

DERADIKALISASI ISLAM INDONESIA

Studi Pemikiran Islam Nahdlatul Ulama

Laporan Penelitian Kelompok

Mendapat Bantuan Dana dari DIPA-RM UIN SGD Bandung
Tahun Anggaran 2016

Sesuai dengan Kontrak No: Un.05/P1/TL.00.1/000/2016



Oleh:

| | | |
|---------|-------------------------|----------------------|
| Ketua | : Dr. Hasbiyallah | - 197809182003121002 |
| Anggota | : Dr. Undang Burhanudin | - 196403241994021001 |
| | Dr. Moh. Sulhan | - 196905092008011011 |
| | Dr. Heri Khoiruddin | - 197811172008011016 |

Pusat Penelitian dan Penerbitan
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
UNI Sunan Gunung Djati Bandung
2016

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadirat Allah Swt, yang berkat kasih dan sayang-Nya, penelitian ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam semoga tercurah limpah kepada Rasulullah Saw. Semoga kita semua berada dalam kasih-sayang dan ampunan Allah Swt, serta dalam syafa'at Rasulullah Saw.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berbagai kekerasan yang diatasnamakan agama. Agama yang awal kehadirannya sebagai piranti untuk membangun kedamaian kehidupan masyarakat lahir dan bathin, telah diubah oleh sebagian orang menjadi sumber konflik. Di tengah munculnya berbagai kekerasan yang diatasnamakan agama ini, NU hadir dengan berbagai pemikiran yang dapat didialogkan dalam menjawab masalah krusial ini, disertai dengan berbagai tindakan sebagai upaya untuk meredam kekerasan dan konflik sehingga agama tetap hadir sebagai piranti yang mendamaikan kehidupan masyarakat.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna dan perlu adanya koreksi dari berbagai pihak, baik dari sisi redaksi ataupun substansi. Namun terlepas dari kekurangan itu, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak atas kepercayaan, kesempatan dan dukungan yang telah diberikan. Khususnya kepada Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan segenap Pimpinan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Bandung, Oktober 2016

Dr. Hasbiyallah, M.Ag

ABSTRAKSI

Munculnya berbagai kekerasan yang di atasnamakan agama telah mengusik berbagai organisasi keagamaan Islam, termasuk Nahdlatul Ulama (NU). Sebagai organisasi keagamaan Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) dituntut untuk berperan aktif menyelesaikan berbagai kekerasan dimaksud, sehingga agama tetap sebagai piranti yang dapat memberikan kedamaian pada masyarakat lahir dan bathin. Untuk mengetahui peran Nahdlatul Ulama (NU) ini, perlu kiranya menelusuri bagaimana pemikiran dan tindakan Nahdlatul Ulama (NU).

Sumber utama dalam penelitian ini adalah pemikiran dan tindakan Nahdlatul Ulama (NU) terkait kekerasan yang di atasnamakan agama. Data yang ditelusuri adalah dinamika sejarah perkembangan dan pemikiran NU tentang Islam Indonesia; pandangan NU tentang radikalisasi agama dan kekerasan agama-terorisme; dan peran NU dalam upaya deradikalisasi dan upaya membangun moderasi Islam Indonesia. Analisis data dilakukan dengan model deskriptif kualitatif. Data-data yang diperoleh di lapangan terlebih dahulu dikelompokkan berdasar kualitas dan kategorinya. Data yang sudah dikategorikan kemudian diinterpretasikan dengan model interpretasi *surface structure* maupun *deep structure*. Dari analisis yang dilakukan, diketahui bagaimana realitas sebenarnya keberadaan NU, tantangan, pandangan dan pemikiran menyelesaikan berbagai permasalahan. Dari analisis dirumuskan beberapa solusi persoalan terkait dinamika NU dan responnya dalam perubahan sosial. Hasil analisis dan rumusan solusi kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk laporan dengan model deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi keagamaan Islam telah berperan aktif menyelesaikan berbagai kekerasan yang di atasnamakan agama. Memahami sikap NU terhadap kekerasan dan rasa kekecewaan dapat dibagi ke dalam dua, yaitu: (1) sikap resmi organisasi; (2) sikap tidak resmi yang diperlihatkan oleh warga NU, baik ia sebagai tokoh NU ataupun mereka sebagai komunitas. Untuk sikap resmi organisasi, upaya NU dalam deradikalisasi Islam Indonesia dilakukan melalui upaya struktural dan upaya kultural. Upaya struktural dilakukan oleh lembaga-lembaga yang jika dilihat pada tugas, pokok, dan fungsinya, berperan aktif termasuk mencegah tersebarnya gerakan Islam transnasional. Untuk gerakan kultural, para nahdliyin aktif di berbagai celah dan lapisan untuk meredam berbagai upaya tersebarnya paham dan gerakan radikal ini.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

| | | |
|---------------|---|-----------|
| BAB I | MENGGUGAT KEKERASAN DAN RADIKALISME ISLAM INDONESIA | 01 |
| | A. Latar Belakang Masalah | 01 |
| | B. Rumusan Masalah | 05 |
| | C. Tujuan Penelitian | 05 |
| | D. Tinjauan Pustaka | 06 |
| | E. Kerangka Pemikiran | 07 |
| | | |
| BAB II | DERADIKALISASI, NU, DAN GERAKAN MODERASI ISLAM INDONESIA | 11 |
| | A. NU dan Sejarah Pertumbuhan Islam Tradisional Indonesia | 11 |
| | 1. Mengenal NU dan Tokoh yang Berpengaruh di Indonesia | 11 |
| | 2. Ajaran dan Doktrin Fikih, Tasawuf, dan Teologi NU | 44 |
| | 3. Program Kerja dan Visi Kebangsaan NU | 45 |
| | 4. Kekuatan NU sebagai Organisasi Masa Islam Terbesar Indonesia | 51 |
| | | |
| | B. Deradikalisasi Islam di Indonesia | 58 |
| | 1. Konsep Radikalisme Islam dan Deradikalisasi Islam | 58 |
| | 2. Faktor yang Melatari Kebangkitan Radikalisme Islam | 65 |

| | | |
|----------------|--|-----|
| 3. | Organisasi Islam Radikal Indonesia | 79 |
| 4. | Deradikalisasi dan Rekonstruksi Islam | 95 |
| C. | NU, Moderasi Ditengah Kecenderungan Radikalisme Islam | 103 |
| 1. | NU dan Gerakan Toleran di Indonesia | 103 |
| 2. | Islam yang Berdialog dengan Budaya | 119 |
| 3. | Kekerasan dan Keberceraian | 127 |
| 4. | Membangun Masyarakat Adil dan Toleran | 133 |
| BAB III | METODOLOGI PENELITIAN | 145 |
| A. | Pendekatan dan Metode Penelitian | 145 |
| B. | Tempat dan Waktu Penelitian | 148 |
| C. | Data dan Sumber Penelitian | 149 |
| D. | Prosedur Pengumpulan Data | 151 |
| E. | Tehnik Analisis Data | 153 |
| F. | Penyajian Data | 155 |
| G. | Penarikan Kesimpulan | 155 |
| H. | Pemeriksaan Keabsahan Data | 156 |
| BAB IV | NU DAN IKHTIAR MENGAKHIRI KEKERASAN DAN MEMBANGUN ISLAM TOLERAN INDONESIA | 163 |
| A. | Temuan Hasil Penelitian | 163 |
| 1. | Problem Kekerasan dan Kerisauan NU terkait Radikalisme Islam di Tanah Air | 163 |
| 2. | Pandangan NU tentang Radikalisme Islam dan Prinsip Dasar Moderasi NU | 171 |
| 3. | Upaya NU dalam Deradikalisasi Islam Indonesia | 182 |

| | |
|--|------------|
| B. Pembahasan Hasil Penelitian | 192 |
| 1. Mengakhiri Kekerasan Atas Nama Agama | 192 |
| 2. Kematangan Beragama dan Membuka Diri untuk Perbedaan | 209 |
| 3. Membangun Islam Rahmatan Lil ‘Alamin | 215 |
| | |
| BAB V PENUTUP | 234 |
| A. Kesimpulan | 234 |
| B. Rekomendasi | 242 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

MENGGUGAT KEKERASAN DAN RADIKALISME ISLAM INDONESIA

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu elemen Islam Indonesia yang berperan strategis dalam mengembangkan Islam Indonesia adalah Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama (Kebangkitan Ulama atau Kebangkitan Cendekiawan Islam), disingkat NU, adalah sebuah organisasi Islam besar di Indonesia. Organisasi dengan pengikut 35 juta Organisasi ini berdiri pada 31 Januari 1926 (Fearly dan Barton, 1997:xiii; Jamil dkk, 2008:277) dan bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan ekonomi. Tujuan Menegakkan ajaran Islam menurut paham Ahlul Sunnah waljama'ah di tengah-tengah kehidupan masyarakat, di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lahirnya NU tak lepas dari respon sosial atas keterbelakangan baik secara mental, maupun ekonomi yang dialami bangsa Indonesia, akibat penjajahan maupun akibat kungkungan tradisi, telah menggugah kesadaran kaum terpelajar untuk memperjuangkan martabat bangsa ini, melalui jalan pendidikan dan organisasi. Gerakan yang muncul 1908 tersebut dikenal dengan "Kebangkitan Nasional". Semangat kebangkitan memang terus menyebar ke mana-mana setelah rakyat pribumi sadar terhadap penderitaan dan ketertinggalannya dengan bangsa lain. Sebagai jawabannya, muncullah berbagai organisasi pendidikan dan pembebasan.

Kalangan pesantren yang selama ini gigih melawan kolonialisme, merespon kebangkitan nasional tersebut dengan membentuk organisasi pergerakan, seperti Muhammadiyah pada tahun 1912. Nahdlatul Wathan (Kebangkitan Tanah Air) pada 1916. Kemudian pada tahun 1918 didirikan Taswirul Afkar atau dikenal juga dengan Nahdlatul Fikri (kebangkitan pemikiran), sebagai wahana

pendidikan sosial politik kaum dan keagamaan kaum santri. Dari situ kemudian didirikan Nahdlatul Tujjar, (pergerakan kaum saudagar). Serikat itu dijadikan basis untuk memperbaiki perekonomian rakyat. Dengan adanya Nahdlatul Tujjar itu, maka Taswirul Afkar, selain tampil sebagai kelompok studi juga menjadi lembaga pendidikan yang berkembang sangat pesat dan memiliki cabang di beberapa kota.

Untuk mengantisipasi perkembangan zaman dan dinamika masyarakat yang terus berubah, berbagai organisasi yang bersifat embrional dan ad hoc, dan setelah berkordinasi dengan berbagai kyai, akhirnya muncul kesepakatan untuk membentuk organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama (Kebangkitan Ulama). Bertepatan pada 16 Rajab 1344 H (31 Januari 1926). Organisasi ini dipimpin oleh K.H. Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar. Namun ada alasan lainnya, karena tidak terakomodir kyai dari kalangan tradisional untuk mengikuti konverensi Islam Dunia yang ada di Indonesia dan Timur Tengah.

Untuk menegaskan prinsip dasar organisasi ini, maka K.H. Hasyim Asy'ari merumuskan kitab Qanun Asasi (prinsip dasar), kemudian juga merumuskan kitab I'tiqad Ahlussunnah Wal Jamaah. Kedua kitab tersebut kemudian diejawantahkan dalam khittah NU, yang dijadikan sebagai dasar dan rujukan warga NU dalam berpikir dan bertindak dalam bidang sosial, keagamaan dan politik. NU di bidang sosial budaya, mengusahakan kesejahteraan rakyat serta kebudayaan yang sesuai dengan nilai keislaman dan kemanusiaan.

Dalam perkembangan dasa warsa terakhir NU mulai bergerak di banyak bidang kegiatan. Sebagai Islam tradisional NU juga mengalami evolusi secara gradual dan berkembang mengikuti dinamika zaman. Isu isu pendidikan, kebangsaan, hukum islam, kekerasan-terorisme, modernisme, globalisasi, lingkungan dan pluralism, gender dan demokratisasi menjadi diskursus tak

terpisahkan dari kegiatan NU sebagai Jammiyyah Islamiyyah. Dalam salah satu situs Resminya NU, menghadirkan diskusi dengan Karen Armstrong penulis dan peneliti teroris. Serangan teroris yang terjadi di Paris beberapa waktu lalu membuat buku terbarunya, *“Fields of Blood: Religion and the History of Violence”*, mendadak menjadi begitu penting. Dalam buku lebih dari 500 halaman tersebut Karen Armstrong, mantan biarawati yang merupakan penulis buku laris *“A History of God”* dan *“The Case for God”* menjawab pertanyaan mengenai apakah ajaran agama memang menjadi penyebab utama dari kekerasan. Sebagai bagian jamiyyah Islamiyah kehadiran Peneliti seperti itu penting dalam kontek memperkaya data bagi pengayaan perspektif guna membangun pandangan organisasi bagaimana memandang kekerasan dan terorisme.

Isu mutakhir yang muncul dalam diskusi di kalangan Nahdlatul Ulama berupa ada harapan dimunculkannya gagasan tentang pentingnya generasi Muslim Indonesia memiliki kesadaran hidup bermasyarakat, berwarganegara dalam konteks modern di bawah republikanisme dengan mindset civic-Islam. Ini gagasan yang sungguh menarik karena beberapa alasan. Lebih jauh lagi, AE Priyono melihat, Islam-politik di Indonesia sudah kehilangan elan vitalnya sebagai kekuatan transformatif. Islam-politik justru merupakan kombinasi dari konservatisme politik dan konservatisme agama. Pada kenyataannya, cita-cita Islam untuk emansipasi sosial tidak mendapat tempat di Indonesia.

Greg Fealy dan Greg Barton (1997: xiii) menulis Nahdlatul Ulama sebagai bagian Penting dari kaum tradisional selama beberapa decade terabaikan dalam studi Indonesia modern. Prasangka-prasangka ilmiah dan idiologis menyudutkannya sebagai unsur yang paling tak mendukung usaha modernisasi Indonesia. Modernitas mempunyai logika, tradisionalitas memiliki paradigma. Bertahan dalam arus deras perubahan politik, adaptif menghadapi terpaan

modernitas dan tetap otentik dengan tradisionalitasnya, NU tampil dalam Nuansa yang eksotik.

Ditengah munculnya kekerasan agama dan terorisme yang mengatasnamakan agama, NU memiliki pemikiran yang dapat didialogkan dalam menjawab problem krusial ini. Terutama, disaat agama yang seharusnya menjadi piranti membangun kesejahteraan bathin, kesejukan ruhani dan perekat sosial berubah menjadi pemicu konflik. Agama menjadi pemicu konflik, menjadi sumber konflik diberbagai daerah. Agama tampil dalam wajah yang menakutkan, menjadi sumber legitimasi melakukan kekerasan. Munculnya ISIS di Suriah dan Irak, Boko Haram Nigeria dan Alqaeda Yaman, al Sahab Somalia telah melakukan 664 serangan dengan korban 5042 korban (BBC 2014). Serangan ini merupakan fenomena yang bermotif karena pemahaman agama yang bias. Kasus kasus yang terjadi diIndonesia semisal di Poso, Papua, Kalimantan, Sulawesi, Ambon, Maluku, Tasik, Madura, Kuningan, Cirebon dan lainnya merupakan gejala hubungan antar agama, aliran dan kepercayaan yang dilematis. Konflik dengan kekerasan di Indonesia mengakibatkan kematian 10.758 orang sejak 1990-2003. (Laporan UNDP-Bappenas 2005).

Penelitian ini menarik dalam kontek akademik karena beberapa pertimbangan: (1) NU sebagai organisasi besar di Indonesia memiliki dasar ajaran yang moderat, dan dapat menjadi harapan memberi peran lebih besar dalam menjawab problem terorisme, ketegangan menyangkut hubungan Islam dan Negara; (2) Berkait derasnya arus perubahan melahirkan dinamika menarik di NU. Penelitian ini akan melihat persinggungan unik, pertarungan, negosiasi, ambigu dan paradok dan bagaimna upaya yang dapat dilakukan NU membangun keselarasan, kerahmatan bagi umat dan bangsa. Serta bagaimana posisi NU dalam arus perubahan dan dinamika pemikiran Islam NU untuk memperkaya studi-studi Islam Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian dapat dirumuskan dalam tiga pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Bagaimana dinamika sejarah perkembangan dan pemikiran Nahdlatul ulama tentang Islam Indonesia?
2. Bagaimana pandangan Nahdlatul Ulama tentang radikalisasi agama dan kekerasan agama-terorisme?
3. Bagaimana peran NU dalam upaya deradikalisasi dan upaya membangun moderasi Islam Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Tujuan umum

Secara akademik berguna untuk menjaga dinamika keilmuan Fakultas dan Universitas (khususnya UIN Bandung) dalam konteks pendidikan, pemikiran Islam yang memungkinkan terjadinya proses klarifikasi (penjelasan), justifikasi (penguatan), revisi (perubahan) atau mungkin invensi (penemuan) menyangkut dinamika Islam tradisional Nahdlatul Ulama di Indonesia modern.

2. Tujuan khusus

- a. Memperoleh Data memadai dinamika Sejarah perkembangan dan pemikiran Nahdlatul ulama tentang Islam Indonesia.
- b. Memperoleh data pandangan Nahdlatul Ulama tentang radikalisasi agama, data kekerasan agama dan terorisme.
- c. Menganalisis dan melihat secara kritis peran NU dalam upaya deradikalisasi dan upaya membangun moderasi Islam Indonesia.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang dinamika NU di Indonesia banyak disusun dengan sumber-sumber rujukan yang dikarang oleh peneliti, pengamat NU, bahkan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama. Salah satu buku yang penting dalam memahami NU mutakhir terutama kaitannya dengan Islam Indonesia adalah Karya Ayu Sutarto. Buku *MENJADI NU MENJADI INDONESIA*, Pemikiran K.H. Abdul Muchith Muzadi. Oleh Prof. Dr. Ayu Sutarto, dan diterbitkan oleh Kelompok Peduli Budaya dan Wisata Daerah Jawa Timur (Kompyawisda Jatim), 2008, cukup inspiratif. Belum banyak buku yang secara jernih memaparkan seperti apa NU, ke mana NU, dan bagaimana seharusnya NU. Dalam buku ini, jeroan (dalam) NU disampaikan dengan bahasa yang sederhana, lugas, enak dan perlu dibaca serta dimengerti terutama oleh warga NU. Di sini dikemukakan banyak hal yang terkait dengan hubungan NU dengan entitas atau kekuatan di luar NU, NU dan Budaya Lokal, NU dan Politik yang sulit pisahkan, NU dan Muhammadiyah Saling Belajar dan Menasehati, NU dan Pesantren Seperti Ikan dan Air, NU dan Konflik Internal antara Gegeran dan Ger-ger-an, NU dan Kiai Khos, serta NU dan Indonesia.

Nahdlatul Ulama dikenal di Indonesia sebagai pengawal tradisi di Indonesia. Istilah agama tradisi dan tradisi agama adalah istilah yang melekat dengan NU. Dalam dinamika dengan perubahan dan tradisi, buku terkait NU misalnya, *ISLAM NU, Pengawal Tradisi Sunni Indonesia*. Oleh KH. A. Busyairi Harits. Khalista, 2010. Buku ini memiliki beberapa dimensi yang ingin dikomunikasikan kepada masyarakat Indonesia. Penulis adalah salah seorang Wakil Katib PWNU Jateng dan mantan Ketua NU Kota Semarang. Ia tidak hanya mengamati akan tetapi merasakan langsung dan menjadi pelaku yang terlibat dalam persoalan-persoalan yang dihadapi NU selama

ini. Di sini sangat kaya dengan informasi sejarah dan kepribadian NU.

Sebagai organisasi jamiyyah yang dekat dengan keummatan, NU juga merangkum banyak persoalan yang dihadapi masyarakat Indonesia. Terutama menyangkut persoalan fiqih. Buku DIALOG PROBLEMATIKA UMAT. Oleh DR. KH. MA. Sahal Mahfudh, Rais Am PBNU, Khalista, 2011. Di sini dibahas secara kronologis, jelas, transparan, sistematis dan tuntas dari setiap problema umat yang disodorkan kepada Kiai Sahal, meliputi: Bersuci, Shalat, Puasa dan Ramadhan, Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat, Haji, Rumah Tangga, Antara Tuntunan Ibadah dan Rekayasa Teknologi, Akidah-Akhlak,

Dinamika tentang NU dalam sejarah dapat terlihat dari buku NU DALAM PERSPEKTIF SEJARAH DAN AJARAN (Refleksi 65 Th. Ikut NU). Oleh KH. A. Muchith Muzadi, Khalista, 2006 .Bagaimana cara memahami NU, baik dalam perspektif sejarah maupun ajaran? di sini solusinya, meliputi: Latar belakang mengapa NU didirikan, khittah, Pesantren, Pancasila, politik, cara mensinergikan antara ajaran dan pemahaman agama yang diharapkan bisa membumi di bumi nusantara. Begitu juga bagaimana cara mengapresiasi dan menjabarkan ukhuwwah Islamiyah, wathaniyah dan menjabarkan ukhuwwah Islamiyah, wathaniyah dan insaniyah seperti yang telah diatur dalam agama Islam.

E. Kerangka Pemikiran

Asumsi dasar penelitian ini berpijak pada pemikiran bahwa Nahdlatul Ulama sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia memainkan peran vital dalam konteks moderasi Islam di Indonesia. Ditengah munculnya tarik menarik isu kebangsaan yang cenderung formalistic dan radikalisasi keagamaan yang makin mengarah pada kekerasan dan potensi konflik lebangsaan, Nahdlatul Ulama dapat

menjadi alternative menciptakan pemikiran strategis menengahi kebuntuan diplomasi mengangkut hubungan islam dan Negara.

NU sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia sedang berkembang dan memainkan peran vital dalam demensi agama, kemasyarakatan dan kebangsaan. Sayang jika kemudian dinamika ini tak dapat direkam dan didiskusikan secara akademik. Dalam kontek universitas perubahan organisasi keagamaan merupakan fenomena menarik yang tak dapat dabaikan. Perubahan dan dinamika organisasi semisal NU ini juga menyimpan banyak *set of believe* dan *set of knowledge* yang hanya bisa disingkap dengan pengamatan dan penelitian serius.

Muktamar Nahdlatul Ulama tahun 2015 akan mengundang daya Tarik berbagai pemikir dan tokoh kaliber internasional, islamisis, pengamat Indonesia dan juga akademisi dari berbagai penjuru dunia. Tokoh tokoh yang dipastikan hadir dan bicara diantaranya Nakamura dari Jepang, Martin Van Brunnissen dari Belanda, Andre Feillard dari Perancis, Greg Fealy dan Greg Barton dari Australia, Robin Bush dari Australia, Mark R. Woodward, dari Amerika dan akademisi lainnya. Semua berlomba dan mengamati tentang bagaimana dinamika NU dalam merespon Islam Transnasional, isu kebangsaan, islam radikal, globalisasi, pasar bebas dan kebangkitan Islam.

Buku yang berjudul “NU vis-a-vis NEGARA: Pencarian Isi, Bentuk

dan Makna” oleh Andree Feillard, untuk dapat memberikan sedikit pemahaman tentang NU dan Gus Dur [alm.] dalam kaitannya dengan wacana mutakhir yang sedang terjadi di negara kita saat ini. Saat ini, dimana Indonesia sedang dilanda krisis politik dan ekonomi yang dahsyat, NU sedang menghadapi paradoks yang aneh: meskipun memainkan peranan yang tidak begitu sentral dalam perubahan kepemimpinan Indonesia pada bulan Mei-1988 lalu yang

menyaksikan pengunduran diri Presiden Soeharto dan tampilnya mantan Menristek BJ. Habibie, Ketua Umum PBNU [saat itu], Abdurrahman Wahid telah menjadi faktor kunci dalam stabilitas Indonesia. Ketika tersebar rumor mengenai kesehatannya, tersebar pula kekhawatiran mengenai keutuhan Indonesia sebagai negara kesatuan. Mengapa bisa begitu? Apakah karena NU memegang kunci masa depan Indonesia? Apakah ini terjadi karena NU mengikuti tradisi jalan tengah, jalan yang sangat mengecewakan pada saat-saat kritis, tetapi dicari-cari pada saat kekacauan? Pernyataan ini menggambarkan bagaimana Nu memiliki elan vitas bagi jalannya Indonesia.

Tentang Negara, NU memiliki argument menarik. NU menempatkan negara sebagai alat bagi pencapaian tujuan Islam. Maka, karena tujuan Islam adalah rahmatan lil 'alamin (kesejahteraan bagi semesta), negara yang mengarah ke tujuan tersebut bisa diterima, meskipun tidak berbentuk Islam. Pada tanggal 4-8 Juni, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) diundang oleh para ulama Afghanistan dan Noor Educational and Capacity Development Organization (NECDO) untuk menghadiri workshop "Peran Ulama dalam Pembangunan dan Rekonstruksi Afghanistan" di Afghanistan. PBNU, yang diwakili empat delegasi, berbicara di hadapan para ulama dan ilmuwan dari 12 provinsi tentang pentingnya perdamaian serta rekonsiliasi. Dalam kesempatan itu, NU diminta berbagi pengalaman tentang peran ulama di Indonesia dalam menciptakan keharmonisan umat beragama beserta manajemen konflik di dalamnya.

Yang menarik dalam pertemuan itu adalah potensi NU sebagai model Islam di dunia, sebab ia menjadi "cermin", khususnya bagi Afghanistan, dalam rangka hubungan Islam dengan kemodernan. Hubungan yang berhasil dijaga NU secara harmonis ini telah meminimalisir konflik, baik konflik antar-umat beragama maupun

antara Islam dan Barat. Dengan demikian, NU bisa menjadi model bagi hubungan Islam dan kemodernan yang melahirkan hubungan harmonis antar-umat beragama. Model yang dibangun NU itu merujuk pada integrasi Islam ke dalam perjuangan nasional melalui demokratisasi dalam jangka panjang. Dalam kaitan ini, terdapat dua proses signifikan. Pertama, integrasi Islam ke dalam nasionalisme. Kedua, partisipasi Islam dalam demokratisasi.

NU menawarkan model integrasi, yakni integrasi Islam ke dalam nasionalisme. Yang dimaksud poin ini adalah penyatuan visi Islam tentang kehidupan ke dalam tujuan utama pendirian negara-bangsa. Hal ini berangkat dari kaidah *al-ghayah wa al-wasail* (tujuan dan metode), yang NU menempatkan negara sebagai alat bagi pencapaian tujuan Islam. Maka, karena tujuan Islam adalah rahmatan lil 'alamin (kesejahteraan bagi semesta), negara yang mengarah ke tujuan tersebut bisa diterima, meskipun tidak berbentuk Islam. Oleh karena itu, NKRI, yang memuat "keadilan sosial" sebagai tujuan konstitusional bernegara, diterima oleh NU, meskipun ia bukan negara Islam yang formal.

Indonesianis dan juga pengamat NU, Martin van Bruinessen dalam NU: tradisi relasi kuasa pencarian wacana baru, menggambarkan bagaimana dinamika NU yang nampak demikian progresif dalam melakukan pencarian jatidiri dan upaya membangun peran sentral dalam konteks bernegara. NU bukan saja statis dalam merespon tantangan hari ini, tetapi dengan berlahan, gradual dan bertahap berevolusi secara unik. Dalam perkembangan mutakhir khususnya menyongsong millennium baru dimana diaspora tokoh dan anak-anak muda NU demikian beragam dalam dinamika Indonesia mutakhir saat ini, sayang kalau dinamika ini tak dapat direkam dan didiskusikan secara akademik.

BAB II

DERADIKALISASI, NU, DAN GERAKAN MODERASI ISLAM INDONESIA

A. NU dan Sejarah Pertumbuhan Islam Tradisional Indonesia

Bagian ini akan mengupas terkait eksistensi, tokoh-tokoh berpengaruh dan program kerja serta visi kebangsaan Nahdlatul Ulama secara memadai. Penjelasan ini penting untuk memahami Nahdlatul Ulama sebagai organisasi keagamaan terbesar di Indonesia yang paling depan dalam mempertahankan visi kebangsaan NKRI dan Dasar Negara Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Bagian ini juga menjelaskan ajaran dasar, doktrin fiqh dan tasawuf Nahdlatul Ulama sehingga menjadi organisasi yang paling mampu beradaptasi dengan budaya yang ada di Indonesia. Organisasi yang mampu mendialogkan agama dan budaya lokal secara kreatif tanpa terjerumus dalam sinkretisme sirik yang banyak dituduhkan kepada Nahdlatul Ulama. Nahdlatul ulama menjadi semacam model keagamaan yang paling nyaman dengan budaya yang ada di Indonesia. Ber-islam yang ramah dengan budaya yang ada dan tidak mencaci maki sebagai suatu penghalang. Bagi NU tetap dapat beragama Islam dengan benar walau tetap berbudaya Jawa. Atas dasar ini Nahdlatul Ulama paling layak kalau kemudian dianggap sebagai representasi Islam Nusantara. Sederhananya Islam Nusantra itu ya NU, karena mungkin ini terkait kenyataan bahwa NU yang dapat mengakomodasi budaya yang ada di Nusantara secara kreatif. Keagamaan yang masih menghargai budaya dan tradisi sufisme (ber-islam dengan hati), yang hari ini menjadi doktrin keagamaan Nahdlatul Ulama seringkali melahirkan pandangan sebagian pengamat bahwa NU itu sebagai Organisasi tradisional Islam Indonesia. Klasifikasi ini sering berangkat dari keterpaksaan karena harus disandingkan dengan kelompok lain yang dalam sejarah

perkembangannya lebih maju di masa awal kelahiran. Untuk membandingkan dengan organisasi lain yang lebih rasional dalam melihat agama. Meski dalam perkembangannya justru sebaliknya generasi belakangan dari Nahdlatul Ulama terlihat lebih progresif, bahkan ultra rasional dalam melihat pemikiran Islam, budaya, Tradisi, Modernisme, globalisasi, dan Isu-isu perubahan sosial.

1. Mengenal NU dan Tokoh yang Berpengaruh di Indonesia

Membicarakan Nahdlatul Ulama sangat menarik, meskipun ia pernah diabaikan oleh insan-insan akademis (Affan Gaffar, 1995:V). Dalam segi-segi tertentu NU itu Fenomena. NU pernah tampil sebagai satu satunya partai yang mampu melintasi tiga tahap perpolitikan Indonesia; era demokrasi liberal, demokrasi terpimpin dan era orde baru. Dengan prestasi stabil setidaknya dilihat dari perolehan prosentase suaranya dalam pemilu. Dalam dasa warsa sepuluh tahun terakhir NU menjadi sumber kekuatan politik Islam yang cukup berarti. Terutama ketika sikap politik Islam diwarnai dengan hubungan penetratif untuk mewujudkan pengaruhnya, dinamika ini menjadi faktor penentu terjadinya hubungan yang akomodatif antara Islam dan Negara.

Nahdlatul Ulama adalah organisasi besar Islam Indonesia yang paling berpengaruh saat ini. Organisasi ini lahir sebagai refleksi sejarah perjuangan membebaskan bangsa dari penjajahan. NU lahir bertepatan pada 16 Rajab 1344 H atau 31 Januari 1926 Di Kampung Kertopaten, Surabaya (Mukhsin Jamil dkk, 2007: 277). Organisasi ini dipimpin oleh KH. Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar, yang merupakan Ulama Besar yang lahir dari tradisi keilmuan pesantren dan belajar ngaji di Timur Tengah. Untuk menegaskan prinsip dasar organisasi ini, maka KH. Hasyim Asy'ari merumuskan kitab Qanun Asasi (prinsip dasar), kemudian juga merumuskan kitab I'tiqad Ahlussunnah Wal Jamaah. Kedua kitab tersebut kemudian

diejawantahkan dalam khittah NU, yang dijadikan dasar dan rujukan warga NU dalam berpikir dan bertindak dalam bidang sosial, keagamaan dan politik. NU di bidang sosial budaya, mengusahakan kesejahteraan rakyat serta kebudayaan yang sesuai dengan nilai keislaman dan kemanusiaan. Peran NU dari sejak berdirinya, 1926, sampai hari ini cukup signifikan. Tidak hanya dalam hal keagamaan, melainkan juga dalam bidang-bidang lain, termasuk politik. Kini, ketika NU memasuki usia 84 tahun.

Sejarah NU adalah Sejarah Perjuangan. Akibat penjajahan maupun akibat kungkungan tradisi, telah menggugah kesadaran kaum terpelajar untuk memperjuangkan martabat bangsa ini, melalui jalan pendidikan dan organisasi. Gerakan yang muncul [1908](#) tersebut dikenal dengan "[Kebangkitan Nasional](#)". Semangat kebangkitan terus menyebar - setelah rakyat pribumi sadar terhadap penderitaan dan ketertinggalannya dengan bangsa lain. Sebagai jawabannya, muncullah berbagai organisasi pendidikan dan pembebasan.

Merespon kebangkitan nasional tersebut, [Nahdlatul Wathan](#) (Kebangkitan Tanah Air) dibentuk pada [1916](#). Kemudian pada tahun [1918](#) didirikan [Taswirul Afkar](#) atau dikenal juga dengan *Nahdlatul Fikri* (kebangkitan pemikiran), sebagai wahana pendidikan sosial politik kaum dan keagamaan kaum santri. Dari situ kemudian didirikan [Nahdlatut Tujjar](#), (pergerakan kaum saudagar). Serikat itu dijadikan basis untuk memperbaiki perekonomian rakyat. Dengan adanya *Nahdlatul Tujjar* itu, maka *Taswirul Afkar*, selain tampil sebagai kelompok studi juga menjadi lembaga pendidikan yang berkembang sangat pesat dan memiliki cabang di beberapa kota.

Berangkat dari munculnya berbagai macam komite dan organisasi yang bersifat embrional dan ad hoc, maka setelah itu dirasa perlu untuk membentuk organisasi yang lebih mencakup dan lebih sistematis, untuk mengantisipasi perkembangan zaman. Maka setelah berkordinasi dengan berbagai [Kiai](#), karena tidak terakomodir Kiai

dari kalangan tradisional untuk mengikuti konferensi [Islam](#) Dunia yang ada di [Indonesia](#) dan [Timur Tengah](#) akhirnya muncul kesepakatan dari para ulama pesantren untuk membentuk organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama (Kebangkitan Ulama) pada [16 Rajab 1344 H \(31 Januari 1926\)](#) di Kota [Surabaya](#). Organisasi ini dipimpin oleh KH. [Hasyim Asy'ari](#) sebagai [Rais Akbar](#).

Ada banyak faktor yang melatarbelakangi berdirinya NU. Di antara faktor itu adalah perkembangan dan pembaharuan pemikiran Islam yang menghendaki pelarangan segala bentuk amaliah kaum Sunni. Sebuah pemikiran agar umat Islam kembali pada ajaran Islam "murni", yaitu dengan cara umat Islam melepaskan diri dari sistem bermadzhab. Bagi para kiai pesantren, pembaruan pemikiran keagamaan sejatinya tetap merupakan suatu keniscayaan, namun tetap tidak dengan meninggalkan tradisi keilmuan para ulama terdahulu yang masih relevan. Untuk itu, Jam'iyah Nahdlatul Ulama cukup mendesak untuk segera didirikan.

Untuk menegaskan prinsip dasar organisasi ini, maka KH. [Hasyim Asy'ari](#) merumuskan [kitab Qanun Asasi](#) (prinsip dasar), kemudian juga merumuskan [kitab I'tiqad Ahlussunnah Wal Jamaah](#). Kedua kitab tersebut kemudian diejawantahkan dalam [khittah NU](#), yang dijadikan sebagai dasar dan rujukan warga NU dalam berpikir dan bertindak dalam bidang sosial, keagamaan dan politik.

Wikipedia.org mencatat bahwa NU menganut paham [Ahlussunah waljama'ah](#), merupakan sebuah pola pikir yang mengambil jalan tengah antara ekstrem aqli (rasionalis) dengan kaum ekstrem naqli (skripturalis). Karena itu sumber hukum Islam bagi NU tidak hanya [al-Qur'an](#), [sunnah](#), tetapi juga menggunakan kemampuan akal ditambah dengan realitas empirik. Cara berpikir semacam itu dirujuk dari pemikir terdahulu seperti [Abu al-Hasan al-Asy'ari](#) dan [Abu Mansur Al Maturidi](#) dalam bidang [teologi](#)/ Tauhid/ketuhanan. Kemudian dalam bidang [fiqih](#) lebih cenderung mengikuti mazhab:

Imam [Syafi'i](#) dan mengakui tiga madzhab yang lain: Imam [Hanafi](#), Imam [Maliki](#), dan Imam [Hanbali](#) sebagaimana yang tergambar dalam lambang NU berbintang 4 di bawah. Sementara dalam bidang [tasawuf](#), mengembangkan metode [Al-Ghazali](#) dan [Syeikh Juneid al-Bagdadi](#), yang mengintegrasikan antara tasawuf dengan [syariat](#).

Gagasan kembali kekhittah pada tahun [1984](#), merupakan momentum penting untuk menafsirkan kembali ajaran ahlussunnah wal jamaah, serta merumuskan kembali metode berpikir, baik dalam bidang fikih maupun sosial. Serta merumuskan kembali hubungan NU dengan negara. Gerakan tersebut berhasil kembali membangkitkan gairah pemikiran dan dinamika sosial dalam NU.

Dalam rentang perjalanan NU dalam kesejarahan di Indonesia telah memberi kontribusi luar biasa dalam membangun sendi-sendi kebangsaan dan kemasyarakatan. NU memiliki seambrek tokoh yang sangat diperhitungkan dalam kancah nasional. Dalam konteks nasional terdapat sepuluh tokoh berpengaruh dalam perjuangan Indonesia dan kehidupan berbangsa dan bernegara dari ormas keagamaan terbesar di Indonesia itu. Secara umum akan disampaikan sepuluh tokoh Nahdlatul Ulama yang berpengaruh di tanah air.

a. Hadratusy Syaikh KH. Hasyim Asy'ari

KH Hasyim Asy'ari merupakan pendiri Nahdlatul Ulama ([Biografiku.com](#)). KH. Hasyim Asy'ari lahir pada 24 Dzulqa`dah 1287 H atau 14 Februari 1871 M di Desa Nggedang, Jombang, Jawa Timur. Ia anak ketiga dari 10 bersaudara pasangan Kiai Asy'ari bin Kiai Usman dari Desa Tingkir dan Halimah binti Usman. Ia lahir dari kalangan elite santri. Ayahnya pendiri Pesantren Keras. ([wikipedia.org](#)) Kakek dari pihak ayah, Kiai Usman, pendiri Pesantren Gedang. Buyutnya dari pihak ayah, Kiai Sihah, pendiri Pesantren Tambakberas. Semuanya pesantren itu berada di Jombang.

Sampai umur 13 tahun, Hasyim belajar kepada orangtuanya sendiri sampai pada taraf menjadi badal atau guru pengganti di Pesantren Keras. Muridnya tak jarang lebih tua dibandingkan dirinya. Pada umur 15 tahun, ia memulai pengembaraan ilmu ke berbagai pesantren di Jawa dan Madura: Probolinggo (Pesantren Wonokoyo), Tuban (Pesantren Langitan), Bangkalan, Madura (Pesantren Trenggilis dan Pesantren Kademangan), dan Sidoarjo (Pesantren Siwalan Panji).

Pada pengembaraannya yang terakhir itulah, ia, setelah belajar lima tahun dan umurnya telah genap 21 tahun, tepatnya tahun 1891, diambil menantu oleh Kiai Ya`kub, pemimpin Pesantren Siwalan Panji. Ia dinikahkan dengan Khadijah. Namun, dua tahun kemudian, 1893, saat pasangan ini tengah berada di Makkah, Khadijah meninggal di sana ketika melahirkan Abdullah. Dua bulan kemudian Abdullah pun menyusul ibunya. Kala itu Hasyim tengah belajar dan bermukim di tanah Hijaz.

Tahun itu juga, Hasyim pulang ke tanah air. Namun tak lama kemudian, ia kembali ke Makkah bersama adiknya, Anis, untuk dan belajar. Tapi si adik juga meninggal di sana. Namun hal itu tidak menyurutkan langkahnya untuk belajar. Tahun 1900, ia pulang kampung dan mengajar di pesantren ayahnya. Tiga tahun kemudian, 1903, ia mengajar di Pesantren Kemuring, Kediri, sampai 1906, di tempat mertuanya, Kiai Romli, yang telah menikahkan dirinya dengan putrinya, Nafisah.

KH. Hasyim Asy'ari belajar dasar-dasar agama dari ayah dan kakeknya, Kiai Utsman yang juga pemimpin [Pesantren Nggedang](#) di Jombang. Sejak usia 15 tahun, ia berkelana menimba ilmu di berbagai pesantren, antara lain [Pesantren Wonokoyo](#) di [Probolinggo](#), Pesantren [Langitan](#) di [Tuban](#), [Pesantren Trenggilis](#) di Semarang, [Pesantren Kademangan](#) di [Bangkalan](#) dan [Pesantren Siwalan](#) di Sidoarjo.

Pada tahun [1892](#), KH. Hasyim Asy'ari pergi menimba ilmu ke [Mekah](#), dan berguru pada [Syekh Ahmad Khatib Minangkabau](#), [Syekh Muhammad Mahfudz at-Tarmasi](#), [Syekh Ahmad Amin Al-Aththar](#), [Syekh Ibrahim Arab](#), [Syekh Said Yamani](#), [Syekh Rahmaullah](#), [Syekh Sholeh Bafadlal](#), Sayyid Abbas Maliki, [Sayyid Alwi bin Ahmad As-Saqqaf](#), dan [Sayyid Husein Al-Habsyi](#).

Selama di Makkah ia belajar kepada Syaikh Mahfudz dari Termas (w. 1920), ulama Indonesia pertama pakar ilmu hadits yang mengajar kitab hadits Shahih Al-Bukhari di Makkah. Ilmu hadits inilah yang kemudian menjadi spesialisasi Pesantren Tebuireng, yang kelak didirikannya di Jombang sepulangnya dari Tanah Suci. Selama hidupnya, KH. Hasyim menikah tujuh kali. Selain dengan Khadijah dan Nafisah, antara lain ia juga menikahi Nafiqah, dari Siwalan Panji, Masrurah, dari Pesantren Kapurejo, Kediri.

Tahun 1899, 12 Rabi'ul Awwal 1317, ia mendirikan Pesantren Tebuireng. Lewat pesantren inilah KH. Hasyim melancarkan pembaharuan sistem pendidikan keagamaan Islam tradisional, yaitu sistem musyawarah, sehingga para santri menjadi kreatif. Ia juga memperkenalkan pengetahuan umum dalam kurikulum pesantren, seperti Bahasa Melayu, Matematika, dan Ilmu Bumi. Bahkan sejak 1926 ditambah dengan Bahasa Belanda dan Sejarah Indonesia.

Kiai Cholil Bangkalan, gurunya, yang juga dianggap sebagai pemimpin spiritual para kiai Jawa, pun sangat menghormati dirinya. Dan setelah Kiai Cholil wafat, KH. Hasyim-lah yang dianggap sebagai pemimpin spiritual para kiai. Menghadapi penjajah Belanda, KH. Hasyim menjalankan politik non-kooperatif. Banyak fatwanya yang menolak kebijakan pemerintah kolonial. Fatwa yang paling spektakuler adalah fatwa jihad, yaitu, "Wajib hukumnya bagi umat Islam Indonesia berperang melawan Belanda." Fatwa ini dikeluarkan menjelang meletusnya Peristiwa 10 November di Surabaya.

Dalam paham keagamaan, pikiran yang paling mendasar Hasyim adalah pembelaannya terhadap cara beragama dengan sistem madzhab. Paham bermadzhab timbul sebagai upaya untuk memahami ajaran Al-Quran dan sunnah secara benar. Pandangan ini erat kaitannya dengan sikap beragama mayoritas muslim yang selama ini disebut Ahlussunnah wal Jama'ah. Menurut Hasyim, umat Islam boleh mempelajari selain keempat madzhab yang ada. Namun persoalannya, madzhab yang lain itu tidak banyak memiliki literatur, sehingga mata rantai pemikirannya terputus. Maka, tidak mungkin bisa memahami maksud yang dikandung Al-Quran dan hadits tanpa mempelajari pendapat para ulama besar yang disebut imam madzhab. NU didirikan antara lain untuk mempertahankan paham bermadzhab, yang ketika itu mendapat serangan gencar dari kalangan yang anti-madzhab. Kiai Hasyim wafat pada 7 Ramadhan 1366 atau 25 Juli 1947 pada usia 76 tahun.

KH. Hasyim Asy'ari banyak membuat tulisan dan catatan-catatan. Sekian banyak dari pemikirannya, setidaknya ada empat kitab karangannya yang mendasar dan menggambarkan pemikirannya; kitab-kitab tersebut antara lain:

- 1) Risalah Ahlis-Sunnah Wal Jama'ah: Fi Hadistil Mawta wa Asyrathis-sa'ah wa baya Mafhumis-Sunnah wal Bid'ah (Paradigma Ahlussunah wal Jama'ah: Pembahasan tentang Orang-orang Mati, Tanda-tanda Zaman, dan Penjelasan tentang Sunnah dan Bid'ah).
- 2) Al-Nuurul Mubiin fi Mahabbati Sayyid al-Mursaliin (Cahaya yang Terang tentang Kecintaan pada Utusan Tuhan, Muhammad SAW).
- 3) Adab al-alim wal Muta'allim fi maa yahtaju Ilayh al-Muta'allim fi Ahwali Ta'alumihi wa maa Ta'limihi (Etika Pengajar dan Pelajar dalam Hal-hal yang Perlu Diperhatikan oleh Pelajar Selama Belajar).

- 4) Al-Tibyan: fin Nahyi 'an Muqota'atil Arham wal Aqoorib wal Ikhwan (Penjelasan tentang Larangan Memutus Tali Silaturahmi, Tali Persaudaraan dan Tali Persahabatan)
- 5) Muqaddimah al-Qanun al-Asasi li Jam'iyat Nahdlatul Ulama. Dari kitab ini para pembaca akan mendapat gambaran bagaimana pemikiran dasar dia tentang NU. Di dalamnya terdapat ayat dan hadits serta pesan penting yang menjadi landasan awal pendirian jam'iyah NU. Boleh dikata, kitab ini menjadi "bacaan wajib" bagi para pegiat NU.
- 6) Risalah fi Ta'kid al-Akhdzi bi Mazhab al-A'immah al-Arba'ah. Mengikuti manhaj para imam empat yakni Imam Syafii, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal, tentunya memiliki makna khusus sehingga akhirnya mengikuti jejak pendapat imam empat tersebut dapat ditemukan jawabannya dalam kitab ini.
- 7) Mawaidz. Adalah kitab yang bisa menjadi solusi cerdas bagi para pegiat di masyarakat. Saat Kongres NU XI tahun 1935 di Bandung, kitab ini pernah diterbitkan secara massal. Demikian juga Prof [Buya Hamka](#) harus menterjemah kitab ini untuk diterbitkan di majalah Panji Masyarakat, edisi [15 Agustus 1959](#).
- 8) Arba'ina Haditsan Tata'allaqu bi Mabadi' Jam'iyat Nahdlatul Ulama. Hidup ini tak akan lepas dari rintangan dan tantangan. Hanya pribadi yang tangguh serta memiliki sosok yang kukuh dalam memegang prinsiplah yang akan lulus sebagai pemegang. Kitab ini berisikan 40 hadits pilihan yang seharusnya menjadi pedoman bagi warga NU.
- 9) Al-Tanbihat al-Wajibat liman Yushna' al-Maulid bi al-Munkarat. Kitab ini menyajikan beberapa hal yang harus diperhatikan saat memperingati maulidur rasul (Aula, 6: 2016)

b. Abdul Wahab Chasbullah

Selain tokoh fundamental KH.Hasyim Asy'ari dan KH. A.Wahid Hasyim juga dikenal KH. Abdul Wahab Hasbullah yang berperan penting dalam proses berdiri sampai berkembangnya NU (Abianan, 2013:1). Ia lahir pada bulan Maret 1888 di Tambakberas, Jombang. Nasabnya tidak jauh dari Hasyim Asy'ari. Nasab keduanya bertemu dalam satu keturunan dari Kiai Abdus Salam (Siapa dia?). Ayahnya, Chasbullah, adalah pengasuh Pondok Pesantren Tambakberas. Ibunya, Nyai Lathifah, juga putri kiai kondang (Siapa?)

Pendidikannya dihabiskan di pesantren, mulai dari Pesantren Langitan (Tuban), Mojosari, Nganjuk, di bawah bimbingan Kiai Sholeh, Pesantren Cepoko, Tawangsari (Surabaya), hingga Pesantren Kademangan, Bangkalan (Madura), langsung berguru kepada Mbah Cholil. Kiai Cholil kemudian mengajarkannya belajar ke Pesantren Tebuireng (Jombang).

Kemauan yang keras untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya tampak semenjak masa kecilnya yang tekun dan cerdas memahami berbagai ilmu yang dipelajarinya. Selama enam tahun awal pendidikannya, ia dididik langsung oleh ayahnya, baru ketika berusia 13 tahun, Wahab Hasbullah merantau untuk menuntut ilmu. Maka beliau pergi ke satu pesantren ke pesantren lainnya.

Di antara pesantren yang pernah disinggahi Wahab Hasbullah adalah sebagai berikut: (1) Pesantren Langitan Tuban; (2) Pesantren Mojosari, Nganjuk; (3) Pesantren Cempaka; (4) Pesantren Tawangsari, Sepanjang; (5) Pesantren Kademangan Bangkalan, Madura dibawah asuhan Kiai Kholil Bangkalan; (6) Pesantren Branggahan, Kediri; (7) Pesantren Tebu Ireng, Jombang dibawah asuhan KH. Hasyim Asy'ari. Khusus di Pesantren Tebu Ireng, ia cukup lama menjadi santri. Hal ini terbukti, kurang lebih selama 4 tahun, ia menjadi "lurah pondok", sebuah jabatan tertinggi yang

dapat dicicipi seorang santri dalam sebuah pesantren, sebagai bukti kepercayaan kiai dan pesantren tersebut (Mashyuri, 2008:83).

Pada umur 27, ia pergi ke Makkah dan berguru kepada ulama-ulama besar Indonesia yang bermukim di sana, seperti Kiai Mahfudz Termas, Kiai Muhtarom Banyumas, Syaikh Ahmad Khatib Minangkabaw, Kiai Bakir Yogya, Kiai Asy`ari Bawean. Ia juga belajar kepada tokoh-tokoh besar lain di sana yang bukan orang Indonesia, seperti Syaikh Sa`id Al-Yamani dan Syaikh Umar Bajened.

Tahun 1921, sewaktu menunaikan ibadah haji bersama istri, sang istri meninggal di Makkah. Kemudian ia menikah dengan Alawiyah binti Alwi. Setelah melahirkan seorang anak, istri kedua ini juga meninggal. Setelah itu ia menikah berturut-turut dengan tiga wanita yang semuanya tidak memberikan keturunan. Empat anak diperolehnya dari istri berikutnya, Asnah binti Kiai Said.

Setelah Asnah meninggal, ia menikah lagi dengan Fatimah binti H. Burhan, seorang janda yang punya anak bernama Syaichu, yang kelak menjadi ketua DPR pada masa Orde Baru. Sesudah itu ia menikah lagi dengan Masnah, dikaruniai seorang anak, lalu dengan Ashikhah binti Kiai Abdul Majid (Bangil), meninggal di Makkah setelah memberinya empat anak, dan yang terakhir dengan Sa`adiyah, kakak sang istri, yang mendampingiya sampai akhir hayatnya dan memberinya keturunan lima anak.

Sedikit mundur ke belakang, tahun 1914, ketika berumur 26 tahun, ia mendirikan kelompok diskusi Tashwirul Afkar (Pergolakan Pemikiran) bersama KH. Mas Mansur. Pada tahun 1916, ia mendirikan Madrasah Nahdlatul Wathan (Kebangkitan Negeri) di Surabaya. Pengajarnya terdiri dari banyak ulama tradisional muda, seperti KH. Bisri Syansuri (1886-1980) dan KH. Abdullah Ubaid (1899-1938), yang di kemudian hari memainkan peranan penting di NU.

Masih pada tahun yang sama, bersama Kiai Hasyim Asy'ari (1871-1947), ia mendirikan koperasi dagang Nahdlatut Tujjar (Kebangkitan Pedagang) untuk kalangan tradisionalis di kisaran Surabaya-Jombang. Pada tahun 1920, ia juga aktif dalam Islam Studie Club, jembatan untuk menghubungkan dirinya dengan tokoh-tokoh nasionalis modernis, seperti dr. Soetomo.

Sejak 1924, Wahab Chasbullah telah mengusulkan agar dibentuk perhimpunan ulama untuk melindungi kepentingan kaum tradisionalis. Pada 31 Januari 1926, atas persetujuan Hasyim Asy'ari, ia mengundang para ulama terkemuka dari kalangan tradisionalis ke Surabaya untuk mengesahkan terbentuknya Komite Hijaz, yang akan mengirim delegasi ke kongres di Makkah untuk mempertahankan praktek-praktek keagamaan yang dianut kaum tradisionalis. Pertemuan 15 kiai terkemuka dari Jawa dan Madura itu dilakukan di rumah Wahab Chasbullah di Kertopaten, Surabaya.

Pertemuan tersebut akhirnya juga menghasilkan kesepakatan mendirikan NU, sebagai representasi Islam tradisional, untuk mewakili dan memperkuat Islam tradisional di Hindia Belanda. Kemudian, MIAI (Majelis Islam A'la Indonesia, Dewan Tertinggi Islam di Indonesia), yang terbentuk pada September 1937, juga merupakan gagasan Wahab Chasbullah dan Ahmad Dahlan Kebondalem (NU), Mas Mansur (Muhammadiyah), dan Wondoamiseno (SI). Federasi organisasi Islam ini bertujuan meningkatkan komunikasi dan kerja sama di antara umat Islam.

Namun kemudian MIAI dibubarkan oleh Jepang dan dibentuklah Masyumi pada November 1943. Hasyim Asy'ari ditunjuk sebagai ketua umum dan Wahab Chasbullah sebagai penasihat dewan pelaksanaannya. Meski Masyumi adalah organisasi non-politik, pada kenyataannya fungsinya setengah politis, dimaksudkan untuk memperkuat dukungan umat Islam terhadap pemerintahan Jepang.

November 1945, Masyumi berubah menjadi parpol. Masyumi menjadi satu-satunya kendaraan politik umat Islam. Hasyim Asy`ari menjadi ketua umum Majelis Syuro (Dewan Penasihat Keagamaan), Wahid Hasyim, putra Hasyim Asy`ari, menjadi wakilnya, dan Wahab Chasbullah menjadi anggota dewan. Selanjutnya, setelah NU menyetujui peran politik bagi Masyumi lewat muktamar di Purwokerto (1946), orang-orang NU tampil di pemerintahan, yakni Wahid Hasyim, Kiai Masykur, dan KH. Fathurahman Kafrawi. Sedang Wahab Chasbullah menjadi anggota DPA.

Tahun 1947, Wahab Chasbullah menjabat rais am NU. Benih-benih krisis NU-Masyumi mulai tumbuh pada 1952. Saat itu Wahab Chasbullah menjadi ketua Dewan Syuro. Maka ia sangat gencar mengkampanyekan penarikan diri NU dari Masyumi. Dan secara resmi NU menarik diri dari Masyumi pada 31 Juli 1952. Pada sidang parlemen 17 September 1952, tujuh anggota parlemen dari NU menarik diri dari Masyumi. Di antaranya Wahab Chasbullah, Idham Chalid, Zainul Arifin. Mereka kemudian membentuk partai sendiri, NU. Akibatnya, Masyumi bukan lagi partai terbesar. "Gelar" itu jatuh ke tangan PNI.

Pada Pemilu 1955, di luar dugaan, NU meraih tempat ketiga setelah PNI dan Masyumi. Sejak itu kesibukan Wahab Chasbullah lebih banyak pada bidang politik praktis di Jakarta, terutama sebagai anggota parlemen dan rais am NU. KH. Wahab Chasbullah wafat tanggal 29 Desember 1971, pada usia 83 tahun, di rumahnya di Kompleks Pesantren Tambakberas, Jombang. (Rifa'I, 2010)

c. Bisri Syansuri

Kiai Haji Bisri Syansuri (lahir di [Pati, Jawa Tengah, 18 September 1886](#) – meninggal di [Jombang, Jawa Timur, 25 April 1980](#) pada umur 93 tahun) seorang ulama dan tokoh [Nahdlatul Ulama](#) (NU). Ia adalah pendiri Pondok Pesantren Denanyar, Jombang (.wikipedia.org). KH.

Bisri Syansuri termasuk seorang pendiri NU (Nahdlatul 'Ulama) di tahun 1926, dan kakek penulis dari jalur ibu. Orang Alim kelahiran Tayu Wetan (Pati) dan dikuburkan di Denayar (Jombang). Itu, terkenal sebagai Ra'is Am PBNU (1972-1980), setelah menjadi wakil Ra'is Am PBNU dibawah KH. A Wahab Hasbullah dari Tambakberas (Jombang), yang terletak 4 KM jauhnya. (1947-1990). Beliau terkenal sebagai pengamal sumber-sumber tertulis (Adillah Naqliyah) dan senantiasa memilih "pendapat yang keras" dalam Fi'qh/hukum Islam, berbeda dari sang kakak ipar KH. A.Wahab Hasbullah, yang sangat terkenal dengan pendapat pendapatnya yang "longgar", sehingga dari kontras pendapat dua tokoh itu NU memperoleh faedah sangat besar (Abdurrahman Wahid, 2015).

RUU Perkawinan, yang menyita banyak perhatian umat Islam pada tahun 1974, terselesaikan dan diterima umat Islam salah satunya karena peran besar Bisri. Sebagai tokoh utama PPP, ia mengajukan amandemen besar atas RUU yang telah diajukan ke DPR RI. Rancangan tandingan yang dibuat bersama sejumlah ulama itu, setelah mendapat restu dari Majelis Syuro PPP, diperjuangkan di DPR hingga akhirnya disahkan.

Begitu pula ketika ada usaha keras untuk mengganti tanda gambar PPP dari Ka`bah ke bintang pada Pemilu 1977, ia tampil dominan dan berhasil mempertahankan tanda gambar PPP (jawatimuran.net/2012). Diakui atau tidak, ia adalah penerus Wahab Chasbullah, yang kebetulan sahabat karib dan kakak iparnya, baik di NU, PPP, maupun DPR.

Setelah Wahab wafat pada 1971, ia menggantikan posisi kakak iparnya itu di NU sebagai rais am. Tapi memang sejak adanya jabatan rais am, yang ditetapkan setelah wafatnya Hasyim Asy'ari pada 1947, keduanya menjadi "dwi tunggal" sebagai ketua dan wakil.

Bisri, anak nomor tiga dari lima bersaudara pasangan Syansuri dan Maiah, lahir pada 18 September 1886/ 26 Dzulhijjah 1304 di Tayu,

Jawa Tengah, daerah yang kuat memegang tradisi ajaran Islam. Umur tujuh tahun, ia belajar agama kepada Kiai Sholeh hingga umur sembilan tahun. Setelah itu ia mempelajari hadits, tafsir, dan bahasa Arab kepada Kiai Abdul Salam, salah seorang familinya yang hafal Al-Quran. Sesudah itu ia ke Jepara belajar kepada Kiai Syu`aib Sarang dan Kiai Cholil Kasingan.

Umur 15 tahun ia menuju Bangkalan, Madura, berguru kepada Kiai Cholil. Di sinilah ia berjumpa dan berteman akrab dengan Wahab Chasbullah. Dari Bangkalan, ia menuju Jombang, berguru kepada KH. Hasyim Asy`ari di Pesantren Tebuireng. Setelah enam tahun, ia mendapat ijazah untuk mengajarkan kitab hadits Shahih Al-Bukhari dan Shahih Muslim serta kitab fiqh Matn Az-Zubad.

Seusai dari Tebuireng, ia melanjutkan pengembaraan ilmunya ke Makkah bersama Wahab (1912). Di sana ia berguru kepada sejumlah ulama terkemuka, seperti KH. Muhammad Bakir, Syaikh Muhammad Sa`id Yamani, Syaikh Ibrahim Madani, Syaikh Jamal Maliki. Juga kepada Syaikh Ahmad Khatib Minangkabaw, Syaikh Syu`aib Dagestani, dan Syaikh Mahfudz Termas.

Tahun 1914 ia mempersunting adik Wahab Chasbullah, Nur Chadijah, di Tanah Suci. Setelah itu, tahun itu juga, Bisri balik ke tanah air dan menetap di Jombang, membantu mertuanya mengurus Pesantren Tambakberas. Pada 1917, atas bantuan mertua, ia membuka pesantren sendiri di Desa Denanyar, yang populer dengan sebutan Pesantren Denanyar. Tahun itu pula, kakak iparnya, Wahab, pulang kampung. Bisri ikut terlibat dalam sepak terjang Wahab ketika mendirikan Komite Hijaz dan pembentukan NU pada 31 Januari 1926 di Kertopaten, Surabaya.

Dalam proses pendirian NU, Bisri menjadi penghubung antara Kiai Wahab dan Kiai Hasyim Asy`ari. Segera setelah NU terbentuk, sebagai pembantu dalam susunan pengurus besar, ia menjadi motor

penggerak di Jombang dan daerah pesisir utara Jawa. Posisi itu membuatnya dikenal secara luas.

Rumah tangga Bisri dikaruniai sepuluh anak, tapi ada beberapa yang meninggal waktu kecil. Di antaranya anaknya itu, Solichah, dinikahkan dengan Wahid Hasyim, putra sulung Hasyim Asy`ari, gurunya. Ketika Masyumi terbentuk, ia pun aktif di dalamnya. Periode kemerdekaan juga membawanya pada fase perjuangan bersenjata. Di pemerintahan, ia mula-mula duduk di Komite Nasional Indonesia Pusat, mewakili Masyumi. Tahun 1855 ia terlibat dalam Dewan Konstituante hasil pemilu, mewakili NU. Pada Pemilu 1971 ia terpilih masuk DPR.KH. Bisri Syansuri menutup mata beberapa bulan setelah terpilih menjadi rais am NU dalam Muktamar Semarang Juni 1979, tepatnya pada 25 April 1980, dalam usia 94 tahun.

d. KH. Ahmad Shiddiq

Kiai Shiddiq atau lebih dikenal dengan julukan Mbah Shiddiq. adalah seorang tokoh panutan (ahlussunahwaljamaah.wordpress.com). KH. Achmad Shiddiq yang nama kecilnya Achmad Muhammad Hasan, lahir di Jember pada hari Ahad Legi 10 Rajab 1344 (tanggal 24 Januari 1926). Ia adalah putra bungsu Kiai Shiddiq dari Ibu Nyai H. Zaqiah (Nyai Maryam) binti KH. Yusuf (Wikipedia.org). Achmad ditinggal abahnya dalam usia 8 tahun. Dan sebelumnya pada usia 4 tahun, Achmad sudah ditinggal ibu kandungnya yang wafat ditengah perjalanan di laut, ketika pulang dari menunaikan ibadah haji. Jadi, sejak usia anak-anak, Kiai Achmad sudah yatim piatu. Karena itu, Kiai Mahfudz Shiddiq kebagian tugas mengasuh Achmad, sedangkan Kiai Halim Shiddiq mengasuh Abdullah yang masih berumur 10 tahun. Ada yang menduga, bahwa bila Achmad terkesan banyak mewarisi sifat dan gaya berpikir kakaknya (Kiai Mahfudz Shiddiq). Kiai Achmad

memiliki watak sabar, tenang dan sangat cerdas. Wawasan berfikirnya amat luas baik dalam ilmu agama maupun pengetahuan umum. Kiai Achmad belajar mengajinya mula-mula kepada Abahnya sendiri, Kiai Shiddiq. Kiai Shiddiq sebagaimana uraian-uraian sebelumnya, dalam mendidik terkenal sangat ketat (strength) terutama dalam hal sholat. Ia wajibkan semua putra-putranya sholat berjama'ah 5 waktu. Selain mengaji pada abahnya, Kiai Achmad juga banyak menimba ilmu dari Kiai Machfudz, banyak kitab kuning yang diajarkan oleh kakaknya.

Beliau Adalah Kiai yang terbuka menerima dasar Negara Pancasila. "Ibarat makanan, Pancasila, yang sudah kita kunyah selama 36 tahun, kok sekarang dipersoalkan halal dan haramnya." Demikian ungkapan KH. Ahmad Shiddiq mengenai penerimaan NU terhadap Pancasila sebagai satu-satunya asas organisasi, dalam Munas Alim Ulama 1983 di Situbondo.

NU adalah organisasi Islam pertama yang menerima Pancasila sebagai asas tunggal, padahal tidak sedikit umat yang menolaknya, apalagi partai Islam. Itulah ketokohan, kemampuan intelektual, dan kapasitas keulamaan Ahmad Shiddiq.

Pujian Presiden Suharto terucap pada tahun 1989 ketika membuka Mukhtamar NU ke-28 di Yogyakarta. Sejak itu, di bawah kepemimpinan Ahmad Shiddiq, sebagai rais am, pamor NU semakin terangkat.

Pada Mukhtamar NU ke-27/1984 di Situbondo, ia berhasil menjadi palang terakhir pemisahan diri yang dilakukan KH. As'ad Syamsul Arifin terhadap kepemimpinan PBNU hasil Mukhtamar ke-28. Ia merangkul kembali kiai sesepuh NU yang kharismatis tersebut.

Pada Mukhtamar NU ke-28 itu ia berhasil menyelamatkan duet dirinya dengan Gus Dur, yang banyak menerima guncangan dari sebagian warga NU sendiri. Begitu juga mengenai "kembali ke khiththah NU 1926". Meski bukan satu-satunya perumus, dialah

yang disepakati sebagai bintangnya kembali ke khiththah. Pada 1979 ia menyusun pokok-pokok pikiran tentang khiththah Nahdliyah, sebagai sumbangan berharga bagi warga NU.

Ahmad Shiddiq lahir di Jember tepat seminggu sebelum NU diresmikan berdirinya oleh Hasyim Asy'ari, yaitu 24 Januari 1926. Ayahnya, KH. M. Siddiq, adalah pendiri Pesantren Ash Shiddiqiyah di Jember. Seusai belajar di Ash-Shiddiqiyah, ia belajar di Pesantren Tebuireng.

Ia diangkat menjadi sekretaris pribadi menteri agama ketika jabatan itu dipercayakan kepada Wahid Hasyim pada 1950. Ketika menjadi ketua Tanfidziyah NU, Abdurrahman Wahid, cucu KH. Hasyim Asy'ari, pun berduet dengannya sebagai rais am PBNU. Sebelum itu, ia mundur dari DPR hasil Pemilu 1955, karena, "Saya selalu bicara keras soal Nasakom." Ia hadir kembali sebagai wakil rakyat setelah pemilu Orde Baru pertama, 1971. Tanggal 23 Januari 1991, KH. Ahmad Shiddiq berpulang ke rahmatullah pada usia 65 tahun. Sesuai wasiatnya, ia dimakamkan di pemakaman Auliya, Ploso, Kediri, tempat beberapa kiai hafal Al-Quran dikuburkan.

e. KH. Wahid Hasyim

Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim (lahir di [Jombang, Jawa Timur, 1 Juni 1914](#) – meninggal di [Cimahi, Jawa Barat, 19 April 1953](#) pada umur 38 tahun) adalah pahlawan nasional Indonesia dan menteri negara dalam [kabinet pertama](#) Indonesia. Ia adalah ayah dari presiden keempat Indonesia, [Abdurrahman Wahid](#) dan anak dari [Hasyim Asy'arie](#), salah satu pahlawan nasional [Indonesia](#). Wahid Hasyim dimakamkan di Tebuireng, [Jombang](#) (wikipedia.org).

Gus Wahid, demikian ia biasa disapa, lahir pada Jum'at 1 Juni 1914, dari pasangan KH. Hasyim Asy'ari, pendiri NU, dan Nyai Nafiqah binti Kiai Ilyas. Ia anak lelaki pertama pasangan tersebut. Umur lima tahun, Wahid Hasyim mulai belajar mengaji kepada

ayahnya, dan umur tujuh tahun sudah khatam Al-Quran. Umur 13 tahun, ia masuk pesantren di Siwalan Panji, Sidoarjo, Mojosari, Nganjuk, dan Lirboyo. Setelah itu ia belajar sendiri berbagai ilmu pengetahuan. Tahun 1932, ketika berumur 18 tahun, ia pergi haji dan bermukim di Tanah Suci selama dua tahun. Empat tahun sepulang dari Tanah Suci, ia bergabung dengan NU. Di NU ia mulai dari bawah, sekretaris tingkat ranting di Desa Cukir. Namun lompatan panjang terjadi. Tak lama kemudian ia dipercaya menjadi ketua NU cabang Jombang, dan ketika departemen maarif (pendidikan) NU dibuka pada tahun 1940 ia ditunjuk sebagai ketuanya. Sejak itu ia duduk di barisan pengurus PBNU. Pada umur 25 tahun ia menikah dengan Solichah binti KH. Bisri Syansuri. Mereka pasangan yang serasi, termasuk dalam dunia politik. Ketika sang suami menjadi menteri, sang istri pun menjadi anggota DPR. Pasangan ini dikaruniai enam anak, empat laki-laki dan dua perempuan. Bulan Maret 1942, Jepang mendarat. Semua ormas dan orpol Islam dilarang, dan dibentuk MIAI. Kiai Wahid terpilih menjadi ketuanya. Kedudukan itu, belakangan, mengantarkan dirinya ke pusat perjuangan bangsa Indonesia di zaman Jepang. Ia menjadi anggota Cu Sangi In, kemudian Dokuritsu Zombi Cosakai, hingga Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. KH. Wahid Hasyim adalah salah satu dari sembilan orang yang menandatangani Piagam Jakarta. Sikapnya yang tegas tapi luwes menjadikannya figur yang dapat diterima oleh berbagai kalangan kendati umurnya baru sekitar 30 tahun. Suksesnya mengintegrasikan kelasykaran golongan Islam ke dalam TRI, dan kemudian TNI, mengantarnya menjadi penasihat Panglima Besar Soedirman hingga terjadi Clash I, pemberontakan PKI Madiun, dan Clash II. Setelah ayahnya wafat pada 25 Juli 1947, ia mengasuh Pesantren Tebuireng. Dalam Kabinet Sukiman, ia menjadi menteri agama. Lima kali ia menjadi menteri. Yaitu menteri negara dalam Kabinet Presidentil I (1945), menteri negara dalam Kabinet Syahrir

(1946-1947), menteri agama Kabinet RIS (1949- 1950), menteri agama Kabinet Natsir (1950- 1951), dan menteri agama Kabinet Sukiman (1951-1952). Setelah tidak menjadi menteri, ia aktif dalam Partai NU, yang saat itu baru memisahkan diri dari Partai Masyumi. Pada 19 April 1953, ia dipanggil ke haribaan Allah SWT dalam suatu kecelakaan lalu lintas di Cimindi, Cimahi, Jawa Barat, dalam usia 39 tahun. Jenazah dimakamkan di Tebuireng, hari itu juga. Dengan Keppres No. 206/1964 tertanggal 24 Agustus 1964, gelar Pahlawan Kemerdekaan Nasional disandangkan kepada KH. Wahid Hasyim.

f. KH. M. Ilyas Ruhiat

KH. Muhammad Ilyas Ruhiat (lahir [Cipasung](#), Jawa Barat, [31 Januari 1934](#) meninggal [Tasikmalaya](#), [18 Desember 2007](#)) adalah seorang ulama besar [Nahdhatul Ulama](#), dan pernah menjabat sebagai Rais Aam Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (1992-1999) dan [lima ulama kharismatik Jawa Barat](#) (Wikipedia.org). Ia putra pasangan Ajengan Ruhiat dan Siti Aisyah. Ilyas hanya nyantri di Cipasung. Sejak kecil, ia berpembawaan tenang dan sejuk, namun kharisma dan kecerdasannya diakui oleh para ulama di kalangan NU dan non-NU. KH. Ilyas memulai kariernya di organisasi NU sejak 1954, terpilih sebagai ketua NU Cabang Tasikmalaya. Saat itu ia merangkap ketua Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Jawa Barat. Tahun 1985-1989, ia menjadi wakil rais Syuriah NU Jawa Barat. Tahun 1989, saat muktamar NU di Krapyak, Ilyas terpilih menjadi salah seorang rais Syuriah PBNU. Puncaknya, tahun 1994, pada muktamar ke-29 NU yang berlangsung di Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, ia terpilih menjadi rais am PBNU, mendampingi KH. Abdurrahman Wahid alias Gus Dur sebagai ketua umum PBNU. Pada saat muktamar NU di Krapyak, KH. Ilyas menjadi salah satu anggota rais Syuriah PBNU. Kemudian, sejak Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar NU di Bandar Lampung tahun 1992, ia ditunjuk sebagai pelaksana rais am

Syuriah NU, menggantikan Rais Am KH. Ahmad Siddiq, yang wafat. Kemudian, ia kembali menjadi rais am untuk periode berikutnya, 1994-1999. KH. Ilyas menikah dengan Hj. Dedeh Fuadah, dan memiliki tiga anak. KH. Muhammad Ilyas Ruhiat, atau kerap disebut "Ajengan Ilyas", adalah sosok yang sangat santun, lembut, mengayomi, dan menebarkan aura kesejukan. Kepribadiannya mencerminkan tipikal ulama NU sejati: penuh toleransi, bersahaja, dan gandrung pada kedamaian. Potret kesejukan Kiai Ilyas Ruhiat semakin mengemuka ketika NU diguncang prahara usai Mukhtamar Cipasung tahun 1994. Ketika itu perhelatan lima tahunan tersebut berakhir dengan pecahnya kepengurusan PBNU ke dalam dua kubu, pro Gus Dur dan pro Abu Hasan. Bahkan, kelompok kedua itu sempat mengadakan muktamar luar biasa di Asrama Haji Pondok Gede. Lima tahun kemudian, dengan pendekatannya yang menyejukkan, perlahan warga NU kembali bersatu. Ketika merasa tugasnya untuk menyatukan jam`iyah sudah selesai, bapak tiga anak ini kemudian mengundurkan diri pada Mukhtamar Lirboyo 1999. Ajengan Ilyas lebih memilih kembali mengajar di pesantrennya di lereng Gunung Galunggung. Ajengan Ilyas wafat pada Selasa 18 Desember 2007. Pengasuh Pesantren Cipasung, Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat, ini berpulang ke hadirat Allah SWT dalam usia 73 tahun.

g. KH. M.A. Sahal Mahfudz

KH. Muhammad Ahmad Sahal Mahfudz, pengasuh Pesantren Maslakul Huda, Kajen, Pati, Jawa Tengah, seluruh kehidupan dan aktivitasnya terkait dengan dunia pesantren, ilmu fiqih, dan pengembangan masyarakat. Kiai Sahal memang nahdliyyin tulen. Dalam menyikapi berbagai problematik sosial, ia selalu menjunjung tinggi sikap tawasuth (moderat), tawazun (seimbang), dan tasamuh (egaliter), yang menjadi ciri khas ulama NU. Namun, kontribusi

pemikirannya yang paling menonjol adalah perhal fiqih sosial kontekstual, yakni bahwa fiqih tetap mempunyai keterkaitan dinamis dengan kondisi sosial yang terus berubah. Penampilan Kiai Sahal Mahfudz bersahaja, tenang, dan lugas dalam berbicara tapi tidak terkesan menggurui. Padahal ia adalah nakhoda kapal besar bernama Nahdlatul Ulama dan MUI, yang fatwa-fatwanya sangat berpengaruh. Muhammad Ahmad Sahal Mahfudz lahir di Desa Kajen, Margoyoso, Pati, Jawa Tengah, 17 Desember 1937. Ia putra KH. Mahfudz Salam, pendiri Pesantren Maslakul Huda, pada tahun 1910. Nasab Mbah Sahal bermuara pada KH. Ahmad Mutamakin, tokoh legendaris yang diyakini hidup pada abad ke-18, salah seorang waliyullah, penulis kitab tasawuf Serat Cebolek. Sahal Mahfudz kecil mengaji kepada orangtuanya, sambil bersekolah di Madrasah Diniyyah tingkat ibtdaiyah (1943-1949) dan tingkat tsanawiyah (1950-1953) di lingkungan Perguruan Islam Mathaliul Falah, Kajen, Pati. Sambil sekolah di Madrasah Diniyyah, ia juga mengikuti kursus ilmu umum di Kajen (1951-1953).Tamat MTs, Sahal nyantri di Pesantren Bendo, Pare, Kediri, Jawa Timur, yang diasuh Kiai Muhajir. Empat tahun kemudian ia melanjutkan ke Pesantren Sarang, Rembang, Jawa Tengah. Di pesantren yang terkenal dengan pendidikan ilmu fiqih itu ia belajar langsung kepada Kiai Zubair. Selain mengaji, ia, yang sudah cukup alim, juga diminta membantu mengajar santri-santri yunior. Pertengahan tahun 1960, usai menunaikan ibadah haji, Sahal Mahfudz bermukim di Makkah dan belajar kepada Syaikh Muhammad Yasin Al-Fadani. Tak kurang tiga tahun ia berguru kepada ulama besar Al-Haramain asal Padang itu. Tahun 1963, ia pulang ke tanah air. Kehadiran ulama muda yang berita kealimannya dalam bidang fiqih sudah mulai tersebar itu segera saja menarik perhatian beberapa lembaga. Sejak 1966 Kiai Sahal diminta mengajar sebagai dosen di beberapa perguruan tinggi. Puncaknya, sejak 1989, ia dipercaya menjadi rektor di Institut Islam

Nahdlatul Ulama, Jepara. Meski hanya belajar di bangku pesantren, sejak muda Kiai Sahal telah menunjukkan bakat menulis. Tradisi yang semakin langka di lingkungan ulama NU. Ratusan risalah atau makalah dan belasan buku telah ditulisnya. Salah satu karya yang merupakan bukti keandalannya dalam menulis adalah kitab *Thariqat al-Hushul* (2000), syarah atas kitab *Ghayah Al-Wushul*, sebuah kitab tentang ushul fiqh karya Syaikhul Islam Zakariya Al-Anshari. Karena kelebihan tersebut, Kiai Sahal kemudian banyak didekati kalangan media. Kiprah Kiai Sahal di NU diawali dengan menjadi kahtib Syuriah Partai NU Cabang Pati 1967-1975. Kedalaman ilmunya dan kearifan sikapnya perlahan membawa langkah kaki suami Dra. Hj. Nafisah Sahal itu ke jenjang tertinggi di NU, yakni rais am Syuriah PBNU, untuk periode 1999-2004, dan terpilih lagi di Mukhtamar Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah, untuk periode 2004-2009. Kiai Sahal sangat teguh dalam menjaga sikap. Saat terpilih menjadi rais am PBNU pada 1999, ia menyampaikan pandangan kenegaraannya bahwa, sejak awal berdirinya NU, warga nahdliyyin berada pada posisi menjaga jarak dengan negara. Karena itu, meski jabatan presiden saat itu diemban oleh KH. Abdurrahman Wahid, yang juga tokoh NU, Kiai Sahal tetap mempertahankan tradisi tersebut dengan selalu bersikap independen terhadap pemerintah. Selain di NU, kefaqihan Kiai Sahal juga membawanya ke MUI. Setelah sepuluh tahun memimpin MUI Jawa Tengah, pada tahun 2000 ia terpilih menjadi ketua umum MUI Pusat untuk periode 2000-2005, dan terpilih lagi untuk periode 2005-2010.

h. KH. Idham Chalid

Menyebut nama Kiai Idham Chalid, ingatan kita tentu akan melayang pada gonjang-ganjing NU pada tahun 1982-1984, yang melahirkan sekaligus menghadapkan dua kubu tokoh-tokoh nahdliyyin: kubu Cipete dan kubu Situbondo. Konflik internal NU itu

juga yang kemudian membuat Idham dianggap kontroversial. Bahkan ia dijuluki “politikus gabus”, karena dianggap tidak memiliki pendirian. Tak banyak yang mau melihat sisi lain kebijakan-kebijakan Kiai Idham, yang sebenarnya sangat NU dan sangat Sunni. Sebagai politisi besar NU yang lihai, Idham memang memainkan dua lakon berbeda, sebagai politisi dan ulama. Sebagai politisi, ia melakukan gerakan strategis, dan bila perlu kompromistis. Sebagai ulama, ia bersikap fleksibel, tapi tetap tidak terlepas dari jalur Islam dan tradisi yang diembannya. Semua itu ia lakukan sebagai bagian dari upaya kerasnya menjaga stabilitas kalangan bawah nahdliyyin, yang menjadi tanggung jawabnya, agar selamat fisik dan spiritual melewati masa-masa gawat transisi dari Orde Lama ke Orde Baru, yang berdarah-darah.

Strategi politik tersebut dilandaskan pada beberapa prinsip. Di antaranya, luwes, memilih jalan tengah ketimbang sikap memusuhi dan konfrontasi, yang justru membahayakan kepentingan umat. Menggunakan pendekatan partisipatoris terhadap pemerintah sehingga mampu memengaruhi kebijakan penguasa, demi kemaslahatan umat. Menurut Idham, NU harus ikut andil dalam kekuasaan sebagai kekuatan penyeimbang. Cara ini dianggap lebih tepat dalam menghasilkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang pro umat, daripada berada di luar kekuasaan, yang justru membuat sulit bergerak. Efek kebijaksanaannya sangat luar biasa. Ia menjadi sangat berakar di kalangan bawah kaum nahdliyyin, terutama di luar Jawa, dan mampu bertahan di kancah perpolitikan tanah air lebih dari tiga dekade. Namun, dalam intrnal nahdliyyin ada anggapan bahwa keterlibatan NU di wilayah politik di bawah kepemimpinannya terlalu besar. Maka, dengan memanfaatkan isu kembali ke khiththah 1926 yang tengah digaungkan kalangan muda NU di Mukhtamar Situbondo 1984, pihak lawan membuat Idham terjatuh dari kursinya. Idham Chalid lahir pada tanggal 27 Agustus 1922 di Setui, dekat

Kecamatan Kotabaru, bagian tenggara Kalimantan Selatan. Ia anak sulung dari lima bersaudara. Ayahnya, H. Muhammad Chalid, penghulu asal Amuntai, Hulu Sungai Tengah, sekitar 200 km dari Banjarmasin. Sejak kecil Idham dikenal sangat cerdas dan pemberani. Saat masuk SR, ia langsung duduk di kelas dua dan bakat pidatonya mulai terlihat dan terasah. Keahlian berorasi itu kelak menjadi modal utama Idham Chalid dalam meniti karier di jagat politik.

Selepas SR, Idham melanjutkan pendidikannya ke Madrasah Ar-Rasyidiyyah, yang didirikan oleh Tuan Guru Abdurrasyid, alumnus Universitas Al-Azhar, Kairo, pada tahun 1922. Kebetulan, saat Idham bersekolah di sana, beberapa guru lulusan Pesantren Gontor, yang terkenal dengan kelebihannya dalam pendidikan bahasa, direkrut untuk membantu mengembangkan pendidikan. Idham, yang sedang tumbuh dan gandrung dengan pengetahuan, mendapatkan banyak kesempatan untuk mendalami bahasa Arab, bahasa Inggris, dan ilmu pengetahuan umum.

Di mata para siswa dan wali murid, guru-guru alumni Gontor itu sangat hebat. Tak mengherankan, banyak siswa, termasuk Idham, bercita-cita melanjutkan pendidikannya ke pesantren yang didirikan oleh KH. Imam Zarkasyi di Ponorogo, Jawa Timur, itu. Di Gontor, otak cerdas Idham Chalid lagi-lagi membuat namanya bersinar. Kegiatan favoritnya di pesantren adalah kependuan, yang kelak ditularkan kepada murid-muridnya di Amuntai dan di Cipete. Kesempatan belajar di Gontor juga dimanfaatkan Idham untuk memperdalam bahasa Jepang, Jerman, dan Prancis.

Tamat dari Gontor, 1943, Idham melanjutkan pendidikan di Jakarta. Di ibu kota, kefasihan Idham dalam berbahasa Jepang membuat penjajah Dai-Nipon sangat kagum. Pihak Jepang juga sering memintanya menjadi penerjemah dalam beberapa pertemuan dengan alim ulama. Dalam pertemuan-pertemuan itulah Idham mulai akrab dengan tokoh-tokoh utama NU. Ketika Jepang kalah

perang dan Sekutu masuk Indonesia, Idham Chalid bergabung ke dalam badan-badan perjuangan. Menjelang kemerdekaan, ia aktif dalam Panitia Kemerdekaan Indonesia Daerah di kota Amuntai. Setelah Proklamasi Kemerdekaan, ia bergabung dengan Persatuan Rakyat Indonesia, partai lokal, kemudian pindah ke Serikat Muslim Indonesia. Tahun 1947 ia bergabung dengan Sentral Organisasi Pemberontak Indonesia Kalimantan, yang dipimpin Hassan Basry, muridnya saat di Gontor. Usai perang kemerdekaan, Idham diangkat menjadi anggota Parlemen Sementara RI mewakili Kalimantan. Tahun 1950 ia terpilih lagi menjadi anggota DPRS mewakili Masyumi. Ketika NU memisahkan diri dari Masyumi, tahun 1952, Idham memilih bergabung dengan Partai Nahdlatul Ulama dan terlibat aktif dalam konsolidasi internal ke daerah-daerah. Idham memulai kariernya di NU dengan aktif di GP Ansor. Tahun 1952 ia diangkat sebagai ketua PB Ma'arif, organisasi sayap NU yang bergerak di bidang pendidikan. Pada tahun yang sama ia juga diangkat menjadi sekretaris jenderal partai, dan dua tahun kemudian menjadi wakil ketua. Selama masa kampanye Pemilu 1955, Idham memegang peran penting sebagai ketua Lajnah Pemilihan Umum NU. Sepanjang tahun 1952-1955, ia, yang juga duduk dalam Majelis Pertimbangan Politik PBNU, sering mendampingi Rais Am KH. Abdul Wahab Chasbullah berkeliling ke seluruh cabang NU di Nusantara. Dalam Pemilu 1955, NU berhasil meraih peringkat ketiga setelah PNI dan Masyumi. Karena perolehan suara yang cukup besar dalam Pemilu 1955, pada pembentukan kabinet tahun berikutnya, Kabinet Ali Sastroamijoyo, NU mendapat jatah lima menteri, termasuk satu kursi wakil perdana menteri, yang oleh PBNU diserahkan kepada Idham Chalid. Pada Mukhtar NU ke-21 di Medan bulan Desember tahun yang sama, Idham terpilih menjadi ketua umum PBNU, menggantikan KH. Muhammad Dahlan. Kabinet Ali Sastroamijoyo hanya bertahan setahun, berganti dengan Kabinet

Djuanda. Namun Idham Chalid tetap bertahan di posisi wakil perdana menteri sampai Dekrit Presiden tahun 1959. Idham kemudian ditarik menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung, dan setahun kemudian menjadi wakil ketua MPRS. Pertengahan tahun 1966 Orde Lama tumbang, dan tampilah Orde Baru. Namun posisi Idham di pemerintahan tidak ikut tumbang. Dalam kabinet Ampera, yang dibentuk Presiden Soeharto, ia dipercaya menjabat menteri kesejahteraan rakyat sampai tahun 1970 dan menteri sosial sampai 1971. Nahdlatul Ulama di bawah kepemimpinan Idham kembali mengulang sukses dalam Pemilu 1971. Namun setelah itu pemerintah melebur seluruh partai menjadi hanya tiga partai: Golkar, PDI, dan PPP. Dan NU tergabung di dalam PPP.

Idham Chalid menjabat presiden PPP, yang dijabatnya sampai tahun 1989. Ia juga terpilih menjadi ketua DPR/MPR RI sampai tahun 1977. Jabatan terakhir yang diemban Idham Chalid adalah ketua Dewan Pertimbangan Agung.

i. Ali Ma'shum

Kiai Ali lahir pada 15 Maret 1915 di Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Ia putra Kiai Ma'shum, pemimpin Pesantren Al-Hidayah, Soditan, Lasem Rembang, Jawa Tengah. Ketika usianya menginjak 12 tahun, Ali dikirim ke Pesantren Termas, Pacitan, Jawa Timur, pesantren terbesar dan termasyhur kala itu selain Tebuireng, Jombang, dan Lasem sendiri. Di Termas ia berguru kepada Syaikh Dimiyathi At-Tarmasi, adik Syaikh Mahfudz At-Tarmasi, ulama besar Nusantara yang mengajar di Masjidil Haram. Sebagai putra kiai kondang, sejak kecil Ali telah digembleng dengan dasar-dasar ilmu agama. Sehingga, ketika delapan tahun belajar di Termas, ia sama sekali tak menemukan kesulitan. Ia mendapat perhatian istimewa dari Syaikh Dimiyathi. Sejak awal mondok, Ali diizinkan gurunya mengikuti pengajian bandongan, yang biasanya hanya diikuti santri-

santri senior. Bahkan ia dibiarkan membaca kitab-kitab karya ulama pembaharu, yang tidak lazim dipelajari di pesantren salaf. Syaikh Dimyathi menilai, Ali Ma'shum sudah memiliki dasar keilmuan yang cukup kuat, sehingga bacaan-bacaan itu tidak akan mempengaruhinya, bahkan justru akan memperluas pandangannya. Segala kelebihan Ali Ma'shum itu tidak terlepas dari kepandaiannya dalam ilmu bahasa Arab, yang di atas rata-rata. Sekembali dari Termas, Ali membantu ayahnya mengasuh pesantren mereka di Lasem. Tak lama kemudian ia dinikahkan dengan Hasyimah binti Munawir, putri pemimpin Pesantren Krapyak, Yogyakarta. Sebulan setelah pernikahan, ia pergi haji. Selain berhaji, selama dua tahun bermukim di Makkah, Ali juga belajar kepada ulama besar Tanah Suci, Sayyid Alwi Al-Maliky dan Syaikh Umar Hamdan. Ketika Kiai Ali kembali dari Makkah, tahun 1941, kondisi tanah air kacau balau. Penjajah Jepang baru saja masuk. Seperti pesantren-pesantren lain, Pesantren Lasem pun sepi, ditinggal para santrinya. Dengan usaha Kiai Ali yang gigih, perlahan pesantren yang didirikan ayahandanya itu kembali menggeliat bangkit. Namun baru dua tahun ia memimpin Pesantren Lasem, ibu mertuanya datang dan minta dirinya pindah ke Krapyak, Yogyakarta, untuk memimpin pesantren yang baru saja ditinggal wafat Kiai Munawir. Sentuhan tangan dinginnya berhasil menghidupkan kembali Pesantren Krapyak. Bersama ipar-iparnya, ia meneruskan kepemimpinan Kiai Munawir hingga Pesantren Krapyak kembali berkembang pesat dan dikenal luas. Arus perubahan melanda NU menjelang dan di awal tahun 1980-an. Yakni, adanya keinginan untuk kembali ke khiththah 1926, bahwa NU tidak berpolitik. Setelah wafatnya Rais Am KH. M. Bisri Syansuri pada 25 April 1981, untuk menduduki posisi puncak dalam kepemimpinan NU, salah seorang yang dianggap paling pas adalah Kiai Ali Ma'shum. Benar saja, September 1981, Kiai Ali Ma'shum

terpilih menjadi rais am PBNU. Ia dipilih dalam Mukhtamar NU di Kaliurang, Yogyakarta.

Masa 1981 sampai 1984 itu ternyata merupakan babak yang sangat menarik bagi NU. Tahun 1982 berlangsung pemilihan umum. Menjelang pemilu, beberapa tokoh NU disingkirkan dari PPP, sehingga di kalangan NU timbul keinginan untuk meninggalkan partai berlambang Ka'bah itu. Kiai Ali termasuk orang yang tidak setuju dengan langkah tersebut. Bersama dengan Kiai As'ad Syamsul Arifin, Kiai Mahrus Ali, dan Kiai Masykur, ia minta agar Ketua PBNU KH. Idham Chalid mundur dari jabatan, karena dianggap gagal memimpin. Pada awalnya Idham Chalid setuju mundur. Tapi beberapa hari kemudian, karena ada pengkhianatan, ia mencabut pernyataan pengunduran dirinya itu. Nahdlatul Ulama pecah menjadi dua kelompok: kelompok Idham Chalid, atau sayap politik, yang berbasis di Cipete, Jakarta Selatan, dan kelompok Kiai As'ad, atau sayap khiththah, yang disebut kelompok Situbondo. Walaupun demikian, selalu diupayakan agar terjadi ishlah. Namun usaha itu gagal. Setelah upaya ishlah mentok, Kiai Ali menganggap kelompok Cipete tidak ada, hingga jabatan ketua umum atau ketua tanfidziyah dirangkap oleh rais am.

Pada 1983, sayap khiththah mengadakan Musyawarah Nasional Alim Ulama di Situbondo dan menghasilkan konsep kembali ke khiththah 1926. Tahun berikutnya, pada Mukhtamar ke-27, ditetapkanlah konsepsi tersebut serta penerimaan asas tunggal Pancasila. Dengan keputusan itu, NU menyatakan independen, tidak ada hubungan dengan partai politik tertentu. Jabatan ketua tanfidziyyah diserahkan kepada KH. Abdurrahman Wahid dan jabatan rais am diserahkan kepada KH. Achmad Siddiq. Kiai Ali sendiri duduk dalam Dewan Penasihat atau Mustasyar. Kamis 7 Desember 1989, tepat usai adzan maghrib, Kiai Ali Ma'shum berpulang ke rahmatullah dalam usia 74 tahun. Keesokan harinya,

ribuan umat Islam mengantarkan kepergiannya ke peristirahatan terakhir di Pekuburan Dongkelan, Bantul, Yogyakarta.

j. KH. Abdurrahman Wahid

Saat Muktamar Nahdlatul Ulama di Situbondo, Jawa Timur, tahun 1984, sempat terjadi suasana yang panas. Bukan hanya karena konflik kubu Situbondo dan kubu Cipete, melainkan juga karena kubu Situbondo terancam pecah akibat KH. Machrus Ali, pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, menolak KH. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menjadi ketua umum Tanfidziyah Pengurus Besar NU apabila tidak mau melepaskan jabatannya sebagai ketua Dewan Kesenian Jakarta. Alasannya, ketua umum PBNU tidak pantas mengurus "kethoprak". Namun ternyata Gus Dur tidak mau mundur. Ia bersikeras lebih baik tidak jadi ketua umum PBNU daripada melepas jabatan ketua DKJ. Sikap keras Gus Dur sekilas tampak agak menyimpang dari tradisi keulamaan NU, yakni tunduk kepada kiai. Apalagi KH. Machrus saat itu rais Syuriah Pengurus Wilayah NU Jawa Timur. Masalahnya kemudian terselesaikan saat KH. Achmad Sidiq dari Jember bercerita kepada KH. Machrus Ali. Ia bermimpi melihat KH. Wahid Hasyim, ayah Gus Dur, berdiri di atas mimbar. Spontan KH. Machrus berubah, sikap mendukung Gus Dur tanpa syarat. Ia menakwilkan mimpi itu, KH. Wahid Hasyim merestui Gus Dur. Sekalipun lebih tua, KH. Machrus tawadhu kepada KH. Wahid Hasyim, karena KH. Wahid Hasyim adalah putra Hadratusy Syaikh KH. Hasyim Asy'ari, pendiri NU dan gurunya. Akhirnya Gus Dur terpilih sebagai ketua umum PBNU, dan pada dua muktamar berikutnya ia kembali terpilih sebagai ketua umum. Maka selama lima belas tahun (1984-1999) NU berada dalam kendali Gus Dur. Kejadian di tahun 1984 itu menunjukkan kuatnya tradisi keulamaan di tubuh NU. Dua pilar dalam tradisi itu adalah nasab,

yaitu atas dasar hubungan darah, dan hubungan patronase kiai-santri atau guru-murid.

Gus Dur memiliki nasab yang sangat kuat, baik dari jalur ayah maupun ibu. Selain cucu KH. Hasyim Asy-ari dari jalur ayah, ia pun cucu KH. Bisri Syansuri dari jalur ibu. KH. Bisri Syansuri, rais am ketiga NU dan pengasuh Ponpes Denanyar, Jombang, adalah ayahanda Hj. Solichah Wahid Hasyim, ibunda Gus Dur.

Dalam hubungan patronase kiai-santri, Ponpes Tebuireng merupakan "kiblat", khususnya semasa KH. Hasyim Asy`ari. Banyak kiai besar yang belajar di Tebuireng. Dalam tradisi keulamaan NU, penghormatan seorang santri kepada putra kiainya sama dengan kepada kiainya. Bahkan, sampai kepada cucu kiainya. Karena itu, putra atau cucu kiai dipanggil "Gus".Wajar jika Gus Dur memiliki superioritas tinggi di mata nahdliyin. Apalagi, ia juga memiliki kemampuan keilmuan yang dipandang sangat tinggi di antara para tokoh NU. Meskipun tidak dikenal sebagai spesialis dalam salah satu atau beberapa cabang ilmu keislaman, ia sangat menguasai kitab kuning, juga kitab-kitab kontemporer yang disusun para ulama di masa belakangan. Selain mumpuni dalam ilmu-ilmu agama, ia pun menguasai berbagai ilmu lain dengan wawasan yang sangat luas. Di masa Gus Dur, pamor NU terus menaik. Ia berhasil membawa NU menjadi kekuatan yang berskala nasional sebagai pengimbang kekuasaan, yang waktu itu tak terimbangi oleh siapa pun. Setelah sebelumnya kurang diperhitungkan, kecuali di saat-saat pemilu, NU kemudian berubah menjadi betul-betul dikenal dan dihormati banyak pihak, baik dari dalam maupun luar negeri. Jika sebelumnya jarang dibicarakan orang, dalam waktu singkat NU berubah menjadi obyek studi dari banyak sarjana di mana-mana. Semua itu tak dapat dilepaskan dari peran Gus Dur, baik sebagai ketua umum PBNU maupun sebagai pribadi dalam berbagai kapasitasnya. Ya, Gus Dur memang punya kharisma yang besar di mata para kiai, apalagi di

depan umatnya. Umat NU ketika itu sedang mencari tokoh yang menjadi jendela menuju dunia modern. Ada kebanggaan di kalangan NU terhadap Gus Dur, karena ia membawa pesantren dan NU ke dunia luar yang luas. Ia membuka masyarakat NU untuk sadar bahwa kita hidup dalam dunia global. Sejak di bawah kepemimpinan Gus Dur, peran NU sebagai jam`iyyah maupun peran tokoh-tokohnya sebagai individu dari waktu ke waktu semakin kuat dan terus meluas, termasuk dalam politik. Meskipun secara resmi NU telah menyatakan diri kembali ke khiththah dan tidak lagi berpolitik praktis, pengaruh politiknya tak pernah surut, bahkan semakin menguat. Tokoh-tokoh NU yang terlibat di pentas politik, meskipun tidak mengatasnamakan NU, semakin banyak.

Munculnya PKB dan partai-partai baru lainnya sangat mengandalkan dukungan warga NU. Dinamika politik kemudian terus bergulir. Hanya berselang setahun tiga bulan setelah pendirian PKB, akhirnya pada bulan Oktober 1999 Gus Dur terpilih sebagai presiden RI yang keempat melalui pemilihan langsung yang dramatis di MPR. Itulah puncak karier NU di pentas politik. Lihat selebihnya dalam situs <http://www.sarkub.com/10-tokoh-berpengaruh-nahdlatul-ulama> secara memadai tokoh NU dan latar biografinya.

Saat ini banyak ditemui tokoh tokoh nasional yang sekaligus ulama-umara masuk dalam daftar struktur Pengurus besar Nahdlatul Ulama. Nama nama Ulama besar yang dapat dilihat dari Struktur PB NU periode 2015-2010 (NU Online, nu.or.id) secara umum dapat dilihat sebagai berikut. Pengurus Musytasyar adalah KH Maemun Zubair, Dr KH Ahmad Mustofa Bisri, KH Nawawi Abdul Jalil, KH Abdul Muchit Muzadi, Prof Dr KH M Tholhah Hasan, KH Dimiyati Rois, KH Makhtum Hannan, KH Muhtadi Dimiyathi, AGH Sanusi Baco, TGH Turmudzi Badruddin (NTB), KH Zaenuddin Djazuli, KH Abdurrahman Musthafa (NTT), KH M Anwar Manshur , KH Habib Luthfi bin Yahya, KH Sya'roni Ahmadi, KH Ahmad Syatibi, KH

Syukri Unus, Dr H M Jusuf Kalla, Prof Dr Chotibul Umam, Prof Dr Tengku H Muslim Ibrahim, KH Hasbullah Badawi KH Hasyim Wahid, KH Thohir Syarqawi Pinrang, KH Hamdan Kholid, KH Saifuddin Amsir, KH Zubair Muntashor, KH Ahmad Basyir, KH Ahmad Shodiq KH Mahfud Ridwan, Prof Dr KH Nasaruddin Umar, MA, Prof Dr H Machasin, MA, KH Adib Rofiuddin Izza, Habib Zein bin Smith dan Dr Ir H Awang Faroeq Ishaq.

Di Jajaran Syuriah Pengurus Pusat Nahdlatul Ulama Rais Aam adalah Dr KH Ma'ruf Amin, Wakil Rais Aam KH Miftahul Akhyar. Jajaran Rais Syuriah secara berturut turut adalah KH Mas Subadar, KH Nurul Huda Djazuli, KH Masdar Farid Mas'udi, M.A. , KH Ahmad Ishomuddin, M.Ag., KH AR Ibnu Ubaidillah Syatori, KH Dimiyati Romli, KH Abdullah Kafabihi Mahrus, KH Khalilurrahman, KH Syarifudin Abdul Ghani, KH Ali Akbar Marbun, KH Subhan Makmun, KH M Mustofa Aqil Siroj, KH Cholil As'ad Samsul Arifin, KH Idris Hamid, KH Akhmad Said Asrori, KH Abdul Hakim, Dr KH Zakki Mubarak, Prof Dr Maskuri Abdillah, dan KH Najib Abdul Qadir. Katib Aam syuriah PB NU adalah KH Yahya Cholil Staquf . Kataib Syuriah yang lain secara berturut turut adalah KH Mujib Qulyubi, Drs KH Shalahuddin al-Ayyubi, M.Si , Dr KH Abdul Ghafur Maemun, KH Zulfa Mustahafa, Dr H Asrorun Niam Shaleh, KH Acep Adang Ruchiyat, KH Lukman Hakim Haris, KH Taufiqurrahman Yasin, KH Abdussalam Shohib, KH Zamzami Amin, Dr H Sa'dullah Affandy.

Jajaran Tanfidiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Ketua Umum nya Prof Dr KH Said Aqil Siroj, MA. Wakil Ketum Prof Dr Ir. Mochammad Maksun Machfoedz, MSc. Di jajaran ketua tanfidliyah secara berurutan adalah Drs H Saifullah Yusuf , Dr H Marsudi Syuhud, Prof Dr M Nuh, DEA, Drs KH Abbas Muin, Lc, Drs H M Imam Aziz, Drs H Farid Wajdi, MPd, Dr H MuH Salim Al-Jufri, MSos.I, KH Hasib Wahab, Dr H Hanief Saha Ghafur, KH Abdul

Manan Ghani, KH Aizzuddin Abdurrahman, S.H, H Nusron Wahid, S.E., MSE, Dr H Eman Suryaman, Robikin Emhas, SH, MH, Ir. H M Iqbal Sullam dan H M Sulton Fatoni, MSi.

Sedang Sekretaris Jenderal adalah Dr (HC). Ir. H A. Helmy Faishal Zaini.

Wakil Sekjen: secara berturut turut adalah H Andi Najmi Fuaidi, Dr H Syahrizal Syarif, MPH, PHD, Drs H Masduki Baidlowi , Drs H Abdul Mun'im DZ, Ishfah Abidal Aziz, SHI, H Imam Pituduh, SH, MH, Ir. Suwadi D. Pranoto, H Ulil A. Hadrawi, MHum, H Muhammad Said Aqil, Sultonul Huda, MSi., Dr Aqil Irham dan Heri Haryanto. Bendahara Umum saat ini dijabat Dr-Ing H Bina Suhendra, Bendahara H Abidin, H Bayu Priawan Joko Sutono, S.E., MBM, H Raja Sapta Ervian, SH, MHuM , H Nurhin, H Hafidz Taftazani, Umarsyah HS dan N.M Dipo Nusantara Pua Upa. Jaringan ulama dari berbagai daerah dengan ratusan bahkan ribuan pengikut menjadi jaringan kuat organisasi ini. Dalam kadar tertentu kehadiran dan peran Nahdlatul Ulama tak dapat dipandang sebelah Mata. Bahkan dalam Bahasa Martin Van Brunissen (2005) secara bertahap, gradual dan evolutif bertransformasi menuju kekuatan besar yang tak adapat dipandang sebelah mata.

2. Ajaran dan Doktrin Fikih, Tasawuf, dan Teologi NU

Nahdlatul Ulama (NU) menganut paham Ahlussunah Wal Jama'ah, sebuah pola pikir yang mengambil jalan tengah antara ekstrim aqli (rasionalis) dengan kaum ekstrim naqli (skripturalis). Atas dasar Ini Nahdlatul Ulama menjadi organisasi yang dapat menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan perubahan yang dramatis. Berdasar faham ini NU dapat mengambil manfaat besar dalam menterjemahkan ajaran agama yang dapat diterima dalam skala luas. Terutama pada masyarakat umum yang berbasis

pedesaan. Dalam konteks seperti ini ajaran yang moderat menjadi pilihan utama.

Karena itu sumber pemikiran bagi NU tidak hanya Al-Qur'an, Sunnah, tetapi juga menggunakan kemampuan akal ditambah dengan realitas empirik. Cara berpikir semacam itu dirujuk dari pemikir terdahulu, seperti Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi dalam bidang teologi. Kemudian dalam bidang fikih mengikuti empat madzhab; Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Sementara dalam bidang tasawuf, mengembangkan metode Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi, yang mengintegrasikan antara tasawuf dengan syariat. Dasar dasar fikih dan tasawuf dan teologi NU seperti ini menjadikan NU organisasi yang paling depan dan mudah menerima keberadaan budaya sebagai bagaian penting memperkaya budaya Islam. Islam di NU menerima budaya dan diberi muatan agama. Budaya yang baik yang didialogkan secara kreatif (Ricklef, 2001) dengan Islam sehingga menjadi memiliki ruh yang benar.

Gagasan kembali ke khittah pada tahun 1984, merupakan momentum penting untuk menafsirkan kembali ajaran Ahlussunnah Wal Jamaah, serta merumuskan kembali metode berpikir, baik dalam bidang fikih maupun sosial. Serta merumuskan kembali hubungan NU dengan negara. Gerakan tersebut berhasil membangkitkan kembali gairah pemikiran dan dinamika sosial dalam NU.

3. Program Kerja dan Visi Kebangsaan NU

Dalam Konsideran AD ART NU disebutkan, bahwa Nahdlatul Ulama sebagai Jam'iyah Diniyah Islamiyah dalam sejarahnya selama ini mampu mengikat para anggotanya menjadi perkumpulan kekuatan sosial keagamaan yang besar dan tangguh. Potensi besar ini oleh karenanya perlu dijaga. NU perlu memelihara dan meningkatkan khidmahnya sesuai dengan tujuan didirikannya yang

dirumuskan dalam khittah 1926. Selanjutnya juga tegas disebutkan bahwa Nahdlatul Ulama yang bertujuan untuk memperjuangkan berlakunya ajaran Islam yang menganut faham Ahlussunah wal Jamaah menurut salah satu madzhab empat untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan demi kesejahteraan umat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Pedoman Nahdlatul Ulama terdapat dalam AD ART Bab II terkait dengan pedoman, aqidah dan asas. Pasal 4 Nahdlatul Ulama berpedoman kepada Al-Qur'an, As-Sunnah, Al-Ijma', dan Al Qiyas. Dalam Pasal 5 Nahdlatul Ulama beraqidah Islam menurut faham Ahlusunnah wal Jama'ah dalam bidang aqidah mengikuti madzhab Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi; dalam bidang fiqh mengikuti salah satu dari Madzhab Empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali); dan dalam bidang tasawuf mengikuti madzhab Imam al-Junaid al-Bagdadi dan Abu Hamid al-Ghazali. Dalam Pasal 6 Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, Nahdlatul Ulama berasas kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan NU terdapat jelas dalam bab iv tujuan dan usaha. Pada pasal 8 (1) Nahdlatul Ulama adalah perkumpulan/jam'iyah diniyyah islamiyyah ijtima'iyah (organisasi sosial keagamaan Islam) untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa, dan ketinggian harkat dan martabat manusia. (2) Tujuan Nahdlatul Ulama adalah berlakunya ajaran Islam yang menganut faham Ahlusunnah wal Jama'ah untuk terwujudnya tatanan masyarakat yang berkeadilan demi kemaslahatan, kesejahteraan umat dan demi terciptanya rahmat bagi semesta.

Pasal 9 Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana Pasal 8 di atas, maka Nahdlatul Ulama melaksanakan usaha-usaha sebagai berikut:

- a. Di bidang agama, mengupayakan terlaksananya ajaran Islam yang menganut faham Ahlusunnah wal Jama'ah.
- b. Di bidang pendidikan,

pengajaran dan kebudayaan mengupayakan terwujudnya penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran serta pengembangan kebudayaan yang sesuai dengan ajaran Islam untuk membina umat agar menjadi muslim yang takwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas dan terampil, serta berguna bagi agama, bangsa dan negara. c. Di bidang sosial, mengupayakan dan mendorong pemberdayaan di bidang kesehatan, kemaslahatan dan ketahanan keluarga, dan pendampingan masyarakat yang terpinggirkan (mustadl'afin). d. Di bidang ekonomi, mengupayakan peningkatan pendapatan masyarakat dan lapangan kerja/usaha untuk kemakmuran yang merata. e. Mengembangkan usaha-usaha lain melalui kerjasama dengan pihak dalam maupun luar negeri yang bermanfaat bagi masyarakat banyak guna terwujudnya Khairu Ummah.

Bergerak di bidang [pendidikan](#), [sosial](#), dan [ekonomi](#). Tujuan Menegakkan ajaran Islam menurut paham Ahlussunnah waljama'ah di tengah-tengah kehidupan masyarakat, di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

NU menempatkan negara sebagai alat bagi pencapaian tujuan Islam. Maka, karena tujuan Islam adalah rahmatan lil 'alamin (kesejahteraan bagi semesta), negara yang mengarah ke tujuan tersebut bisa diterima, meskipun tidak berbentuk Islam. Hubungan Islam dan megara secara mutualistic dapat dilihat dari Fati Osman (Bahtiar Effendi, 2011:1).

Menyatakan bahwa Islam hanya berhubungan dengan kehidupan spiritual, tanpa sangkut-paut sama sekali dengan masyarakat dan negara, mungkin sama jauhnya dari kenyataan dengan menyatakan bahwa Islam telah memberikan sebuah sistem sosial, ekonomi dan politik yang menyeluruh dan terperinci. Hukum Islam, Syari'ah, dalam dua sumber sucinya—al-Qur'ân dan Sunnah, tradisi verbal dan praktis Nabi Muhammad saw.—bersifat permanen, tetapi aturan-aturan legalnya yang langsung bersifat terbatas; pada saat

yang sama, turunan intelektualnya (sebagaimana ditunjukkan dalam berjilid-jilid karya fiqih) dan kumulasi tingkah-laku masyarakat-masyarakat Muslim sepanjang berabad-abad dan di tempat-tempat yang berbeda (seperti ditunjukkan dalam catatan-catatan sejarah) bisa berubah dan ekstensif. Kedua bagian itu kadang-kadang bercampur dan membingungkan, bukan saja dalam pandangan beberapa pengamat dan sarjana non-Muslim, melainkan juga dalam pandangan beberapa jurubicara Islam yang bersemangat.

NU sebagai model Islam di dunia, memberi kerangka hubungan Islam dengan kemodernan. Hubungan yang berhasil dijaga NU secara harmonis ini telah meminimalisir konflik, baik konflik antar-umat beragama maupun antara Islam dan Barat. Dengan demikian, NU bisa menjadi model bagi hubungan Islam dan kemodernan yang melahirkan hubungan harmonis antar-umat beragama. Model yang dibangun NU itu merujuk pada integrasi Islam ke dalam perjuangan nasional melalui demokratisasi dalam jangka panjang. Dalam kaitan ini, penting mengingat pandangan KH. As'ad Said Ali, wakil ketua umum PBNU (nu.or.id) melalui dua proses signifikan. Pertama, integrasi Islam ke dalam nasionalisme. Kedua, partisipasi Islam dalam demokratisasi. NU berusaha mengintegrasikan Islam ke dalam nasionalisme. Yang dimaksud poin ini adalah penyatuan visi Islam tentang kehidupan ke dalam tujuan utama pendirian negara-bangsa. Hal ini berangkat dari kaidah *al-ghayah wa al-wasail* (tujuan dan metode), yang NU menempatkan negara sebagai alat bagi pencapaian tujuan Islam. Maka, karena tujuan Islam adalah *rahmatan lil 'alamin* (kesejahteraan bagi semesta), negara yang mengarah ke tujuan tersebut bisa diterima, meskipun tidak berbentuk Islam. Oleh karena itu, NKRI, yang memuat "keadilan sosial" sebagai tujuan konstitusional bernegara, diterima oleh NU, meskipun ia bukan negara Islam yang formal.

Pada ranah historis, proses integrasi ini terjadi melalui beberapa tahap. Pertama, pengakuan wilayah Nusantara sebagai wilayah Islam (dar al-Islam). Hal ini dilakukan pada Mukhtamar ke-11 (1936), yang para ulama NU menetapkan Nusantara sebagai dar al-Islam. Menariknya, istilah dar al-Islam ini tidak dimaknai sebagai “negara Islam”, melainkan “wilayah Islam”, sebab di dalamnya umat Islam bebas melaksanakan syari’at. Dengan cara ini, NU telah membentuk “kebangsaan Islam” (Islamic nationalism) sebab dar al-Islam tersebut dipahami sebagai bangsa. Artinya, ketika Nusantara diakui sebagai dar al-Islam, wilayah ini telah dipahami sebagai bangsa muslim Indonesia. Kedua, penerimaan atas negara-bangsa (NKRI), bukan negara Islam pada pembentukan konstitusi 1945. Wakil NU di sidang PPKI, yakni Kiai Wahid Hasyim, Kiai Masykur, dan Zainul Arifin, telah menyepakati bangunan NKRI dalam kerangka perawatan kemajemukan bangsa. Pada titik ini, NU telah menepis ego-kelompok, demi terjaganya masyarakat bangsa yang majemuk.

Ketiga, penetapan pemerintah RI sebagai pemimpin darurat yang memiliki wewenang menerapkan syari’at (waliy al-amri al-dlaruri bi al-syaukah). Kesepakatan ulama pada Munas Alim Ulama (1954) ini ditetapkan agar syari’at Islam bisa ditegakkan, karena pemerintahan sah secara syar’i. Dari sini terlihat bahwa politik kebangsaan NU tidak bersifat sekuler, karena ia bermuara pada syari’at Islam, baik melalui penerapan partikel hukumnya di dalam hukum nasional, maupun pengamalan sebagai etika sosial.

Keempat, penerimaan Pancasila sebagai dasar negara. Hal ini ditetapkan pada Munas Alim Ulama NU di Situbondo (1983), Pancasila diterima sebagai dasar negara sedangkan Islam tetap dijaga sebagai aqidah. Antara aqidah beragama dan dasar bernegara tidak dibenturkan, sebab Pancasila yang memuat sila ketuhanan, merupakan bentuk pengamalan syari’at Islam.

Melalui proses integrasi Islam ke dalam nasionalisme ini, NU telah meleraikan ketegangan antara Islam sebagai “ideologi universal” dan Pancasila sebagai “ideologi nasional”, serta antara Islam sebagai “paham theokratis” dan NKRI sebagai “bangunan negara-bangsa”. Sebuah pola hubungan yang hingga saat ini masih menyediakan ketegangan bagi sebagian besar negara Islam di Timur Tengah, karena mereka belum mencapai hubungan harmonis antara Islam dan kemodernan.

Dalam kaitan ini, penerimaan NU atas NKRI digerakkan melalui demokratisasi dalam jangka panjang. Hal ini terjadi karena NU memahami nasionalisme tidak dalam kerangka identitas dan wilayah, melainkan kerakyatan. Hal ini terkait dengan pandangan terhadap kekuasaan yang terkait langsung dengan kemaslahatan rakyat (*tasharruf al-imam ‘ala al-ra’iyyah manuthun bi al-mashlahah*). Melalui pandangan ini, demokrasi yang diperjuangkan bukan demokrasi prosedural, melainkan demokratisasi, baik dalam rangka pemenuhan hak sipil-politik maupun hak sosial-ekonomi.

Dari paparan di atas terlihat bahwa NU telah membangun model Islam yang selaras dengan kemodernan, nasionalisme dan demokrasi. Menariknya, NU melakukan ini melalui khazanah tradisi Islam. Tradisi yang kemudian menjadi metodologi ini misalnya terdapat pada legal maxim (*qawa’id al-fiqhiyah*), legal theory (*ushul fiqh*), dan legal philosophy (*hikmah al-tasyri’*).

Legal maxim menyediakan kaidah praktis yang bertujuan menyalurkan ketaatan normatif dengan keluwesan menghadapi realitas. Misalnya, kaidah *Ma laa yudraku kulluhu laa yutraku julluhu* (Apa yang tidak bisa dicapai semuanya jangan ditinggal prinsip dasarnya). Kaidah ini membuat NU tidak menolak NKRI, sebab terdapat prinsip-prinsip Islam di dalamnya, meliputi syura (musyawarah), ‘adalah (keadilan), dan musawah (persamaan). Sementara itu legal theory menyediakan metode penerapan syari’at

dengan mengakomodir perkembangan zaman. Adapun legal philosophy menjadi jembatan antara hukum Islam dan ilmu pengetahuan.

Dengan metode tradisional yang bernuansa modern ini, NU bisa menghadapi Islam dengan tantangan zaman secara setara. Dampaknya, ia tidak terjebak di dalam asumsi Barat sebagai ancaman dengan posisi “Islam terancam” selayak pemahaman kalangan fundamentalistis. NU dengan tradisinya telah menempatkan Islam sebagai kebijaksanaan hidup yang menyempurnakan sistem kehidupan yang ada. Oleh karenanya, dalam kaitan dengan pembangunan, peran Islam tidak sebatas suplementer (tambahan), melainkan komplementer (penyempurna), dengan ikut menentukan arah ideal pembangunan.

NU membuktikan bahwa jam’iyyah ini memiliki potensi besar. Tidak hanya dalam kehidupan berbangsa, melainkan terlebih kehidupan global. Tak mengherankan jika pemikir muslim asal Mesir, Hassan Hanafi, melihat potensi “Islam Indonesia” sebagai pemimpin dunia Islam. Pandangan ini disampaikan oleh Hanafi kepada KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ketika menjabat presiden ke-4 RI. Tentu yang dimaksud Hassan Hanafi tersebut adalah NU.

4. Kekuatan NU sebagai Organisasi Masa Islam Terbesar Indonesia

Nahdlatul Ulama (NU) basis pendukungnya diperkirakan mencapai lebih dari 80 juta orang. dari beragam profesi. Sebagian besar dari mereka adalah rakyat jelata, baik di kota maupun di desa. Mereka memiliki kohesifitas yang tinggi karena secara sosial-ekonomi memiliki masalah yang sama, selain itu mereka juga sangat menjiwai ajaran Ahlusunnah Wal Jamaah. Pada umumnya mereka memiliki ikatan cukup kuat dengan dunia pesantren yang

merupakan pusat pendidikan rakyat dan cagar budaya NU. Basis pendukung NU ini mengalami pergeseran, sejalan dengan pembangunan dan perkembangan industrialisasi. Warga NU di desa banyak yang bermigrasi ke kota memasuki sektor industri. Jika selama ini basis NU lebih kuat di sektor pertanian di pedesaan, maka saat ini, pada sektor perburuhan di perkotaan, juga cukup dominan. Demikian juga dengan terbukanya sistem pendidikan, basis intelektual dalam NU juga semakin meluas, sejalan dengan cepatnya mobilitas sosial yang terjadi selama ini. Bahwa Nahdlatul Ulama sebagai Jam'iyah Diniyah Islamiyah dalam sejarahnya selama ini mampu mengikat para anggotanya menjadi perkumpulan kekuatan sosial keagamaan yang besar dan tangguh dan oleh karenanya perlu memelihara dan meningkatkan khidmahnya sesuai dengan tujuan didirikannya yang dirumuskan dalam khittah 1926. Potensi Islam.

Peta agama dunia yang dirilis lembaga riset demografi Pew Research Center (PRC) pada April 2015 itu benar. Riset berjudul *The Future of World Religions: Population Growth Projections 2010-2050* tersebut mengolah data umur, tingkat kelahiran dan kematian, data migrasi dan perpindahan agama, serta populasi delapan kelompok agama mayoritas. Pada 2010, populasi delapan agama mayoritas di dunia: Kristen 31,4 persen, Islam 23,2 persen atau 1,6 miliar pemeluk, Hindu 15 persen, Buddha 7,1 persen, agama lokal 5,9 persen, Yahudi 0,2 persen, agama tak berafiliasi (unaffiliated) 16,4 persen seperti ateisme dan agnostik, dan agama lain (0,8 persen). Proyeksi yang dibuat PRC pada 2050, populasi Muslim menanjak paling tinggi menjadi 29,7 persen (2,76 miliar pemeluk). Kristen stabil di angka 31,4 persen. Persentase Muslim dan Kristen diperkirakan sama pada 2070 (32,3 persen). Tiga dekade berikutnya, 2100, Muslim menjadi 34,9 persen dan Kristen 33,8 persen. Riset ini juga mencatat, jumlah penganut ateisme dan agnostik serta kaum tak beragama, meski meningkat di beberapa negara seperti AS dan Perancis, secara

global menurun dari 16,4 persen (pada 2010) menjadi 13,2 persen (pada 2050). Sementara agama lain, seperti Hindu, Buddha dan Yahudi, tidak banyak mengalami pergeseran hingga empat dekade mendatang (Rumadi, uinjkt.ac.id).

Umat Islam yang seyogianya bisa menjadi kekuatan Indonesia untuk menghadapi liberalisasi pasca reformasi, justru tidak luput dari arus itu. Padahal, arus liberalisasi, baik di bidang politik, ekonomi, maupun budaya, masuk secara deras ke Indonesia. Sementara Indonesia tak cukup siap dengan strategi kebudayaan menghadapinya. Rakyat gagap, gamang, galau menghadapi tantangan itu, sementara di dalamnya ada umat Islam.

Kalau ini berlanjut, dengan ke-Indonesia-an yang goyah, dan umat Islam di dalamnya juga goyah, maka dalam rentang waktu yang panjang Indonesia tak akan tampil sebagai negara. Apalagi jika melihat tantangan globalisasi, seperti munculnya masyarakat ekonomi ASEAN, munculnya perubahan di Asia sebagai kawasan pertumbuhan abad ini. Catatan Muslim (2016) menyebutkan NU sebagai kekuatan besar Islam nusantara dengan berbagai variasi istilah seperti "Islam Indonesia", "pribumisasi Islam, "Islam rahmatan lil alamin" sejatinya sudah lama terjadi. Gerakan keislaman di Indonesia, hal ini sudah lama muncul. KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) misalnya, sejak pertengahan 1980-an sudah mendiskusikan tema ini dengan menggunakan istilah "pribumisasi Islam". Kesadaran bahwa Islam Indonesia mempunyai ke-khas-an dengan Islam di belahan dunia Islam yang lain sudah mengendap dalam kesadaran banyak orang.

Para peneliti asing yang memotret Islam Indonesia mengamini kenyataan itu. Meskipun pada level doktrin Islam adalah satu, namun ekspresi keislaman dan kebudayaannya bisa berbeda dengan Islam di tempat yang lain. Gairah keislaman di Indonesia tidak kalah dengan pusat-pusat Islam yang lain. Hal ini antara lain karena proses

islamisasi di Indonesia dilakukan para sufi tidak dengan jalan peperangan, tapi bil himah walmau'idhatil hasanah. Sebuah model penyebaran Islam yang dilakukan tanpa merusak dan tanpa melukai perasaan penganut keyakinan yang sudah ada sebelumnya. Proses Islamisasi seperti inilah yang sekarang kita nikmati, dimana sekitar 87 persen penduduk Indonesia beragama Islam. Pertanyaannya, mengapa begitu "Islam Nusantara" dijadikan sebagai tema Muktamar NU ke-33, banyak orang rebut, meledek bahkan menyebarkan fitnah? Apalagi setelah Presiden Joko Widodo membuka Munas Alim Ulama NU di Masjid Istiqlal (14/6/2015) yang dalam pidatonya memberi apresiasi tema Islam Nusantara dalam Muktamar ke-33, banyak yang menuding tema Islam nusantara merupakan titipan pemerintah. Kata "nusantara" dianggap dekat dengan kata "maritime" yang sekarang ini menjadi semacam trademark-nya Jokowi. Di media sosial pun terjadi pro-kontra, saling meledek. Ada tanggapan yang masuk akal, namun lebih banyak tanggapan yang tak masuk akal, bahkan asal bunyi. Kata "Islam Nusantara" meskipun persoalan lama, tapi begitu diangkat NU, kata ini mempunyai tuahdan berpeluru. Orang-orang yang terkena sasaran peluru itulah yang sekarang ini merespon negatif. Tentu saja sebagian besar dari mereka mempunyai pandangan keagamaan dan politik berbeda dengan NU.

Sasaran Tembak Islam Nusantara Ada beberapa kelompok yang menjadi sasaran tembak istilah Islam Nusantara dalam tema muktamar NU. Pertama, kelompok yang masih mempersoalkan Pancasila dan NKRI sebagai bentuk final Negara Indonesia. Salah satu spirit Islam Nusantara dalam NU adalah tidak mempertentangkan antara keislaman dan kebangsaan. Karena itu, tema Islam nusantara pada dasarnya merupakan penegasan identitas dan komitmen kebangsaan NU. Komitmen kebangsaan ini menjadi sumbu penting bagi NU. Sejak kelahirannya tahun 1926, NU telah

menunjukkan relevansi kehadirannya sebagai organisasi sosial keagamaan yang senantiasa menyatu dengan spirit kebangsaan. Para ulama pendiri NU bukan saja telah meletakkan landasan beragama dan bernegara yang kokoh, tapi juga telah memberi teladan bagaimana seharusnya menjadi muslim di tengah keragaman bangsa. Keislaman yang dirintis ulama-ulama NU adalah model keislaman yang bisa menjadi jangkar kehidupan bangsa dan memayungi segala jenis perbedaan. Jejak-jejak visi kebangsaan NU terlihat jelas dan menjadi perbincangan dari muktamar ke muktamar. Visi kebangsaan itu dibentuk dan dihasilkan dari cara pandang keagamaan –tepatnya fiqih– yang dihayati dan dipraktikkan ulama-ulama NU. Inilah yang khas dari NU. Keputusan dan langkah apapun –termasuk dalam hal politik– selalu disandarkan pada dalil dan argumentasi keagamaan (fiqih). Pada 1938 dalam Muktamar di Menes Banten misalnya, NU menyatakan Hindia Belanda sebagai dar al-Islam, artinya negeri yang dapat diterima umat Islam meskipun tidak didasarkan pada Islam. Alasan NU adalah penduduk muslim dapat melaksanakan syariat, syariat dijalankan para pegawai yang juga muslim, dan negeri ini dahulu juga dikuasai raja-raja muslim. Cara pandang ini merupakan khas sunni dalam mengesahkan dan menerima sebuah kekuasaan politik sejauh membawa manfaat bagi perkembangan kehidupan keagamaan.

Resolusi Jihad NU pada 1945 yang melahirkan pertempuran 10 November di Surabaya merupakan bukti lain, bagaimana Kiai dan ulama-ulama NU berkorban untuk bangsa. Sayangnya Resolusi Jihad NU tidak dicantumkan dalam sejarah nasional, sehingga banyak generasi muda Indonesia yang tidak mengenalinya. Sikap kenegaraan seperti inilah yang memungkinkan Indonesia secara ideologi tetap stabil meski goncangan datang silih berganti. Pandangan-pandangan keagamaannya menjadi jangkar yang bisa mengokohkan bangsa ini berdiri. Kekokohan visi kebangsaan itu mencapai puncaknya pada

tahun 1984 ketika NU menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Pancasila sebagai dasarnya adalah bentuk final.

Islam Nusantara merupakan peneguhan darisikap politik dan kebangsaan NU ini yang sekarang mendapat banyak tantangan terutama dengan lahirnya kelompok Islam yang mengusung ideologi khilafah. Kelompok ini ideologi politiknya jelas berbeda dengan NU, karena masih mempersoalkan Pancasila dan NKRI. Karena itu, tidak aneh kalau kelompok ini tersengat dengan tema Islam Nusantara yang diusung NU. Kedua, kelompok puritan yang hendak melakukan pemurnian Islam atau sering disebut kelompok wahabi. Mereka tidak segan-segan melakukan pengkafiran (takfir) terhadap orang atau kelompok yang berbeda.

Islam Nusantara merupakan simbol dari kelenturan Islam ketika berhadapan dengan tradisi lokal. NU selama ini memerankan diri sebagai organisasi yang setia dengan tradisi keagamaan. Di pihak lain, kelompok wahabi adalah kelompok keagamaan yang anti tradisi, sehingga sering menyebut komunitas NU sebagai pengamaltahayul, bid'ahdankhurafat. Kelompok ini merasa terintimidasi dengan Islam Nusantara yang diusung NU, apalagi tema ini menguat dan akan menjadi identitas keislaman bangsa Indonesia.

Ketiga, kelompok yang cenderung menghalalkan kekerasan untuk menyiarkan dan menyebarkan Islam. Kelompok ini tidak segan-segan melakukan pemaksaan dan perusakan terhadap apa saja yang mereka anggap sebagai tempat maksiat, kelompok yang disesatkan, simbol-simbol kemusyrikan dan sebagainya.

Islam nusantara yang diusung NU justru anti terhadap tindakan kekerasan dalam berdakwah. Sebejat apapun seseorang tidak boleh diperangi sejauh mereka tidak memerangi umat Islam. Dakwah amar makruf harus dilakukan dengan cara-cara yang makruf (baik), mencegah kemungkaran (nahy 'anil munkar) harus dilakukan

dengan cara-cara yang tidak membawa kemungkar. Prinsip berdakwah seperti inilah yang menjadi spirit Islam Nusantara yang telah dipraktikkan para sufi dan Wali di Jawa pada abad 15. Kombinasi dari tiga kelompok inilah yang meributkan Islam Nusantara. NU sebagai organisasi besar tentu tidak boleh mundur hanya karena temanya diributkan beberapa kalangan. Mereka yang meributkan memang garis perjuangannya berbeda dengan garis perjuangan NU.

NU kali ini punya beberapa makna strategis. Terutama sebagai kekuatan besar umat Islam. Dalam memasuki millennium baru NU harus ambil peran strategis. Menurut Rumadi (uinjkt.ac.id) Intelektual Muda NU menegaskan peran NU makin dibutuhkan mengingat beberapa pertimbangan; Pertama, dengan pergantian kepemimpinan nasional yang pemerintahannya belum sepenuhnya stabil, NU dituntut mengambil peran dan memastikan pemerintahan baru berjalan di atas rel yang benar. Secara ideologi tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tapi kebijakan-kebijakan yang diambil harus dipastikan tidak menyengsarakan rakyat kecil yang sebagian besar warga NU. Kedua, Timur Tengah yang selama ini menjadi kiblat dalam melihat dunia Islam sedang berada dalam instabilitas politik yang parah. Musim Semi Arab yang berembus di berbagai belahan dunia Islam sejak 2010 ternyata tak sepenuhnya membawa perubahan mencerahkan. Tak sedikit kawasan Timur Tengah yang masih terus bergolak, saling berperang, saling bunuh, yang sebagian besar dilakukan sesama umat Islam. Munculnya NIIS juga menjadi tambahan persoalan. Ketiga, secara internasional sekarang ini sedang terjadi pergeseran geopolitik dan peta aliansi dalam merespons berbagai persoalan. Meski sejumlah kalangan masih ada yang beranggapan Islam sebagai ancaman terhadap nilai-nilai modernitas, harus diakui-dalam perkembangan global mutakhir-Islam memiliki peran sangat penting dalam menentukan arah perubahan dunia.

Islam juga semakin berkembang di berbagai belahan dunia, baik kuantitatif maupun kualitatif. Di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Perancis, Inggris, dan Jepang, Islam menduduki peringkat tertinggi dalam perkembangan dan penambahan pemeluk, baik karena migrasi maupun konversi.

B. Deradikalisasi Islam di Indonesia

1. Konsep Radikalisme Islam dan Deradikalisasi Islam

Istilah radikal berasal dari kata *radix* dalam bahasa latin artinya akar. Dalam bahasa Inggris kata *radical* serupa dengan makna ekstrim, menyeluruh, fanatik, revolusioner, dan fundamental. Sedangkan *radicalism* artinya doktrin atau praktik penganut paham radikal atau paham ekstrim. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989:719) radikalisme diartikan sebagai “paham atau aliran yang menginginkan perubahan dengan cara keras atau drastis.” Allard R. Feddes dkk dalam *Journal For Deradicalization* (Winter15/16:3) memahami sebagai “*a process of increasing willingness to use violence in order to obtain political or religious goals.*”

Berdasarkan makna di atas, istilah radikalisme sering diartikan sebagai suatu paham yang menghendaki adanya perubahan, pergantian, dan pengebolan terhadap suatu sistem di masyarakat sampai ke akar-akarnya. Bilamana perlu menggunakan cara-cara kekerasan. Radikalisme menginginkan adanya perubahan secara total terhadap suatu kondisi atau semua aspek kehidupan masyarakat. Kaum radikal menganggap bahwa rencana-rencana yang digunakan adalah rencana yang paling ideal. Tentu saja melakukan perubahan (pembaruan) merupakan hal yang wajar dilakukan bahkan harus dilakukan demi menuju masa depan yang lebih baik. Namun, perubahan yang sifatnya revolusioner seringkali “memakan korban” lebih banyak sementara keberhasilannya tidak sebanding. Oleh sebab itu, sebagian ilmuwan sosial dalam Pior Stomka (2009:223)

menyarankan perubahan dilakukan secara perlahan-lahan tetapi kontinyu dan sistematis, ketimbang revolusioner tetapi tergesa-gesa.

Radikalisme menurut Rahimi Sabirin (2004:5) ditandai dengan empat hal, yaitu: (1) sikap tidak toleran, tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain; (2) sikap fanatik, yaitu selalu merasa benar sendiri, menganggap orang lain salah; (3) sikap eksklusif, yaitu membedakan diri dari kebiasaan umat Islam kebanyakan; (4) sikap revolusioner, yaitu cenderung menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan.

Menurut Muh. Khamdan dalam ADDIN Vol 9 No. 1 (2015:188), bahwa Radikalisasi pada dasarnya istilah untuk menggambarkan adanya proses seseorang melakukan transformasi pemikiran dan pemahaman atas kondisi normal masyarakat menuju kondisi yang tidak normal, yaitu pembolehkan melakukan tindakan kekerasan. Ketidaknormalan (irasionalitas) aksi terorisme dengan adanya aksi kekerasan yang berujung sampai pembunuhan atas nama membela Tuhan dianggap sebagai tindakan *immoral* (berdosa), sedangkan Tuhan adalah sumber moralitas (kebaikan). Oleh karenanya, tidaklah mungkin Tuhan memerintahkan manusia untuk melakukan perbuatan dosa itu sendiri dengan membunuh atau bunuh diri untuk perlawanan.

Seorang radikal adalah seseorang yang menginginkan perubahan terhadap situasi yang ada dengan menjebol sampai keakar-akarnya. *A radical is a person who favors rapid and sweeping changes in laws of governments.* Seorang radikal adalah seorang yang menyukai perubahan-perubahan secara cepat dan mendasar dalam hukum dan metode-metode pemerintahan. Jadi radikalisme dapat dipahami sebagai suatu sikap yang mendambakan perubahan dari status quo dengan jalan menghancurkan status quo secara total, dan dengan menggantinya dengan suatu yang baru sama sekali berbeda. Biasanya cara yang digunakan adalah revolusioner artinya

menjugkirbalikkan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan (violenceri) dan aksi-aksi ekstrim.

Adapun radikalisme Islam oleh Olever Roy disebutnya dengan Islam Fundamentalis karena berorientasi pada pemberlakuan syariat Islam. Namun istilah fundamentalis bagi Espito terasa lebih provokatif dan bahkan pejoratif sebagai gerakan yang pernah dilekatkan pada Kristen sebagai kelompok literlis, statis dan ekstrem. Pada gilirannya fundamentalisme sering merujuk kepada kehidupan masa lalu, bahkan lebih jauh lagi fundamentalisme sering disamakan sebagai ekstrimisme, fanatisme politik, aktivisme politik, terorisme dan Anti Amerika. Karena itu, John L. Es Posito lebih memilih menggunakan istilah revivalisme Islam atau aktivisme Islam yang memiliki akar tradisi Islam.

Sementara Abid al-Jabiri (2001: 139-140) menggunakan istilah ekstrimisme Islam. Kelompok Islam ekstrim biasanya mengarahkan permusuhan dan perlawanan kepada gerakan- gerakan Islam "tengah" atau moderat. Oleh Jabiri disebutkan, musuh bebuyutan Islam ekstrim adalah kelompok yang paling dekat dengannya. Islam moderat al-Jabiri menunjukkan perbedaan dari gerakan Islam ekstrim dimasa kontemporer ini. Gerakan-gerakan ekstrimis masa lalu mempraktikkan ekstrimisme pada tatanan akidah, sedangkan gerakan-gerakan ekstrim kontemporer menjalankannya pada tatanan syariah dengan melawan mazhab-mazhab moderat.

Dengan demikian radikalisme islam atau ekstrimisme islam dan islam fundamental memiliki kesamaan yaitu sebagai suatu paham yang menghendaki adanya perubahan, pergantian dan penjebolan terhadap suatu sistem Islam di masyarakat melalui penerapan nilai dan ajaran islam dalam seluruh aspek kehidupan manusia tanpa melihat aspek sosiologis masyarakat. Karena itu, radikalisme islam menurut Rubaidi (2010:63) terdapat lima ciri gerakan radikalisme Islam, yaitu: (1) menjadikan Islam sebagai ideologi final dalam

mengatur kehidupan individual dan juga politik ketata negaraan; (2) nilai-nilai Islam yang dianut mengadopsi sumbernya—di Timur Tengah—secara apa adanya tanpa mempertimbangkan perkembangan sosial dan politik ketika Al-Qur'an dan hadits hadir di muka bumi ini, dengan realitas lokal kekinian; (3) karena perhatian lebih terfokus pada teks Al-Qur'an dan hadits, maka purifikasi ini sangat berhati-hati untuk menerima segala budaya non asal Islam (budaya Timur Tengah) termasuk berhati-hati menerima tradisi lokal karena khawatir mencampuri Islam dengan *bid'ah*; (4) menolak ideologi Non-Timur Tengah termasuk ideologi Barat, seperti demokrasi, sekularisme dan liberalisasi. Sekali lagi, segala peraturan yang ditetapkan harus merujuk pada Al-Qur'an dan hadits; (5) gerakan kelompok ini sering berseberangan dengan masyarakat luas termasuk pemerintah. Oleh karena itu, terkadang terjadi gesekan ideologis bahkan fisik dengan kelompok lain, termasuk pemerintah.

Radikalisme memang tidak persis sama dan tidak bisa disamakan dengan terorisme. Ahmad Syafii Maarif (*Islam and the Challenge of Managing Globalisation*, 2002) pernah menyatakan bahwa radikalisme lebih terkait dengan model sikap dan cara pengungkapan keberagamaan seseorang, sedangkan terorisme secara jelas mencakup tindakan kriminal untuk tujuan-tujuan politik. Radikalisme lebih terkait dengan problem intern keagamaan, sedangkan terorisme adalah fenomena global yang memerlukan tindakan global juga. Namun radikalisme kadang-kala bisa berubah menjadi terorisme, meskipun tidak semuanya dan selamanya begitu.

Radikalisme adalah satu tahapan atau satu langkah sebelum terorisme. Pada umumnya, para teroris yang banyak melakukan tindakan destruktif dan bom bunuh diri mempunyai pemahaman yang radikal terhadap berbagai hal, terutama soal keagamaan. Hal itu karena perbedaan diantara keduanya sangat tipis, dalam istilah Rizal Sukma (2004), "*Radicalism is only one step short of terrorism.*" Dan itu

tampak ketika banyak para teroris melegitimasi tindakannya dengan paham keagamaan radikal yang mereka anut. Tidak heran jika para teroris yang juga kadang disebut sebagai orang *neo-khawarij* itu menganggap orang lain yang bukan kelompoknya sebagai ancaman. Dan ancaman ini dalam batasbatas tertentu, menurut mereka harus dimusnahkan. Radikalisme juga banyak beririsan dengan problem terorisme yang menjadikan keamanan dan kenyamanan menjadi terganggu. Oleh karenanya, diskusi tentang radikalisme dan kesadaran masyarakat akan bahaya radikalisme mesti harus dijadikan agenda yang serius dan terus menerus.

Sedangkan istilah deradikalisasi merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris *deradicalization* dengan kata dasar *radical*. Mendapat awalan *de-* yang memiliki arti, *opposite, reverse, remove, reduce, get off* (kebalikan atau membalik). Mendapat imbuhan akhir *-isasi* dari kata *-ize*, yang berarti, *cause to be or resemble, adopt or spread the manner of activity or the teaching of* (suatu sebab untuk menjadi atau menyerupai, memakai atau penyebaran cara atau mengajari). Secara sederhana deradikalisasi dapat dimaknai suatu proses atau upaya untuk menghilangkan radikalisme. Sebagaimana yang diungkap oleh Hogan yang dikutip oleh Allard dkk (Winter 15/16:3) *deradicalization* dipahami sebagai *“the social and psychological process whereby an individual’s commitment to, and involvement in, violent radicalisation is reduced to the extent that they are no longer at risk of involvement and engagement in violent activity.”*

Deradikalisasi adalah upaya mendeteksi secara dini, menangkal sejak awal, dan menyasar berbagai lapisan potensial dengan beragam bentuk dan varian yang relevan bagi masing-masing kelompok yang menjadi sasaran. Tujuan utama dari deradikalisasi, bukan hanya mengikis radikalisme, memberantas potensi terorisme tapi yang utama adalah mengokohkan implementasi empat pilar hidup

berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan dan cita-cita nasional Indonesia. (Tim Setara Institute, h. 3).

Dengan demikian deradikalisasi dipahami sebagai upaya sistematis untuk membangun kesadaran masyarakat bahwa fanatisme sempit, fundamentalisme, dan radikalisme berpotensi membangkitkan terorisme. Deradikalisasi dapat pula dipahami sebagai segala upaya untuk menetralisasi paham-paham radikal melalui pendekatan interdisipliner, seperti agama, psikologi, hukum serta sosiologi, yang ditujukan bagi mereka yang dipengaruhi paham radikal. Sedangkan dalam konteks radikalisme agama yang muncul akibat paham keberagamaan radikal, deradikalisasi dimaknai sebagai proses untuk meluruskan pemahaman keagamaan yang sempit, mendasar, menjadi moderat, luas dan komprehensif. (Amir Syah, 2012:35).

Dalam konteks ini, deradikalisasi Islam sebagai media penyadaran umat dihadapkan pada problem bagaimana mengembangkan pola keberagamaan berbasis inklusivisme, pluralis dan multikultural, sehingga pada akhirnya dalam kehidupan masyarakat tumbuh pemahaman keagamaan yang toleran, inklusif dan berwawasan multikultur. Hal ini penting sebab dengan tertanamnya kesadaran demikian, sampai batas tertentu akan menghasilkan corak paradigma beragama yang *hanif* dan *rahmatan lil 'alamin*. Ini semua mesti dikerjakan pada level bagaimana menyadarkan umat beragama dalam paradigma yang toleran dan inklusif.

Sebagai rangkaian program yang berkelanjutan, deradikalisasi ini meliputi banyak program yang terdiri dari reorientasi motivasi, reedukasi, resosialisasi, serta mengupayakan kesejahteraan sosial dan kesetaraan dengan masyarakat lain bagi mereka yang terlibat dengan tindak pidana terorisme (para terpidana tindak pidana terorisme) karena Islam adalah agama kemanusiaan." Karena itu, secara hakiki

watak Islam bersifat inklusif. Maksudnya “pikiran (sistem Islam) yang dikehendaki ialah sistem yang menguntungkan semua orang, termasuk mereka yang bukan Muslim”. Artinya, kalau ada istilah “Kemenangan Islam”, maka itu adalah “Kemenangan semua golongan”.

Filosofi agama yang hanya membenarkan agamanya sendiri, tanpa mau menerima kebenaran agama lain, perlu dikritisi untuk selanjutnya dibenahi dan dilakukan reorientasi. Konsep iman-kafir, muslim non-muslim, dan *truth claim* yang sangat berpengaruh terhadap cara pandang masyarakat pada agama lain, semestinya “dibongkar” agar umat tidak lagi menganggap agama lain sebagai agama yang salah dan bukan jalan memperoleh keselamatan. Jika ini yang terjadi, tanpa ragu lagi dan pasti akan merusak harmonisasi agama dan menghilangkan sikap saling menghargai, sehingga pada gilirannya sangat rentan konflik. Namun demikian, setiap pemeluk agama tidak seharusnya meragukan keyakinan agamanya, karena telah memiliki kebenaran dalam setiap agama. Keyakinan bahwa agamanya yang benar tetap harus ada dalam diri setiap pemeluk agama tetapi yang tidak dibolehkan adalah senantiasa menyalahkan agama orang lain dan mencemoohkan atau memperolok agama lain. *Truth claim* tetap harus ada dalam diri setiap pemeluk agama, namun jangan sampai merugikan orang lain yang tidak seagama sehingga akan menimbulkan konflik dan disharmoni antara para pemeluk agama.

Deradikalisasi sebagai strategi pencegahan menjadi alternatif dari strategi kontra terorisme yang cenderung menggunakan kekerasan atau pendekatan *hard measure*. Indonesia, misalnya, telah mengerahkan kekuatan militer dan menghukum mati para teror, namun aksi kekerasan masih berkembang dan meluas. Oleh karena itu, John Horgan dalam bukunya *Walking Away from Terrorism: Accounts of Disengagement from Radical and Extremist Movements*

menguraikan bahwa deradikalisasi yang dimaksudkan untuk mengubah pemikiran radikal justru dapat memicu radikalisme itu sendiri, sehingga yang dibutuhkan adalah kemandirian hidup berupa akses ekonomi serta upaya menjauhkan seseorang dari kekerasan (*disengagement from violence*) dan identitas kelompok radikal. (Muh. Khamdan, 2015:190).

2. Faktor yang Melatari Kebangkitan Radikalisme Islam

Telah muncul berbagai studi yang mencoba memahami akar-akar terorisme dan radikalisme dalam berbagai perspektif, baik itu segi ekonomi, budaya, politik, psikologi, dan keagamaan (A.P. Schmidt, 2011 dan John Horgan, 2012). Demikian halnya studi terorisme di Indonesia. Para ahli sepakat bahwa akar terorisme bersifat kompleks. Ada beberapa segi terorisme keagamaan di Indonesia yang membedakan dengan fenomena serupa di negara-negara Barat maupun negara muslim lainnya seperti Malaysia, yakni unsur kesejarahan. Akar terorisme di Indonesia saat ini yang melibatkan banyak kelompok Islam berpandangan radikal akan dapat diketahui dengan baik dengan melihat keterhubungannya dengan gerakan-gerakan Islam radikal yang telah ada sebelumnya.

Jika dihubungkan dengan fakta sejarah, maka dapat dijumpai adanya kelompok-kelompok dalam Islam yang berpandangan Fundamentalisme (radikalisme), walaupun tidak sepenuhnya muncul sebagai reaksi terhadap modernisasi, melainkan juga karena latar belakang politik, teologi dan lain sebagainya. Dalam bidang teologi misalnya kita jumpai Khawarij, kelompok ini muncul sebagai reaksi terhadap sikap khalifah Ali Bin Abi Thalib dan Muawiyah serta para pendukungnya dari tokoh yang bertikai ini mengambil jalan penyelesaian dengan cara *arbitrase* (damai) yang berakhir dengan kemenangan dari pihak Muawiyah. Kelompok ini kemudian menuduh orang-orang yang terlibat dalam *arbitrase* sebagai kafir.

Di Indonesia, radikalisme agama pasca kemerdekaan terbagi ke dalam beberapa fase. Fenomena terorisme di era reformasi merupakan fase ketiga yang merupakan evolusi dua fase sebelumnya. Fase pertama, ditandai dengan munculnya gerakan Darul Islam/DI (Negara Islam)/Tentara Islam Indonesia Kartosoewirjo yang kemudian diikuti oleh Kahar Muzakkar dan Daud Beureuh. Fase kedua, munculnya gerakan Komando Jihad 1970-an hingga 1980-an yang beberapa aktor utamanya adalah mantan anggota DI/TII era Kartosoewirjo. Nama Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'ashir, yang kemudian dikenal luas sebagai amir Jemaah Islamiyah (JI), telah muncul pada fase itu. Fase ketiga, berbagai gerakan teror dan kekerasan yang terjadi saat dan pasca reformasi, akhir 1990-an hingga saat ini.

Selain akar kesejarahan, genealogy pemikiran/ideology yang menginspirasi berkembangnya radikalisme keagamaan juga penting untuk ditelusuri. Perkembangan gagasan Islam radikal di tanah air, yang beberapa ekspresi politiknya dilakukan melalui aksi teror, banyak dipengaruhi oleh pandangan keislaman ulama klasik Ibnu Taimiyah dan juga Sayid Quthb –pemikir Islam radikal Ikhwanul Muslimin Mesir yang akhirnya dihukum gantung-. Pemikiran Quthb –melalui *Ma'alim fi at Thorieq*- banyak menginspirasi radikalisme keagamaan di kalangan muda pada 1980-an. Terutama, pandangannya soal jahiliah modern dan definisi kufr yang meluas. Lalu, gagasan ini diperkukuh oleh Syaikh Abdullah Azzam – dengan konsep jihadnya, yang kemudian berhasil mempengaruhi para aktivis muslim Indonesia pergi berjihad ke Afghanistan. Lalu, Osama bin Laden, menjadi tokoh terpenting dalam mempengaruhi arah dan perkembangan gerakan neo-fundamentalisme kontemporer (Oliver Roy, 2005). Justifikasi jihad dan dalil keagamaan yang banyak keluar dari aktifis radikal saat ini kenyataannya tidak lebih sebagai “*copy paste*” ungkapan-ungkapan yang sering dilontarkan Bin Laden

sebelumnya. Kuatnya pengaruh para tokoh di atas juga dapat dibaca dengan jelas dalam berbagai buku, majalah, tabloid, atau media lain yang diproduksi oleh kelompok-kelompok Islam radikal di tanah air.

Salah satu faktor yang melatarbelakangi kebangkitan radikalisme Islam lainnya adalah memandang Islam sebagai satu wajah dalam ideologisasi Islam. Menurut Wahid (2006) ideologisasi Islam tidak sesuai dengan perkembangan Islam di Indonesia, yang dikenal dengan “negerinya kaum Muslim moderat”. Islam di Indonesia muncul dalam keseharian kultural yang tidak berbaju ideologis. Di sisi lain, ideologisasi Islam mudah mendorong umat Islam kepada upaya-upaya politis yang mengarah pada penafsiran tekstual dan radikal terhadap teks-teks keagamaan. Implikasi paling nyata dari ideologisasi Islam adalah upaya-upaya sejumlah kalangan untuk menjadikan Islam sebagai ideologi alternatif terhadap Pancasila, serta keinginan sejumlah kelompok untuk memperjuangkan kembalinya Piagam Jakarta. Juga langkah-langkah sejumlah pemerintah daerah dan DPRD yang mengeluarkan peraturan daerah berdasarkan “Syari’at Islam”. Menurut Gus Dur, upaya-upaya untuk “meng-Islamkan” dasar negara dan “men-syari’atkan” peraturan-peraturan daerah itu bukan saja a-historis, tetapi juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Mengutip pendapat mantan Hakim Agung Mesir, Al-Ashmawi, upaya syari’atisasi semacam itu menurut ilmu *fiqh* termasuk dalam *tahsil al-hasil* (melakukan hal yang tidak perlu karena sudah dilakukan).

Tinka Veldhuis dan Jorgen Staun yang dikutip oleh Muh. Khamdan dalam ADDIN Vo. 9 No. 1 (2015:189) menguraikan bahwa akar penyebab dari radikalisme dibedakan menjadi dua faktor, yaitu pada level makro dan level mikro. Level makro adalah kondisi umum yang menjadi prasyarat terbangunnya radikalisme seperti kondisi aktual terkait bidang politik, ekonomi, dan budaya. Adapun pada level mikro adalah kondisi yang menjadi faktor langsung terjadinya

radikalisme pada diri seseorang atau kelompok tertentu sehingga dalam level mikro dibedakan sebagai faktor individual dan faktor sosial.

Dalam level makro, faktor penyebab radikalisme bersifat global sebagaimana pendudukan negara Barat atas negara-negara Islam serta adanya hubungan politik dan ekonomi yang buruk yang mengakibatkan ketidakadilan sistemik. Adapun dalam level mikro, faktor-faktor penyebab radikalisme ditentukan oleh faktor sosial dan individu yang sangat erat hubungannya dengan perubahan tingkah laku atau aspek psikologi, pemikiran, serta adanya interaksi di tengah masyarakat dalam penentuan identitas diri kendati seseorang tersebut terisolasi dari pergaulan namun masih bisa berkomunikasi melalui internet sehingga membentuk hubungan maya dalam kelompok identitas.

Kebangkitan gerakan-gerakan Islam radikal sudah pasti menimbulkan persoalan bagi masyarakat Indonesia yang bercorak multietnik, multiagama dan multibudaya. Tapi kebangkitan para Islamis dan Salafis hanya *simtom* dari persoalan besar yang menyangkut penindasan yang bekerja pada wilayah paling privat dari manusia yang membuat orang sulit bersikap pluralis. Para aktivis radikal misalnya melalui proses identifikasi dengan "teman" dan negasi dengan "musuh" dalam mendefenisikan siapa dirinya. Mereka menjadi tidak toleran dan anti-pluralisme bukan karena menegasikan *other* sebagai musuh. Tapi lantaran *other* diperlakukan sebagai "musuh" yang tidak punya hak untuk hidup dan perlu dibasmi. Memperlakukan *other* dengan cara demikian bisa dipersoalkan sebagai perilaku sosial yang tidak sehat dalam konteks masyarakat multi kultural. Tapi perlakuan semacam ini adalah produk historis tertentu yang perlu dikaitkan dengan persoalan penindasan dan perlawanan. Dalam kondisi sosio-historis tertentu, misalnya, *other* yang dinegasikan bisa diperlakukan sebagai *adversary*,

yakni sebagai "musuh" yang tetap punya hak untuk hidup. Tidak cukup jelas seberapa jauh Buya Syafii menyadari implikasi yang bisa timbul dari upayanya membaca gerakan-gerakan Islam radikal sebagai wujud politik identitas terhadap gagasan-gagasan tentang pluralisme seperti yang baru saja diuraikan (Ma'arif, 2012: 58).

Pemahaman sempit agama yang berujung pada aksi teror bom tumbuh bersama sistem. Sikap ekstrem ini berkembangbiak di tengah-tengah panggung yang mempertontonkan kemiskinan, kesenjangan sosial, atau ketidakadilan. Perilaku elite politik yang tidak akomodatif terhadap kepentingan rakyat dan hanya memikirkan kelompok atau partainya menjadi tempat persemaian subur bagi radikalisme.

Radikalisme Islam memiliki pemikiran yang menjadi doktrin yang diyakini sebagai suatu kebenaran. Di antara pemikiran-pemikiran mereka adalah sebagai berikut:

a. Membentuk sebuah kekuasaan Islam.

Hubungan antara agama dengan negara atau politik menjadi isu perenial di kalangan umat Islam, baik ulama, pemikir muslim dan bahkan gerakan Islam. Menurut Azyumardi Azra dalam Fiqh Kebhinekaan (2015:115) bahwa hubungan antara agama dan negara terdiri dari tiga bentuk. Pertama, pemisahan antara agama dan politik yang bahkan disertai idiologi politik sekuler yang tidak bersahabat dengan agama seperti Turki. kedua, pemisahan yang disertai ideologi yang bersahabat dengan agama seperti Indonesia. Bentuk kedua ini juga dapat disebut sebagai akomodasi antara negara dan agama; ketiga, penyatuan agama dengan negara seperti Arab Saudi, yang dapat juga disebut sebagai teokrasi.

Faham radikalisme lebih memilih bentuk ketiga yaitu penyatuan antara agama dengan negara yang mengharuskan mereka membentuk sebuah kekuasaan Islam, baik itu berupa Negara Islam

ataupun Kekhilafahan Islam. Sebab, hanya melalui sarana itulah, kekuasaan politik, syariat Islam dan semua kebijakan yang betul-betul islami bisa diberlakukan. Apapun akan mereka lakukan demi terwujudnya sebuah negara atau khilafah Islam.

Sebenarnya tidak ada yang salah untuk mewujudkan khilafah Islam atau negara Islam; tetapi apakah ketika telah terwujud negara Islam atau khilafah kemudian tidak terimplementasi nilai-nilai Islam dalam sebuah negara Islam masih dikatakan sebagai negara islam? Ataukah tidak perlu menggunakan label Islam tetapi negara itu senantiasa komitmen dalam menerapkan nilai-nilai Islam. Seperti yang terjadi pada Indonesia yang nyata-nyata tidak menggunakan label negara Islam tetapi menggunakan negara pancasila. Dalam hal ini tidak menyatukan agama dengan negara. Namun Indonesia dengan penduduk muslimnya yang 88 % mencoba untuk menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan lima prinsip dalam pancasila. Pada sila pertama 'Ketuhanan Yang Maha Esa', Indonesia menegaskan bukan negara sekuler tetapi negara yang mengakomodasi agama pada tempat yang sangat terhormat.

Pancasila dalam konteks Indonesia menurut Zakiyuddin Baidhawiy dalam *Fiqh Kebhinekaan* (2015:143-147) sangat berhubungan dengan realitas masyarakatnya yang sangat plural. Oleh karena itu, perlu manajemen masyarakat bineka yang setidaknya memiliki beberapa ciri utama, yaitu: (1) dalam masyarakat bineka terbuka pintu untuk mengakomodasi semua kepentingan politik dari berbagai segmen masyarakat yang hidup. Kepentingan politik ini mensyaratkan suatu sistem keadilan, keterbukaan, dan demokratis; (2) masyarakat bineka memberlakukan sepenuhnya sistem kelola kebudayaan yang mengakomodasi semua entitas kultural yang ada. Kebijakan kultural ini diupayakan dalam rangka memberikan tempat dan hak yang sama pada semua kelompok

masyarakat; (3) masyarakat bineka tidak semata mengakui keberadaan kebudayaan-kebudayaan yang beragam dan berbeda, namun juga mengandaikan kesediaan dan ketulusan untuk menghargai kebudayaan-kebudayaan tanpa harus mengorbankan loyalitas atas identitas kulturalnya sendiri.

Ketiga ciri utama masyarakat bineka tersebut merupakan intisari Islam yang menghendaki terciptanya masyarakat dalam negara yang adil, makmur, dan sejahtera. Tidak perlu menggunakan label negara Islam tetapi di dalamnya masyarakat tersiksa dalam kehidupan mereka yang penuh penindasan, kezhaliman dan penganiayaan. Dengan alur argumentasi semacam ini, pembentukan sebuah negara Islam dalam pengertiannya yang formal dan ideologis tidaklah sungguh-sungguh penting. Sebab yang terpenting adalah bahwa negara—karena posisinya yang bisa menjadi instrumental dalam perealisasi ajaran-ajaran agama—menjamin tumbuhnya nilai-nilai dasar seperti itu. Jika demikian halnya, maka tidak ada alasan teologis atau religius untuk menolak gagasan-gagasan politik mengenai kedaulatan rakyat, negara-bangsa sebagai unit teritorial yang sah, dan prinsip-prinsip umum teori politik modern lainnya. Dengan kata lain, sesungguhnya tidak ada landasan yang kuat untuk meletakkan Islam dalam posisi yang bertentangan dengan sistem politik modern. (Bahtiar Efendi dalam *Islam dan Negara*, 2011:16).

b. Masyarakat Jahiliyah Modern

Dalam pandangan aliran radikalisme Islam bahwa masyarakat modern dinilai sebagai masyarakat jahiliyah modern yang telah menyimpang jauh dari ajaran Islam, meskipun mereka hari ini memiliki pengetahuan dan keterampilan yang telah mampu mengubah dunia, namun mereka dinilai sebagai orang yang tidak beriman (kafir) karena beberapa hal diantaranya adalah tidak berhukum dengan hukum Allah, bekerjasama dengan Yahudi dan

Nashrani yang padahal mereka telah menjadi musuh Allah dan Rasul-Nya.

Sejalan dengan konsep Quthb tentang masyarakat jahiliah, baik Darul Islam maupun Jemaah Islamiyah juga memberikan penilaian keagamaan terhadap pemerintahan Republik Indonesia, yang karena ketidaksediaanya menjalankan syariah dengan kaffah (secara total), sebagai pemerintahan jahiliah (Pinardi: 1964, Greg Barton, 2004). Bagi mereka, apabila pemerintahan jahiliah seperti itu apabila tidak bersedia melakukan "*hijrah*" secara sukarela, maka harus diperangi. Dalam *Dakwah dan Jihad* (2003), Abu Bakar Ba'ashir menjelaskan secara eksplisit beberapa point penting menyangkut doktrin keagamaan menyangkut pelaksanaan syariat islam dan hukum bagi mereka (pemerintah) yang tidak menjalankannya, antara lain: (1) dienul Islam (agama Islam) wajib diamalkan secara murni, tidak tercampur dengan ajaran-ajaran dan hukum-hukum buatan manusia; (2) dienul Islam wajib diamalkan secara bedaulat/ berpemerintahan/ dengan kekuasaan, bukan secara sendiri-sendiri atau berkelompok.

Dengan dasar wajibnya syariah dijalankan secara *kaffah*, Ba'asyir kemudian menjatuhkan vonis musyrik kepada mereka yang masuk kategori: (1) seseorang atau kelompok yang membuat undang-undang atau hukum tanpa merujuk kepada Qur'an dan Hadits; (2) siapapun yang membenarkan dan mentaati undang-undang atau hukum buatan manusia yang tidak merujuk kepada hukum Allah. Dengan merujuk kepada pendapat Syaikh Abdullah Azzam, kafir juga berlaku bagi: presiden, para sarjana atau kaum intelektual, Dewan Perwakilan Rakyat, serta masyarakat, yang telah membuat dan melaksanakan undang-undang yang tidak berdasarkan syariat dari Allah. Bagi Ba'asyir, "Barang siapa yang menandatangani pelaksanaan undang-undang itu –yang tidak bersumber dari Allah– maka dia telah menjadi kafir, keluar dari Islam dan golongan kaum muslimin". Meski Indonesia telah mengadopsi beberapa unsur

syariat dalam hukum nasional, bahkan telah memberikan legalitas bagi Provinsi Aceh- kini Naggroe Aceh Darussalam- untuk menerapkan syariat Islam, bagi Ba'asyir pemerintah Indonesia tetap saja pemerintahan kafir sebab syariah tidak diberlakukan secara menyeluruh (Praga Adhitama, 2011).

Ia menegaskan, “meski pemerintah melaksanakan sebagian hukum Islam, bahkan menjadikan agama Islam sebagai agama negara, kalau dia (pemerintah) sengaja pelaksanaan hukum Allah secara *kaffah*, dan menolak menjadikan Qur'an dan Sunnah sebagai satu-satunya sumber hukum, maka pemerintahan semacam ini masuk dalam golongan *thaghut* (Ba'asyir, 2003) . Atau dengan meminjam istilah Sayyid Quthb merupakan pemerintahan *hizb al-syaithan*.

Kelompok radikalisme menekankan aspek formalisasi agama seperti hukum islam, negara islam, dan perda syariah. Formalisasi agama sangat jelas membahayakan baik bagi agama itu sendiri maupun penganutnya/bangsa Indonesia. Dengan formalisasi agama akan diamputasi sedemikian rupa, dilepaskan dari konteks sosial dan kultural masa risalah, disapih dari pertumbuhannya sepanjang sejarah dan pesan-pesannya akan ditentukan berdasarkan bingkai ideologis dan/atau platform partai politik. Dalam situasi demikian, identitas dan simbol-simbol keagamaan menjadi bagian terpenting, bahkan lebih penting dari substansi pesan agamaa itu sendiri, untuk diperjuangkan. Mereka mengejar simbol-simbol, bukan mengamalkan substansi ajaran agama (Lihat, *Ilusi Negara Islam*, 2009:102).

Beberapa contoh gairah memperjuangkan simbol ini bisa dikemukakan seperti sebuah riwayat menuturkan bahwa Tuhan akan mencintai hamba-hamba-Nya yang mempunyai tnada hitam di dahinya. Berdasarkan riwayat ini, sangat banyak aktivis kelompok radikal yang berusaha membuat dahinya hitam, padahal yang

dimaksud adalah banyak bersujud, beribadah, berserah diri kepada Allah swt., berusaha mencintai-Nya dengan sepenuh hati sehingga dia juga akan akan mencintai seluruh makhluk-Nya. Mereka berpikir bahwa tanda hitam itu akan ditunjukkan sebagai bukti kepada Tuhan kelak di akhirat, padahal Allah swt melihat hatii dan perbuatan, bukan simbol-simbol. Demikian pula dengan jenggot dan pakaian. Dugaan terbaik, hal ini disebabkan tidak adanya kemampuan membedakan antara substansi ajaran agama dari simbol-simbol keagamaan atau budaya. Hal ini wajar, karena pemahaman mereka bersifat harfiah belaka.(lihat *Ilusi Negara Islam*, 2009:103).

c. Menciptakan Teokrasi dan Takfir (Pengkafiran)

Menciptakan Teokrasi, dalam pandangan mereka, sistem kehidupan (sosial, ekonomi, dan politik, atau apapun) yang tidak berasal dari Islam adalah kufur. Mereka menentang baik demokrasi (kekuasaan rakyat) maupun kekuasaan otoriter dengan dalih model kekuasaan tersebut tidak berasal dari Islam. Dalam Islam, hanya Allah yang berkuasa. Golongan Islamis menggunakan slogan-slogan, “syariah adalah solusi” dan “al-Qur’an adalah konstitusi”.

Konsep *takfir* yang kontroversial itu awalnya muncul dari ulama klasik Ibnu Taymiyya, yang kemudian dihidupkan kembali oleh Quthb dan para Islamis modern pengikutnya, untuk menghakimi pemerintahan yang meskipun muslim tapi tidak Islami. Bagi mereka, definisi kafir dan semua implikasinya, tidak hanya berlaku bagi mereka yang tidak beragama Islam ataupun ateis, tetapi juga berlaku bagi sebuah pemerintahan yang meski mereka menyatakan diri sebagai muslim tetapi tidak menjadikan syariat Islam sebagai dasar kebijakan. Dengan membagi hanya pada dua pilihan bagi masyarakat saat ini: Jalan Tuhan (*hizb Allah*) atau Jalan Setan (*hizb al-syaithan*), Quthb menegaskan siapapun yang tidak bersandar hanya pada hukum Allah (syari’ah), maka mereka adalah bagian *hizb al-syaithan*.

Gagasan tentang jihad dan *takfir* seperti di atas juga terlihat betul dalam keyakinan Imam Samudra sehingga menginspirasi untuk melakukan pengeboman di Bali 12 Oktober 2002. Menurut Imam Samudra, jihad yang berarti perang melawan kaum kafir wajib dilakukan kapan saja dan dimana saja hingga terlaksananya hukum Allah secara sempurna. Jihad ini juga berlaku untuk memerangi kaum yang disebut sebagai *bughot*, meskipun muslim, tetapi menolak Negara Islam (Imam Samudra, 2004). Pemahaman yang radikal tentang jihad hingga dengan tegaknya hukum Allah di muka bumi juga dapat ditemukan dalam berbagai testimoni para pelaku aksi bom bunuh (lihat, testimony Acong 2012). Di mata para “martyr” ini siapapun mereka yang menolak tegaknya hukum Allah secara kaffah dianggap sebagai bagian kaum *kuffar* salibis-zionis yang harus diperangi.

d. Kewajiban untuk Hijrah dan Jihad

Konsep tentang jihad dan hijrah dapat ditemukan dalam retorika gerakan-gerakan islam radikal yang muncul setelahnya, misalnya dalam diri gerakan Komando Jihad era Orde Baru dan Jemaah Islamiyah (JI) pasca reformasi. Semakin kebelakang, pemaknaan jihad dan hijrah juga semakin meluas. Apabila sebelumnya, jihad hanya merujuk kepada perjuangan nasional melawan kolonial Belanda, dan kemudian pada 1950-an menysasar kepada pemerintah yang “mendukung” komunis, tetapi dalam beberapa tahun terakhir makna jihad menjadi lebih bersifat internasional, mencakup perlawanan bagi siapa saja (pemerintahan) yang dianggap telah mendukung penindasan dunia Islam oleh Amerika Serikat dan Israel.

Konsepsi jihad sering diinterpretasikan sebagai peran suci. Implikasinya membunuh, menyiksa, merusak, membakar, menjarah segala sesuatu milik golongan yang tak seagama dipandang sebagai perbuatan di jalan Tuhan. Kekerasan menjadi teologi perang atas

nama Tuhan. Padahal makna jihad dalam konotasi lebih luas adalah usaha sungguh-sungguh untuk menahan diri/hawa nafsu dari hal-hal yang membawa kerusakan. (Sulhan, 2003:59).

Abdurrahman Wahid (2000:10) mengungkapkan bahwa faham seperti ini dipahami oleh kaum khawarij yang menggunakan jihad untuk memaksakan pendapat mereka kepada komunitas Muslim yang lain atas nama idealisme transenden dan ekstrem. Mereka bersikukuh, karena Nabi Muhammad menghabiskan hidupnya dalam peperangan, maka orang yang beriman harus mengikuti teladannya-sehingga negara Islam harus mengatur urusan perang, dan orang bid'ah dipaksa untuk menganut keyakinan seperti itu atau terkena tajamnya pedang.

Tetapi kelompok Islam moderat lebih memahami jihad sebagai tindakan Islam melawan ketidakadilan bukan pemaksaan atas kebenaran yang diyakininya dan berperang hanya bertujuan membela diri (Abdurrahman Wahid, 2000:11). Mereka mendasarkan perilakunya pada al-Quran dan hadis, contoh-contoh historis tercantum dalam ayat al-Quran berikut ini:

“Perangilah mereka yang memerangi kamu di jalan Allah tetapi janganlah melanggar batas, karena Allah tidak menyukai mereka yang melanggar batas” (QS. Al-Baqarah:190).

Dari gambaran-gambaran di atas tampaknya ada beberapa hal yang melatarbelakangi radikalisme agama sebagaimana diungkap oleh Sulhan (2003:58) dalam jurnal Fikih Rakyat sebagai berikut :

- a. Problem mitologi agama, yaitu cara pandang pemikiran yang cenderung anti sejarah dan anti peradaban modern.

Keberagamaan yang berciri mitologi bisa melahirkan sikap radikal yang muncul dalam dua bentuk paradoksal, yaitu: (1) radikalisme eskapis, yaitu berusaha melepaskan kehidupan duniawi, hidup bertapa, membebaskan diri dan kenikmatan duniawi yang

bersikap racun dan bersifat semu; (2) radikalisme teologis-idiologis, yakni membangun komunitas eksklusif sebagai wadah dari identitas kelompok vis a vis dunia sekitarnya yang dianggap dekaden, mirip dunia iblis yang harus dibasmi. Kelompok kedua ini meyakini dirinya paling benar, paling dekat dengan Tuhan. Berperang melawan kafir adalah kebajikan sedang kematian adalah take off menuju rumah primordial Tuhan. Bagi mereka kehidupan jalan menuju Tuhan sedang kematian adalah gerbang kehidupan abadi.

b. Problem interpretasi dan keberagamaan simbolik.

Yaitu keberagamaan simbolik ditandai dengan sikap dan praktik beragama yang bertitik tolak dari simbol atau identitas, bukan disemangati oleh nilai substansial ajaran agama. adanya keberagamaan simbolik ini, melahirkan agama yang secara empirik tidak mampu menjawab problem kemanusiaan dan justru banyak melahirkan konflik atas nama agama. beberapa fenomena yang dapat dilihat sebagai bentuk kehidupan keberagamaan simbolik adalah semaraknya tuntutan pemberlakuan syariat Islam.

c. Problem ketidakadilan dan ketimpangan politik global.

Yakni ketidakpuasan terhadap kebijakan politik negara bangsa modern yang dominatif dan manipulatif berikutan krisis yang diakibatkannya telah menjadi tempat bersemayam paling strategis gerakan radikal. Seperti kasus pengeboman di WTC Amerika dan teror bom Bali merupakan ekspresi atas kekecewaan globalisasi dan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Terorisme yang dilakukan Amerika lebih berbahaya karena menggabungkan fundamentalisme agama dan fundamentalisme pasar. Kekecewaan atas intervensi Amerika di Afghanistan, Iraq, dan sikap ambifalensi Palestina-Israel memicu lahirnya teror yang dilakukan untuk melawan orang yang dianggap musuh Islam.

d. Problem ketimpangan nilai dan kesenjangan sosial

Yakni munculnya radikalisme agama bisa jadi merupakan isyarat akan tidak berfungsinya institusi pemerintah maupun sosial masyarakat sesuai dengan tata nilai yang diidealkan oleh kelompok tertentu. Sebagaimana diungkap oleh Muchtar Buchori yang dikutip oleh Sulhan (2003:61) mengungkapkan bahwa radikalisme biasanya muncul sebagai akibat dari persepsi kolektif menenai dua kepincangan: pertama, suatu kondisi masyarakat yang terus memburuk bagi mayoritas masyarakat tertentu, sementara suatu kelompok lain mungkin yang lebih kecil tidak terpengaruh oleh keadaan umum tersebut. Kedua, pelanggaran terhadap norma-norma keagamaan dalam kehidupan sehari-hari yang nampaknya tidak dapat dihentikan oleh siapapun seperti pejabat korup, pelacuran, perjudian, kemaksiatan dan lain.

e. Problem kebangsaan dan isu modernitas

Yakni radikalisme agama juga terkait dengan gelombang modernitas yang membanjiri negara muslim pada awal abad 20. Radikalisme agama dicerminkan dari ketidakmampuan kelompok Islam menegosiasikan dogma dan doktrin keagamaan realitas sosial dan kebutuhan masyarakat, tentang pentingnya wawasan kebangsaan sebagai entitas yang menjamin pluralisme.

Sedangkan Yusuf Qardhawi (2004: 24) menguraikan indikasi dan penyebab munculnya radikalisme: (1) fanatik pada pendapat dan pemahaman sendiri tanpa memberikan tempat bagi pendapat dan pemahaman lain yang jelas lebih baik; (2) mewajibkan orang lain untuk tidak melaksanakan apa yang tidak diwajibkan oleh Allah, padahal Nabi mengatakan: "permudahlah jangan mempersulit, berilah kabar gembira jangan menakut-nakuti"; (3) sikap keras yang tidak pada tempatnya. Secara tegas, ia mengecam orang beragama yang memilih jalan kekerasan, mengikuti pendapat yang paling menyulitkan, menghindari kelonggaran dan kemudahan; (4) keras dan kasar dalam bergaul; (5) berburuk sangka pada orang lain.

Prinsip pokok kelompok radikal adalah menuduh. Oleh sebab itu, ia menyesalkan kelompok radikal yang menuduh da'i yang berbicara sesuai dengan cita rasa dan selera zaman sebagai orang yang telah terbaratkan; (6) mengkafirkan orang lain dan mencapai puncaknya ketika mereka menghalalkan darah dan kehormatan orang lain untuk ditumpahkan. Nabi menggambarkan orang seperti ini sebagai orang yang telah membaca al-Quran namun otak mereka tidak memikirkannya.

3. Organisasi Islam Radikal Indonesia

Berdasarkan pengertian dan konsep radikalisme di atas, terdapat organisasi Islam yang dapat mengarah kepada tindakan-tindakan yang tidak diharapkan. Meskipun dilatarbelakangi dengan lillahi kalimatillah (menegakkan kalimat Allah) dan niat untuk memajukan dan menegakkan Islam di muka bumi ini. Karena dalam pandangan mereka, apabila telah memiliki niat baik tersebut, pasti akan banyak rintangan dan hambatan yang dihadapi. Karena itu, mereka siap menghadapi pertentangan dan permusuhan dari siapapun dan kelompok apapun yang merintanginya dakwah mereka. Sehingga konflik di antara masyarakat di negeri ini tidak kunjung padam.

Pola pemahaman keagamaan yang berkembang di Indonesia memiliki basis ideologi, pemikiran dan strategi gerakan yang berbeda dari pola pemahaman keagamaan yang dikembangkan oleh ormas-ormas Islam yang ada sebelumnya. Mereka berhaluan *puritan*, memiliki karakter yang lebih militan, radikal, konservatif dan eksklusif. Sikap-sikap eksklusif, tidak Islami, dan bahkan arogan dari para pengusung atau pengikut paham-paham tersebut, telah semakin meresahkan, mengancam sendi-sendi *ukhuwah*, dan menggerogoti persatuan umat. Tidak hanya sampai disitu, sikap merasa diri paling berhak dalam menafsirkan Al-Qur'an atau hadis, merasa dialah yang paling benar dan yang lain salah dan sesat, mengganggu pemahaman

umat Islam tentang agama selainnya keliru, pandangan bahwa kebenaran itu milik Allah dan hanya dia yang berhak memvonis sesat, dan sebagainya semua dalih itu telah menyebabkan perbedaan pendapat yang memicu kepada perpecahan di kalangan umat Islam.

Dalam level organisasi, kelompok radikal dapat dilihat dari tiga pola, yaitu: (a) cara penyampaian dan pemingkaian gagasan kepada masyarakat (*framing*); (b) mobilisasi sumber gerakan (*mobilizing*); (c) dan juga taktik dan strategi (*making decision*). *Framing*, dikaji melalui doktrin puritan radikal sebagai *master frame* beserta gagasan-gagasan pendukung lainnya. *Framing* di dalam literatur biasanya dilihat sebagai sebuah aktivitas verbal. Dengan kata lain, analisis *frame* adalah analisis tentang teks dan pidato-pidato (*speeches*). Namun, komunikasi dan *framing* juga memiliki dimensi simbolis. Pandangan ini secara khusus penting di dalam perspektif global, sebab simbol berjalan melampaui batas-batas ruang sosial, kultural dan politik. Simbol juga memadatkan makna dan identitas dan tidak otomatis tergantung pada penjelasan verbal. Simbol-simbol global tentang ketidakadilan merupakan bagian dari *master frame* Islam radikal dengan fokus pada konflik yang tidak dapat didamaikan antara Barat dan dunia Islam. Kerangka pemikiran dalam *master frame* ini menekankan pada eksistensi komunitas Muslim global (*ummah*) yang memiliki tanggung jawab untuk melawan ketidakadilan terhadap umat Islam dimanapun (Setara Institute, h. 16).

Di antara gerakan-gerakan radikal atau setengah radikal yang berbaju Islam di Indonesia. Sebagaimana partner mereka di bagian dunia lain, gerakan-gerakan ini juga anti-demokrasi dan anti-pluralisme, dan sampai batas-batas yang jauh juga anti-nasionalisme. Secara ideologis, mereka ini jelas mendapat inspirasi dan pengaruh dari gerakan Islamis dan Salafi yang semula berpusat di beberapa negara-negara Arab. Seperti Hizbut Tahrir Indonesia yang memiliki tuntutan pelaksanaan Syari'ah Islam dalam kehidupan bernegara.

Di Indonesia juga berkembang Majelis Mujahidin Indonesia dan kelompok-kelompok radikal lainnya, kemungkinan perbedaan dan bahkan konflik di antara berbagai fraksi di kalangan mereka, menurut Yusuf al-Qardhawi termasuk dalam kategori mazhab Zhahiriyyah baru dengan enam ciri yang menonjol: pemahaman dan penafsiran yang literal, keras, dan menyulitkan, sombong terhadap pendapat mereka, tidak menerima perbedaan pendapat, mengkafirkan orang yang berbeda pendapat dengan mereka, dan tidak peduli terhadap fitnah. Kita turunkan salah satu ciri saja, yaitu mudah mengkafirkan orang yang berbeda pendapat. Al-Qardhawi menulis: Orang-orang literal tersebut tidak cukup hanya dengan mengingkari orang-orang yang berbeda pendapat dengan mereka, tetapi melakukan hal-hal lebih besar dari itu, yaitu dengan berburuk sangka, membid'ahkan, memfasikkan, dan sampai mengkafirkan mereka.

Dasar bagi orang yang berbeda pendapat dengan mereka adalah "tuduhan." Padahal, menurut hukum manusia, dasar orang yang dituduh adalah, "benar" (tidak bersalah). Inilah hal yang ditegaskan oleh Syari'ah Islam. Namun dasar bagi mereka adalah, tertuduh (bersalah) hingga terbukti kebenarannya. Dan kebenarannya ada di tangan mereka, bukan di tangan orang lain. Untuk membantah para pemikir Muslim yang tidak sepakat dengan mereka, mereka telah menulis banyak buku besar dan dicetak dengan cetakan *luks*. Mereka meluaskan bantahan tersebut dengan membid'ahkan, memfasikkan. Jika sikap mudah mengkafirkan orang-orang yang berlainan pendirian ini menyebar, maka sudah bisa dibayangkan bahwa yang akan terjadi adalah makin buyarnya suasana persaudaraan Muslim yang memang sudah lama rusak. Dengan kata lain, "Mereka memonopoli kebenaran, sebuah keangkuhan teologis yang muaranya satu: menghancurkan peradaban dengan memakai lensa kaca mata

kuda!"Syafii Maarif : politik Identitas dan masa depan pluralisme kita (2012).

Di antara organisasi Islam yang muncul tersebut, yang paling banyak mendapatkan sorotan dari masyarakat khususnya yang berkaitan dengan visi dan misi yang mereka bawa antara lain; Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), dan Negara Islam Indonesia (NII), JIL, Jamaah Salafi dan ISIS dan lain-lain.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam perkembangannya, terdapat dua bentuk berbeda dari gerakan Islam radikal di Indonesia, yaitu: (a) gerakan Islam radikal yang masih dalam bentuk seperti yang berkembang di daerah asalnya. Beberapa di antaranya adalah, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Tarbiyah-Ikhwanul Muslimin, Gerakan Salafi-Wahabi dan ISIS; (b) gerakan Islam radikal yang sudah bermetamorfosis, meskipun secara ideologis sangat berkesesuaian dengan gerakan Islam radikal transnasional di Timur Tengah. Beberapa contoh dapat disebut, misalnya, Front Pembela Islam (FPI), Lasykar Jihad (LJ), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI).

Jargon-jargon yang sering mereka gunakan adalah membela Islam, penerapan syari'ah, dan penegakan khilafah islamiyah, bagi umat Islam yang tidak mempunyai pemahaman mendalam tentang ajaran agamanya bisa menjadi ungkapan yang sangaat ampuh dan mempesona. Pada saat yang sama, para penolak jargon-jargon tersebut bisa dengan mudah dituduh menolak syari'ah, bahkan menolak Islam. Tuduhan semacam ini lazim dilontarkan oleh orang-orang yang merasa paling tahu tentang Islam, mereka merasa paling benar dalam memahami Islam. Sikap arogan ini membuat mereka lebih suka menyalahkan siapa pun yang tidak sama dengan dirinya dan tidak mampu melakukan introspeksi. Sikap demikian lahir karena tidak adanya sikap berislam secara sejati, sikap berserah diri seutuhnya kepada Allah swt. Dan rendah hati sepenuhnya

sebagaimana pesan utama Islam sendiri. Dangkalnya pemahaman ini menjelma menjadi kesalahkaprahan akut, mereka tidak mampu membedakan antara sumber ajaran Islam dari pemahaman atas sumber ajaran tersebut. Mereka juga tidak mampu mengurai kompleksitas relasi antara ajaran agama dengan realitas sosial, budaya, ekonomi, maupun politik. Dalam hal ini, agama yang mengandung pesan-pesan luhur dan sangat menekankan akhlak mulia, kemudian direduksi menjadi seperangkat aksi kekerasan yang tidak berperasaan. (Abdurrahman Wahid dalam *Ilusi Negara Islam*, 2009:90).

Radikalisme dapat mewujud ke dalam dua varian atau *trajektori* yakni: *radikalisme demokratis inklusif* dan *radikalisme intoleran-eksklusif* (ibid: 108). Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan penggunaan jenis penalaran dalam menata ko-eksistensi mereka dalam kehidupan kolektif; radikalisme demokratis inklusif menggunakan *logic of inclusion*, sedang radikalisme intoleran eksklusif menggunakan *logic of exclusion*. Radikalisme demokratis-inklusif menggunakan logika inklusi dan partisipatoris melalui aksi kolektif untuk membuat perubahan atau bernegosiasi secara politik dengan kekuatan-kekuatan dominan dalam masyarakat dan negara. Sementara radikalisme intoleran-eksklusif menggunakan logika penarikan diri dari ko-eksistensi pada saat menghadapi dislokasi atau krisis.

Namun demikian, pilihan pemisahan ini tidak semata-mata didorong oleh ideologi yang eksklusif, melainkan lantaran hasil relatif dari proses-proses negosiasi yang tidak memungkinkan identitas dan kepentingan mereka terakomodasi dalam norma umum masyarakat atau konstitusi dalam kehidupan bernegara. Semakin kecil kemungkinan proses negosiasi menghasilkan akomodasi identitas dan kepentingan mereka dalam norma umum atau konstitusi maka semakin besar kemungkinan terjadinya penggunaan kekerasan

sebagai artikulasi dan sarana mencapai tujuan moral dan politik mereka.

Abdurrahman Wahid dalam *Ilusi Negara Islam* (2009) mengungkapkan organisasi yang termaksud dalam kategori radikalisme yaitu pada kelompok transnasional dan lokal yang tumbuh dan berkembang dari pribumi. Berikut ini akan diuraikan sebagai berikut:

a. Kelompok Radikal Islam Transnasional

Disebut gerakan transnasional karena asal usul gerakannya berasal dari luar Indonesia dan hingga kini kelompok-kelompok ini masih punya hubungan dengan kelompok yang ada di luar negeri. Kelompok ini diwakili Salafi dan HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) yang akan diuraikan berikut ini:

1) Jamaah Salafi-Wahabi

Gerakan salafi dipengaruhi oleh gerakan Wahabi di Saudi Arabia. Muhammad Bin Abdul Wahab adalah pendiri Wahabi yang berusaha mengubah wajah Islam sebelumnya agar sesuai dengan yang dipraktekkan oleh Nabi. Dalam pandangannya, Islam saat itu telah dipenuhi oleh bid'ah dan khurafat. Karena itu, dalam pandangannya hal-hal ini tidak mempunyai rujukan (dari Nabi) secara jelas, dan setiap yang tidak punya rujukan adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat dan setiap yang sesat neraka tempatnya. Kalangan Salafi bisa dikatakan sebagai kelompok fundamentalis radikal setidaknya dalam pemikiran. Hal ini berkaitan dengan keinginan mereka untuk menerapkan dasar-dasar Islam dalam kehidupan masyarakat. Disamping itu, mereka juga berkeinginan untuk mengganti Islam yang sementara ini dipraktekkan oleh masyarakat dengan Islam yang mereka anut dan dianggap paling benar. Seperti dikemukakan diatas, mayoritas umat Islam Indonesia

dalam pandangan salafi telah terlumuri oleh praktek Islam yang melenceng. Bid'ah karenanya terpraktekkan dimana-mana. Kelompok masyarakat yang mempraktekkan bid'ah ini tidak terbatas pada kalangan NU (tradisionalis). Karena memelihara tradisi yang ada, tetapi juga kalangan lain yang biasa disebut modernis, seperti Muhammadiyah. Disini kelihatan bahwa salafi berusaha melakukan purifikasi, karena Islam yang ada dianggap terkotori oleh pengaruh atau praktek dan pemikiran yang tidak berasal dari sahabat Nabi. Karena itulah, mereka dalam hal ini selalu menolak pemikiran-pemikiran baru yang datang dari ulama atau intelektual Islam lain selain kelompok mereka. Jadi radikalnya itu terbatas pada kegigihannya untuk mengubah situasi atau praktek Islami yang ada yang dilakukan oleh mayoritas Muslim Indonesia dan mengembalikannya kedalam situasi atau praktek para sahabat Nabi. Radikalnya mereka tidak menyentuh dimensi pembaharuan atau reformasi baik dalam pemikiran atau lainnya.

Meskipun demikian, radikalisme salafi hanya terbatas pada sikap atau pemikiran dan tidak tertuangkan dalam tindakan. Dalam tindakan, mereka sepertinya membiarkan masalah-masalah yang sejauh ini mereka anggap bertentangan dengan Islam. Mereka terutama memberikan perhatian besar terhadap apa yang mereka sebut pelurusan akidah. Mereka, misalnya, berbeda pendapat dengan apa yang dilakukan oleh kelompok Islam lain yang menghancurkan beberapa tempat yang dianggap maksiat. Dalih yang digunakan adalah bahwa penanganan masalah seperti itu harus dilakukan oleh mereka yang punya power. Makanya hal itu sebenarnya urusan pemerintah. Apa yang perlu dilakukan oleh orang Islam adalah bersikap, setidaknya negatif terhadap maksiat tadi.

Mereka mengakui bahwa penerapan Islam itu memang meliputi banyak aspek dalam kehidupan manusia. Tetapi keterbatasan diri telah membatasi langkah manusia mengenai mana yang bisa

dilakukan dan mana yang tidak. Perintah Qur'an untuk melarang atau mengubah kelakuan atau praktek maksiat tidak bisa dilakukan secara individual. Perubahan dibidang ini, kata mereka, harus menggunakan power yang memang jauh dari tangan mereka. Seorang Islam akan terbebas dari perintah itu ketika dia tidak mempunyai kekuatan dan juga menyikapi masalah kemungkaran itu sebagai masalah yang jelek yang dilarang oleh agama. Sikap di atas nampaknya menjadi karakter penganut Salafi yang kelihatannya tidak melibatkan diri dalam tindakan-tindakan yang provokatif yang dapat menimbulkan masalah dalam masyarakat. Ini artinya bahwa lepas dari radikalisme pemikiran yang dianut mereka, kalangan Salafi dalam banyak hal hanya membatasi diri pada lapangan dakwah saja. Radikalisme yang mereka anut terbatas pada radikalisme dalam pemikiran, dan itupun juga lebih difokuskan pada mengubah praktek keislaman yang selama ini dianut oleh masyarakat Indonesia. Karena itulah, mereka agak mengecam apa yang dilakukan oleh kelompok Islam lain yang melakukan perusakan terhadap tempat maksiat. Menurut mereka, kekerasan sendiri bukan saja tidak sesuai dengan Islam tetapi juga tidak akan menyelesaikan masalah yang ada, untuk tidak mengatakan memperkeruhnya.

Menurut Abdurrahamaan Wahid dalam *Ilusi Negara Islam* bahwa pemahaman ekstrem, kaku dan keras Ibn 'Abdul Wahab, yang terus dipelihara dan diperjuangkan para pengikutnya hingga saat ini, adalah hasil dari pembacaan harfiah atas sumber-sumber ajaran Islam. Ini pula yang telah menyebabkan dia menolak rasionalisme, tradisi, dan beragam khazanah intelektual Islam yang sangat kaya. (2009:63). Literasi Wahabi telah membuat teks-teks suci menjadi corpus tertutup terhadap cara pembacaan sel lainnya. Artinya pemahaman ini telah memutus teks-teks suci dari konteks masa risalah maupun konteks masa pembacaan. Teks-teks suci, dan akhirnya Islam sendiri, tidak lagi komunikatif dengan konteks para

penganutnya. Islam yang semula sangat apresiatif dan penuh perasaan dalam merespon permasalahan umat, di tangan Ibn 'Abdul Wahab berubah menjadi tidak peduli, keras dan tak berperasaan.

Lebih lanjut, Abdurrahman Wahid (2009:63-64) bahwa dari perspektif Ibn 'Abdul Wahab, tujuan utama literalisme ini mungkin untuk menghindari kompleksitas pemahaman dan praktik hukum, teologi dan tasawuf umat Islam yang telah tumbuh sejak berakhirnya masa risalah. Namun membayangkan bahwa setiap individu atau masyarakat akan mengamalkan Islam sebagaimana makna harfiah kitab suci dan hadis, tanpa pengaruh tradisi maupun budaya setempat, tentu sangat tidak realistis dan merupakan mimpi belaka. Literalisme tertutup, dalam kebanyakan kasusnya, lebih disebabkan ketidakmampuan memahami kompleksitas realitas sosial dalam kaitannya dengan kompleksitas pesan-pesan luhur ajaran agama. akibatnya, semua direduksi sesuai dengan daya tampung atau daya paham si pembaca. Dengan kata lain, keluhuran dan keluasan pesan agama kandas di keterbatasan daya pikir pembaca yang kaku.

2) Hizbut Tahrir

Hizbut Tahrir adalah sebuah partai politik Islam yang didirikan oleh Taqiyuddin An-Nabhany di Al-Quds, Palestina pada tahun 1952. Kegiatan utama partai ini adalah politik dan berideologi Islam. Hizbut Tahrir bercita-cita membangun tatanan masyarakat dan sistem politik berdasarkan akidah Islam. Islam harus menjadi tata aturan kemasyarakatan dan menjadi dasar konstitusi dan undang-undang. Hizbut Tahrir juga berniat membangun kembali Daulah Khilafah Islamiyah di seluruh dunia melalui ini Hizbut Tahrir berkeyakinan bahwa hukum Islam dapat di berlakukan.

Hizbut Tahrir resmi melakukan aktivitasnya di Indonesia sejak diselenggarakannya konferensi internasional di Istora Senayan. Para tokoh HTI banyak bertempat tinggal di Bogor dan banyak mendapat

sambutan dari civitas akademika IPB, hingga salah satu pemimpinya Muhammad al-Khattath adalah alumni IPB. Kelompok ini menganut paham integrasi antara agama dan Negara. Oleh karena itu, HTI mengusung ide perlunya mendirikan kembali *khilafah islamiyyah*. Mereka berpendapat bahwa dengan sistem kekhalifahan maka dapat dihindari yang namanya hegemoni dan dominasi satu negara terhadap negara lain baik dalam bentuk kolonialisme fisik maupun non-fisik. Aspirasi ini begitu kuat karena faktor kontekstual di mana sering satu negara begitu otoriter mengatur negara lain dengan segala justifikasinya. Kemudian kehidupan umat Islam saat ini yang sangat tidak Islami sebagai akibat sekulerisasi.

HTI memiliki misi untuk menjaga kontinuitas ajaran Islam, yaitu: (1) melanjutkan kehidupan islamiy; (2) Membangun jaringan yang luas; (3) Pendidikan luas kepada masyarakat supaya dapat berfikir dan bertindak islami. Kelompok ini tidak mengklaim dirinya yang paling benar, namun mereka memiliki prinsip dalam menghadapi kelompok yang berbeda yaitu dengan sikap saling nasihat-menasihati (*taushiyah*), mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Mereka juga berpendapat kalau perbedaan yang ada tidak perlu membawa perpecahan. HTI banyak beraksi dalam perang pemikiran sebagaimana sikap yang mereka usung yaitu tausiah. Seperti dengan Jaringan Islam Liberal (JIL), mereka tidak mengkafirkan kelompok ini, namun dianggap sudah tercemar oleh gaya pemikiran sekular dan liberal dan tidak membawa suara Islam. Jadi dalam anggapan HTI, JIL ini tidak murtad atau keluar dari Islam, status hukum mereka tetap Islam hanya pemikirannya menyimpang.

Gerakan yang dilakukan partai ini meliputi pendidikan dan pembinaan umat dengan wawasan Islam, melancarkan pertarungan pemikiran, dan aktivitas politik. Dalam rangka menjalankan agenda politiknya Hizbut Tahrir menempatkan diri sebagai kekuatan oposisi yang menentang para penguasa yang tidak menerapkan sistem

politik Islam, syariah dan hukum-hukum Islam menurut konsepsi mereka, mengkhianati amanat rakyat dan melakukan penindasan. Pemikiran inilah yang mendasari pilihan strategi perjuangan mereka dengan tidak melibatkan diri dalam proses-proses politik resmi.

Dalam kampanyenya, HTI menekankan bahwa syariat Islam-lah yang bisa membawa kesejahteraan bagi umat Islam, bukan sistem sosialisme atau kapitalisme. Lain lagi kelompok radikal jihadi yang menganggap jalan untuk mencapai penegakan syariat Islam hanya lewat dakwah dan jihad. Dakwah memberikan kesadaran kepada umat Islam pentingnya syariat Islam sehingga umat mendukung mereka. Setelah mendapat dukungan masyarakat mereka melakukan jihad bersenjata melawan pemerintah Indonesia yang dianggap kafir. Sementara itu kelompok radikal lokal banyak memakai strategi gerakan *amar ma'ruf nahi munkar* alias gerakan anti maksiat. Mereka menganggap bahwa aksi ini sebagai upaya untuk menegakan syariat Islam di tingkat akar rumput.

Abdurrahman Wahid dalam *Ilusi Negara Islam* (2009:86) mengungkapkan bahwa terdapat tiga tahap perjuangan Hizbut Tahrir dalam usaha menegakkan Khilafah internasional. Pertama, membangun partai (hizb). Pada tahap ini para agen Hizbut Tahrir melakukan rekrutmen anggota baru, mereka membinanya dalam kurun waktu yang bisa berlangsung selama enam bulan hingga tiga tahun tergantung progres masing-masing mereka. Kedua, berinteraksi dengan masyarakat. Dalam tahap ini, anggota yang telah lulus dari tahap pertama membentuk sel-sel baru dan mulai aktif mengaitkan kasus-kasus lokal dengan masalah-masalah global dan membakar massa untuk membangun ketegangan sosial antara rakyat dan pemerintah, untuk kemudian menawarkan jalan Islam sebagai alternatif keluar dari ketegangan yang telah dibangunnya. Target mereka adalah untuk menyusup kedalam pemerintahan dan militer, agar kelak melampangkan jalan dalam merebut kekuasaan. Ketiga,

merebut kekuasaan. Tahap terakhir ini akan dilancarkan setelah mereka yakin akan menang dan berhasil merebut kekuasaan, yang antara lain akan ditandai dengan tingkat keberhasilan mereka menyusup ke dalam pemerintahan dan militer. Setelah berkuasa, mereka siap memaksakan penafsiran tentang Islam ala Hizbut Tahrir dalam semua bidang kehidupan umat manusia.

3) Ikhwanul Muslimin

Ikhwanul Muslimini didirikan oleh Hasan al-Banna di Mesir pada tahun 1928. Diantara tujuan berdirinya adalah untuk melawan penjajah, mengatasi kemunduran peradaban Islam, dan membawa umat Islam kembali kepada ajaran Islam yang murni. Pada awalnya, ikhwanul muslimin sebuah tarekat namun dengan tujuan politik bukan spiritual sebagaimana layaknya tarekat tasawuf. Setelah berakhirnya penjajahan Inggris tidak menjadi peluang emas bagi ikhwanul muslimin untuk mewujudkan cita-cita politiknya membuat Ikhwanul Muslimin menjadi keras dan fanatik. Hal ini mempertajam konflik dengan pemerintah ketika itu terbunuhlah Perdana Menteri Mesir Mahmud al-Nukrashi Pasa dan pendiri Ikhwanul Muslimin, Hasan al-Banna. (2011:80).

Sayid Qutb, yang menjadi ideologi dan salah seorang pemimpin Ikhwanul Muslimin setelah al-Banna dibunuh, merasa penguasa ketika itu telah berbuat kejam dan aniaya. Kekecewaan terhadap penguasa membuat Qutb dan pemimpin yang lain bersikap lebih agresif terhadap lawan-lawan politiknya. Ditangkap dan disiksa di penjara, Qutb menyerang penguasa Mesir melalui tulisan-tulisannya, dan menuduh siapapun yang tidak mengikuti ideologi kerasnya sebagai murtad, kafir dan halal darahnya.

Dalam tulisan-tulisan Qutb terlihat bahwa para pengikut ideologinya harus memperjuangkan kekuasaan proletariat, supremasi ummah/syari'ah, serta terwujudnya negara Islam dan

akhirnya khilafah yang sentralistik melalui revolutionary-vanguard, yaitu para pemimpin garis keras pengikut ideologi Qutb. Gagasan-gagasan Qutb ini mengilhami para pembacanya dari kalangan garis keras melakukan aksi-aksi kekerasan dan mengancam keselamatan jiwa para pejabat negara dan rakyat serta mengacaukan situasi politik tidak hanya di Mesir ketika itu, tetapi di seluruh dunia hingga dewasa ini. (2009:81-82).

b. Kelompok Radikal Islam Lokal

Kelompok-kelompok radikal lokal ini asli *made in* Indonesia. Dibentuk oleh aktivis Islam lokal dan tak punya hubungan dengan berbagai gerakan Islam internasional.

1) Front Pembela Islam (FPI)

FPI didirikan tepat pada perayaan kemerdekaan RI ke-53, 17-8-1998. Bertempat di Pesantren al-Umm Ciputat Jakarta Selatan pimpinan KH. Misbahul Anam. Lahir bersamaan dengan naiknya Habibie menjadi presiden pasca pengunduran Soeharto. Karena Habibie dianggap bagian dari Orde Baru, maka mahasiswa berdemonstrasi menuntut penggantian kepemimpinan yang baru, terutama saat Sidang Istimewa MPR RI pertanggung jawaban laporan presiden. FPI lahir di Jakarta sebagai gerakan penekanan yang bertujuan memberantas kemaksiatan seperti, pelacuran, rumah hiburan, pornoaksi dan pornografi. Dipimpin oleh Habib Rizieq Syihab, FPI menjadi perhatian publik karena tak segan-segan melakukan kekerasan dalam aksi-aksinya. Meskipun FPI menolak Megawati atas alasan gender, namun FPI tidak larut dalam isu-isu politik seperti itu. Setelah Megawati terpilih 2001, FPI justru sibuk dengan penggalangan aksi-aksi penertiban kafe-kafe dan lokalisasi maksiat. Pada wilayah penerapan syariat Islam, FPI turut serta didalamnya, namun memilih isu dan penetapan skala prioritas

tersendiri yang berbeda dengan konsern kelompok lainnya seperti Laskar Jihad, MMI dan lain-lain.

Dasar berdirinya FPI sendiri menurut Habieb Rizieq lebih dilatari oleh keprihatinan terhadap semakin maraknya tindak kemaksiatan dan pornografi. Sementara aparat keamanan yang semestinya memberantas berbagai macam kemaksiatan tersebut seperti tidak berdaya dan bahkan membiarkan begitu saja. Kenyataan ini tentu saja bertolak belakang dengan nilai-nilai yang dipegang FPI, yang tujuan pendiriannya, sebagaimana yang dinyatakan dalam Anggaran Dasarnya, adalah untuk "menegakkan amar ma'ruf nahi munkar di segala aspek kehidupan".

Latar belakang seperti itu menunjukkan bahwa pada mulanya FPI bukanlah sebuah perkumpulan yang bersifat politik. Namun demikian dalam perkembangan lebih lanjut, isu-isu yang diangkat oleh FPI semakin meluas tidak lagi sekedar melakukan penyisiran dan perusakan lokasi-lokasi maksiat, tetapi FPI juga sangat untensif dalam mengkritisi berbagai persoalan politik yang muncul.

Tujuan perjuangan FPI sebagai organisasi Islam yang berasaskan akidah ahlus sunnah wal jamaah (berorientasi *manhaj salafi*) adalah untuk *amar ma'ruf nahi munkar*. Penyebutan "pembela Islam" disini dimaksudkan bahwa yang dibela bukanlah umat Islamnya saja, tapi lebih kepada nilai-nilai keislaman. Motto perjuangan FPI adalah "hidup Mulia atau Mati Syahid". Bagi FPI, NKRI sudah final, yang dipersoalkan adalah hukum positif bagi umat Islam harus disesuaikan dengan syariat islam berdasarkan al-Qur'an dan Hadis.

Pada dekade terakhir ini yang paling dominan turun ke jalan dalam melakukan *amar ma'ruf nahi munkar* adalah FPI. Gesekan-gesekan dengan ahmadiyah, pornografi dan porno aksi, pemaham menyimpang (Lia Eden, Mushaddiq), artis-artis yang dianggap melecehkan agama selalu mendapat reaksi keras dari kelompok ini. Setelah aparat keamanan Indonesia bertindak tegas atas aktivitas FPI

yang merusak bar, diskotik terutama di bulan ramadhan, para elit pimpinan FPI membekukan sementara FPI, terutama setelah beberapa pimpinannya ditangkap termasuk Habib Rizieq karena tuduhan pengrusakan.

2) Laskar Jihad Ahlussunah wal Jama'ah

Laskar jihad merupakan bagian dari gerakan salafi. Akar kesejarahan dari gerakan salafi ini dapat dirunut asal-muasalnya dalam gerakan wahabi atau wahabiah yang muncul pertama kali pada akhir abad ke-19 di Saudi Arabia. Dinamakan sebagai Wahabiah sebab gerakan ini bersumber dari seorang ulama "pembaru" Muhammad bin Abdul Wahab. Pada awal perkembangannya, ide-ide dan perilaku yang dianut oleh kelompok-kelompok Islam yang lain, termasuk kalangan umat Islam tradisional di Indonesia. Hal ini tidak lain disebabkan pandangan Wahabi yang terlalu ketat mengenai konsep katauhidan. Ide dan gerakan yang dilakukan semuanya dalam kerangka pemurnian tauhid dari segala macam syirik dan bid'ah, dengan cara menghancurkan tempat-tempat dan bangunan kuburan yang dianggap keramat oleh sebagian umat Islam.

Ajaran ini masuk ke Indonesia melalui para sarjana alumni Timur Tengah yaitu Arab Saudi yang ber-Imamkan Ja'far Umar Thalib dan Kuwait dengan pemimpinya Abu Nida, Abu Hakim, Yusuf Baisa, dan Yazid Jawash. Dua negara ini merupakan basis utama gerakan salafi seluruh dunia.

3) Majelis Mujahidin Indonesia

Dideklarasikan pada bulan Agustus 2000 di Yogyakarta dihadiri oleh puluhan ribu umat Islam dalam dan luar negeri dan terpilih sebagai Amir saat itu Abu Bakar Ba'asyir. Ada kaitan antara Abu Bakar Ba'asyir dengan gerakan Komando Jihad yang muncul pada

awal 70-an atau 80-an. Ia bersama Abdullah Sungkar mendirikan pesantren Ngruki sebagai central perjuangan Komando Jihad saat itu.

Agenda utama MMI adalah menegakkan syariat Islam untuk kemudian mendirikan negara Islam. MMI menganggap dirinya sebagai kelanjutan dari DI/TII. Tidak seperti FPI dan Laskar Jihad yang berjuang secara keras, MMI memilih jalur sistem perjuangan yang lebih politis. Mereka melakukan advokasi penerapan syariat Islam melalui tulisan-tulisan, lobi-lobi politik kepada partai-partai Islam, seminar-seminar di kampus maupun mesjid-mesjid. MMI menggagas 3 formulasi dalam rancangan mendirikan negara Islam di Indonesia, pertama, kebersamaan dalam misi (*tansiq al-fardiy*). Kedua, kebersamaan dalam program penegakan syariat (*tansiq al-'amaliy*). Dan ketiga, kebersamaan dalam satu institusi penegakan syariat Islam (*tansiq al-niz}amiy*).

Belakangan MMI ramai dibicarakan ketika tokohnya Abu bakar Ba'asyir ditangkap oleh pihak keamanan karena dituduh bersekongkol akan membunuh presiden Megawati maupun pengeboman di sejumlah tempat umum seperti tempat ibadah, pusat perbelanjaan, maupun hotel. MMI juga dianggap sebagai perpanjangan dari Jama'ah Islamiyah Asia Tenggara yang ingin menghancurkan fasilitas-fasilitas milik Barat dan Amerika di Asia Tenggara.

Fundamentalisme MMI telah melahirkan kader di luar kendali. Karena pemahamannya kebablasan dan disalahartikan oleh beberapa pengikutnya sehingga di luar kontrol mereka menjadi teroris. Organisasi ini dilatarbelakangi oleh semangat untuk mendzahirkan syariah ilahi dan dilatari oleh kesadaran akan pentingnya menyelaraskan langkah perjuangan untuk menuntaskan persoalan krisis dan krusial keumatan maupun kemanusiaan, yaitu tegaknya syariah Islam.

4) Negara Islam Indonesia (NII)/Darul Islam

Pemikiran dan ideology gerakan Islam radikal dalam sejarah perjalanan Indonesia, mulai dari gerakan Darul Islam (DI) hingga Jamaah islamiah (JI), memegang teguh ketiga doktrin di atas. Dalam teks proklamasi DI misalnya dengan jelas disebutkan kewajiban umat untuk membentuk sebuah kekuasaan Islam karena hanya model kekuasaan itulah yang “diridhoi” Allah. DI juga memperkenalkan konsep hijrah, yang berisikan seruan kepada warga Republik Indonesia RI –negara yang dianggapnya kufur- agar berpindah ke Negara Islam bentukan Kartosoewirjo. Tindakan pembunuhan dan serangan DI di daerah muslim yang tidak mendukung tujuan politiknya, juga didasarkan atas keyakinan bahwa meski mereka muslim tetapi dapat dihakimi sebagai kufur karena tidak mendukung jihad pendirian Negara Islam. Pembunuhan terhadap muslim yang bukan pendukung NII karenanya juga dijustifikasi sebagai bagian perang sabil. Gagasan tentang jihad sendiri telah ditulis Kartosuwirjo pada 1930, yang dilanjutkan kemudian dengan melahirkan konsep hijrah, dari “Makkah-Indonesia” menuju “Madinah-Indonesia”, pada 1940 (Formichi, 2012). Baru kemudian, seiring dengan konfrontasi yang makin keras antara gerakan DI dan pemerintah Indonesia pada 1950-an, konsep ini ditafsirkan dan diterapkan dalam bentuknya yang paling radikal.

4. Deradikalisasi dan Rekonstruksi Islam

Deradikalisasi Islam yang dikehendaki adalah kedamaian dalam melihat wajah islam sebagai multi wajah sebagaimana yang ditawarkan oleh Wahid (2006: viii) bahwa masyarakat pluralitas yang diutamakan dalam melihat Islam: “Islamku, Islam Anda, Islam Kita”. Tak ada satu Islam, Islam adalah multi wajah, wajah manusiawi. Pluralitas dalam melihat Islam dan kehidupan, dengan bersandar pada etika dan spiritualitas. Termasuk untuk mengelola dunia yang

terus bergerak ke arah globalisasi ini: untuk perdamaian abadi dan saling menghormati antar bangsa dan antar manusia.

Deradikalisasi Islam harus dibangun dengan prinsip-prinsip Islam sebagaimana diungkap oleh Rahimi (2004:13) bahwa Islam datang untuk membangun masyarakat yang adil, beradab, damai dan toleran. Setidaknya ada tiga prinsip dasar yang menjadi tujuan utama ajaran Islam dalam membangun masyarakat, yaitu:

a. Prinsip persamaan (*al-musawah*).

Yaitu bahwa semua manusia diciptakan sama (*all men are created equal*) dan karenanya semua berkedudukan sama di depan Tuhan (*all man are equal before God*). Hal ini sebagaimana disebutkan dalam firman Allah swt: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. (QS. Al-Hujurat:13).

b. Prinsip kebebasan (*al-hurriyah*)

Yakni Islam sangat menjunjung tinggi kebebasan baik itu kebebasan beragama maupun kebebasan sosial dan politik. Kebebasan merupakan suatu yang melekat dalam penciptaan manusia. Kebebasan itulah yang menjadikan manusia mampu menjalankan tugas sebagai khalifah di bumi dan menjadikannya berdaulat dan bermartabat. Hal ini sebagaimana firman Allah swt: “Tidak ada paksaan untuk memasuki agama. sesungguhnya sudah jelas jalan yang benar daripada jalan yang salah (QS. Al-Baqarah:256). Prinsip kebebasan beragama ini mendorong kita untuk memandang bahwa agama bukanlah tujuan, tetapi syariat (jalan) untuk mencapai tujuan, yaitu kebenaran dan kebahagiaan hidup.

c. Prinsip keadilan (*al-'adalah*)

Yakni bahwa Islam sangat menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam membangun masyarakat. Sebagaimana firman Allah swt: “Hai orang-orang beriman, hendaklah kamu menjadi orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi yang adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. (QS. Al-Maidah:8).

Ketiga prinsip di atas adalah menjadi jalan lancarnya deradikalisasi Islam yang menghendaki masyarakat toleran, adil dan sejahtera bagi seluruh masyarakat Indonesia yang menjadi tujuan berdirinya negara Indonesia. Karena itu, masyarakat Indonesia, apapun agamanya harus menunjukkan kepribadian yang moderat, adil, dan toleran.

Menurut teoretisasi Cak Nur yang dikutip Budhi Munawar dalam Ensiklopedi Nurchalis Madjid (2006:Ixxxviii) sebagai seorang Islam, *alislâm* telah menjadi sebuah nama agama (*organized religion*): “Islam” apa artinya? Menurut Cak Nur, ini berarti umat Islam harus menjadi penengah (*al-wasîth*), dan saksi (*syuhadâ'*) di antara sesama manusia. Itu sebabnya orang Islam disebut, dalam istilah sekarang, sebagai golongan “moderator” atau mediator, di mana orang Islam diharapkan berdiri tegak di tengah.

Seorang Muslim tak boleh ekstrem memihak terlalu jauh. Seorang Muslim harus selalu mempunyai dalam jiwa dan alam pikirannya melihat keadaan secara objektif, secara adil. Cak Nur selalu menunjukkan bahwa keadaan umat Islam sebagai penengah merupakan keadaan yang pernah dibuktikan dalam sejarah peradaban Islam, yang sangat menghargai minoritas non-Muslim (Yahudi-Kristiani). Sikap inklusivisme ini ada karena Al-Quran mengajarkan paham kemajemukan beragama (*religious plurality*). Sikap inklusivisme dan pluralisme inilah yang telah menjadi prinsip pada masa jaya Islam, dan telah mendasari kebijaksanaan politik

kebebasan beragama. “Meskipun tidak sepenuhnya sama dengan yang ada di zaman modern ini, prinsip-prinsip kebebasan beragama di zaman modern adalah pengembangan lebih lanjut, yang lebih konsisten dengan yang ada dalam zaman Islam klasik,”

Modernisasi berarti berpikir dan bekerja sesuai dengan hukum-hukum alam”. Maka dari itu, “modernisasi adalah suatu keharusan bahkan suatu kewajiban mutlak. Modernisasi merupakan suatu perintah dan ajaran Tuhan.” Karena itu modernisasi—seperti pernah dikatakan Sidi Gazalba, yang pada saat itu juga ikut menyumbangkan respons Islam atas gagasan modernisasi—adalah “*proses reislamisasi*” atas kaum Muslim, berdasarkan nilai-nilai pengetahuan dan perubahan sosial yang tepat. Bahkan Deliar Noer, dalam majalah *Api* (Oktober 1966, h. 10), menulis, masalah yang harus dijawab oleh kita adalah, “Bagaimana ummah kita memperlakukan, memfungsikan, dan menentukan sikap terhadap upaya-upaya modernisasi di dalam menghadapi tuntutan zaman, apabila dengan jujur kita mengklaim bahwa ajaran-ajaran kita sebenarnya selalu dalam keadaan modern.” Budhi Munawar dalam *Ensiklopedi Nurchalis Madjid* (2006:Ixx).

Islam memandang manusia secara alamiah berorientasi kepada kebenaran (*hanîf*), maka kaum Muslim harus bersikap terbuka. Ini berarti, mereka juga harus bersedia menerima dan menyerap gagasan-gagasan apa pun, tanpa menghiraukan asal-asulnya, asal saja gagasan-gagasan tersebut secara objektif menyampaikan kebenaran. Budhi Munawar (2006:Ixxii).

Dalam menerapkan syariat Islam hendaklah kita memulainya dengan yang paling pokok, bukan dari cabang. Dimulai dari esensi terdalamnya, bukan kulit luarnya. Mendahulukan keadilan di atas sanksi-sanksi, menjamin stabilitas di atas *qisas* dan menjamin rasa aman di atas teror serta menjamin perut kenyang daripada memotong tangan. (Kebenaran yang hilang, Farag Fauda, th: 45).

Bagaimanakah caranya agar upah meningkat sementara harga menurun bila syariat Islam diterapkan? Bagaimanakah caranya mengatasi soal perumahan yang sangat kompleks itu dengan penerapan syariat? Bagaimana menanggulangi utang luar negeri secara syariat? Bagaimana badan usaha milik negara akan menjadi badan usaha yang produktif, seimbang dengan tingkat investasinya, dalam kerangka penerapan syariat? (farag Fauda, 46).

Menurut Said Aqil dalam Harian Kompas bahwa Indonesia punya "warisan" radikalisme. Tak perlu banyak jabaran, kita cukup menatap hingga kini banyak "area" yang menjadi "lahan" persemaian puritanisme dan radikalisme. Semakin membesarnya kelompok radikal, semakin besar pula penolakan mereka terhadap budaya Nusantara. Seolah inilah "nasib" kita yang sampai detik ini tak pernah sepi dari munculnya kelompok radikal baik radikal "kelas pinggiran" maupun radikal "kelas eksekutif". Tak heran, ketika ada "ekspor" paham keagamaan anti budaya seperti ISIS yang terus menabur badai, maka selalu ada yang menuainya.

Saatnya kita menoleh pada moderatisme pesantren yang senantiasa disinari oleh sebuah credo "*almuhafadztu 'alal qodim al-sholih wal akhdzu bi al-jadid al-ashlah*", yaitu melestarikan tradisi lama dan mengambil hal-hal baru yang bermanfaat. Kredo ini melahirkan sikap "melek budaya" sehingga agama mampu bersanding harmonis dengan budaya lokal. Kearifan lokal yang tersebar di Nusantara menjadi "pasangan" bagi agama yang perlu dirawat dan diruwat karena di dalamnya mengandung ajaranyang adiluhung.

Di sinilah pentingnya mengembalikan anak bangsa yang terserang virus radikalisme pada akarnya, yaitu budaya bangsa. Kearifan lokal, seperti tradisi gotong royong, sikap harmoni dan toleransi adalah laksana sumur yang tak pernah kering betapapun di musim kemarau. Ia akan selalu memancarkan mata air keteduhan di tengah sengatan kegalauan.

Pendekatan keagamaan ternyata tak niscaya mampu meredam radikalisme. Kadang kala justru makin "berkobar" karena perbedaan pijakan dalil keagamaan. Masing-masing bersikukuh lantaran merasa paling benar. Walhasil, "kebajikan Nusantara" harus menjadi "obat penawar" bagi upaya deradikalisasi terhadap mereka yang galau dan radikal. Para aktor radikal harus diberi pencerahan melalui nilai-nilai budaya bangsa. Inilah keindonesiaan kita, kesadaran kita.

Jika demokrasi menjadikan otoritarianisme sebagai musuh bebuyutan, maka lawan dari moderasi adalah intoleransi dan ekstremisme. Karena itu, jalan terbaik yang harus dibangun dalam masyarakat yang plural, yaitu rekonsiliasi antara demokrasi dan moderasi, demokrasi dan multikulturalisme untuk menggempur otoritarianisme dan ekstremisme. Benazir Bhutto, (2008:18).

Marty, sebagaimana dikutip Azyumardi (1996:iv-vi), mengemukakan empat prinsip dalam memahami gejala Fundamentalisme Islam Kontemporer. Pertama, fundamentalisme adalah *oppositionalisme*, paham perlawanan terhadap segala sesuatu yang dianggap mengancam jati diri dan eksistensi Islam. Kedua, fundamentalisme merupakan penolakan terhadap hermeneutika. Teks al-Qur'an harus dipahami secara literal, sebagaimana adanya, karena nalar dipandang tidak mampu memberikan interpretasi yang tepat terhadap teks. Ketiga, fundamentalisme merupakan penolakan terhadap pluralisme dan relativisme, karena keduanya merupakan pemahamn yang keliru terhadap perkembangan historis dan sosiologis. Masyarakat harus menyesuaikan, bila perlu dengan kekerasan, perkembangannya dengan teks al-Qur'an, bukan sebaliknya, teks atau penafsirannya yang mengikuti perkembangan masyarakat.

Deradikalisasi (*soft Approach*) Kita harus mengembangkan pemikiran Islam rahmatan lil'alamin. Penyimpangan pemikiran kalangan teroris dan radikalisis dalam memaknai teks-teks Al-Qur'an

dan Al-Hadist, harus kita imbangi dengan harakah pemikiran sesuai dengan tafsir yang sejalan dengan nilai-nilai luhur ajaran Agama Islam. Ideologi dan theologi kekerasan harus kita lawan dengan ideologi dan theologi yang cinta damai. Termasuk pemikiran yang ingin mendirikan daulah Islamiyah di Negara RI dengan sistem khilafah Islamiyah, harus di luruskan dengan pemikiran Al-Wasathiyah Al-Islamiyyah wa Madzharuha fi daulati pancasila (Islam tawassuth dan manifestasinya dalam Negara pancasila, termasuk penjelasan yang termaktub dalam Pancasila dan UUD RI. Upaya ini dengan meningkatkan Kedua ; penindakan (hard approach), artinya harus ada ketegasan dari pihak pemerintah untuk menindak pada kelompok-kelompok teroris dan radikalisis.

Deradikalisasi islam sangat efektif dilakukan pada lembaga agama dan pendidikan sebagaimana diungkap oleh Yayah Khisbiyah dalam Politik Identitas (2012:89) bahwa Lembaga pendidikan memiliki peran penting dalam deradikalisasi karena secara langsung maupun tidak langsung mengajarkan dan mentransmisikan muatan budaya tertentu, berupa nilai-nilai, sikap, peran, dan pola-pola perilaku. Lembaga agama dan pendidikan seharusnya mampu menjadi guiding light yang berfungsi menuntun manusia berakhlak dan berbudi pekerti luhur, untuk misalnya mampu menghargai pandangan dan hak asasi orang lain, menghindari kekerasan, menghormati keanekaragaman, dan mematuhi hukum. Sikap toleran dan inklusif dalam menghadapi pluralitas harus dipandang sebagai salah satu indikator integral dari akhlak atau budi pekerti luhur.

Lebih lanjut bahwa langkah strategis yang harus dilakukan adalah mengubah paradigma dalam menyikapi perbedaan dan kemajemukan budaya dalam lembaga keagamaan dan sistem pendidikan. wawasan pluralisme dan multi kulturalisme yang inklusif, toleran dan non sektarian perlu dikembangkan sebagai wujud nyata motto kebangsaan Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, yang

telah lama diingkari melalui uniformitas yang dipaksakan melalui dominasi sosial-politik. Pendekatan truth-claim dogmatis dalam dakwah dan pendidikan agama, serta pendekatan sentralistik dan segregatif dalam pendidikan selama ini kurang mempertimbangkan keunikan lokal indigenous dengan nilai sosial budayanya yang kaya dan beragam, sehingga kurang memberi ruang bagi tumbuhnya apresiasi terhadap budaya-budaya yang lain (the others). Pendekatan semacam ini perlu diubah menjadi pendekatan desegrasi, toleransi dan apresiasi yang mengajarkan kepada penganut agama dan peserta didik untuk menghargai dan mengembangkan potensi dan sumber daya sosial-budaya yang ada dalam komunitasnya masing-masing. Namun pada saat yang sama mereka juga dididik untuk mampu mengenali dan mengapresiasi budaya-budaya lain yang berbeda. (2012:90).

Langkah selanjutnya adalah melakukan reorientasi visi dan misi, serta restrukturisasi penyelenggaraan pendidikan nasional, termasuk pendidikan mata pelajaran agama, yang sejalan dengan wawasan multikulturalisme. Berkaitan dengan ini, juga perlu dirumuskan kembali shared concerns dan common goals dari berbagai kelompok etnis dan agama yang hidup bersama dalam payung kebangsaan Indonesia dan payung kemanusiaan yang satu, untuk kemudian mengimplementasikannya bersama-sama (2012:90-91).

Hamka Hasan mengungkapkan bahwa perkembangan radikalisme Islam di Indonesia merupakan suatu kenyataan sosio-historis dalam Negara majemuk, tetapi juga bisa menjadi ancaman bagi masa depan pluralisme di Indonesia. Sebagai antisipasi, perlu memperluas gerakan Islam yang mendorong pluralis dan inklusif di tengah-tengah masyarakat.

Gagasan moderasi didasarkan pada dua hal, yaitu: (a) secara diskursif, gerakan moderasi umat diyakini sebagai penopang terciptanya harmonisasi sosial masyarakat di era multikultural.

Karena bagaimanapun multikulturalisme merupakan realitas historis dalam masyarakat yang mesti disikapi secara positif. Dengan demikian eksklusivitas beragama diyakini secara total sebagai kebenaran agama (*religious truth*) bisa menjadi batu sandungan ideologis untuk memecahkan problem pluralism di Indonesia. Itu sebabnya pendidikan pluralis menjadi prioritas dalam menjembatani doktrin eksklusif; (b) secara praksis, praktek kehidupan beragama masih mendikotomi klaim kebenaran dan keselamatan dalam masing-masing umat beragama mesti dikikis habis agar tidak terjadi sikap saling menyalahkan antara satu agama dengan agama lain. Problem pluralisme seringkali disebabkan fanatisme kebenaran agama yang menimbulkan sikap-sikap radikal. Karena itu upaya konkret untuk membangun toleransi antar umat beragama terus dilakukan sebagai bagian dari proses sosial yang berkelanjutan.

C. NU, Moderasi Ditengah Kecenderungan Radikalisme Islam

1. NU dan Gerakan Toleran di Indonesia

a. NU, Khittah dan Toleransi

NU adalah organisasi masa Islam yang menurut khittahnya merupakan gerakan keagamaan yang bertujuan untuk ikut membangun dan mengembangkan insan dan masyarakat yang bertaqwa kepada Allah Swt, cerdas, terampil, berakhlak mulia, tentram, adil dan sejahtera. Nahdlatul Ulama mewujudkan cita-cita dan tujuannya melalui serangkaian ikhtiyar yang didasari oleh dasar-dasar faham keagamaan yang membentuk kepribadian khas Nahdlatul Ulama (Khittah Nahdlatul Ulama, dalam Hasil-hasil Muktamar ke 33 NU, h. 97).

NU lahir pada tahun 1926 M. Pada tanggal 16 Rajab 1344 H/31 Januari 1926 M, para ulama yang berpengaruh berkumpul di Surabaya. Di antara mereka adalah KH Hasyim Asy'ari (Jombang), KHR Asnawi (Kudus), KH Wahab Chasbullah (Jombang), KH Bisri

Syansuri (Jombang), KH Nawawie bin Noerhasan (Sidogiri), KH Ma'shum (Lasem), KH Nachrowi (Malang), KH Ngoro Muntaha (Bangkalan), KH Ridwan Abdullah (Surabaya), dan KH Mas Alwi Abdul Aziz (Surabaya). Pertemuan ini menyimpulkan dua hal, yaitu: (1) mengirimkan delegasi dengan nama "Komite Hijaz" ke Kongres Dunia Islam di Mekah; (2) membentuk suatu jam'iyah bernama Nahdlatul Ulama (Kebangkitan Ulama) (Munawwir, 2013: 121-122). BAB 1 Pasal 1 Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama mengatakan, NU didirikan oleh ulama pondok pesantren di Surabaya pada tanggal 16 Rajab 1344 H/31 Januari 1926 M untuk waktu yang tidak terbatas. Berdasarkan pasal ini, ikhtiyar NU untuk mencapai cita-citanya didasarkan pada gerakan kiai, pesantren, dan para santrinya. Sehingga untuk memahami NU, khittah, dan toleransi dapat dilihat pada kehidupan para nahdliyin baik ketika sebagai santri di pesantren ataupun setelah berkiprah di masyarakat, termasuk ketika berkiprah untuk membangun dan mengembangkan insan bangsa dan negara ke arah kehidupan beragama yang adil dan damai.

NU memang lahir dan dibesarkan oleh para tokoh yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip hidup adil dan damai. Mereka dikenal sebagai para tokoh yang toleran. Ketika masuk kantor pusat PBNU (Juli, 2016), akan didapat beberapa foster dengan pemikiran-pemikiran mereka yang damai dan toleran, misalnya: (1) "Jika sulit mencari alasan untuk menghormati pemeluk agama lain, alasan bahwa dia adalah manusia ciptaan Allah SWT saja sudah cukup" (Habib Muhammad Luthfi bin Yahya); (2) "Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara Indonesia harus ditaati, harus diamalkan, harus tetap dipertahankan, dan harus dijaga kelestariannya" (KHR As'ad Syamsul Arifin); (3) "Pancasila dan Islam adalah hal yang dapat sejalan dan saling menunjang. Keduanya tidak bertentangan dan jangan dipertentangkan" (KH. Achmad Siddiq); (4) "Nilai dasar demokrasi adalah memanusiakan manusia dan mengaturnya agar

pola hubungan antar manusia itu saling menghormati perbedaan dan mampu bekerjasama, sehingga menciptakan kesejahteraan bersama” (KH. Abdul Wahab Chasbullah). Senada dengan pemikiran pada kiai NU di atas, KH Said Agil Siradj dalam wawancaranya dengan NU Online, tanggal 08 November 2008 berkata, “Ahlussunnah tidak mengenal kekerasan dan terorisme. Kita ini adalah umat yang modern, yang penuh toleran, dan moderat, agar menjadi contoh bagi umat yang lain.”

Berdasarkan Khittah Nahdlatul Ulama (dalam Hasil-hasil Muktamar ke 33 NU, h. 99), dasar-dasar pendirian keagamaan Nahdlatul Ulama adalah untuk menumbuhkan sikap kemasyarakatan yang bercirikan pada: (1) sikap tawassuth dan i'tidal. Dengan sikap ini, Nahdlatul Ulama akan selalu menjadi kelompok panutan yang bersikap dan bertindak lurus dan selalu bersifat membangun serta menghindari segala bentuk pendekatan yang bersifat tatharruf (ekstrim); (2) sikap tasamuh, yaitu sikap toleran terhadap perbedaan pandangan baik dalam masalah keagamaan, terutama hal-hal yang bersifat furu', atau menjadi masalah khilafiyah, serta dalam masalah kemasyarakatan dan kebudayaan; (3) sikap tawazun, yaitu sikap seimbang dalam berkhidmah. Menyertakan khidmah kepada Allah Swt, khidmah kepada sesama manusia serta kepada lingkungan hidupnya. Menyelaraskan kepentingan masa lalu, masa kini dan masa mendatang; (4) amar ma'ruf nahi munkar, yaitu selalu memiliki kepekaan untuk mendorong perbuatan yang baik, berguna dan bermanfaat bagi kehidupan bersama; serta menolak dan mencegah semua hal yang dapat menjerumuskan dan merendahkan nilai-nilai kehidupan. Keempat sikap ini menjadi garis dakwah keagamaan dan kemasyarakatan NU, baik dakwah melalui organisasi ataupun melalui para kiai dan para nahdliyin pada umumnya.

Merujuk kepada Khittah 1926 Butir 8 dikatakan, bahwa sebagai organisasi keagamaan, Nahdlatul Ulama merupakan bagian tak

terpisahkan dari Umat Islam Indonesia yang senantiasa berpegang teguh prinsip persaudaraan (al-ukhuwah), toleransi (al-tasamuh), kebersamaan, dan hidup berdampingan, baik dengan sesama umat Islam maupun dengan sesama warga negara. Dalam Qanun Asasi NU 1926 dikatakan, bahwa meskipun ada perbedaan, kebhinekaan, dan keberagaman dalam berbagai aspek kehidupan, hal itu tidak berakibat munculnya khusumah (permusuhan), 'adawah (perlawanan), ataupun muhasadah (saling menghasut), karena kuatnya pengikat tersebut (Mahfudh, 2012: 236, 239). KH Abdul Muchith Muzadi dalam wawancaranya dengan NU Online, tanggal 17 Agustus 2008 menegaskan, bahwa khittah NU mencakup banyak hal. Khittah NU mengatur NU seluruhnya, mencakup karakter dasar tawassuth, i'tidal, tawazun, amar makruf nahi munkar, dasar-dasar memahami al-Qur'an dan hadits dengan pendekatan bermadzhab, dasar-dasar akhlak khas NU, sikap kemasyarakatan, kebangsaan dan kegunaan NU, sikap terhadap ulama dan keulamaan, dan lainnya.

Seiring perjalanan waktu, NU sering dipandang sebagai organisasi masa Islam yang banyak dan bahkan akrab dengan politik. Walaupun NU sendiri pada akhirnya tidak melibatkan diri pada politik praktis, tetapi harus diakui banyaknya warga NU yang terlibat aktif pada politik praktis. Meskipun warga NU menjadi pemimpin tidak atas nama NU, tetapi atas nama partai politik tertentu, tetapi semangat ke-NU-annya tetap melekat pada diri mereka. Ini artinya, gerak dakwah NU tidak hanya akan terlihat pada sikap NU dan warga NU yang tidak terlibat pada politik praktis, tetapi juga akan terlihat pada sikap warga NU yang terlibat pada politik praktis.

Warga NU ada di semua partai politik, apakah Golkar, PDIP, terutama PPP dan PKB. Dibiarkannya bahkan didukungnya warga NU untuk berkiprah pada politik praktis, dapat saja dipahami sebagai strategi NU untuk berkiprah pada pembangunan bangsa dan

negara dari berbagai aspek, termasuk dari panggung politik. Dengan Khittah dan Qanun yang sudah dirumuskan organisasi, maka semangat NU untuk membumikan hidup berbangsa dan bernegara dengan prinsip persaudaraan dan saling menghargai serta tidak berdampak pada permusuhan dan saling menghasut dapat dicapai. Sehingga NU sebagai organisasi yang tidak terlibat langsung pada politik praktis dapat ditempatkan sebagai kekuatan yang dapat mendukung sekaligus mengontrol terselenggaranya kehidupan berbangsa dan bernegara dengan prinsip persaudaraan dan saling menghargai sebagaimana yang dicita-citakan oleh para pendirinya.

b. Makna Toleransi Beragama

Toleransi beragama terdiri dari dua kata, yaitu toleransi dan agama. Dalam kamus Bahasa Indonesia (2008: 1722, 17), toleransi diartikan sebagai sifat atau sikap toleran. Sedangkan toleran adalah bersifat atau bersikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dsb) yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Sedangkan agama adalah ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, tata peribiodata, dan tata akidah yang bertalian dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya dengan kepercayaan itu. Dari dua pengertian terpisah di atas, "toleransi beragama" dapat dimaknai sikap atau bersikap menghargai tata keimanan yang berbeda atau bertentangan dengan tata keimanannya sendiri. Dalam tulisannya Abu Dzarrin al-Hamidy (2008: 255-256), pengertian "toleransi beragama" dapat dipahami dalam dua arti, yaitu: (1) sikap bersedia menerima keanekaragaman dan kebebasan agama yang dianut dan kepercayaan yang dihayati oleh pihak atau golongan lain; (2) pemberian kebebasan kepada sesama manusia atau kepada sesama warga masyarakat untuk menjalankan

keyakinannya, atau mengatur hidupnya, dan menentukan nasibnya masing-masing selama tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan syarat-syarat asas terciptanya ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Dalam praktiknya, dua arti di atas dapat dirinci ke dalam beberapa bentuk toleransi, yaitu: (1) mengakui hak setiap orang, yaitu sikap untuk mengakui hak setiap orang di dalam menentukan pilihannya dalam beragama; (2) menghormati keyakinan orang lain, yaitu tidak memaksakan apa yang diyakini untuk juga diyakini oleh orang atau golongan lain; (3) setuju dalam perbedaan, yaitu perbedaan yang tidak semestinya melahirkan pertentangan apalagi permusuhan; (4) saling pengertian di antara umat beragama, yaitu perbedaan yang tidak semestinya melahirkan sikap saling membenci dan saling berebut pengaruh dalam rangka memonopoli kebenaran; (5) kesadaran dan kejujuran, yaitu sikap jiwa dan kesadaran batin seseorang, dan kesadaran jiwa melahirkan kejujuran dalam sikap dan tingkah laku (al-Hamidy, 2008: 256-257).

Dalam Islam, bagaimana bersikap toleran dalam kehidupan beragama dapat dirujuk kepada al-Qur'an ataupun hadis. Dalam surat al-Kafirun/109: 1-6, al-Qur'an mengingatkan pentingnya bertoleransi dalam keyakinan dan menjalankan peribadatan. Surat ini terkait ketegasan Rasulullah Saw untuk tidak menyembah apa yang mereka (orang-orang Arab) sembah. Surat di atas ditutup dengan penegasan, bahwa untuk mereka adalah agama mereka dan untuk orang-orang Islam adalah agamanya. Berdasarkan surat di atas, setiap orang akan mendapatkan konsekuensi (balasan) karena agama yang dianutnya, tetapi perbedaan ini tidak seharusnya menjadikan mereka bermusuhan dan saling menindas satu dengan yang lainnya.

Setelah turunnya surat di atas, Rasulullah Saw dan sahabatnya adalah komunitas yang semakin mendapatkan kekerasan dan penindasan karena tidak bersedia untuk mengikuti keyakinan mereka. Penindasan ini mereka dapatkan dalam berbagai bentuknya,

termasuk diasingkan dalam kegiatan ekonomi. Ini adalah contoh perbedaan keyakinan yang menyebabkan permusuhan antara keluarga dan masyarakat, yang ketika dirujuk kepada kehidupan Rasulullah Saw ketika di Madinah, hampir tidak terjadi kekerasan dan penindasan yang terjadi terutama diakibatkan karena perbedaan agama. Bahkan tidak sedikit hadis yang memberitakan bagaimana Rasulullah Saw dan para sahabat berinteraksi dengan mereka terutama transaksi dalam berbagai kegiatan ekonomi.

Selain surat/ayat di atas, dalam al-Qur'an dan hadits Rasulullah Saw akan mudah didapat bagaimana pentingnya hidup berdampingan dengan mereka yang berbeda agama, atau mereka yang berbeda paham dalam satu agama. Misalnya saja:

- 1) Larangan untuk memaksa orang beda agama masuk ke dalam agama Islam. Dalam surat al-Baqarah/2: 256 ditegaskan, "Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."
- 2) Perintah untuk berlaku adil kepada mereka orang beda agama yang hendak tinggal berdampingan secara adil dan damai. Dalam surat al-Mumtahanah/60: 8 ditegaskan, "Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil."
- 3) Larangan untuk berkawan dengan mereka komunitas yang suka akan perpecahan dan terus menerus menanamkan benih keberceraian, terutama atas nama agama. Dalam surat al-Mumtahanah/60: 9 ditegaskan, "Sesungguhnya Allah hanya

melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang dzalim.”

- 4) Larangan untuk saling memperolok satu dengan yang lain. Dalam surat al-Hujurat/49: 11 ditegaskan, “Hai orang-orang yang beriman janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula wanita-wanita (mengolok-olok) wanita-wanita lain (karena) boleh jadi wanita-wanita (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari wanita (yang mengolok-olok) dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang dzalim.”
- 5) Perintah untuk hidup berdampingan dan saling menghargai. Rasulullah Saw bersabda: “Darah kaum mukminin itu sederajat (tidak dibedakan antara darah orang kaya dan darah orang miskin), mereka adalah pelindung terhadap orang selain mereka. Orang-orang yang dipandang rendah dari mereka boleh memberikan perlindungan (pada orang kafir yang minta perlindungan). Ingatlah, tidak boleh seorang mukmin dibunuh karena (membunuh) orang kafir, dan tidak boleh dibunuh orang (kafir) yang telah mengikat janji selama masa perjanjiannya.” (Riwayat al-Nasa’i)
- 6) Larangan untuk saling menyakiti satu dengan yang lain. Rasulullah Saw bersabda: “Barang siapa membunuh orang (kafir) yang mengikat janji perdamaian, maka ia tidak akan

mencium bau surga, walaupun baunya tercium dalam jarak perjalanan empat puluh hari.” (Riwayat Bukhari)

c. NU dan Gerakan Islam Transnasional

NU dan gerakan toleransi di Indonesia tidak hanya dibatasi karena perbedaan agama, tetapi juga toleransi dengan mereka yang masih satu agama tetapi berbeda faham. Untuk toleransi dengan mereka yang satu agama, tentunya tidak lepas dari adanya gerakan yang tidak toleran (radikal). Upaya untuk menghalangi orang beda agama untuk menjalan ibadahnya hingga upaya untuk memecah belah hubungan persaudaraan antara sesama muslim dengan cara mengkafirkan dan membid'ahkan serta pemaksaan untuk mengikuti suatu paham keagamaan Islam tertentu adalah bagian dari berbagai gerakan radikal.

Bagi kalangan Nahdliyin, di antara gerakan yang harus diwaspadai adalah gerakan Islam Transnasional atau gerakan Islam garis keras. Mereka diklasifikasi sebagai individu dan organisasi, yaitu: (1) Individu garis keras adalah orang yang menganut pemutlakan atau absolutisme pemahaman agama; bersikap tidak toleran terhadap pandangan dan keyakinan yang berbeda; berperilaku atau menyetujui perilaku dan/atau mendorong orang lain atau pemerintah berperilaku memaksakan pandangannya sendiri kepada orang lain; memusuhi dan membenci orang lain karena berbeda pandangan; mendukung pelarangan oleh pemerintah dan/atau pihak lain atas keberadaan pemahaman dan keyakinan agama yang berbeda; membenarkan kekerasan terhadap orang lain yang berbeda pemahaman dan keyakinan tersebut; menolak Dasar Negara Pancasila sebagai landasan hidup bersama Bangsa Indonesia; dan/atau menginginkan adanya Dasar Negara Islam, bentuk Negara Islam, atau pun Khilafah Islamiyah; (2) Organisasi garis keras adalah kelompok yang merupakan himpunan individu-individu dengan

karakteristik yang disebutkan di atas, ditambah dengan visi dan misi organisasi yang menunjukkan orientasi tidak toleran terhadap perbedaan, baik semua karakter ini ditunjukkan secara terbuka ataupun tersembunyi (Wahid [ed], 2009: 45-46).

Di Indonesia, di antara gerakan transnasional ini adalah: (1) Ikhwanul Muslimin. Gerakan ini didirikan oleh Hasan al-Bana di Mesir, yang di Indonesia hadir melalui lembaga-lembaga dakwah kampus yang kemudian menjadi Gerakan Tarbiyah. Kelompok ini kemudian melahirkan Partai Keadilan Sejahtera; (2) Hizbut Tahrir Indonesia. Gerakan ini ingin menegakkan Khilafah Islamiyah di seluruh dunia, termasuk di Indonesia; (3) Wahabi. Gerakan ini dianggap yang paling kuat karena didanai besar. Di Indonesia, gerakan ini hadir melalui Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII). Di antara upaya yang dilakukannya adalah dengan mengirimkan mahasiswa untuk belajar ke Timur Tengah, dan sebagian dari merekalah yang kemudian menjadi agen-agen penyebaran ideologi Wahabi-Ikhwanul Muslimin di Indonesia (Wahid [ed], 2009: 77-87).

Genderang perang untuk menghadapi kelompok Islam garis keras memang telah lama ditabuh NU. Bahkan dalam sejarahnya, latar belakang berdirinya NU pada tahun 1926 adalah sebagai respon dan bentuk perlawanan para pendiri NU terhadap menguatnya rezim Wahabi di Arab Saudi (Shidqi, 2013: 111). Ketika Wahabi masuk dan menyebar di Indonesia, bentuk perlawanan NU terhadap paham ini terus diperkuat. Hal ini dapat dilihat dari berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Upaya NU untuk menentang tersebarnya gerakan Islam Transnasional radikal (termasuk gerakan Wahabisme), dapat di bagi ke dalam macam, yaitu upaya struktural dan upaya kultural. Secara struktural, NU memiliki banyak lembaga yang masing-masing bergerak sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsinya. Sesuai dengan

Anggaran Rumah Tangga BAB V Pasal 16, terdapat beberapa lembaga yang jika dilihat pada tugas, pokok, dan fungsinya, berperan aktif termasuk mencegah tersebarnya gerakan Islam transnasional, di antaranya: (1) Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LDNU), yang bertugas melaksanakan kebijakan NU di bidang pengembangan agama Islam yang menganut faham Ahlusunnah Wal Jama'ah; (2) Lembaga Pendidikan Maarif Nahdlatul Ulama (LP Maarif NU), yang bertugas melaksanakan kebijakan NU di bidang pendidikan dan pengajaran formal; (3) Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMINU) yang bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan pondok pesantren dan pendidikan keagamaan; (4) Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU) yang bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang kesejahteraan keluarga, sosial dan kependudukan; (5) Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama (LAKPESDAM NU) yang bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengkajian dan pengembangan sumber daya manusia; (6) Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBHNU) yang bertugas melaksanakan pendampingan, penyuluhan, konsultasi, dan kajian kebijakan hukum; (7) Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU) yang bertugas membahas masalah-masalah maudlu'iyah (tematik) dan waqi'iyah (aktual) yang akan menjadi Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama; (8) Lembaga Ta'mir Masjid Nahdlatul Ulama (LTMNU) yang bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan dan pemberdayaan masjid; (9) Lembaga Ta'lif wan Nasyr Nahdlatul Ulama (LTNNU) yang bertugas mengembangkan penulisan, penerjemahan dan penerbitan kitab/buku serta media informasi menurut faham Ahlussunnah wal Jama'ah; (10) Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama (LPTNU) yang bertugas mengembangkan pendidikan tinggi Nahdlatul Ulama.

Selain lembaga-lembaga resmi NU di atas, pada BAB 5 pasal 18 terdapat juga berbagai jenis badan otonom berbasis usia dan kelompok masyarakat yang berperan aktif termasuk mencegah tersebarnya gerakan Islam transnasional, yaitu: (1) Muslimat Nahdlatul Ulama (Muslimat NU) untuk anggota perempuan Nahdlatul Ulama; (2) Fatayat Nahdlatul Ulama (Fatayat NU) untuk anggota perempuan muda Nahdlatul Ulama berusia maksimal 40 (empat puluh) tahun; (3) Gerakan Pemuda Ansor Nahdlatul Ulama (GP Ansor NU) untuk anggota laki-laki muda Nahdlatul Ulama yang maksimal 40 (empat puluh) tahun; (4) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) untuk mahasiswa Nahdlatul Ulama yang maksimal berusia 30 (tiga puluh) tahun; (5) Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) untuk pelajar dan santri laki-laki Nahdlatul Ulama yang maksimal berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun; (6) Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) untuk pelajar dan santri perempuan Nahdlatul Ulama yang maksimal berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun.

Upaya NU secara struktural dapat dilihat misalnya, upaya yang dilakukan pada tahun 2007 oleh 8 ketua pengurus wilayah LDNU (Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama) se-Indonesia yang menandatangani maklumat yang merupakan respon atas tuduhan sesat terhadap ajaran dan amaliyah NU. Maklumat ini, di antara poinnya adalah, "... Kami menyadari dengan sepenuh hati, bahwa dewasa ini telah tumbuh dan berkembang gejala pemikiran dan gerakan ke-Islam-an (al-harakah al-Islamiyyah) melalui praktek-praktek keagamaan yang dapat melunturkan nilai-nilai Ahlusunnah Wal Jama'ah ala NU, maka dengan ini kami menyatakan: ... Senantiasa menjalankan amaliah ibadah Ahlusunnah Wal Jama'ah ala NU, melestarikan praktek-praktek dan tradisi keagamaan salafush shalih; seperti salat-salat sunnat, salat tarawih 20 rakaat; wirid, salawat, qunut, talqin, ziarah kubur, tahlil, manaqib, ratib, maulid Nabi, haul, dan istighotsah; serta toleran terhadap tradisi budaya

yang sesuai dengan nilai-nilai Islam sebagai bagian dari dakwah Ahlussunnah Wal Jama'ah ala NU." (NU Online, 27 Februari 2007. Lihat juga dalam *Ilusi Negara Islam*, Wahid [ed], 2009)

Upaya lain dapat dilihat misalnya, PWNU DI Yogyakarta melalui Musyawarah Kerja Wilayah (Musykerwil) yang diselenggarakan pada tanggal 26-27 Mei 2012 di Bantul Yogyakarta. Pada Musykerwil ini, diagendakan untuk melakukan konsolidasi organisasi melalui Turba (turun ke bawah) ke PCNU-PCNU di lingkungan DI Yogyakarta, dengan tujuan: (1) sebagai upaya transformasi pengetahuan tentang peta gerakan keagamaan yang berkembang di Indonesia, termasuk di dalamnya tentang Wahabisme; (2) sebagai upaya penyegaran terhadap gerak langkah organisasi dalam upaya pembentengan warga NU dari infiltrasi kelompok-kelompok yang berusaha mengancam akidah NU, khususnya dari pengaruh Wahabi (Shidqi, 2013: 119).

Berdasarkan Musykerwil di atas, praksis gerakannya dilakukan melalui lembaga dan lanjahan yang ada di bawahnya dengan sejumlah program, di antaranya: (1) mendirikan sejumlah Radio Komunitas (Rakom) di lima PCNU di DIY; (2) menerbitkan kembali majalah "Bangkit" sebagai media silaturahmi dan sekaligus sebagai kampanye bagi ajaran-ajaran NU; (3) membuat website resmi PWNU DIY; (4) membangun kerjasama dengan media-media populer di Yogyakarta untuk kampanye Islam ala NU; (5) penguatan kapasitas guru-guru Aswaja yang ada di sekolah-sekolah LP Ma'arif NU; (6) melakukan pendataan sekaligus pendampingan terhadap masjid-masjid NU; (7) menerbitkan sejumlah buku yang menjelaskan tentang dalil-dalil amaliyah NU; (8) menyelenggarakan sejumlah kajian tentang peta gerakan Islam kontemporer di sejumlah pesantren-pesantren NU di DIY (Shidqi, 2013: 120).

Kegelisahan NU terhadap tersebar dan menguatnya faham radikal terlihat juga ketika Mukhtar ke 33 NU di Jombang. Dalam

Muktamar ini, dibahas program dasar, arah, dan hasil yang diharapkan, yang di antaranya dapat dilihat dalam: (1) program penguatan dan penyebaran ajaran Aswaja (h. 338-341); (2) program pengembangan kualitas SDM NU (h. 342-353).

Pada program penguatan dan penyebaran ajaran Aswaja (h. 340-341), hasil yang diharapkan adalah: (1) tersusun standarisasi materi Aswaja yang secara resmi dikeluarkan oleh PBNU sebagai acuan penyampaian materi Aswaja baik untuk kalangan internal NU maupun masyarakat luas; (2) Jama'ah NU memiliki pemahaman yang sama tentang Aswaja sebagai ideologi dan metode dalam memahami ajaran Islam; (3) Jama'ah NU memiliki karakter yang mencerminkan nilai-nilai yang ada dalam Aswaja (tawassuth/moderat, tawazun/ seimbang, tasamuh/ toleran), yang dipraktekkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara; (4) sebagian besar masyarakat bisa menjadikan nilai-nilai Aswaja sebagai ajaran untuk menuntun kehidupan mereka sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; (5) Jama'ah NU mendapat informasi, pengetahuan dan pemahaman yang benar tentang Aswaja, secara berkelanjutan, melalui berbagai kegiatan seperti; pendidikan di madrasah/ sekolah/ pesantren/ perguruan tinggi, pusat pendidikan dan informasi Aswaja, pengajian di majlis taklim/ majlis tahlil/ majlis lailatul ijtima', diskusi, seminar, media elektronik-website, twitter, TV, Radio, cetak buku utama, buku saku, jurnal, bulletin, brosur, dan lainnya; (6) lahirnya sejumlah da'i Aswaja di setiap PCNU (melalui pendidikan/ pelatihan khusus yang diselenggarakan untuk itu), yang mampu mentransformasikan ajaran dan nilai-nilai Islam Aswaja secara profesional kepada jama'ah NU maupun masyarakat luas, di wilayah kerja PCNU masing-masing maupun di daerah transmigrasi/daerah terpencil lain di sekitarnya; (7) tumbuhnya kesadaran warga NU untuk melestarikan dan mengembangkan kesenian bernuansa keagamaan sebagai bagian dari media dakwah

Islam Aswaja dalam upaya mewujudkan dan memperkuat peradaban masyarakat.

Pada program pengembangan kualitas SDM NU (h. 344-345), hasil yang diharapkan dibagi ke dalam empat bidang, yaitu bidang pendidikan, kaderisasi, pendidikan politik warga NU, dan pelayanan kesehatan. Hasil yang diharapkan pada bidang pendidikan adalah: (1) terbentuk manusia yang memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai Ajaran Islam Ahlussunnah Wal jam'ah dan sesuai dengan nilai-nilai dari Mabadi khoiro Ummah; (2) meningkatnya kualitas proses belajar-mengajar di semua tingkatan pendidikan yang diselenggarakan oleh NU; (3) meningkatnya jumlah peserta belajar/peserta didik setiap tahun ajaran baru di semua tingkatan pendidikan yang diselenggarakan oleh NU; (4) terbentuknya Badan Penyelenggara Pendidikan (BPP) Ma'arif NU. Struktur organisasinya mulai di tingkat pusat, wilayah, sampai tingkat cabang; (5) berdirinya lembaga pendidikan perguruan tinggi di provinsi/ wilayah NU seluruh Indonesia, sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat; (6) berdirinya lembaga pendidikan formal untuk sekolah umum maupun kejuruan juga lembaga pendidikan madrasah, dan pendidikan non formal, yang diinisiasi oleh Badan Penyelenggara Pendidikan (BPP) - Ma'arif NU, sekurangnya setiap tahun sebanyak 5-10 unit sekolah/ madrasah (formal dan non formal) di semua tingkatan provinsi/ wilayah, kabupaten/ cabang, kecamatan/ MWC dan desa/ ranting; (7) tersedianya dan didistribusikannya beasiswa bagi peserta belajar/peserta didik yang berprestasi dan tidak mampu secara finansial, untuk semua jenis dan tingkatan pendidikan yang diselenggarakan oleh BPP-Ma'arif NU; (8) meningkatkan fasilitas penyelenggaraan pendidikan yang dikelola oleh badan yang ditunjuk untuk itu, untuk memberikan kesempatan kepada warga memperoleh pelayanan pendidikan yang berkualitas; (9) tumbuhnya kesadaran warga NU terhadap budaya/ tradisi lokal yang tidak

bertentangan dengan ajaran Islam Aswaja sebagai bagian dari tata kehidupan sosial kemasyarakatan yang mesti dilestarikan dan dikembangkan dalam upaya memperkuat peradaban masyarakat.

Untuk bidang kaderisasi (h. 347-348), hasil yang diharapkan adalah: (1) meningkatnya kinerja para pengurus NU, lembaga, lajnah, dan pengurus banom di semua tingkatan organisasi NU dalam menggerakkan dan mengelola organisasi/ kelembagaan NU, dalam berkhidmat kepada jama'ah NU, sesuai dengan mandat, fungsi dan perannya, tugas dan tanggung jawabnya masing-masing untuk mewujudkan Visi dan Misi NU; (2) tersusunnya konsep menyeluruh tentang kaderisasi, sebagai penyempurnaan atas konsep kaderisasi yang sudah disusun dan ditetapkan oleh rapat pleno I PBNU serta disahkan oleh PBNU periode 2010-2015; (3) berdirinya pusat pendidikan dan pelatihan tingkat nasional yang dikelola secara profesional oleh lembaga yang mendapatkan mandat untuk menyelenggarakan kaderisasi dan melahirkan jenis-jenis kader terdiri dari Kader; Struktural (termasuk Kader Penggerak Ranting), Keulamaan, Penggerak NU, Fungsional dan kader Profesional. Pusat pendidikan dan pelatihan dimaksud merupakan bagian tak terpisahkan dari tugas dan tanggungjawab NU dalam kaderisasi di NU; (4) lahirnya para kader terlatih yang mampu menjalankan peran, fungsi, tugas dan tanggung jawabnya secara profesional sesuai dengan kategori kader masing-masing, yaitu secara keseluruhan akan dilahirkan Kader Struktural, Kader Keulamaan, Kader Penggerak NU, Kader Fungsional (sebagai pelatih/ instruktur pelatihan/ pendidikan) relawan pendamping desa, team leader penyelenggara Bahtsul Masail, team pemantau rukyat hilal; (5) terselenggaranya penyelenggaraan kaderisasi di masing-masing perangkat organisasi NU di semua tingkatan secara terencana dan berkelanjutan, sesuai dengan kebutuhannya masing-masing dengan mengacu pada konsep kaderisasi yang berlaku di NU.

Gerakan Kultural NU dilakukan di antaranya melalui langkah-langkah: (1) membangun visi, yaitu memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa warga negara adalah pemilik negara; (2) pendampingan dan atau advokasi, yang di antaranya dilakukan dengan cara mendirikan lembaga hukum atau apa saja yang memfokuskan pada persoalan-persoalan hak dasar politik masyarakat (Suhaidi, 2008: 24-25). Untuk gerakan kultural ini, para naahdliyin aktif di berbagai celah dan lapisan untuk meredam berbagai upaya tersebarnya paham dan gerakan radikal ini. Di Yogyakarta misalnya, Keluarga Mahasiswa NU (KMNU) UGM melakukan beberapa kegiatan sebagai upaya memberikan perlawanan dan meredam tersebarnya paham radikal di lingkungan kampus, yaitu: (1) menyelenggarakan daurah KMNU di sejumlah pesantren milik Kiai NU di kawasan Yogyakarta; (2) menyelenggarakan kajian rutin yang diberi nama KISWAH (Kajian Islam Ahli Sunnah Wal Jama'ah) setiap hari minggu di Masjid Kampus UGM; (3) menggelar sejumlah acara amaliyah NU seperti tahlilan, shalawatan, dan semaan berkeliling dari satu fakultas ke fakultas lain di lingkungan kampus UGM; (4) melakukan infiltrasi ke sejumlah masjid atau mushalla di lingkungan UGM dengan cara menjadi relawan atau takmir; (5) pendampingan terhadap mahasiswa baru dari kalangan santri NU agar tidak masuk ke kelompok keagamaan di luar NU (Shidqi, 2013: 13-124).

2. Islam yang Berdialog dengan Budaya

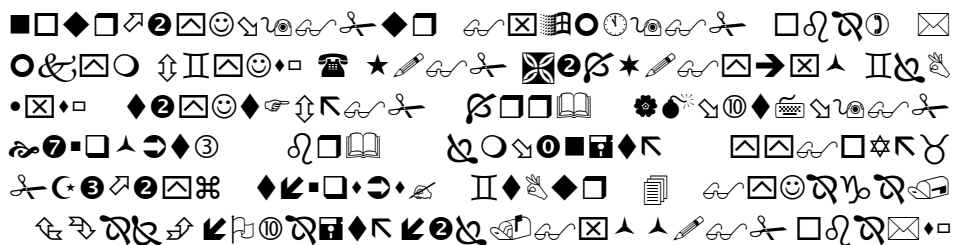
a. Memahami Hubungan Islam dan Budaya

Pergumulan Islam dengan budaya sudah terjadi sejak Islam datang ke dalam kehidupan masyarakat Arab dan mempengaruhi kehidupan mereka. Bukti pertama pergumulan Islam dengan budaya adalah turunnya Al-Qur'an yang menjadi kitab sucinya umat Islam kepada Muhammad Saw, yang diyakini melibatkan unsur budaya.

Beberapa alasan dapat dikemukakan tentang turunnya al-Qur'an, yaitu: (a) proses penurunan al-Qur'an mengindikasikan penggunaan pendekatan budaya dari pemberi pesan (Tuhan) kepada penerima pesan. Al-Qur'an turun menggunakan bahasa objek penerima, yaitu bahasa Arab; (b) pemilihan Muhammad Saw sebagai rasul penyampai pesan al-Qur'an menunjukkan penggunaan pendekatan budaya. Muhammad Saw berasal dari suku Quraisy, suku yang paling mulia dan dihormati oleh suku-suku Arab. Keberadaannya menjadi patron bagi suku yang lain, karena kepemimpinan dan kebesaran suku ini. Apa yang disampaikan Muhammad Saw lebih didengar oleh suku lain karena ia berasal dari suku Quraisy, disamping karena keutamaan dan keteladanan pribadinya; (c) media yang digunakan untuk mentransformasikan ajaran-ajaran Islam adalah budaya lokal. Ini terlihat dengan banyaknya adat istiadat Arab yang terekam dalam, dan berdialektika dengan al-Qur'an (Sodiqin, 2008: 13-14).

Al-Qur'an (Islam) datang kepada masyarakat yang telah memiliki budaya dan Islam berdialog hingga melahirkan tiga sikap, yaitu: (a) menerima dan mengembangkan budaya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan berguna bagi pemuliaan kehidupan umat manusia; (b) menolak tradisi dan unsur-unsur budaya yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam; (c) membiarkan saja (Machasin, 2011: 187). Perintah "membaca" pada ayat pertama turun adalah bukti penerimaan dan pengembangan budaya baca yang memang harus dilakukan oleh setiap manusia. "Bacaan" yang dilakukan sekaligus akan mampu menuntun manusia untuk menerima atau menolak unsur-unsur budaya yang berkembang pada sebuah masyarakat, atau mungkin membersihkan berbagai unsur pada budaya yang dianggap menyalahi ajaran Ilahi. Karena "bacaan" pada ayat pertama turun diikat dengan ketentuan harus didasarkan pada nilai-nilai ketauhidan.

Ketika turunnya al-Qur'an, dialog ketauhidan dengan ritual ibadah tertentu telah dilakukan. Misalnya saja ketika turunnya surat al-Baqarah/2:158,



“Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian dari syi’ar Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau ber-`umrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha Menyukuri kebaikan lagi Maha Mengetahui.”

Peristiwa terkait turunnya ayat di atas adalah kaum Anshar yang mereka sebelum masuk Islam mengadakan upacara keagamaan kepada Manat (Tuhan mereka) yang jahat. Mereka menolak untuk bersa'i antara Shafa dan Marwah. Dalam riwayat lain, di antara Shafa dan Marwah biasa diletakkan berhala-berhala orang-orang Jahiliyah. Ketika Islam datang, berkatalah kaum muslimin kepada Rasulullah Saw bahwa mereka tidak akan bersa'i antara Shafa dan Marwah, karena upacara itu bisa mereka lakukan di jaman Jahiliyah (al-Wahidi, 2005: 152-155). Dari dialog antara teks dan peristiwa yang menjadi sebab turunnya, apa sudah dilakukan oleh orang-orang pada masa sebelumnya tidak harus dihilangkan seluruhnya, tetapi cukup dengan dihilangkan berbagai unsur kesyirikannya sehingga tidak ada lagi unsur kezhaliman dan kesyirikan di dalamnya.

b. NU dan Persentuhannya dengan Budaya Nusantara

Pergumulan Islam dengan budaya lokal Indonesia dapat ditelusuri di antaranya melalui jejak rekam dakwah para wali. Masyarakat kita mengenal adanya sembilan wali, yaitu: (1) Maulana Malik Ibrahim; (2) Sunan Ampel; (3) Sunan Bonang; (4) Sunan Drajat; (5) Sunan Giri; (6) Sunan Muria; (7) Sunan Kudus; (8) Sunan Kalijaga; (9) Sunan Gunung Djati. Dari antara mereka bahkan seluruhnya berasal dari keluarga kerajaan, misalnya saja Sunan Ampel yang bernama Raden Rahmat dan Sunan Giri yang bernama Raden Paku. Selain karena mereka adalah keturunan para bangsawan, dakwah mereka juga tidak melupakan media dan berbagai istilah yang ketika itu akrab digunakan oleh masyarakat.

Bentuk dialog Islam yang dibawa oleh mereka (para wali) telah mampu memberi warna pada budaya masyarakat Indonesia. Berbagai unsur kezhhaliman dan kesyirikan pada setiap budaya yang ada dihilangkan dengan tetap mempertahankan budayanya agar tidak hilang. Wayang misalnya, kesenian rakyat berupa wayang telah dikonstruksi dengan teologi Islam sebagai pengganti dari teologi Hindu. Hingga saat ini, kisah yang diangkat dalam pewayangan merupakan kisah-kisah dari kitab Mahabrata dan Ramayana yang merupakan bagian dari kitab suci Hindu. Melalui wayang, para wali berdakwah dengan tetap mengadopsi kisah-kisah tersebut tetapi dengan dimasukkan unsur nilai-nilai Islam dalam plot kisahnya. Misalnya saja, untuk “jimat kalimah shada” yang asalnya berarti “jimat kali maha usada” yang bernuansa teologi Hindu, para wali merubahnya menjadi bermakna “azimah kalimat syahadah”. Frase yang terakhir merupakan pernyataan seseorang tentang keyakinan bahwa tiada Tuhan selain Allah Swt dan bahwa Muhammad Saw adalah utusan Allah. Selain itu, para wali juga memperkenalkan figur-figur baru yang sebenarnya tidak ada dalam kisah asli Mahabarata dan Ramayana. Figur-figur yang paling dikenal luas adalah punakawan (Semar, Nala Gareng, Petruk, Bagong), yang

berarti mentor yang bijak bagi para pandawa. Nama-nama punakawan sendiri sebagai satu kesatuan merepresentasikan karakteristik kepribadian muslim yang ideal. Semar, yang diambil dari kata "ismar" adalah seorang yang memiliki kekuatan fisik dan psikis. Ia sebagai representasi seorang mentor yang baik bagi kehidupan, baik bagi raja ataupun bagi masyarakat umum. Nala Gareng, yang diambil dari kata "nala qarim" adalah seorang yang memiliki banyak teman. Ia merupakan representasi dari orang yang supel, tidak egois, dan berkepribadian menyenangkan sehingga ia memiliki banyak teman. Petruk, yang diambil dari kata "fatruk ma siwa Allah" adalah seorang yang berarti seorang yang berorientasi dalam segala tindakannya hanya kepada Tuhan. Ia mempresentasikan orang yang memiliki konsen sosial yang tinggi dengan dasar kecintaan kepada Tuhan. Bagong, yang diambil dari kata "bagha" adalah seorang yang mampu menolak segala hal yang bersifat buruk, baik yang berada di dalam diri ataupun di dalam masyarakat (Suparjo, 2008).

Bagi kalangan Nahdliyin, sosok walisongo (wali sembilan) memang sosok yang tidak dapat dipisahkan dari gerak jejak dakwah NU. Apa yang harus diteladani dari dakwah mereka adalah dengan tidak menjadikan budaya dan tradisi lokal sebagai "musuh agama" yang harus dibasmi, tetapi sebagai "teman akrab" dan media dakwah, yang tentunya selama tidak ada larangan dan nash syari'at. Langkah dakwah walisongo diawali dengan belajar bahasa lokal, memperhatikan kebudayaan dan adat, serta kesenangan dan kebutuhan masyarakat, kemudian berusaha menarik simpati mereka. Setelah penduduk tertarik, mereka diajak membaca syahadat, diajari wudlu, shalat, dan lain sebagainya. Di antara warisan walisongo dengan mengadaptasi dan memperhatikan kondisi masyarakat ketika itu adalah kebiasaan berkumpul dan kenduri pada hari-hari tertentu setelah kematian keluarga, yang tidak mereka haramkan tetapi

mereka isi dengan tahlil, do'a, dan sedekah (Munawwir, 2013:55-56), yang hingga kini terus dilestarikan.

Dalam analisis Syamsu-l Arifyn Munawwir (2013: 58-59), dakwah kultural ala walisongi di atas dapat dirujuk atau sesuai dengan dakwah kulturalnya Rasulullah Saw. Dakwah mereka (walisongo) sesuai dengan: (1) Surat al-Nahl/16:125 tentang harusnya berdakwah dengan hikmah dan pelajaran yang baik, serta membantah dengan cara yang baik; (2) Surat Ali Imran/3:159 tentang larangan bersikap keras yang akan menyebabkan mereka justeru menjauhkan diri; (3) Pesan Rasulullah Saw saat mengutus Abu Musa dan Mu'adz untuk berdakwah untuk memudahkan mereka dan bukan untuk mempersulitnya, dan untuk memberi kabar gembira dan bukan untuk membuat mereka (objek dakwah) lari (Riwayat Muslim); (4) Pesan Rasulullah Saw untuk memperlakukan manusia sesuai keberadaan (akal) mereka (Riwayat Abu Daud).

Memahami hubungan dialektika agama dan budaya lokal sedikitnya dapat dilihat dalam tiga ragam, yaitu: (1) pribumisasi; (2) negosiasi; (3) konflik. Pribumisasi diartikan sebagai penyesuaian Islam dengan tradisi lokal dimana ia disebarkan. Pribumisasi bertujuan agar budaya itu tidak hilang. Pribumisasi Islam menjadikan agama dan budaya tidak saling mengalahkan melainkan berwujud dalam pola nalar keagamaan yang tidak lagi mengambil bentuk yang outentik dari agama. Pola negosiasi terjadi ketika ada kebutuhan untuk saling sama-sama mengubah tradisi yang dimiliki. Ketika proses negosiasi ini terjadi, kadangkala pada batas-batas tertentu, berujung pada perubahan bentuk masing-masing tradisi. Pola konflik mengandaikan adanya sikap yang saling bertahan antara agama dan budaya dalam pergumulan antara keduanya. Hal ini akan terwujud dari pola yang relatif "menyimpang" yang dilakukan satu di antara keduanya (Budiyanto dkk, 2008: 652-654).

Bagi kalangan Nahdliyin, Islam yang dipraktikkan oleh orang Indonesia adalah Islam yang seharusnya tidak mengabaikan budaya tetapi justru berdamai dengan budaya Indonesia, dan bukan dengan budaya masyarakat Arab kemudian dipraktikkan di Indonesia. Islamnya Indonesia adalah Islam yang dikenalkan dan disebar oleh para wali. Pribumisasi dan negosiasi akan banyak mewarnai bagaimana Islam dipraktikkan di Indonesia. Bagi kalangan Nahdliyin, Islam dan budaya diupayakan tidak untuk saling mengalahkan. Banyak sekali kegiatan keagamaan yang dijalankan oleh para Nahdliyin yang mungkin tidak sepenuhnya didasarkan pada agama secara tekstual, tetapi didasarkan pada ajaran yang tersirat pada teks agama, dengan tetap menjadikan budaya yang sudah ada sebagai wadah terselenggaranya nilai-nilai ajaran Islam. Kegiatan seperti tahlilan tujuh hari, empat puluh hari, atau seratus hari, mungkin tidak sepenuhnya ada teks agamanya (al-Qur'an dan hadisnya), tetapi didasarkan pada ajaran yang tersirat pada teks agama yang dikemas dalam budaya tertentu, yaitu mengingatkan bahwa siapapun pada waktunya akan meninggal, mendo'akan orang yang meninggal dunia, menjalin hubungan persaudaraan dengan keluarga yang ditinggalkan, dan lainnya, yang dikemas dalam suatu kegiatan tertentu yang mungkin hanya ada di Indonesia. Dengan tidak mengabaikan budaya, Islam Indonesia adalah Islam yang kental dengan budaya ziarah kubur, maulid Nabi Saw, haul, dan lainnya.

Indonesia terdiri dari berbagai suku dan budaya. Islam yang datang ke berbagai daerah dan suku yang tersebar di Indonesia berdialog dengan setiap budaya yang ada, sehingga tidak heran meski ziarah kubur atau maulid Nabi Saw ditradisikan hampir di setiap tempat, tetapi masing-masing bentuknya boleh jadi berbeda. Karena Islam yang berdialog dan tidak mengabaikan budaya inilah, maka Islam dapat mudah diterima oleh berbagai kalangan dan komponen masyarakat di berbagai suku di pelosok Indonesia.

c. NU, Kiai, dan Budaya

Jam'iyah yang diberi nama Nahdlatul Ulama dan bukan Nahdlatul Muslimin merupakan bagian yang tidak terpisahkan untuk memahami hubungan NU dengan budaya. Sebagaimana Nabi Muhammad Saw yang merupakan sosok terpancang dari keluarga terpancang ketika itu, atau para wali yang menyebarkan Islam di Indonesia yang juga dari keluarga terpancang, para kiai NU juga merupakan para ulama terpancang untuk masyarakatnya. Ini juga bagian dari persentuhan Islam dengan budaya dan bagian dari strategi dakwah Islam dengan menggunakan pendekatan budaya.

Kenapa harus kiai? Beberapa faktor menjadi alasan mengapa harus kiai, yaitu: (1) tingginya derajat mobilitas kiai dalam membangun jaringan hubungan dengan komunitas di luarnya, baik sesama kiai ataupun pertemuan dengan jaringan-jaringan tertentu; (2) posisi sentral dan ketokohan kiai di desa dan di pesantrennya, menjadikan mereka sebagai sumber rujukan bagi orang dari luar desa, di mana orang-orang yang datang ke desa tak bisa mengabaikan eksistensi dan peran kiai; (3) sebagai dampak langsung ataupun tidak langsung dari posisinya, kiai biasanya memiliki kelebihan yang bersifat material dibandingkan dengan masyarakat sekitarnya, termasuk memiliki akses informasi yang lebih baik (Trianto, 2008: 88). Sehingga kiai dianggap sebagai sosok yang memiliki keunggulan dari berbagai segi, baik ilmu agama, jejaring, informasi, dan lainnya.

Kiai bagi kalangan Nahdliyin adalah "pemimpin agama", yang membina santri dan masyarakat bagaimana beriman dan beribadah. Beberapa kiai berkunjung ke berbagai wilayah dan pelosok untuk memberi nasihat dan memperbincangkan berbagai soal agama dan keyakinan. Sosok kiai tetap menjadi sosok sentral, bahkan ketika mereka sudah meninggal dunia. Ajaran-ajaran kiai, terutama mereka

pada pendiri NU terus dipelajari dan dibumikan. Beberapa literatur yang ditulis oleh kaum intelektual Nahdliyin bahkan mampu menelusuri genealogi keilmuan Islam kiai mereka (Aswaja) kepada wali songo bahkan hingga Rasulullah Saw. Silsilah keilmuan Islam Aswaja inilah yang tidak hanya sekedar mengenalkan ketersambungan keilmuan Islam tetapi juga sebagai referensi intelektual akan pentingnya mendialogkan ajaran Islam dengan budaya setempat. Suksesnya Rasulullah Saw, sahabat, tabi'in, dan generasi berikutnya, atau terutama wali songo di Indonesia karena berdakwah dengan tidak mengabaikan budaya, menjadi bukti bahwa dakwah yang diterima dan dikehendaki oleh masyarakat adalah dakwah yang tidak mengabaikan budaya.

3. Kekerasan dan Keberceraian

a. Kekerasan terjadi kepada Kaum Minoritas

Kekerasan atas nama agama telah lahir seiring lahirnya perbedaan di kalangan manusia karena agama dan keyakinan yang dianutnya. Setiap Nabi dan Rasul yang diutus kepada suatu ummat, umumnya ditolak dan ditindas karena keyakinan dan penyebaran keyakinan yang dibawanya. Penindasan ini seringkali didasarkan pada kekhawatiran beralihnya pengaruh dan kekuasaan yang berdampak pada tidak terselenggaranya berbagai kegiatan dan perilaku kehidupan yang biasa mereka lakukan.

Ketika Islam datang, Rasulullah Saw dan diikuti oleh para pengikutnya mengalami berbagai penindasan karena agama yang dianutnya. Mereka yang mengalaminya, pada umumnya adalah kalangan minoritas. Ketika mereka yang berkuasa hanya berpihak kepada masyarakat mayoritas, maka penindasan rawan terjadi, dan di antara upaya yang ditempuh oleh kalangan minoritas ketika itu untuk terhindar dari berbagai penindasan adalah dengan berhijrah. Pada masa ini, masyarakat Arab memiliki kekhawatiran yang sangat

jika Rasulullah Saw dan agama yang dianutnya berkuasa, terutama terhadap berbagai perilaku kehidupan mereka sehari-hari, baik terkait ekonomi, sosial, budaya, dan lainnya.

Kekerasan atas nama agama tidak berhenti di antara penganut agama yang berbeda, tetapi juga lahir di antara para penganut agama yang sama. Di kalangan umat Islam, perpecahan telah muncul terutama setelah Rasulullah Saw wafat. Diawali peperangan antara sahabat (misalnya, perang Jamal) dan peperangan pada generasi berikutnya hingga sekarang. Konflik antara Khalifah Ali dan Muawiyah adalah konflik yang paling mengerikan dalam sejarah keberceraian di antara umat Islam atas nama agama. Bukan karena tidak ada konflik yang lebih mengerikan lagi setelah itu, tetapi konflik saat itu melibatkan orang-orang (sahabat) yang pernah hidup bersama Rasulullah Saw dan yang paling dekat dengan ajaran beliau. Hingga sekarang, konflik antara Khawarij, Syi'ah, dan Sunni terus mewarnai keberceraian umat Islam atas nama agama. Perebutan pengaruh dan kekuasaan hingga pelembagaan paham tertentu melalui kekuasaan mewarnai alasan dibalik terjadinya berbagai penindasan. Sehingga tidak heran jika dalam berbagai literatur sejarah, banyak ulama yang dihukum dan dipenjarakan hanya karena tidak sejalan dengan paham penguasanya ketika itu.

b. Kekerasan atas Nama Agama di Indonesia

Di Indonesia, masyarakat diberi kebebasan untuk memilih agama sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Kebebasan ini diatur di antaranya dalam: (1) UU NO. 1/PNPS/1965 tentang Penodaan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama; (2) UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial dan Etnik.

UU NO. 1/PNPS/1965 tentang Penodaan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama lahir antara lain karena suasana politik dan keamanan waktu itu dengan hadirnya gerakan separatis DI/TII,

Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan dan Daud Beureuh di Aceh yang berlatar belakang agama. Kebijakan Soekarno yang pada saat itu dianggap tidak mengakomodir kepentingan umat Islam memunculkan pemberontakan di berbagai daerah. Selain alasan di atas, apa yang menjadi sebab langsung keluarnya undang-undang ini adalah meningkatnya ketegangan antara Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Nahdlatul Ulama (NU) di pertengahan tahun 1960-an. Menteri Agama waktu itu, Saifuddin Zuhri, mendesak Presiden Soekarno untuk mengeluarkan Penetapan Presiden No.1 Tahun 1965 mengenai Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. UU ini dibuat untuk mengamankan negara dan masyarakat, cita-cita revolusi dan pembangunan nasional di mana penyalahgunaan atau penodaan agama dipandang sebagai ancaman revolusi. (Hanna, 2010: 159-160).

Seiring dengan waktu, sebagian pihak beranggapan bahwa UU di atas masih membatasi kebebasan beragama dan bersifat diskriminatif, sehingga diajukan untuk uji materi pada akhir tahun 2009 ke Mahkamah Konstitusi oleh almarhum Abdurrahman Wahid, Musdah Mulia, Dawam Rahardjo, dan Maman Imanul Haq, lembaga Imparsial, Elsam, PBHI, Demos, Perkumpulan Masyarakat Setara, Desantara Foundation, dan YLBHI. Permohonan pencabutan UU di atas ditentang oleh banyak pihak di antaranya Menteri Agama Suryadharma Ali, Ketua MUI (Amidhan), Muhamadiyah, Tokoh NU Hasyim Muzadi, Ketua Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Syihab, Ahli hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra, ahli hukum pidana UGM Eddy OS Hiariej dan feminis Islam Khofifah Indar Parawansa. Mereka berpendapat bahwa UU di atas justeru sejalan dengan penghormatan terhadap kebebasan beragama, tetapi pada tanggal 19 April 2010 Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh gugatan atas uji materi UU Pencegahan Penodaan Agama (Hanna, 2010: 158).

Pasal 1 UU NO. 1/PNPS/1965 mengatakan, bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu; penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu. Ini adalah salah satu pasal yang dimohon untuk dicabut karena dianggap bertentangan dengan pasal 28E ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya." (Hanna, 2010:162-163).

Pasal 5 UU No. 40 Tahun 2008 mengatakan bahwa penghapusan diskriminasi ras dan etnis wajib dilakukan dengan memberikan: (1) perlindungan, kepastian, dan kesamaan kedudukan di dalam hukum kepada semua warga negara untuk hidup bebas dari diskriminasi ras dan etnis; (2) jaminan tidak adanya hambatan bagi prakarsa perseorangan, kelompok orang, atau lembaga yang membutuhkan perlindungan dan jaminan kesamaan penggunaan hak sebagai warga negara; (3) pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya pluralisme dan penghargaan hak asasi manusia melalui penyelenggaraan pendidikan nasional. Pasal 6 mengatakan, bahwa perlindungan terhadap warga negara dari segala bentuk tindakan diskriminasi ras dan etnis diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, serta melibatkan partisipasi seluruh warga negara yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 7 mengatakan, bahwa untuk penyelenggaraan perlindungan terhadap warga negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pemerintah dan pemerintah daerah wajib: (1) memberikan perlindungan yang efektif kepada setiap warga negara yang mengalami tindakan diskriminasi ras dan etnis dan

menjamin terlaksananya secara efektif upaya penegakan hukum terhadap setiap tindakan diskriminasi yang terjadi, melalui proses peradilan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) menjamin setiap warga negara untuk memperoleh pertolongan, penyelesaian, dan penggantian yang adil atas segala kerugian dan penderitaan akibat diskriminasi ras dan etnis; (3) mendukung dan mendorong upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis, dan menjamin aparaturnegara dan lembaga-lembaga pemerintahan bertindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; (4) melakukan tindakan yang efektif guna memperbaiki, mengubah, mencabut, atau membatalkan peraturan perundang-undangan yang mengandung diskriminasi ras dan etnis.

c. Berbagai Bentuk Kekerasan atas Nama Agama

Di Indonesia, kekerasan atas nama agama semakin mewarnai kehidupan masyarakat, baik kekerasan atas nama agama yang berbeda ataupun atas nama paham yang berbeda dalam satu agama. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Human Rights Watch pada tahun 2013 (h. 50-70) memberi gambaran tentang beberapa bentuk kekerasan, baik kekerasan fisik ataupun non-fisik. Untuk kekerasan fisik misalnya, kesulitan untuk mendirikan rumah ibadah hingga serangan terhadap rumah ibadah. Kekerasan ini dialami hampir oleh seluruh agama, ketika pengikut agama tertentu tinggal di suatu wilayah sebagai minoritas. Hasil penelusuran Human Rights Watch misalnya, keluarga-keluarga Muslim di Batuplat, Kecamatan Alak, Kupang, sejak 2002 kesulitan mendirikan masjid karena protes dari umat Kristiani di daerah mayoritas Kristen tersebut, SKB 2006 digunakan untuk kasus ini di kota Kupang, pulau Timor, dan ada kemungkinan kasus serupa terjadi di tempat mayoritas Kristen lain. Perilaku yang sama diterima oleh kaum Kristiani ketika hendak

mendirikan Gereja, seperti yang mereka alami ketika mendirikan Gereja GKI Yasmin di Bogor. Dokumentasi lainnya Human Rights Watch adalah serangan 2011 oleh sebagian militan Sunni terhadap pesantren Syiah di Bangil, dekat Surabaya Pada tanggal 15 Februari 2011, lebih dari 200 militan memasuki YAPI (Yayasan Pesantren Islam) milik komunitas Syiah, dan menghancurkan properti sekolah.

Sebagaimana disebutkan pada sub-bab sebelumnya, di antara gerakan Islam yang harus diwaspadai adalah gerakan Islam Transnasional atau gerakan Islam garis keras. Di Indonesia, gerakan ini di antaranya adalah Ikhwanul Muslimin, HTI, Wahabi, dan gerakan-gerakan lainnya yang berafiliasi kepada ketiga gerakan di atas. Mereka dikatakan sebagai gerakan Islam garis keras karena dianggap sebagai gerakan yang berupaya untuk merubah wajah Indonesia yang santun dan toleran menjadi garang. Kekerasan mereka di antaranya: (1) kekerasan doktrinal, yaitu pemahaman-pemahaman literal atas teks-teks keagamaan dan hanya menerima kebenaran sepihak. Literalisme-tertutup telah memutus relasi konkret dan aktual pesan-pesan luhur agama dari realitas sejarah, sosial, dan kultural; (2) kekerasan tradisi dan budaya, yang merupakan dampak turunan dari yang pertama. Gerakan-gerakan ini umumnya menolak eksistensi tradisi, sehingga mereka lazim menolak bermadzhab, menolak tradisi tasawuf, dan berbagai praktik yang merupakan buah dari komunikasi teks-teks atau ajaran luhur agama dengan tradisi dan budaya umat Islam di berbagai daerah; (3) kekerasan sosiologi, yang merupakan dampak turunan dari dua kekerasan pertama. Gerakan-gerakan ini terkadang melakukan aksi-aksi anarkis dan destruktif terhadap pihak lain yang dituduh musyrik, murtad, atau kafir, sehingga menyebabkan ketakutan, instabilitas, dan kegelisahan sosial yang mengancam negara (Wahid [ed], 2009: 88-89).

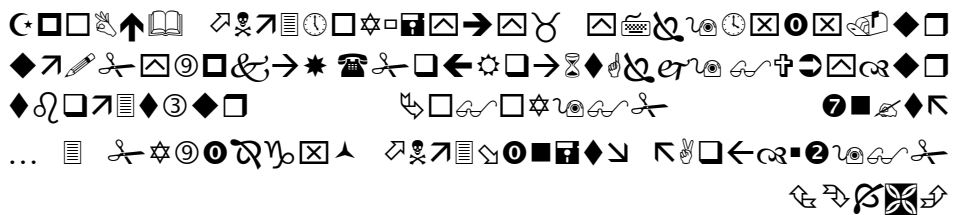
NU mempetakan kelompok-kelompok garis keras di atas berdasarkan karakteristiknya ke dalam empat kelompok, yaitu: (1)

kelompok takfiri, yakni mereka yang mudah mengkafirkan orang lain karena tidak sejalan dengan paham mereka, dan mereka menganggap bahwa orang yang sudah kafir halal darahnya. Menurut NU, ideologi takfiri bersumber dari ajaran Wahabi yang berkembang di Arab Saudi; (2) kelompok jihadi, yaitu kelompok yang menganggap sistem negara yang tidak menerapkan syariah Islam dianggap sebagai sistem kafir dan thogut. Kelompok ini melakukan gerakan jihad dengan kekuatan fisik terhadap negara-negara yang dianggap sebagai musuhnya. Mereka melakukan teror dengan mengebom fasilitas umum dan penyerangan terhadap aparat kepolisian. Kelompok ini memiliki jaringan dengan gerakan radikal di Timur Tengah seperti ISIS dan al-Qaidah; (3) kelompok siyasi, yaitu kelompok berideologi transnasional yang bergerak melalui jalur politik. Kelompok ini mendirikan partai politik dengan menggunakan simbol-simbol Islam. Kelompok Siyasi juga mendirikan ormas yang tujuannya mendirikan Khilafah Islam; (4) kelompok salafi, yaitu kelompok (termasuk penyebar ajaran wahabi) yang menuduh kelompok lain sebagai pelaku bid'ah, syirik dan khurafat. Kelompok ini sering melakukan penguasaan masjid-masjid perkantoran untuk menyebarkan ideologinya. Kelompok ini paling getol menganggap bid'ah kegiatan keagamaan seperti Maulud Nabi dan Isra' Mi'raj. Media yang digunakan oleh kelompok ini untuk penyebaran fahamnya adalah berbagai media baik media cetak, sosial media, radio maupun TV (Hasil-hasil Muktamar ke 33 NU, h. 313-315).

4. Membangun Masyarakat Adil dan Toleran

a. Islam sebagai Agama yang Adil dan Toleran

Umat Islam adalah umat yang diperkenalkan oleh Allah Swt sebagai ummatan washatan, sebagaimana dalam surat al-Baqarah/2:143,



“Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu...”

Makna washatiyah atau moderasi dalam surat al-Baqarah/2:143 di atas, dipahami oleh KH Afifuddin Muhajir Situbondo (2015: xiv-xviii) salah satunya dalam arti waqi’iyah (realistis). Menurut beliau, banyak kaidah fikih yang mengacu pada prinsip (realistis) ini, di antaranya: (1) kemadaratan itu harus dihilangkan; (2) apabila suatu perkara itu sempit, maka hukumnya menjadi luas, sebaliknya jika suatu perkara itu luas, maka hukumnya menjadi sempit; (3) menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan; (4) turun ke realitas yang lebih rendah ketika tidak mungkin mencapai idealitas yang lebih tinggi; (5) beradaptasilah dengan mereka selama kamu berada di kediaman mereka dan hormatilah mereka selama kamu ada di kampung mereka.

Dakwahnya beberapa wali songo, terutama Sunan Kalijaga dan Sunan Kudus mencerminkan beberapa kaidah di atas. Sunan Kalijaga sangat toleran pada budaya lokal sehingga ajarannya terkesan sinkretis (penyesuaian antara aliran-aliran) dalam mengenalkan Islam. Sarana dakwah yang digunakannya adalah seni ukir, wayang gamelan, dan seni suara suluk. Dalam dakwahnya, ia mengenalkan baju takwa, perayaan sekatenan, grebeg maulud, layang kalimasada, dan lakon wayang petruk jadi raja. Juga lanskap pusat kota berupa kraton, alun-alun dengan dua beringin serta masjid. Sedangkan

Sunan Kudus, dalam dakwahnya, ia menggunakan menggunakan simbol-simbol Hindu dan Budha yang dapat dilihat melalui arsitektur Masjid Kudus (Situbondo, 2015: xiv-xvi).

Berkembangnya Islam di tangan para wali telah menjadikan Islam sebagai agama yang berkembang nyaris tanpa ketegangan dan konflik. Masyarakat Indonesia yang ketika itu kuat memegang keyakinan mereka, terutama Budha dan Hindu, setahap demi setahap masuk ke dalam Islam tanpa paksaan. Susah untuk dibayangkan, jika ketika itu para wali berdakwah dengan kekerasan atau dengan saling mengkafirkan kepada masyarakat. Di tangan para wali, Islam berkembang menjadi agama yang akomodatif, yaitu agama yang menciptakan rasa damai dan toleran untuk hidup berdampingan dengan pengikut agama lain.

b. Masyarakat Adil dan Toleran di Indonesia

Beberapa teori yang dikemukakan oleh Syafi'i Ma'arif (dalam *Ilusi Negara Islam*, 2009, Wahid [ed], h. 7-10) terkait maraknya faham fundamental atau radikal, yaitu: (1) kegagalan umat Islam menghadapi arus modernitas yang dinilai telah sangat menyudutkan Islam. Karena ketidak berdayaan menghadapi keadaan ini, kaum fundamentalis mencari dalil-dalil agama untuk "menghibur diri", bahkan hingga mereka menyusun kekuatan politik untuk melawan modernitas dengan segala cara, yang menyebabkan mereka harus berbenturan dengan kaum muslimin lainnya yang menentang cara-cara yang mereka lakukan; (2) besarnya gelombang fundamentalisme didorong oleh rasa kesetiakawanan terhadap nasib yang menimpa saudara-saudaranya di berbagai belahan dunia. Kesetiakawanan ini diperlihatkan melalui berbagai bentuk kekerasan, yang terkadang dilakukan bukan di negara konflik; (3) maraknya fundamentalisme di Nusantara disebabkan oleh kegagalan negara mewujudkan cita-cita kemerdekaan berupa tegaknya keadilan sosial dan terciptanya

kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat, sehingga kaum fundamentalis berkeinginan agar syari'at Islam dilaksanakan, dan jika secara nasional belum mungkin, maka diupayakan melalui Perda-perda.

c. Upaya NU Menuju Masyarakat Adil dan Toleran

NU adalah organisasi keagamaan yang faham keagamaannya didasarkan kepada sumber ajaran agama Islam, yaitu al-Qur'an, sunnah, ijmak, dan qiyas. Dalam memahami sumber ajaran di atas, NU mengikuti faham Ahlussunnah Wal Jama'ah yang menggunakan jalan pendekatan: (1) di bidang aqidah, NU mengikuti Ahlussunnah Wal Jama'ah yang dipelopori oleh Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Manshur al-Maturidzi; (2) di bidang fiqih, Nahdlatul Ulama mengikuti jalan pendekatan (al-madzhab) salah satu dari madzhab Abu Hanifah al-Nu'man, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'I dan Imam Ahmad bin Hanbal; (3) di bidang tasawuf, mengikuti antara lain Imam al-Junaidi al-Baghdadi dan Imam al-Ghazali serta imam-imam yang lain. Selain itu, NU mengikuti pendirian, bahwa Islam adalah agama yang fitri, yang bersifat menyempurnakan segala kebaikan yang sudah dimiliki manusia. Faham keagamaan yang dianut oleh NU bersifat menyempurnakan nilai-nilai yang baik yang sudah ada dan menjadi milik serta ciri-ciri suatu kelompok manusia seperti suku maupun bangsa dan tidak bertujuan menghapus nilai-nilai tersebut (Khittah Nahdlatul Ulama, dalam Hasil-hasil Muktamar ke 33 NU, h. 98).

Pada tahun 1990, dilakukan halaqah di Pondok Pesantren Manba'ul Ma'arif Denanyar Jombang untuk merumuskan metode bahtsul masa'il yang lebih progressif. Halaqah tersebut menghasilkan beberapa rekomendasi, yaitu: (1) cara terbaik untuk memahami dan mengamalkan ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Sunnah adalah dengan sistem bermadzhab; (2) bermandzah itu ada

dua, yaitu bermadzhab secara manhaji dan bermadzhab secara qauli; (3) bagi orang awam dianjurkan untuk bermadzhab secara qauli, sedangkan bagi ulama yang telah memenuhi kualifikasi sebagai mujtahid mutlak dipersilahkan untuk bermadzhab secara manhaji; (4) bermadzhab secara manhaji dilakukan secara kolektif (istinbath jama'i) setelah dalam masalah yang dibahas tidak ditemukan aqwal (pendapat) dari madzhab empat. Jika terdapat aqwal, tetapi masih bersifat mukhtalaf fih, maka ditempuh taqirir jama'i (penyeleksian pendapat secara kolektif); (5) bermadzhab secara manhaji ataupun qauli dilakukan dalam bingkai al-madzhab al-arba'ah (Aminuddin, 2008: 40).

Dalam perkembangannya, NU semakin akrab sebagai organisasi yang dikenal memiliki ragam pemikiran fiqh yang terkadang dianggap "kebablasan", terutama ragam pemikiran yang sering diperlihatkan oleh kaum mudanya. Dalam simpulan Luthfi Hadi Aminuddin (2008: 49), perkembangan nalar fiqh NU ditipologikan dalam tiga tipe sebagai berikut: (1) tipe konservatif (tradisional) yang merupakan model pemikiran yang dominan. Kelompok ini lebih sering memecahkan masalah melalui madzhab qauli. Di antara kelompok ini adalah ulama-ulama alumni pesantren salaf; (2) tipe modern, yaitu mereka yang mengusung wacana kontekstualisasi hukum Islam. Kelompok ini lebih sering memecahkan masalah melalui madzhab manhaji. Di antara kelompok ini adalah Sahal Mahfudz dan Ali Yafie; (3) tipe liberal, yaitu mereka yang berpandangan bahkan mendesak untuk dilakukannya pembaharuan ushul fiqh, karena ushul fiqh yang ada dianggap sudah tidak memadai untuk memecahkan masalah-masalah kontemporer. Di antara kelompok ini adalah Masdar F Mas'udi dan Ulil Abshar. Dari ketiga nalar fiqh di atas, mungkin tipe liberal dapat ditempatkan sebagai tipe yang paling keras jika dikaitkan dengan upaya untuk meredam aksi kekerasan dan keberceraian atas nama agama. Luthfi

Hadi Aminuddin (2008: 48) sedikitnya ada empat pokok yang menjadi garis perjuangan tipe liberal ini, yaitu: (1) memperkokoh landasan demokratisasi lewat penanaman nilai-nilai pluralisme, inklusivisme, dan humanisme; (2) membangun kehidupan keberagaman yang berdasarkan pada penghormatan atas perbedaan; (3) mendukung dan menyebarkan gagasan paham Islam yang pluralis, terbuka, dan humanis; (4) mencegah pandangan keagamaan yang militan dan sarat dengan kekerasan.

Tipe kedua adalah tipe modern. Pada tipe ini, ulama besar NU yaitu KH Sahal Mahfudz dan Ali Yafie termasuk di dalamnya. Sosok KH Sahal Mahfudz adalah sosok yang tidak asing dengan fiqh sosialnya. Selain beliau memiliki pesantren yang gagasannya beliau kembangkan kepada para santrinya, beliau juga aktif menulis gagasannya dapat dibaca oleh masyarakat luas. Ketika Mukhtamar ke 33 NU di Jombang, sosialisasi Islam toleran dan fiqh sosialnya Sahal Mahfuzh menjadi kajian utama untuk beberapa seminar yang diadakan, antara lain: (1) Institut Agama Islam Bani Fattah (IAIBAFa) menyelenggarakan bedah buku "Al-Nushush al-Islamiyah fi Raddi 'Ala Madzhab al-Wahhabiyah" karya KH. Faqih Maskumambang dengan tema "Islam Rahmatan lil 'Alamin dalam bingkai Islam Nusantara", dan narasumber KH. Aziz Masyhuri (Ulama dan Peneliti Karya Nusantara), Abd Mun'im DZ (Wakil Sekjen PBNU), dan M. Guntur Romli (Intelektual Muda NU); (2) Institut Agama Islam Bani Fattah (IAIBAFa) menyelenggarakan bedah buku "Ensiklopedia NU" dengan tema "Islam Rahmatan lil 'Alamin dalam bingkai Islam Nusantara"; (3) Institut Agama Islam Bani Fattah (IAIBAFa) menyelenggarakan Forum Ulama Internasional bertema "Meneguhkan Moderasi Beragama dan Berpolitik dan Memproyeksikan Kebangkitan Islam", dengan narasumber syekh Abdel Monem Fouad (Wakil Azhar Mesir), Syekh Abed al-Naser Jabri (Mufti Lebanon), Muhammad Amr (Tajammu

Ulama Lebanon), Syekh Ismail as-Sandawy (Syiria-Palestina), Syekh Zuhair Juaid (Tajammu Ulama Lebanon), Syekh Khaleed Abu Samra (Palestina), Syekh Adnan Trablusi (Global University Lebanon), dan Perwakilan Syekh Darul Fatwa Australia, Pakistan, dan Malaysia; (4) Institut Agama Islam Bani Fattah (IAIBAFa) menyelenggarakan bedah buku "Metodologi Fiqh Sosial" dengan tema "Mengenalkan Islam Nusantara melalui Fiqh Sosial", dan narasumber H. Syaiful Hidayat, Lc., M. HI, Umdah el-Baroroh MA, dan Tutik Nurul Jannah, MH; (5) Institut Agama Islam Bani Fattah (IAIBAFa) menyelenggarakan Seminar Nasional dan Diskusi Tasawuf, dengan tema "Pasang Surut Ulama NU dalam Pergulatan Nusantara", bersama KH. A. Mustofa Bisri (Rois 'Am PBNU), Prof. Dr. KH. Said Aqil Siraj, MA (Ketua PBNU), KH. Yahya C. Staquf (Katib Syuriah PBNU), Dr. KH. Luqman Hakim (Cahaya Sufi), dan Prof. Nadzir Syah Husain (Rais Syuriah NU Australia dan New Zeland); (6) Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang menyelenggarakan seminar Internasional, dengan tema "Menjelang Satu Abad; Quo Vadis Nahdlatul 'Ulama", dengan nara sumber Dr. HC. Ir, KH. Salahuddin Wahid (Pesantren Tebuireng), Prof. Mitsuo Nakamura (Pengamat NU. Chiba University), dan Prof. Martin Van Bruinessen (Pengamat NU. Utrecht University).

Beberapa upaya telah dilakukan oleh NU sebagai upaya mencapai kehidupan yang dicita-citakan. misalnya: (1) peningkatan silaturahmi, komunikasi, dan relasi-relasi antar ulama; (2) peningkatan kegiatan dibidang keilmuan, pengkajian, dan pendidikan; (3) peningkatan penyiaran Islam, membangun sarana-sarana peribadatan dan pelayanan sosial; (4) peningkatan taraf dan kualitas hidup masyarakat melalui berbagai kegiatan yang terarah (Khittah Nahdlatul Ulama, dalam Hasil-hasil Mukhtamar ke 33 NU, h. 101).

Dalam Khittah Nahdlatul ulama (dalam Hasil-hasil Muktamar ke 33 NU, h. 100), perilaku yang dibentuk oleh dasar keagamaan dan sikap kemasyarakatan Nahdlatul Ulama, baik dalam tingkah laku organisasi ataupun perorangan adalah: (1) Menjunjung tinggi nilai-nilai maupun norma-norma ajaran Islam; (2) mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi; (3) menjunjung tinggi sifat keikhlasan dan berkhidmah serta berjuang; (4) menjunjung tinggi persaudaraan (al-ukhuwah), persatuan (al-ittihad) serta kasih mengasihi; (5) meluhurkan kemuliaan moral (al-akhlaq al-karimah) dan menjunjung tinggi kejujuran (al-shidqu) dalam berfikir, bersikap dan bertindak; (6) menjunjung tinggi kesetiaan (loyalitas) kepada bangsa dan negara; (7) menjunjung tinggi nilai amal, kerja dan prestasi sebagai bagian dari ibadah kepada Allah Swt; (8) menjunjung tinggi ilmu-ilmu pengetahuan serta ahli-ahlinya; (9) selalu siap untuk menyesuaikan diri dengan setiap perubahan yang membawa kemaslahatan bagi manusia; (10) menjunjung tinggi kepeloporan dalam usaha mendorong memacu dan mempercepat perkembangan masyarakatnya; (11) menjunjung tinggi kebersamaan di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hasil sidang Komisi Bahtsul Masail Diniyyah Maudlu'iyah tentang Khashaish Aslussunnah Wal Jama'ah al-Nahdliyah (lihat, Hasil-hasil Muktamar ke-33 NU, 2015, h. 172-175) memahami wasathiyah yang sering diterjemahkan dengan moderasi memiliki beberapa pengertian sebagai berikut:

- 1) Keadilan di antara dua kezhaliman atau kebenaran di antara dua kebatilan, seperti wasathiyah antara atheisme dan poletheisme. Islam ada di antara atheisme yang mengingkari adanya Tuhan dan poletheisme yang memercayai adanya banyak Tuhan. Begitu juga wasathiyah antara boros dan kikir yang menunjuk pada pengertian tidak boros dan tidak kikir. Artinya, Islam mengajarkan agar seseorang di dalam memberi

nafkah tidak kikir dan tidak pula boros, melainkan ada di antara keduanya, yaitu al-karam dan al-jud.

- 2) Pemaduan antara dua hal yang berbeda/berlawanan. Misalnya, (a). wasathiyah antara ruhani dan jasmani yang berarti bahwa Islam bukan hanya memperhatikan aspek ruhani saja atau jasmanai saja, melainkan memperhatikan keduanya. Wasathiyah antara nushus dan maqâshid. Itu berarti Islam tak hanya fokus hanya pada nushus atau maqashid, melainkan memadukan antara keduanya; (b). Islam pun merupakan agama yang menyeimbangkan antara `aql dan naql. Bagi Islam, akal dan wahyu merupakan dua hal yang sama-sama memiliki peranan penting yang sifatnya komplementer (saling mendukung antara satu sama lain); (c). Islam menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat, antara individu dan masyarakat, antara ilmu dan amal, antara ushul dan furu', antara sarana (wasilah) dan tujuan (ghayah), antara optimis dan pesimis, dan seterusnya.
- 3) Realistis (wâqî'iyah). Islam adalah agama yang realistis, tidak selalu idealistis. Islam mempunyai cita-cita tinggi dan semangat yang menggelora untuk mengaplikasikan ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan hukumnya, tapi Islam tidak menutup mata dari realitas kehidupan yang justru lebih banyak diwarnai hal-hal yang sangat tidak ideal. Contoh wasathiyah dalam arti wâqî'iyah ini adalah pemberlakuan hukum 'azîmah dalam kondisi normal dan hukum rukhshah dalam kondisi dlarurat atau hajat.

Hasil sidang Komisi Bahtsul Masail Diniyyah Maudlu'iyah tentang Khashaish Aslussunnah Wal Jama'ah al-Nahdliyah (lihat, Hasil-hasil Muktamar ke-33 NU, 2015, h. 175-181) memahami wasathiyah dalam Islam Ahlussunnah wal Jama'ah tercermin dalam

semua aspek ajarannya, yaitu akidah, syariah, dan akhlaq/tasawwuf serta dalam manhaj. Dalam jam'iyah Nahdlatul Ulama sebagai bagian dari golongan Ahlus Sunnah Wal- Jama'ah, watak wasathiyah tersebut antara lain terjadi dalam hal-hal sebagai berikut:

- 1) Melandaskan ajaran Islam kepada al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai sumber pokok dan juga pada sumber-sumber sekunder yang mengacu kepada al-Qur'an dan al-Sunnah seperti ijma' dan qiyas.
- 2) Menjadikan ijihad sebagai otoritas dan aktifitas khusus bagi orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang tidak mudah untuk dipenuhi. Sedangkan bagi orang yang tidak memenuhi syarat-syarat ijihad tidak ada jalan lain kecuali harus bermazhab dengan mengikuti salah satu dari mazhab-mazhab yang diyakini penisbatannya kepada ashabu al-madzhab. Namun, Nahdlatul Ulama membuka ruang untuk bermadzhab secara manhaji dalam persoalan-persoalan yang tidak mungkin dipecahkan dengan bermadzhab secara qauli. Pola bermadzhab dalam NU berlaku dalam semua aspek ajaran Islam; aqidah, syariah/fiqh, dan akhlaq/tasawwuf, seperti dalam rincian berikut: (a). Di bidang syariah/fiqh, Nahdlatul Ulama mengikuti salah satu dari madzhab empat, yaitu madzhab Imam Abu Hanifah, Madzhab Imam Malik ibn Anas, madzhab Imam Muhammad bin Idris As-Syafii dan madzhab Imam Ahmad bin Hanbal. (b). Di bidang aqidah mengikuti madzhab Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan madzhab Imam Abu Manshur Al-Maturidi. (c). Di bidang akhlaq/tasawwuf mengikuti madzhab Imam Al-Junaid Al-Baghdadi dan madzhab Imam Abu Hamid Al-Ghazali.
- 3) Berpegang teguh pada petunjuk al-Qur'an di dalam melakukan dakwah dan amar makruf nahi mungkar, yaitu

dakwah dengan hikmah (bijak/arif), mau'idhah hasanah, dan mujadalah billati hiya ahsan.

- 4) Salah satu wujud dari watak wasathiyah dengan pengertian al-waqi'iyah (realistis), Nahdlatul Ulama menghukumi NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) dengan Pancasila sebagai dasarnya sebagai sebuah negara yang sah menurut pandangan Islam dan tetap berusaha secara terus menerus melakukan perbaikan sehingga menjadi negara adil makmur berketuhanan Yang Maha Esa.
- 5) Mengakui keutamaan dan keadilan para shahabat Nabi, mencintai dan menghormati mereka serta menolak dengan tegas segala bentuk penghinaan dan penistaan terhadap mereka apalagi menuduh mereka kafir.
- 6) Tidak menganggap siapa pun setelah Nabi Muhammad SAW. sebagai pribadi yang ma'shum (terjaga) dari kesalahan dan dosa.
- 7) Perbedaan yang terjadi di kalangan kaum muslimin merupakan salah satu dari fitrah kemanusiaan. Karena itu, menghormati perbedaan pendapat dalam masa'il furu'iyahijtihadiyah adalah keharusan. Nahdhatul Ulama tidak perlu melakukan klaim kebenaran dalam masalah furu'iyahijtihadiyah tersebut.
- 8) Menghindari hal-hal yang menimbulkan permusuhan seperti tuduhan kafir kepada sesama muslim (ahlu al-qiblah).
- 9) Menjaga ukhuwwah islamiyyah di kalangan kaum muslimin, ukhuwwah wathaniyyah terhadap sesama warga negara, dan ukhuwwah insaniyyah terhadap sesama umat manusia. Dalam konteks NU, menjaga ukhuwwah nahdliyah adalah keharusan terutama untuk menjaga persatuan dan keharmonisan seluruh warga NU.

- 10) Menjaga keseimbangan aspek ruhani dan jasmani dengan mengembangkan tasawwuf `amali, majelis-majelis dzikir dan shalawat sebagai sarana taqarrub ila Allah di samping mendorong umat Islam agar melakukan kerja keras untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Fenomenologi (*Phenomenology Approach*) yang berguna untuk menggambarkan keadaan atau fenomena yang terjadi dari realitas di sekitar kehidupan manusia. Bogdan dan Biklen (2003: 25) menegaskan bahwa penelitian dengan pendekatan fenomenologi “berusaha memahami makna dari suatu peristiwa atau fenomena yang saling berpengaruh dengan manusia dalam situasi tertentu”. Heidegger (Salim, 2006: 173) lebih fokus menegaskan bahwa “fenomenologi suatu metode mengintepretasikan eksistensi manusia”.

Peneliti tertarik memilih pendekatan fenomenologi ini didasari beberapa alasan: (1) sebagai sarana tepat mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, aktivitas sosial berkait Nahdlatul Ulama sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia. Sebagaimana nampak bahwa persentuhan NU dengan perubahan sosial dewasa ini telah mendapat perhatian serius dan menjadi fenomena sosial yang sayang kalau diabaikan. Selain aspek penting tentang pemahaman pentingnya memahami Nahdlatul Ulama, radikalisme, kerisauan NU dan upaya deradikalisasi menjadi bahan studi menarik. Terutama sistem pengetahuan yang dibangun pimpinan dan Kiai Pesantren, dari Pengurus Besar, Wilayah atau Cabang Nahdlatul Ulama serta Jamaah dan pengikut serta simpatisan dan peneliti serta pengamat akademisi yang secara langsung atau tidak langsung bersinggungan dengan Nahdlatul Ulama; (2) berdasar semangat besar fenomenologi, peneliti ingin mengungkap ‘*mode of thinking*’ dari para pimpinan dan tokoh Nahdlatul Ulama tersebut sehingga berguna untuk membantu munculnya kreatifitas, cara mengatur [*managing*] lembaga atau

organisasi sebagai cara hadir dia sebagai manusia. Ini yang mendasar, karena disadari peneliti bahwa *data don't speak themselves*.

Melalui metode kualitatif [*qualitative method*] peneliti akan berusaha mengamati entitas orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan subjek penelitian, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya, melihat fenomena di lingkungan penelitian, berusaha memahami dan memberi makna terhadap rangkaian peristiwa yang dilihatnya. Secara pribadi alasan peneliti memilih pendekatan kualitatif karena dengan visi *etik* dan *emik* dari kualitatif memungkinkan peneliti memanfaatkan data hasil wawancara, observasi, pengamatan dan dokumen dengan apa adanya. Di sisi lain, ada ruang bagi peneliti untuk memberi tafsiran atau opini atas peristiwa dan realitas yang terjadi dari setting penelitian.

Dengan penelitian ini akan mencoba melihat fenomena Nahdlatul Ulama, dasar profetis sikap moderasi Nahdlatul Ulama dan Upaya yang dilakukan NU dengan segala fenomena yang ada didalamnya. Melalui lembaga atau jamiyyah ini peneliti membaca ragam perubahan-perubahan sosial dan budaya yang berpengaruh terhadap tuntutan peran dan eksistensi NU. Juga memahami munculnya kesadaran baru akan faktor yang mendukung dan tantangan NU dewasa ini.

Argumen ini diinspirasi Lincoln dan Guba (1990: 19). Menurutnya perencanaan penelitian kualitatif adalah skema atau program dari penelitian yang berisi *outline* tentang apa yang harus dilakukan oleh peneliti mulai dari pertanyaan sampai pada analisis dan data final yang dilakukan. Penelitian kualitatif betolak dari asumsi realitas sosial yang bersifat unik, kompleks, dan ganda. Artinya penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang tepat untuk mengungkapkan fenomena di lingkungan Nahdlatul Ulama yang sedang peneliti teliti. Keuntungan metode kualitatif membuka peluang bagi peneliti untuk

cair, *chemistry*, dan membuka hubungan sangat dekat dengan responden. Sukmadinata (2006: 27) menguatkan “penelitian kualitatif berakar pada latar alamiah sebagai kebutuhan mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, memanfaatkan metode kualitatif, dan mengadakan analisis secara induktif”. Dalam penelitian kualitatif dapat dipelajari dan dieksplorasi serta difahami pengalaman manusia atau kelompok bahkan kepercayaan, yang telah terbentuk dan dialami oleh manusia, khususnya kalangan Kiai dan pesantren NU.

Penelitian kualitatif banyak dipilih peneliti dan dikenal dengan beberapa pilihan jenis semisal *etnografi*, *participant observation*, *etnometodologi*, serta istilah-istilah kualitatif seperti *case study*, *interpretive inquiry*, *natural inquiry*, dan *phenomenology*. Semua ini sebagai sebutan dari metode pendekatan kualitatif. Sedangkan Craswell (1988: 9) mengelompokkan penelitian kualitatif ke dalam lima pendekatan, yaitu: *biography*, *phenomenology*, *grounded theory*, *ethnography*, dan *case study*.

Penelitian tentang NU dan peran pentingnya dalam membendung radikalisme Islam Indonesia akan mudah dianalisis secara induktif, karena berkait realitas cair, umum dan kompleks. Pada peristiwa yang bersifat khusus dan kongkrit tepat didekati dengan analisis induktif. Menurut Moleong [2005: 5] sebagaimana sifat natural penelitian kualitatif, analisis induktif digunakan karena lebih dapat menemukan kenyataan ganda yang terdapat dalam data, hubungan peneliti dan responden dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasar beberapa argument dan pernyataan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa: (1) pilihan penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Karena selain memberi ruang peneliti sebagai instrument utama, juga dapat menjawab masalah yang kompleks, dengan secara terus menerus mencari makna yang bersifat konseptual didasarkan persepsi subyek yang diteliti; (2) melalui analisis deskriptif, mengutamakan proses dari sekedar

produk; (3) peneliti sebagai instrumen yang diperkenankan member interpretasi dan tafsiran walau bersifat subyektif.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

NU sebagai bidang studi baru dewasa ini telah mendapat respon masyarakat luas dan menjadi fenomena sosial yang menarik untuk diteliti. Ini berkait mulai tumbuhnya kesadaran akan potensi besar NU dan kekayaan khazanah intelektualisme Islam yang dimiliki NU. Dari sisi organisasi tersebar dari Pusat Wilayah, Cabang dan Ranting.

Pemilihan NU sebagai tempat dan setting studi didasarkan pada beberapa pertimbangan: (1) NU menjadi kekuatan baru Islam dengan perubahan evolutif yang menarik untuk di studi; (2) daya tarik dari Nahdlatul Ulama karena dapat berdialog dengan budaya setempat sehingga menunjukkan wajah ramah sehingga dapat menjadi alternative baru ditengah dinamika Islam Indonesia hari ini.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam rentang waktu relatif panjang dan berkesinambungan. Pada awal persiapan dan pengamatan awal untuk memperoleh data pendahuluan sudah di mulai dari semenjak Mei 2016 terutama dalam momentum besar Muktamar Nahdlatul Ulama Jombang Jawa Timur. Penelusuran data dilanjutkan pada 24 Juli 2016 di pengurus besar Nahdlatul Ulama Jl. Kramat Raya Jakarta dan Juga ke Wahid Institute Jakarta. Enrichment dilanjutkan dengan diskusi dan wawancara dengan tokoh nasional dan pimpinan Pesantren Nahdlatul Ulama di Jombang Pesantren Tebu Ireng dan UNISMA Malang pada Agustus 2016. Pada tahap Penelitian serius [wawancara, observasi, focus group discussion] menyangkut focus dan berbagai permasalahan penelitian mengenai dinamika NU, radikalisme dan upaya deradikalisasi yang dilakukan Nahdlatul

Ulama secara intensif berlangsung bulan Juli, Agustus sampai dengan September 2016. Tahap pendalaman berlangsung rentang Agustus 2016 sampai Desember 2016 sebagai sarana check and recheck data, dan juga enrichment data yang terlewat sebelumnya.

C. Data dan Sumber Penelitian

Secara keseluruhan data penelitian ini meliputi seluruh karakteristik yang berhubungan dengan NU. Radikalisme Islam Indonesia dan tantangan dan peran vital NU dalam mengembangkan Islam rahmatan lilalamin.. Penelitian ini banyak berhubungan dengan Pengurus NU, Kiai, pimpinan pondok pesantren yang terakait langsung dengan masalah ke NU an. Dalam penelitian ini peneliti banyak berhubungan dengan berbagai sumber dan informan.

Informan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua informan, yaitu informan kunci dan informan sekunder. Informan kunci (*key informan*) yang menjadi sumber utama untuk mendapatkan data berharga dari fokus penelitian dari faktor determinan yang menyangkut landasan, tujuan, organisasi isi, dinamika, tantangan dan landasan perjuangan organisasi Nahdlatul Ulama. Dalam hal ini Pimpinan Nahdlatul Ulama, Kiai Sepuh dan Musytasyar, Syuriyah dan Tanfidiyah Nahdlatul Ulama menjadi informan kunci. Informan Sekunder, yang menjadi sumber informasi adalah Kiai pesantren, Generasi Muda Nahdlatul Ulama, Penulis Muda Nahdlatul Ulama dan para aktivis yang memiliki jaringan koordinasi atau underbow Nahdlatul Ulama. Selain itu para mundir pesantren, ustadz dan juga santri dan pengamat atau peneliti yang dianggap memiliki pengetahuan memadai terkait NU.

Sedangkan sumber data didasarkan pada berbagai Dokumen dan naskah. Sumber data primer penelitian ini adalah dokumen AD/ART NU, Qanun Asasi Nahdlatul Ulama, Dokumen Aswaja yang di tulis KH Said Aqil Siradj (*Ahlu Sunnah dalam Lintas Sejarah*, LKPSM, 1997),

Hadaratus Syaikh Hasyim Asy'ari (*Risalah Aswaja dari Pemikiran, Doktrin hingga Model Ideal Gerakan keagamaan*, Ar-Ruzz Media, tt). *Nahdlatul Ulama Dinamika Ideologi dan Politik Keagamaan*, Khamami Zada dan Fawaiz Sadzali, Editor, Kompas, 2010, dan *Nahdlatul Ulama dari Berbagai sudut Pandang*, Lakpesdam, 1994.

Sumber data sekunder didasarkan pada dokumen, arsip, brosur, jurnal, buku yang berkaitan dengan dinamika, pemikiran, penelitian Nahdhatul Ulama dan riset terkait radikalisme yang sudah dipublikasikan ke publik. Peneliti sangat terbantu dengan informasi dari NU online situs resmi PB NU, yang sangat aktif menyuarakan suara dan pemikiran NU ke kinian. Publikasi dan Hasil Riset banyak membantu dalam penelitian ini, Misalnya Hamka Hasan tentang *Masa Depan Islam Radikal di Indonesia* (UIN Jakarta), Saepul Arif, *Deradikalisasi Islam Pandangan dan Strategi Islam Kultural* diterbitkan Koekoesan. Khamami Zada, *Islam Radikal Pergulatan ormas Ormas Garis Keras di Indonesia*, Hasym Muzadi Dkk, *Gerakan Radikal Islam di Indonesia dalam Sorotan*, Ahmad Imran, *Rekam Jejak Radikalisme Salafi Wahabi Sejarah, Doktrin dan Akidah*, Zaenuddin Fanani, *Radikalisme Keagamaan dan Perubahan Sosial*, Asia Foundation dan Muhammadiyah University Press 1982. Ahmad Suadi dkk, *Politisasi Agama dan Konflik Komunal Beberapa Isu Penting*, The Wahid Institute, 2007. dan A Ghaffar Karim, *Metamorfosis NU dan Politisasi Islam Indonesia*, LKIS, 1995. Publikasi ini cukup menjadi data penting untuk menunjang penelitian ini.

Dari Informan dan sumber ini akan menjadi bahan masukan berharga guna menghubungkan dengan perbagai program NU dan upaya deradikalisasi yang dilaksanakan. Dari sumber ini nanti akan didapatkan masukan berharga guna menemukan deskripsi utuh tentang NU dan segala aspek yang lahir dari dialog dengan perubahan sosial diluarnya. Ada empat faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan besarnya jumlah informan, yaitu: derajat keseragaman, presisi yang dikehendaki dalam

penelitian, rencana analisa, tenaga, waktu, dan biaya. Penarikan sampel penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman (1992: 47) adalah mengambil sepenggal kecil dari suatu keseluruhan yang lebih besar, dan penarikannya cenderung menjadi lebih purposive dengan tujuan yang jelas daripada acak.

Sesuai dengan kebutuhan data maka dalam penelitian ini Pengurus NU, Kiai yang memiliki afiliasi dengan NU, dan pihak-pihak yang terkait dengan program NU akan menjadi prioritas informan yang ditentukan secara *purposive* sampling. Pertimbangan penetapan subjek, yaitu: (1) subjek telah cukup lama menyatu dengan medan aktivitas yang diteliti; (2) subjek masih terlibat secara penuh atau aktif dalam lingkungan yang menjadi sasaran penelitian; (3) subjek mempunyai banyak waktu atau kesempatan untuk dimintai informasi.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan multi strategi, strategi-strategi yang bersifat interaktif, seperti observasi langsung, observasi partisipatif, wawancara mendalam, dokumen-dokumen, teknik-teknik pelengkap seperti foto, rekaman, dll. Strategi penelitian bersifat fleksibel, menggunakan aneka kombinasi dari teknik-teknik untuk mendapatkan data yang valid (Sukmadinata, 2007: 95).

Metode pengumpulan data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Metode observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. Metode observasi yang akan digunakan adalah observasi langsung dengan cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk kepentingan tersebut. Dalam hal

ini, teknik yang akan digunakan adalah *non participant observation* dimana peneliti berada di luar subyek, yang pada dasarnya meliputi pengamatan tanpa menyembunyikan identitas seseorang dan kelompok. Dalam observasi ini peneliti tidak ikut terlibat langsung di dalam kehidupan orang yang diobservasi dan secara terpisah berkedudukan selaku pengamat.

Melalui teknik pengamatan ini, diharapkan gambaran mengenai: (1), dinamika NU, radikalisme dan usaha yang dimainkan NU disampaikan apa adanya dari sumber atau penutur dan hubungan dengan peneliti tetap dapat berjalan secara wajar; (2) budaya akademik dan dialogis terbuka akan mudah dilihat tanpa ada unsur rekayasa; (3) mengurangi resiko kegaduhan. Biasanya informan sangat mudah terpecah perhatiannya ketika melihat hal baru atau orang baru yang baru dilihatnya. Disini perlunya berjarak.

2. Wawancara

Jenis wawancara yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tak terstruktur. Wawancara ini mirip dengan percakapan informal. Metode ini bertujuan untuk memperoleh bentuk-bentuk informasi tertentu dari semua informan, tetapi susunan kata dan urutannya disesuaikan dengan ciri-ciri setiap respondens. Wawancara dilakukan guna mengubah data menjadi informasi secara langsung yang diberikan oleh seseorang (subjek). Pendekatan ini memungkinkan untuk mengukur apa yang diketahui oleh seseorang (pengetahuan dan informasi), apa yang disesuaikan dan apa yang tidak disesuaikan oleh seseorang (nilai dan prefensi), dan apa yang difikirkan seseorang (sikap dan kepercayaan). Obyek sasaran meliputi tokoh besar NU nasional, Kiai Pesantren NU, Pengasuh Pesantren, Mundir, kepala Universitas, Rektor, Direktur Lembaga terkait NU.

Dalam teknik wawancara tak terstruktur ini, peneliti akan melakukan wawancara berbentuk dialog dengan informan, *Focus Group Discussion*, dengan tetap berpatokan kepada sejumlah pertanyaan yang telah disiapkan (*unstructured interview*). Berdasar daftar check list yang sudah disiapkan peneliti. Dalam wawancara ini, peneliti mengharapkan data mengenai: (1) kebijakan pimpinan terkait dengan Program NU; (2) respon atas berbagai tuntutan upaya deradikalisasi; (3) keterlibatan berbagai bidang sosial, kemasayarakatan NU dalam merespon perkembangan baru.

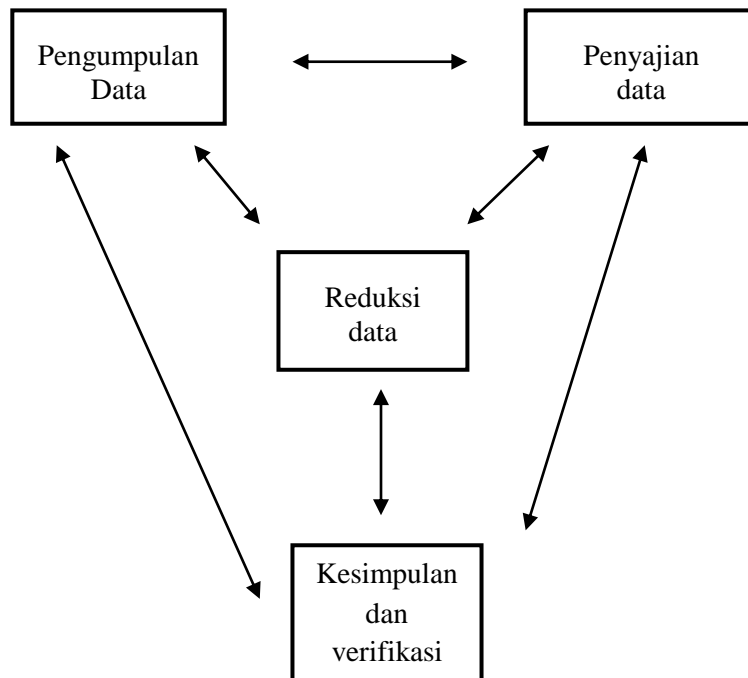
3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah merupakan sumber non manusia, sumber ini adalah sumber yang cukup bermanfaat sebab telah tersedia sehingga akan relatif murah pengeluaran biaya untuk memperolehnya, merupakan sumber yang stabil dan akurat sebagai cermin situasi/kondisi yang sebenarnya serta dapat dianalisis secara berulang-ulang dengan tidak mengalami perubahan.

Metode dokumentasi dalam penelitian ini akan digunakan untuk melihat data tentang: (1) sejarah dan latar belakang pendirian NU; (2) struktur organisasi; (3) data base keanggotaan dan jaringan kerja NU.

E. Tehnik Analisis Data

Analisis data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah model analisis data mengalir (*flow model*). Sejumlah langkah analisis terdapat dalam model ini, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman, 1992: 15-20).



Gambar 3.1. Komponen Analisis Data (Miles dan Huberman, 1992: 15-20)

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yakni dari hasil wawancara, pengamatan, dan dokumentasi.

2. Reduksi Data

Proses reduksi data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yakni dari pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Setelah dibaca, dipelajari, maka langkah selanjutnya adalah mengadakan reduksi data. Langkah ini berkaitan

erat dengan proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, dan mentransformasikan data mentah yang diperoleh dari hasil penelitian. Reduksi data dilakukan selama penelitian berlangsung, bahkan seperti telah dijelaskan di atas, langkah ini dilakukan sebelum data benar-benar dikumpulkan.

F. Penyajian Data

Setelah melalui reduksi data, langkah selanjutnya dalam analisis data adalah penyajian data atau sekumpulan informasi yang memungkinkan peneliti melakukan penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data yang umum dilakukan dalam penelitian kualitatif adalah teks naratif yang menceritakan secara panjang lebar temuan penelitian. Namun, untuk teks naratif pada tempat tertentu akan dialihkan menjadi bentuk matrik, naratif, jaringan kerja, dan tabel. Untuk itu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan kedua bentuk penyajian data di atas.

G. Penarikan Kesimpulan

Setelah data yang terkumpul direduksi dan selanjutnya disajikan, maka langkah yang terakhir dalam menganalisis data adalah menarik kesimpulan atau verifikasi. Analisisnya menggunakan analisis model interaktif, artinya analisis ini dilakukan dalam bentuk interaktif dari ketiga komponen utama tersebut. Data yang terkumpul dari hasil pengamatan, wawancara, dan pemanfaatan dokumen manajemen perencanaan kurikulum yang sedemikian banyak direduksi untuk dipilih mana yang paling tepat untuk disajikan. Proses pemilihan data akan difokuskan pada data yang mengarah untuk pemecahan masalah, penemuan, pemaknaan, atau untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Data disajikan secara sistematis, agar lebih mudah dipahami interaksi antara bagian-bagian dalam konteks yang utuh sehingga

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan/verifikasi. Penarikan kesimpulan tidak lepas dari fenomena permasalahan yang diteliti. Penarikan kesimpulan dilakukan sejak peneliti berusaha mencari makna dari data yang terkumpul, dalam hal ini tema hubungan dan kesamaan dari hal-hal yang sering timbul. Dari data yang diperoleh peneliti mencoba untuk mengambil kesimpulan, dan kesimpulan tersebut mula-mula masih sangat kabur dan perlu dikaji ulang. Akan tetapi dengan bertambahnya data melalui verifikasi, maka diperoleh kesimpulan yang mantap.

H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data dari penelitian ini dilakukan dengan teknik-teknik berikut ini:

1. *Credibility dan transferability*

Credibility dan *transferability* atau validitas desain menunjukkan tingkat kejelasan fenomena hasil penelitian sesuai dengan kenyataan. Dalam penelitian kuantitatif validitas ini berkenaan dengan validitas internal atau inferensi kausal, validitas eksternal atau generalisasi, objektivitas atau sesuai kenyataan dan reliabilitas atau keajegan.

Sedangkan validitas desain kualitatif menunjukkan sejauhmana tingkat interpretasi dan konsep-konsep yang diperoleh memiliki makna yang sesuai antara partisipan dengan peneliti, (Sukmadinata, 2007: 104). Baik peneliti maupun partisipan memiliki kesesuaian dalam mendeskripsikan dan menggambarkan peristiwa terutama dalam menarik makna dari peristiwa.

Menurut Millan dan Schumacher, "Validitas desain kualitatif adalah tingkat dimana interpretasi dan konsep memiliki makna yang sama (*mutual meanings*) antara peneliti dan partisipan. Peneliti dan partisipan sepakat tentang deskripsi dan komposisi sebuah kegiatan, utamanya makna kegiatan tersebut," (1993: 407).

Guna mendapatkan data penelitian yang kredibel, peneliti akan akan berpedoman pada Lincoln dan Guba (1985) yang mengelompokkan teknik pencapaian kredibilitas menjadi: (a) perpanjangan waktu tinggal di lokasi penelitian; (b) mengadakan observasi secara tekun (*persistent observation*); (c) menguji secara triangulasi (*trianggulasi*); (d) mengadakan analisis kasus negative (*negative case analysis*); (e) mengadakan pengecekan anggota (*member check*), mengadakan diskusi dengan teman sejawat (*peer debriefing*); (f) mengadakan pengecekan dan kecukupan referensi (*referential adequacy checks*).

a. Perpanjangan keikutsertaan

Melalui teknik ini peneliti dapat menguji ketidakbenaran informasi yang diperkenalkan oleh distorsi, baik yang berasal dari diri sendiri maupun dari responden, dan membangun kepercayaan subjek sehingga dapat dipastikan apakah konteks itu difahami dan dihayati.

Peneliti juga akan terjun ke lapangan dalam waktu yang cukup panjang guna mendeteksi dan memperhitungkan distorsi yang mungkin mengotori data, khususnya distorsi pribadi. Peneliti dalam menghadapi distorsi ini akan menentukan apakah benar-benar ada distorsi; apakah distorsi itu disengaja atau tidak; dari mana atau dari siapa sumbernya; dan bagaimana strategi menghadapinya.

Teknik ini juga akan dilakukan untuk membangun kepercayaan para subjek terhadap peneliti dan juga kepercayaan diri sendiri. Kepercayaan ini merupakan proses pengembangan yang berlangsung setiap hari dan merupakan alat untuk mencegah usaha-usaha dari pihak subjek.

b. Ketekunan Pengamatan

Teknik ini digunakan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.

Peneliti melalui teknik ini juga akan mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol. Kemudian menelaahnya secara rinci sampai pada suatu titik sehingga pada pemeriksaan tahap awal tampak salah satu atau seluruh faktor yang ditelaah sudah difahami dengan cara yang biasa. Peneliti juga akan menguraikan secara rinci bagaimana proses penemuan secara tentatif dan penelaahan secara rinci tersebut dapat dilakukan.

c. Trianggulasi

Trianggulasi merupakan teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik trianggulasi yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi; trianggulasi dengan sumber, metode, penyelidik, dan teori.

Trianggulasi dengan sumber akan digunakan untuk membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Hal ini akan dilakukan dengan jalan: (1) membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara; (2) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi; (3) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu; (4) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti pandangan pejabat, karyawan biasa, dan pelanggan lain; (5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Trianggulasi metode digunakan untuk melalui dua strategi, yaitu: (1) pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian dengan beberapa teknik pengumpulan data; (2) pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

Trianggulasi dengan penyidik akan dilakukan dengan jalan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Pemanfaatan pengamat lainnya akan digunakan untuk mengurangi kemencengan dalam pengumpulan data.

Trianggulasi dengan teori akan digunakan dengan cara membandingkan hasil temuan dengan teori yang ada. Laporan hasil penelitian akan disertai dengan penjelasan guna meningkatkan derajat kepercayaan yang diperoleh.

d. Pemeriksaan sejawat

Teknik ini akan dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat dan pembimbing akademik. Teknik ini akan digunakan untuk membantu peneliti agar tetap mempertahankan sikap terbuka dan kejujuran. Dalam diskusi, kemencengan peneliti disingkap dan pengertian mendalam ditelaah yang nantinya menjadi dasar bagi klarifikasi penafsiran.

e. Analisis kasus negatif

Teknik ini akan digunakan dengan jalan mengumpulkan contoh dan kasus yang tidak sesuai dengan pola dan kecenderungan informasi yang telah dikumpulkan dan digunakan sebagai bahan pembandingan.

2. *Dependability/auditability* (Reliabilitas)

Dependability dan *auditability* atau reliabilitas dapat diulangi oleh peneliti lain dengan metode dan situasi sama. Hal ini tidak mungkin terjadi dalam penelitian kualitatif. Karena situasi dalam penelitian kualitatif adalah natural, sehingga tidak mungkin direkonstruksi kembali oleh orang lain dalam waktu yang lain. Faktor lain yang menyebabkan syarat reliabilitas tidak bisa diterapkan pada penelitian kualitatif adalah bahwa cara melaporkan hasil penelitian oleh peneliti bersifat *ideosyncartic* dan *individualistic* sehingga selalu berbeda dari peneliti ke peneliti.

Dalam penelitian kualitatif, reliabilitas dipengaruhi oleh: (a) status dan kedudukan peneliti di kalangan anggota kelompok yang diselidiki dan hubungan pribadinya dengan partisipan; (b) pilihan dan informan; (c) situasi dan kondisi sosial yang memengaruhi informasi yang diberikan; (d) definisi konsep; (e) metode pengumpulan dan analisis data penelitian.

Dependabilitas ditunjukkan sejauhmana kualitas proses dalam mengkonseptualisasikan penelitian, nilai, dan pengumpulan data, interpretasi temuan dan pelaporan yang dimintakan pihak-pihak atau orang-orang yang telah pakar atau ahli dalam penelitian kualitatif, fungsi orang tersebut hanya sebagai editor yang memberikan koreksi secara independen terhadap proses penelitian.

Usaha yang akan dilakukan untuk mempertinggi reliabilitas internal adalah: (a) uraian deskriptif yang kongkrit; (b) membentuk tim peneliti; (c) menggunakan partisipan lokal sebagai asisten peneliti; (d) meminta pendapat atau pertimbangan ahli lain; (e) pencatatan data atau informasi dengan alat mekanis. Reliabilitas dalam penelitian ini akan dilakukan untuk mempertajam uraian deskriptif yang kongkrit yaitu pengungkapan data wawancara dan dokumen dengan konfirmasi berulang-ulang terhadap responden, meminta pendapat dan pertimbangan peneliti lain yang

menggunakan pendekatan kualitatif, dan pencatatan data atau informasi dengan alat mekanis menggunakan komputer.

3. *Confirmability* (Objektivitas)

Confirmability atau objektivitas dalam penelitian kualitatif berarti jujur, peneliti mencatat apa yang dilihat, didengar, ditangkap, dirasakan berdasarkan persepsi dan keyakinan dia, tidak dibuat-buat atau direka-reka, (Sukmadinata, 2007: 105). Data yang ditemukan dianalisis secara cermat dan teliti, disusun, dikategorikan secara sistematis, dan ditafsirkan berdasarkan pengalaman, kerangka pikir dan persepsi peneliti tanpa prasangka dan kecenderungan-kecenderungan tertentu.

Subjektivitas sebagai lawan dari objektivitas memang harus dihindari dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian kualitatif dianggap objektif bila dibenarkan atau dikonfirmasi oleh peneliti lain. Oleh karenanya istilah objektivitas dalam penelitian kualitatif sering disebut *confirmability*.

Konfirmabilitas merupakan proses mengacu pada hasil penelitian. Apabila konfirmabilitas ini menunjukkan data cukup koheren, maka temuan penelitian dipandang memenuhi syarat, namun bila tidak cukup koheren, maka temuan dianggap gugur dan peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data. Oleh karena itu, peneliti akan berusaha meningkatkan kredibilitas agar hasil penelitian bisa diterapkan oleh orang lain. Penelitian kualitatif melibatkan segi-segi subjektif, tetapi tidak berarti peneliti bebas menafsirkan apa yang ia lihat, dengar, rasakan semau dia, dia harus jujur atau disiplin terhadap dirinya (Sukmadinata, 2007: 105).

Melalui prosedur penelitian ini akan mempermudah sekaligus memberi rambu-rambu dan petunjuk yang jelas berkait dengan beragam masalah, faktor dan perubahan-perubahan yang terjadi pada Nahdlatul Ulama. Penelitian ini dapat memberikani

pemaknaan pada permasalahan yang tertuang dalam teks atau realitas yang muncul dari realitas radikalisme di Indonesia. Khususnya, problem, tantangan dan organisasi NU. Selain itu penelitian ini dapat mengungkap makna-makna tersirat dibalik program, pemikiran NU, aktivitas yang berkait masalah itu, atau respon masyarakatnya.

Dari analisa yang dilakukan diharapkan akan diketahui realitas praktek dan pengelolaan dan tawaran deskripsi model deradikalisasi NU yang mungkin dapat menjadi kontribusi konseptual bagi perbaikan islam di Indonesia, mengatasi problem, mengetahui faktor pendorong, dan berbagai usaha perbaikan yang pada akhirnya menjadi data berharga guna menyusun kerangka Gerakan Islam Rahmatan Lil 'Alamin.

BAB IV

NU DAN IKHTIAR MENGAKHIRI KEKERASAN DAN MEMBANGUN ISLAM TOLERAN INDONESIA

A. TEMUAN HASIL PENELITIAN

1. Problem Kekerasan dan Kerisauan NU terkait Radikalisme Islam di Tanah Air

Salah satu bentuk kerisauan NU terkait radikalisme adalah *petroreligiositas*. *Petroreligiositas* adalah lahirnya transformasi keberagaman negara-negara kaya minyak. Di dunia Islam, negara yang gencar menyebarkan *petroreligiositas* adalah Arab Saudi dan Iran. Arab Saudi dengan paham salafi-wahabinya dan Iran dengan syiahnya. Melalui dana minyak yang melimpah, mereka menyebarkan pahamnya ke seluruh dunia. Bahkan antar keduanya telah terjadi semacam kontestasi yang saling menegasikan. *Petroreligiositas* juga merambah Indonesia. Bentuknya berupa transformasi pemikiran melalui buku-buku, yayasan, pesantren dan sekolah Islam yang berafiliasi dengan keduanya.

Menurut Syarif Hidayat dalam NU Online (2014) Nahdlatul Ulama (NU) dengan kekuatan basis massa tradisionalnya merupakan sasaran empuk gerakan *petroreligiositas*. Basis massa NU digerogeti sedikit demi sedikit. Salafi dan Syiah bergerak dengan dua titik. *Pertama*, ruang urban di perumahan-perumahan di kota, *kedua* di pedesaan terpencil. Ini merupakan taktik kaum *petroreligiositas*. Di perumahan-perumahan modern, kaum transnasional bisa dengan mudah mendapat kader. Sebab sosiologisnya karena ikatan warga penghuni perumahan relatif longgar. Warga perumahan pada dasarnya merupakan kalangan terpelajar kelas menengah keatas namun minim ilmu agama. Gerakan *petroreligiositas* dengan gigih berupaya merebut massa kalangan profesional. Mereka dengan

bangga akan mengatakan ke hadapan publik bahwa kader dan simpatisannya merupakan kalangan terpelajar dan profesional.

Kalangan awam di pedesaan terpencil juga merupakan sasaran empuk. Taktik yang dipakai mirip misionaris. Menyantuni kaum miskin sambil menyebarkan pahamnya. Baik di perumahan maupun kawasan terpencil NU relatif bergerak. Di perumahan kaum urban, NU relatif sulit didekati karena longgarnya basis soliditas antar warga. Kaum urban juga terkadang sinis terhadap para kiai dan ustadz NU yang dianggap konservatif dan tradisional. Di kawasan terpencil, NU terkena stigma sebagai pelindung kaum abangan. Posisi NU di kawasan terpencil kadang kalah gesit dengan ormas lokal Hidayatullah dan DDII. Dalam beberapa kasus sering dijumpai kalau gerakan Islam transnasional bisa berkembang karena memanfaatkan massa Islam modernis yang lebih dulu ada.

Bagi kalangan urban, para tokoh NU yang berstatus akademisi atau mereka yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi wajib didayagunakan. Kombinasi antara kiai salaf dengan kiai universitas wajib dilakukan demi dakwah di kota-kota. Tanpa dukungan akademisi, dakwah NU akan diminorkan kaum urban. Di desa terpencil, NU harus lebih kreatif dalam melindungi kaum abangan diantaranya dengan perbaikan syariat secara perlahan. Sebabnya, Kaum transnasional sering mendudukkan kaum abangan sebagai sasaran dakwah. Simpati terhadap Dakwah salafi-wahabi sebenarnya lebih banyak berasal dari kalangan abangan, bukan nahdliyyin. Kaum abanganlah penyumbang terbesar kader salafi-wahabi di Indonesia.

Petroreligiositas ini terjadi karena dalam anggapan mereka bahwa umat Indonesia terutama NU masih dianggap sebagai umat agama yang mempercampuradukkan antara syari'ah dengan bid'ah. Agama dipisahkan dengan negara, dan praktik-praktik agama masih berbau tradisi-tradisi animisme dan dinamisme. Padahal menurut Marzuki

Wahid (2014:3) bahwa inilah yang menjadi fenomena keislaman tersendiri yang berbeda dengan dunia Islam yang lain. Itulah yang disebut dengan Islam Nusantara.

Menurut Khairi Fuadi dalam www.islamnusantara.com bahwa Islam Nusantara adalah model keberagaman yang sejak lama menjadi model dakwahnya para Kyai di Jawa, para Buya di Sumatera, para Tuan Guru di Kalimantan, dan para Gurutta di Sulawesi. Islam Nusantara adalah Islam yang ketika harus berhadapan dengan *The Old Establishing Beliefs*— seperti Hinduisme di Indonesia, maka dengan lentur tidak menjadikan sapi sebagai hewan kurban karena sapi adalah hewan yang mulia menurut kepercayaan masyarakat Hindu. Para ulama kala itu paham bahwa Islam memperbolehkan kerbau dan kambing sebagai *substitute animal* (baca; pemain cadangan) untuk dikurbankan. Inilah prinsip Islam sebagaimana al-Qur`an ketika melarang minum khamr juga metodenya bertahap. Awalnya dengan menyatakan bahwa di dalam khamr terdapat *itsmun kabiir* (dosa besar) dan juga *manaafi' linnaas* (manfaat untuk manusia), hanya saja dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Lalu kemudian memerintahkan jangan melaksanakan shalat dalam keadaan mabuk, hingga pada akhirnya baru mengharamkan khamr secara tegas. Metode semacam ini dalam istilah Arab disebut dengan *tadriijiyyan*, atau *step by step*.

Islam Nusantara adalah Islam yang mengerti lokalitas sehingga masyarakat Islam Banjar sangat akrab dengan tradisi *baaruhan*, di Jawa ada tradisi slametan, bahkan muslim yang sudah meninggal dunia pun diurus sampai seratus hariannya dan diperingati setiap tahunnya. Islam Nusantara juga mengerti psikologis masyarakat untuk berkesenian hingga dikenal tradisi maulidan, barzanjian, diba'an, dan lain-lain.

Kesemua contoh di atas adalah ke-khasan tersendiri bagi corak keberislaman di Indonesia, yang jika digali lebih dalam adalah

identitas kearifan lokal (*local wisdom*) itu sendiri. Karena sejatinya identitas inilah yang mahal, identitas ke-Islaman dan ke-Indonesiaan. Seperti yang dicontohkan dari Kyai Haji Hasyim Asy'ary yang bertahun-tahun mengaji di Mekkah tapi mind set-nya tidak pernah ter-Arab-kan. Juga belajar dari Wapres legenda kita Mohammad Hatta yang belajar di Belanda tapi tidak ter-barat-kan. Beliau bahkan masyhur dengan gagasan ekonomi koperasinya, hingga gagasan politik luar negeri Mendayung di atas Dua Karang-nya yang sampai hari ini menjadi khas kebijakan luar negeri Indonesia yang nonblock dan nonaffiliate. Dengan demikian, sejarah mencatat untuk menjadi saksi bagaimana beliau tetap hidup Islami dengan sifat qana'ah-nya hingga sampai akhir hayatnya tidak mampu membeli sepatu bermerek mahal.

Islam Nusantara tidak pernah anti Arab tetapi Islam itu sendiri bukanlah Arabisme karena memang spiritnya universal. Turun sebagai agama langit (*samawi*), tapi eksistensinya membumi. Islam Nusantara juga tidak pernah anti-barat, karena prinsip dasarnya adalah memungut hikmah darimana pun sumbernya. Hikmah adalah milik orang Islam yang tercecceh. Karenanya, Islam Nusantara sangat menghargai tradisi dan sekaligus juga terbuka dengan modernitas.

Dengan demikian, tidak ada yang salah dengan islam nusantara, mereka yang tidak suka dengan islam nusantara karena tidak memahami kondisi masyarakat nusantara. Sehingga seharusnya tidak ada petroreligiusitas yang dilakukan mereka terhadap masyarakat Islam nusantara. Begitu pula islam nusantara tentunya memiliki prinsip-prinsip yang harus dipegang, menurut Said Aqil harus memiliki empat prinsip dalam islam nusantara. *Pertama* prinsip *ruhuddin*, yaitu semangat keagamaan yakni bahwa penekanan pada semangat keagamaan adalah akhlak. Islam nusantara harus menekankan pada akhlak terutama akhlak dalam berbudaya toleransi dan perdamaian sehingga menghindari dari perkelahian,

permusuhan dan pembunuhan antar penduduk nusantara. *Prinsip kedua*, semangat nasionalisme. Yakni bersama-sama membangun negeri ini dengan kekuatan nusantara yang dimiliki tanpa harus mempertentangkan perbedaan agama, budaya dan bahasa. *Ketiga*, prinsip semangat kebhinekaan. Yakni sebagai bangsa yang beragam agama, budaya dan bahasa harus menerima semua perbedaan tersebut. Karena kebhinekaan merupakan fitrah manusia. *Prinsip keempat*, *ruhul insaniyah* yakni semangat kemanusiaan bahwa manusia secara fitrahnya mendambakan kedamaian dan perdamaian tanpa harus berperang dan saling bunuh. Meskipun konflik sering terjadi antar manusia, namun tidak harus dengan jalan peperangan atau pembunuhan.

Islam nusantara bukanlah ajaran baru atau madzhab baru dalam Islam. Tetapi ini hanya semata pandangan umat Islam Indonesia yang melekat dengan budaya Nusantara. Inilah yang harus dipahami oleh umat Islam Indonesia. Kita harus menyatu dengan budaya itu, selama budaya itu baik dan tidak bertentangan itu semakin membuat indah Islam, kita tidak boleh menentang atau melawannya, terkecuali budaya yang bertentangan dengan syariat, seperti zinah, berjudi, mabuk dan lainnya. Said Aqil (2015) dalam republika.co.id.

Islam nusantara ini harus dipahami dan diperkuat oleh masyarakat islam Indonesia dalam rangka menghadapi kelompok islam radikal yang telah menjadi isu global. istilah Islam Nusantara merujuk pada fakta sejarah penyebaran Islam di wilayah Nusantara yang disebutnya "dengan cara pendekatan budaya, tidak dengan doktrin yang kaku dan keras." "Islam Nusantara ini didakwahkan merangkul budaya, melestarikan budaya, menghormati budaya, tidak malah memberangus budaya. Dari pijakan sejarah itulah, menurut Said Aqil, nya, NU akan terus mempertahankan karakter Islam Nusantara yaitu "Islam yang ramah, anti radikal, inklusif dan toleran." Said Aqil (2015 dalam www.bbc.com).

Bahkan menurut Azyumardi Azra dalam www.bbc.com (2015) bahwa model Islam Nusantara atau Islam Nusantara dibutuhkan oleh masyarakat dunia saat ini, karena ciri khasnya mengedepankan "jalan tengah". Karena bersifat *tawasut* (moderat), jalan tengah, tidak ekstrim kanan dan kiri, selalu seimbang, inklusif, toleran dan bisa hidup berdampingan secara damai dengan penganut agama lain, serta bisa menerima demokrasi dengan baik.

Kerisauan lainnya adalah ketidakadilan terutama terhadap umat islam di dunia yang mengakibatkan radikalisme islam bermunculan. Sebagaimana diungkap oleh As'ad Sa'ad Ali dalam NU Online (2015) bahwa kelompok radikalisme global pada dasarnya melakukan perlawanan terhadap ketidakadilan dunia. Isu yang mereka perjuangkan mampu menarik perhatian generasi muda muslim secara cepat dan mendunia karena mudah dicerna karena dikaitkan dengan ketidakadilan di Palestina (Al Aqsa), kesenjangan sosial-ekonomi di negara-negara muslim dan ekspansi budaya Barat yang dianggap merusak nilai-nilai Islam seperti hedonism dan materialism. Para pemimpin dunia Islam dianggap tidak berdaya dan tunduk pada kemauan Barat. Isu tersebut dengan cepat menyebar keseluruh penjuru dunia melalui jaringan maya, bukan saja di negara-negara Islam, tetapi juga di negara-negara Barat sebagai akibat kebijakan banyak negara yang memberikan perlindungan kepada kelompok-kelompok perlawanan yang lari dari negara masing-masing.

Oleh karena itu, menurut beliau (2015) Nahdlatul Ulama berpandangan sudah saatnya negara secara lebih serius melibatkan Ormas-ormas Islam meluruskan faham-faham radikal tersebut. Terorisme dan radikalisme, tidak hanya bisa diselesaikan oleh pemerintah dan aparat keamanan saja. Melibatkan Ormas-ormas besar pendiri republik seperti NU dan Muhammadiyah merupakan langkah yang bijaksana untuk memoderasi pandangan-pandangan

yang terlanjur ekstrim dan membentengi lingkungan internal masing-masing dari perembesan radikalisme.

NU ini besar, tapi jika tidak bisa memainkan perannya tidak akan terasa kebesarannya. Karenanya, sesuai dengan tantangan kekinian, kegiatan pertama yang harus diagendakan NU adalah memperkuat amal usaha ekonomi, pendidikan, dan sosial. Dibanding Muhammadiyah, jelas NU tertinggal dalam tiga bidang ini, terutama pendidikan tinggi, rumah sakit dan ekonomi.

Kedua, NU harus menjadi unsur utama masyarakat sipil. Dalam negara ada tiga kekuatan yakni: pengelola negara (pemerintah), pengusaha, dan masyarakat sipil. Nah, kekuatan yang terakhir adalah NU karena warga NU mencapai sekitar 40 persen dari seluruh penduduk Indonesia. Jika kekuatan masyarakat sipil tidak didukung oleh NU menjadi kurang kuat. Disinilah NU harus bergerak.

Pada zaman Gus Dur, NU telah membuktikan dirinya menjadi kekuatan utama masyarakat sipil melawan Orde baru yang otoriter. Karena sekarang sudah tidak otoriter lagi, maka NU tidak perlu melawan pemerintah. NU bukan oposisi, tetapi tetap kritis terhadap pemerintah. Dulu NU memperjuangkan demokrasi politik, sekarang NU harus memperjuangkan demokrasi ekonomi demi kesejahteraan rakyat.

Ketiga, saat ini NU harus melepaskan diri dari politik praktis dan kekuasaan. Tapi NU harus menerapkan politik kebangsaan, politik keumatan, dan politik kemasyarakatan. Maksudnya adalah jika NU melihat ada produk UU atau produk pemerintah lainnya yang tidak benar, NU harus merespon dan mengoreksi melalui tokoh-tokohnya yang ada di pemerintah dan parlemen, dari partai mana pun. Jadi, sudah bukan zamannya NU terlibat politik praktis. (Wawancara dengan Gus Shalah, 1 Agustus 2016 Pukul 13.00 di Pesantren Tebuireng Jombang).

Menurut Abdurrahman Wahid dalam *Ilusi Negara Islam* (2009:138) bahwa kerisauan lainnya terhadap kelompok radikalisme yang pemahaman mereka terhadap ideologi totalitarian-sentralistik dan politisasi syariah. Pandangan ideologis ini membawa konsekuensi ketentuan hukum yang totaliter dan sentralistik pula. Artinya, hukum harus mengatur semua aspek kehidupan umat tanpa kecuali dan negara mengontrol pemahaman dan aplikasinya secara menyeluruh. Itu sebabnya, dalam pandangan ini, pengamalan syari'ah tidak dapat dipisahkan dari politik. Begitu juga politisasi syari'ah yang muncul dari pemahaman mereka yang sempit dan terbatas terhadap syari'ah. Sebab Nahdlatul Ulama (NU) telah secara resmi menentang pemberlakuan Perda-perda Syari'ah. Rais Syuriah PBNU, KH. Sahal Mahfudz mengatakan bahwa, "Kita (NU) menentang pemberlakuan Perda-perda Syari'ah karena akan menjurus kepada perpecahan bangsa. Syari'ah bisa dilaksanakan tanpa perlu diformalkan." (2009:138).

Syariah Islam bagaimanapun tetap harus dijalankan oleh setiap muslim. Namun kelompok garis keras berpandangan bahwa konsep Islam Kaffah memiliki konsekuensi kewajiban untuk membentuk pemerintahan atau kekhalifan Islam. Sementara mayoritas umat Islam yang diwakili oleh NU dan Muhammadiyah berpandangan bahwa kewajiban utama adalah taat pada pemerintahan yang sah dan berdaulat, sedangkan bentuk dan sistem di negara masing-masing. Dua pandangan yang berbeda ini berimplikasi pada perbedaan cara memosisikan dan melihat syari'ah Islam, serta bagaimana syari'ah Islam itu beroperasi di tengah masyarakat, terutama masyarakat plural seperti Indonesia (2009:147).

Begitu juga yang perlu diwaspadai oleh masyarakat Islam Indonesia terutama NU menurut Hasyim Muzadi dalam yang dikutip oleh Abdurrahman Wahid (2009:189) bahwa masjid-masjid yang selama ini dibangun dan dikelola oleh warga NU telah banyak

diambil oleh kelompok-kelompok yang kerap membid'ahkan bahkan mengkafirkan warga NU itu. Hal ini juga senada diungkapkan oleh KH. Masdar F. Mas'udi yang mengungkapkan bahwa beberapa masjid milik warga NU telah disusupi dan diambil alih oleh kelompok-kelompok garis keras yang menklaim dirinya paling benar itu mencapai ratusan. Mereka menganggap masji-masjid NU mempraktikkan bid'ah dan beraliran sesat. Tradisi-tradisi ritual keagamaan khas NU pun diganti. Bahkan bukan hanya masjid-masjid, tetapi menyusup juga ke organisasi-organisasi lain seperti pesantren, majlis taklim dan lain sebagainya. (2009:192).

Oleh karena itu, Hasyim yang pada saat itu menjabat ketua NU telah menginstruksikan semua pengurus NU di seluruh Indonesia untuk menjaga masjid dan organisasi lainnya dari kelompok-kelompok garis keras. Sebab kelompok garis keras bukan hanya berbahaya bagi NU namun juga bagi bangsa Indonesia. Itu sebabnya, NU menyerukan agar pemerintah mencegah masuknya ideologi garis keras yang bercorak transnasional atau lintas negara itu ke Indonesia, walaupun seruan ini tampaknya masih bertepuk sebelah tangan. Hasyim juga menegaskan dan mengkampanyekan bahwa Islam merupakan agama bukan ideologi, dan yang terjadi di Timur Tengah selama ini bukan Islam sebagai agama, tetapi sebagai ideologi. "Ideologi Islam Timur Tengah antara lain Ikhwanul Muslimin, Majelis Mujahidin, al-Qaeda, dan sebagainya. Tapi ideologi Islam itu bukan Islam, karena Islam sebagai agama bukan bersifat gerakan kepentingan, apalagi politisi. (2009:194).

2. Pandangan NU tentang Radikalisme Islam dan Prinsip Dasar Moderasi NU

Kekerasan agama di Indonesia sudah diatas ambang batas Toleransi. Agama menjadi picu konflik, berubah menjadi sumber konflik diberbagai daerah. Agama tampil dalam wajah yang

menakutkan, menjadi sumber legitimasi melakukan kekerasan. Misal: poso, papua, kalimantan, sulawesi, ambon, maluku, tasik, madura, dll. Dalam kadar tertentu juga terjadi di Cirebon. Akibat persentuhan agama dan dinamika sosio- kultural, sering terabaikan oleh kepentingan manusia yang meningkat (rising demands). Akibatnya peran vital agama seringkali tereliminasi dalam kehidupan manusia. Agama mengalami desakralisasi, kehilangan spirit transendentalnya. Konflik dengan kekerasan di Indonesia mengakibatkan kematian 10.758 orang sejak 1990-2003. (UNDP-Bappenas, 2005). proporsi terbesar yaitu konflik yang bersifat etno-komunal (antar etnik, agama dan sekte agama) sebesar 89.3 persen atau menelan 9.612 korban. Konflik terjadi di 14 propinsi dimana kasus tertinggi terjadi di Maluku Utara (72 insiden dan 2.794 korban jiwa); Maluku (332 insiden dan 2.046 korban jiwa) dan Kalimantan Barat (78 insiden dan 1.515 korban jiwa). Harga yang terlalu mahal. Terlalu banyak korban nyawa yang sia sia. Karenanya upaya strategis mengurangi kekerasan agama harus dilakukan. Jika dibiarkan berlarut akan merugikan semua pihak. Secara khusus Indonesia sebagai bangsa besar. NU sebagai salah satu pilar keindonesiaan juga diharuskan memiliki perhatian terkait masalah seperti ini. Karenanya penting kemudian melihat dasar profetis yang menjadi pijakan moderasi Nahdlatul Ulama dalam beragama di Indonesia.

Dalam Qanun Azazi Nahdlatul Ulama yang ditulis Rais Akbar Jam'iyah Nahdlatul Ulama KH. Muhammad Hasyim Asy'ari di sebutkan landasan profetis yang penting bagi dasar kemasyarakatan Nahdlatul Ulama. Al-Qur'an 10: 99, 2: 256, dan 2: 62 sebagai berikut:

- a. Surat Yunus, 10: 99,



b. Surat al-Maidah/5: 65,

| | |
|----------|----------|
| <p> </p> | <p> </p> |
|----------|----------|

c. Surat al-Maidah/5: 68-69,

| | |
|----------|----------|
| <p> </p> | <p> </p> |
|----------|----------|

Bahkan juga disebut dalam terjemah misalkan,

- a. "Serulah ke jalan Tuhanmu dengan bijaksana, peringatan yang baik dan bantulah mereka dengan yang lebih baik. Sungguh Tuhanmulah yang mengetahui siapa yang sesat dari jalanNya. Dan Dia Maha mengetahui orang orang yang mendapat hidayah."
- b. "Maka berilah kabar gembira hamba-hambaKu yang mendengarkan perkataan dan mengikuti yang paling baik darinya. Merekalah orang orang yang diberi hidayah oleh Allah dan merekalah orang orang yang mempunyai akal."

- c. Juga scara gambling disebutkan, “Dan sesungguhnya inilah jalan-Ku (Agama-Ku) yang lurus. Maka ikutilah Dia dan jangan ikuti berbagai jalan (yang lain) nanti akan menceraiberaikan kamu dari jalanNya.Demikianlah Allah memerintahkan agar kami semua bertaqwa.”
- d. “Wahai orang orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, serta Ulil amri di antara kamu, kemudian jika kamu berselisih dalam satu perkara, maka kembalikanlah perkara itu kepada Allah dan Rasul, kalau mau benar-benar beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Yang demikian itu lebih bagus dan lebih baik kesudahannya.”
- e. “Maka orang-orang yang beriman kepadaNya (Kepada Rasulullah) maka memuliakannya, membantunya dan mengikuti cahaya (Al-Qur’an) yang di turunkan kepadanya, mereka itulah orang orang yang beruntung.”
- f. “Dan orang orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Ansur) pada berdoa: Ya Tuhan ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami beriman dan janganlah Engkau jadikan dalam hati kami kedengkian terhadap orang-orang yang beriman: Ya Tuhan kami sesungguhnya Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.”
- g. “Wahai manusia, sesungguhnya Aku telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertaqwa kepada Allah di antara kamu semua.”

Kalau ditelaah secara lebih seksana dasar moderasi Nahdlatul Ulama bermuara pada pemahaman syariat Islam yang lebih berorientasi kepada kemaslahatan. Karenanya NU selalu condong pada pemahaman agama yang mengarah kepada maslahatan dan

kerahmatan. Beberapa dasar profetis moderasi NU dilihat dari cara pandang sebagai berikut:

a. Memilih Jalan Damai

Islam adalah agama damai. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk mencintai kedamaian dan jauh dari permusuhan. Jika dua kelompok bertikai maka perintah dalam Alquran adalah mendamaikan dari keduanya. Jika musuh juga condong kepada kedamaian maka perintah Alquran adalah menganjurkan menyahuti jalan keselamatan dan kedamaian. Dalam Surat 8:61 “Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakAllah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Dan juga tersurat dari surat lainnya, yaitu 49: 9, “Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Ayat ini secara tegas menyeru muslim untuk memilih jalan damai. Muslim adalah bersaudara. Dan damaikan jika ada permusuhan. Dalam surat 49:10 “Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.

b. Keragaman adalah Fitrah Manusia

Manusia diciptakan Allah dalam keadaan berbeda warna kulit dan bahasa. Manusia adalah makhluk yang secara fitrah memiliki keragaman baik jenis kelamin, suku dan agama. Secara tegas Surat

49:13 “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Ini kehendak Allah untuk menjadi pelajaran bagi manusia. Agar manusia dapat saling belajar, mengembangkan diri dan mengenal. Mudah bagi Allah jika berkendak menjadikan manusia seragam. Dalam surat 11:118 “Jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat.

- c. Jaminan Keselamatan bagi Orang yang beriman kepada Allah Swt dan Hari Akhir.

Allah menjamin keselamatan dan kehidupan akhir yang baik bagi mereka yang mau beriman kepada Allah dan hari akhir. Jaminan ini nampak bukan saja dijanjikan kepada umat Islam, tetapi juga umat-umat terdahulu. Surat 2: 62 “Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal shaleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Ini jaminan yang secara khusus dijanjikan Allah. Dalam nada yang serupa juga disiratkan dalam surat 5:69 “Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, Shabiin dan orang-orang Nasrani, siapa saja (di antara mereka) yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal shaleh, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati; 2:82 Dan orang-orang yang beriman serta beramal shaleh, mereka itu penghuni surga; mereka

kekal di dalamnya. Nampak pula dalam surat 2:121 “Orang-orang yang telah Kami berikan Al Kitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya, mereka itu beriman kepadanya. Dan barang siapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Dan juga dalam surat 2: 218 “Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dipertegas dalam surat 2: 277 “Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal shaleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Jaminan surge yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Surat 4:57 “Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal shaleh, kelak akan Kami masukkan mereka ke dalam surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai; kekal mereka di dalamnya; mereka di dalamnya mempunyai istri-istri yang suci, dan Kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman.

d. Beragam Nabi tetapi Satu Umat

Allah mengutus rasul dan Nabi untuk menjadi perantara pesan Allah kepada manusia. Allah mengutus Nabi sebagai pemberi kabar gembira. Dalam surat 2:213” Manusia itu adalah umat yang satu. (Setelah timbul perselisihan), maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab dengan benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang Kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang

yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendak-Nya. Dan Allah selalu memberi petunjuk. Dalam surat lain juga tegas disebut, misalnya surat 10: 19 “Manusia dahulunya hanyalah satu umat, kemudian mereka berselisih. Kalau tidaklah karena suatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu dahulu, pastilah telah diberi keputusan di antara mereka, tentang apa yang mereka perselisihkan itu. Padahal mudah bagi Allah. Surat 11:118 “Jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Seruan yang sama Nampak dalam surat 16:93 “Dan kalau Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat (saja), tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan. Namun dari sekian nabi yang diutus secara umum membawa pesan tauhid. Dalam surat 21: 92 “Sesungguhnya (agama tauhid) ini adalah agama kamu semua; agama yang satu dan Aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah Aku. 23: 53 Kemudian mereka (pengikut-pengikut rasul itu) menjadikan agama mereka terpecah belah menjadi beberapa pecahan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka (masing-masing).

e. Tidak Ada Paksaan dalam Agama

Islam adalah agama yang jelas. Alquran menggambarkan sebagai pilihan yang harus didasari pada kerelaan dan kesungguhan. Tak ada paksaan dan memberi ruang memilih. Karena baik dan buruk semuanya jelas. Dalam surat 2:256 “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan

putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Dan juga Nampak dalam surat 3: 85 "Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi; 3:83 Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah, padahal kepada-Nya-lah berserah diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa dan hanya kepada Allahlah mereka dikembalikan; 109: 6 Untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku". Pilihan dan hak memilih sepenuhnya diserahkan kepada manusia. Mau beriman atau tidak adalah pilihan. Tetapi hanya orang bodoh yang tidak mau memilih jalan iman. Dalam surat 2:130 "Dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim, melainkan orang yang memperbodoh dirinya sendiri, dan sungguh Kami telah memilihnya di dunia dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang shaleh.

f. Beragama dengan kasih Sayang

Islam sebagai *rahmatan lilalamin* mengajarkan kepada umatnya untuk selalu berperilaku menyebarkan kasih sayang. Dalam surat 8:22 "Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-anak atau saudara-saudara atau pun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripada-Nya. Dan dimasukkan-Nya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah rida terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap (limpahan rahmat) -Nya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah, bahwa sesungguhnya golongan Allah itulah golongan yang beruntung. Orang yang beruntung

adalah orang yang beriman dan saling menasehati dalam sabar dan takwa. Dalam surat 90:17 “Dan dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Kasih sayang dan lemah lembut adalah rahmat terbesar Allah bagi manusia. Dalam surat 3:159 “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah-lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakal kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.

Nahdlatul Ulama memandangi bahwa Perbedaan adalah pintu utama untuk saling belajar (*ya ayyuhannas inna khalaknakum min dzakarim wa unsa...lita'arrafu..*). Manusia memiliki banyak identitas, baik yang berkaitan dengan suku, agama, ras, golongan, maupun status sosial. Identitas-identitas tersebut merupakan sesuatu yang *given*, dan sebagian yang lain merupakan konstruk sosiologis. Karena itu, menurut Budi Munawar Rahman (2001:h. 72) bahwa pluralisme sebagai realitas social. Keragaman sebagai tanda-tanda kebesaran Allah untuk umatnya agar mau berfikir (*wa min âyâtihî khalqa as-samâwât wal alrdh wakhtilâf al sinatikum wa alwânikum*). Keragaman hanyalah sebagai ujian terhadap apa yang datang pada manusia (Sulhan, 2015).

Keseragaman adalah kebekuan, bahkan disebut nabi akan menggiring pada kehancuran, sebab keseragaman memuat statisme, kontra produktif dan musuh dari dinamisme (*lâ yazal an-nâs fi khair mâ tabayyanû wa in tasawwû halaqû*). Islam saatnya melihat wilayah kemanusiaan, sebagai perhatian untuk menghindari konflik atas nama agama. ‘*Religion for peace*’ atau ‘*min al iman ila al ukhuwwah*’

sebagai tema yang dapat ditawarkan untuk membangun kesefahaman dan pengertian antar pemeluk agama dan keyakinan, membangun persaudaraan kemanusiaan (ukhuwah insaniyah), persaudaran antar iman (*interreligious harmony*) dan persaudaraan sebagai warga bangsa. Dialog ini akan melahirkan "*interfaith understanding*", jika pemahaman akan multikulturalisme, keragaman dan inklusivitas menjadi kesadaran bersama. Manusia punya kepala yang berbeda, isi berbeda, pemahaman berbeda, pemikiran dan pilihan berbeda-beda. Kelebihan dan keterbatasan harus dihargai. Tak penting membicarakan keburukan atau kekurangan, tetapi hal-hal positif lebih penting di bicarakan untuk secara bersama-sama bersinergi membangun kehidupan. *Dialogue of Understanding* dan *Dialogue of action*.

3. Upaya NU dalam Deradikalisasi Islam Indonesia

Upaya NU dalam deradikalisasi Islam Indonesia dilakukan melalui upaya struktural dan upaya kultural. Upaya struktural dilakukan oleh lembaga-lembaga yang jika dilihat pada tugas, pokok, dan fungsinya, berperan aktif termasuk mencegah tersebarnya gerakan Islam transnasional. Sebagaimana dilaporkan dalam Mukhtamar ke 33 NU di Jombang tentang capaian program NU masa Khidmat 2010-2015, bahwa Nahdlatul Ulama sebagai ormas Islam yang berfaham Ahlussunah wal Jamaah, telah bergerak cepat melakukan aksi penyadaran, baik di ranah struktural maupun kultural dalam bentuk dakwah dan penguatan faham ke-NU-an serta menjaga keutuhan NKRI. Hal ini dilakukan untuk mengatasi maraknya ideologi keagamaan radikal yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu, dalam beberapa tahun terakhir, sudah dirasakan sangat mengkhawatirkan terhadap keberagaman dan keutuhan NKRI.

Melalui Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU) yang bertugas membahas masalah-masalah maudlu'iyah (tematik) dan waqi'iyah (aktual) yang akan menjadi Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, NU mengambil sikap:

- a. Khilafah dan Formalisasi Syari'ah (lihat, *Ilusi Negara Islam*, Wahid [ed], 2009, h. 252-253)

1) Deskripsi masalah

Wacana Islam sebagai solusi dan ideologi alternatif mengusahakan bentuk pemerintahan negara Indonesia dari negara kesatuan berformat Republik menjadi Khilafah, berikut konstitusi negara sejak dari Undang-undang Dasar dan hukum positif diangkat dari Syari'ah Islamiyah seutuhnya. Bila mencermati fakta sejarah masa awal Islam dibentuk khilafah hanya bertahan semasa Khulafa al-Rasyidin dengan diwarnai tragedy pembunuhan terhadap pejabat khalifah ke 2, 3, dan 4. Hukum positif negara-negara Islam masa sekarang masih mengadopsi hukum sekuler (Konun Maudlu'i) tatanan hukum positif di Indonesia sangat berorientasi pada keragaman agama dan budaya lokal serta fakta kesulitan mengganti kitab undang-undang Hukum Waris Kolonial.

2) Pertanyaan

- a) Adakah tuntutan syari'ah berbentuk dalil nash yang mengharuskan pembakuan bentuk khilafah dalam sistem kenegaraan Islam?
- b) Bagaimana hukum kelompok warga negara Indonesia yang berusaha mengubah bentuk dan dasar hukum negara?
- c) Apakah strategi mengintegrasikan (syari'ah) Islam secara substantif menyalahi prinsip tathbiq (penerapan) syari'ah menempuh pola tadrij (gradual)?

3) Jawaban

- a) Tidak ada dalil nash, karena keberadaan sistem khilafah adalah bentuk ijtihadiyah.
- b) Hukum merubah bentuk Negara Indonesia dengan bentuk yang lain maka hukumnya tidak boleh selama menimbulkan mafsadah yang lebih besar. Sedangkan merubah dasar hukum negara juga tidak diperbolehkan jika menggunakan cara yang inkonstitusional dan diperbolehkan jika menggunakan cara yang konstitusional.
- c) Tidak menyalahi prinsip tathbiq. Bahkan strategi secara tadrij sangat tepat bila diterapkan di Negara Indonesia.

b. Dlawabithul Kufr (lihat, Hasil-hasil Muktamar ke 32 NU di Makassar, 2010, h. 223-224)

1) Deskripsi masalah

Mengkufurkan pada sesama muslim hanya karena faham dan penafsiran terhadap ajaran Islam, apalagi ajaran yang multi interpretasi perlu dihindari. Berkaitan dengan istilah kufur ini, terdapat juga istilah bid'ah yang dianggap sesat dan memiliki konsekuensi seperti kufur, berdasarkan hadits: "kullu bid'atin dlalalattun wa kullu dlalalatin finnar". Hadits ini dipakai sebagai dasar untuk melegitimasi tindakan orang-orang yang meng-kufur-kan atau mem-bid'ah-kan siapa saja yang tidak sejalan dengan pemahamannya.

2) Pertanyaan

- a) Bagaimana pengertian kufur dan klasifikasinya?
- b) Apa saja ukuran seseorang dikatakan kafir?
- c) Apa saja kriteria bid'ah, dan apakah bid'ah identik dengan kufur ?

3) Jawaban

- a) Secara etimologi, al-kufr berarti as-satr wa ath-taghthiyah (tutup). Malam disebut juga dengan kufr (yang menutupi), karena dengan kegelapannya menutupi segala sesuatu. Sedangkan menurut terminologi, kufr berarti mengingkari apa yang sudah pasti dibawa Rasulullah Saw (inkaru ma 'ulima bi adl-dlarurah maji'u ar-rasul bihi)
- b) Para ulama mengklasifikasikan kufr menjadi empat macam: (1) Kufr Inkar, yaitu seseorang mengingkari dan tidak mengakui Allah sama sekali, seperti kufurnya Fir'aun; (2) Kufr Juhud, yaitu seseorang mengakui Allah dalam hatinya hanya saja lisannya tidak pernah menyatakan pengakuannya itu, seperti kufurnya Iblis; (3) Kufr 'Inad, yaitu seseorang mengakui Allah dalam hatinya dan menyatakan pengakuannya tersebut dengan lisannya hanya saja tidak mau menjadikannya sebagai suatu keyakinan, seperti kufurnya Umayyah bin Abi Shalt dan Abi Thalib; (4) Kufr Nifaq, yaitu seseorang mengakui dengan lidahnya hanya saja hatinya tidak mau mengakuinya; (5) Kufr Ni'mah.
- c) Ukuran seseorang dikatakan kafir adalah ingkar terhadap rukun iman, rukun Islam dan sesuatu yang diketahui secara pasti dari Rasulullah (ma 'ulima bidl dlarurah maji'ur Rasul bihi).
- d) Secara bahasa bid'ah adalah suatu yang baru. Sedangkan secara istilah adalah memunculkan sesuatu yang baru sepeninggal Nabi Muhammad SAW. dalam masalah agama setelah sempurna. Ulama mengklasifikasikan bid'ah menjadi dua; pertama, mahmudah (terpuji) atau hasanah (bagus); kedua, madzmumah (tercela) atau sayyiah (jelek). Bid'ah mahmudah atau hasanah adalah sesuatu yang baru dan sesuai al-Qur'an, as-Sunnah, atsar shahabat, atau ijma' sebagai sumber syari'at Islam. Sedangkan bid'ah madzmumah atau

sayyi'ah adalah sesuatu yang baru dan tidak sesuai dengan Syari'at Islam.

- e) Ditinjau dari sisi hukum, bid'ah ada lima macam: (1) wajib, seperti merumuskan dalil-dalil 'aqli dalam bidang teologi untuk menolak pemikiran atheisme (al-mulahadah) dan semacamnya; (2) mandub/sunnah, seperti menulis karya ilmiah, membangun gedung-gedung sekolah, perguruan tinggi, pesantren, dan sebagainya; (3) mubah, seperti mengembangkan resep makanan, mushafahah setelah Shalat dan sebagainya; (d) makruh, seperti shalat memakai pakaian yang dapat mengganggu kekhusyu'an Shalat dan sebagainya; (4) haram, seperti mengembangkan dan menyebarkan pemikiran yang bertentangan dengan syari'at Islam, seperti pemikiran-pemikiran faham qaddariyyah, murji'ah, dan sebagainya.
- f) Dalam kaitannya dengan kekufuran, tidak semua bid'ah identik dengan kekufuran. Hanya bid'ah yang bertentangan dengan dalil-dalil qath'i saja yang menyebabkan kekufuran.

Untuk memahami beberapa upaya apa yang telah dilakukan NU, berikut ini di antaranya:

- a. Penyebarluasan ajaran di berbagai media, baik cetak ataupun elektronik

Untuk penyebarluasan ajaran, NU melakukan pengembangan teknologi informasi untuk menyebarkan ajaran Aswaja NU sekaligus menangkal aliran Islam garis keras yang menyerang ideologi, ajaran maupun amaliah NU. Juga dimaksudkan untuk mempublikasikan berbagai program serta kegiatan PBNU dan lembaga, lajnah, dan banom NU di NU Online (pernah mendapatkan ranking I website ormas di Indonesia dari ALEXA) serta Radio NU maupun masing-masing lembaga, lajnah dan banom. Selain itu, NU

juga melakukan pengembangan media cetak oleh berbagai lembaga dan banom, di antaranya: Jurnal Taswirul Afkar, Risalah NU, jurnal Ma'arif, dan lain-lain (lihat, capaian program NU masa khidmat 2010-2015 dalam Hasil-hasil Mukhtamar ke 33 NU, h. 335).

“NUTV” dan “NU Online” menjadi bagian penting untuk “berperang” dengan berbagai paham yang disebarakan via dunia elektronik. “NUTV” menjadi bagian penting menyampaikan berbagai berita terkait NU melalui tayangan televisi. “NUTV” banyak menampilkan kolom, seperti: (1) berita NU; (2) dakwah dan do'a; (3) pojok Aswaja; (4) talk show. Dalam kanal NU Online, disediakan beberapa kolom, yaitu: (1) warta; (2) keislaman; (3) khotbah; (4) hikmah; (5) taushiyah; (6) do'a; (7) tokoh; (8) fragmen; (9) pesantren; (10) opini; (11) seni budaya; (12) risalah redaksi; (13) wawancara. Saat ini, apa yang dilakukan oleh NU akan mudah diakses melalui “NUTV” ataupun “NU Online”.

Selain di media elektronik, terbitnya berbagai jurnal, buku, dan media cetak lainnya, serta diseminarkan di berbagai tempat, juga bagian penting untuk meredam tersebarnya paham dan gerakan radikal. Untuk kajian terkait formalisasi syari'ah, Jurnal “Tashwirul Afkar” menerbitkannya pada Edisi No. 20 Tahun 2006. Jurnal ini diterbitkan oleh Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (LAKPESDAM) Nahdlatul Ulama. Untuk edisi No. 20 ini, di antara penulisnya adalah: (1) Rumadi dengan judul, “PERDA SYARI'AT ISLAM: Jalan Lain Menuju Negara Islam?”; (2) Khamami Zada dengan judul, “PERDA SYARI'AT: Proyek Syariatisasi yang Sedang Berlangsung”; (3) Siti Musda Mulia dengan judul, “PEMINGGIRAN PEREMPUAN DALAM PERDA SYARI'AT”; (4) Marzuki Wahid dengan judul, “SYARI'AT ISLAM, NEGARA, DAN ANCAMAN PLURALITAS: Kritik atas Perda Syari'at Islam di Indonesia”; (5) Syamsurijal Ad'han dan Subair Umam dengan judul, “PERDAISASI SYARI'AT ISLAM DI BULUKUMBA”; (6) Hasibullah

Satrawi dengan judul, "ISLAM POLITIK: Dari Pertarungan Kekuasaan Hingga Ideologisasi Pengetahuan"; (7) Najib Kailani dengan judul, "JILBAB ANNIDA DAN IDENTITAS REMAJA ISLAMI"; (8) KH. A. Sanusi Baco dengan judul, "OBAT ITU BERNAMA SYARI'AT ISLAM (?) Perda Syari'at Tidak Perlu Diributkan"; (9) H.A. Malik Madaniy dengan judul, "Syari'at Simbolik Jangan Mengalahkan Syari'at Substantif"; (10) Ulfa Fikriyati dengan judul, "PRO KONTRA FORMALISASI SYARI'AT ISLAM".

- b. Penguasaan aset sebagai upaya meredam tersebarnya paham radikal melalui lembaga-lembaga, terutama lembaga-lembaga NU

Untuk penguasaan aset, NU membangun sistem pengelolaan aset dan menertibkan administrasi aset-aset yang dimiliki Nahdlatul Ulama, khususnya tanah dan bangunan. Beberapa aset NU yang sudah berhasil dikembalikan atas nama NU dengan badan hukum Perkumpulan di antaranya: (1) Rumah Sakit Islam (RSI) Surabaya; (2) Rumah Sakit Islam (RSI) Demak; (3) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Tuban; (4) Sertifikat tanah gedung PBNU; (5) Sertifikat tanah Parung (STAINU); (6) Tanah Kawi-Kawi di Jakarta Pusat. Selain penguasaan aset, NU juga melakukan kordinasi, konsolidasi dan memberikan bimbingan tehnik kepada Rumah Sakit NU, di antaranya Rumah Sakit Islam Nahdlatul Ulama (RSI NU) Demak dan Tuban. PBNU juga memfasilitasi tersalurkannya bantuan alat kesehatan dari pihak luar, di antaranya untuk RSI Kajen, Pati, Jawa Tengah (sedang dalam proses sertifikasi) (lihat, capaian program NU masa khidmat 2010-2015 dalam Hasil-hasil Muktamar ke 33 NU, h. 332-333).

Selain itu, NU juga melakukan labelisasi ribuan masjid NU dan telah menjangkau ribuan Ta'mir Masjid (DKM/ Dewan Kesejahteraan Masjid) serta mendistribusikan secara gratis belasan ribu kaleng

GISMAS (Gerakan Infak Sedekah Memakmurkan Masjid dan Masyarakat) dalam rangka upaya pemandirian umat melalui masjid dan reposisi masjid menjadi sebagai pelayan jamaah (lihat, capaian program NU masa khidmat 2010-2015 dalam Hasil-hasil Mukhtamar ke 33 NU, h. 336).

c. Membangun kerjasama dengan pihak lain untuk kampanye Islam ala NU;

Membangun kerjasama dengan pihak lain dilakukan oleh NU di antaranya dengan merintis kerjasama dengan pihak terkait baik di dalam maupun luar negeri, antara lain: (1) Penandatanganan nota kesepahaman kerjasama dengan beberapa badan usaha, baik milik daerah maupun milik negara, pelaku usaha swasta (Bumi Hijau Lestari, Bank Mandiri, Bank BRI, PT. XL Axiata); (2) Penandatanganan nota kesepahaman kerjasama dengan Pembangunan Buku Hijau Holdings Sdn. Bhd., Malaysia, dan Pemerintah Republik Sudan, di bidang pengembangbiakan ternak sapi, serta pemotongan dan pemasaran daging; (3) Penandatanganan nota kesepahaman dengan Komunitas Muslim China di bidang pengawasan dan pemberian label halal yang diproduksi dan dipasarkan oleh Indonesia dan China (lihat, capaian program NU masa khidmat 2010-2015 dalam Hasil-hasil Mukhtamar ke 33 NU, h. 333).

Selain kerjasama pada bidang di atas, NU juga aktif dalam bidang perdamaian, di antaranya: (1) PBNU menjadi peserta aktif dalam Global Peace Convention yang diselenggarakan oleh Global Peace Foundation di Jerman, Italia, Korea Selatan, dan Belgia. Melalui program ini PBNU mempromosikan Islam Ahlussunah wal Jama'ah ke dunia internasional, termasuk ke komunitas non muslim dari berbagai negara; (2) PBNU yang bersama Pemerintah Republik Turki menjadi motor utama bagi negara-negara berpenduduk muslim di

dunia dalam upaya mencari solusi perdamaian Afghanistan sekarang dan di masa mendatang. PBNU mempromosikan Islam Ahlul Sunnah wal Jamaah yang mengedepankan ajaran Tasamuh, Tawasuth, dan Tawazun untuk terciptanya perdamaian, antara lain dalam program Multaqa Sufi di Indonesia dan Turki, serta seminar dan forum konsultasi di Afghanistan. Saat ini telah berdiri Nahdlatul Ulama Afganistan (NUA) dan terbentuk jaringan sufi Internasional; (3) pada tingkat nasional, PBNU melakukan inisiatif perdamaian untuk masyarakat di wilayah konflik yaitu desa Karanggayam, Kecamatan Omben dan desa Buluran, Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang. Melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat diantaranya; memberikan bantuan dana untuk infrastruktur pendidikan di empat pesantren, optimalisasi fungsi masjid dari dan oleh masyarakat setempat serta berbagai kegiatan untuk mewujudkan inklusi sosial (lihat, capaian program NU masa khidmat 2010-2015 dalam Hasil-hasil Muktamar ke 33 NU, h. 333-334).

d. Penguatan di bidang SDM Nahdlatul Ulama

Penguataun di bidang SDM dilakukan di antaranya dengan memfasilitasi beasiswa pendidikan ke luar negeri, mulai dari S1, S2, hingga S3. Hingga tahun 2015, sedikitnya 300 kader muda NU telah menerima beasiswa pendidikan ke luar negeri ke beberapa negara, yaitu: Australia 10 mahasiswa, Amerika Serikat 5 mahasiswa, Rusia 50 mahasiswa, Maroko 30 mahasiswa, Sudan 20 mahasiswa, serta puluhan mahasiswa ke Mesir dan negara-negara lainnya. Selain itu, NU juga memberikan beasiswa kepada pelajar dari luar negeri untuk mempelajari Islam Nusantara, yaitu 40 orang dari Pattani, Thailand, dan 20 orang dari Afghanistan (lihat, capaian program NU masa khidmat 2010-2015 dalam Hasil-hasil Muktamar ke 33 NU, h. 331).

Selain penguatan di bidang SDM melalui fasilitas beasiswa, NU juga melakukan penguatan di bidang pendidikan melalui pesantren

dan sekolah-sekolah formal. Selain itu, upaya lain yang dilakukan NU adalah berdirinya banyak perguruan tinggi NU yang merupakan tindak lanjut upaya yang dilakukan NU untuk terus membumikan faham aswaja yang damai dan toleran sehingga tidak terhenti di sekolah menengah atas tetapi berlanjut hingga jenjang kuliah.

PBNU telah berhasil memperjuangkan keluarnya ijin operasi sejumlah Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (PTNU) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Jumlah PTNU yang telah keluar ijin operasinya itu sebanyak 23 PTNU dengan rincian sebagai berikut: (1) 11 PTNU telah mendapatkan izin dari Kemendikbud RI yang semuanya masih dalam bentuk penguasaan pihak Yayasan; (2) 12 PTNU sudah dalam berbentuk Badan Perkumpulan NU. Kebijakan PBNU tentang PTNU yaitu, seluruh PTNU yang proses perijinannya lewat PBNU harus berbentuk badan hukum perkumpulan NU, bukan dalam bentuk yayasan yang berujung pada kepemilikan pribadi (lihat, capaian program NU masa khidmat 2010-2015 dalam Hasil-hasil Muktamar ke 33 NU, h. 332).

Selain itu, NU juga melaksanakan program pengkaderan untuk kategori Kader Penggerak NU dan Kader Struktural (Penggerak Ranting) tingkat nasional dan daerah. Pelaksanaan pengkaderan ini Pendidikan Kader Penggerak NU (PKPNU). Kegiatan tersebut sudah berlangsung 12 angkatan di tingkat nasional dan 87 angkatan tingkat Daerah dengan keseluruhan peserta sebanyak 2430 kader. Pengkaderan yang penyelenggaranya adalah PP Lakpesdam NU katagorinya yaitu Pelatihan Penggerak Ranting (PPR). Kegiatan tersebut telah dilaksanakan di pusat dan di daerah sebanyak 7 kali dengan peserta 210 orang. PP Lakpesdam NU menyelenggarakan pengkaderan kategori Kader Keulamaan melalui Program Pengembangan Wawasan Keulamaan (PPWK) dilaksanakan di Pusat dan Daerah sebanyak 4 kali dengan peserta 120 orang. Pengkaderan katagori PKPNU ini bertemali erat dengan bentuk kewasapadaan NU

untuk menjaga tetap tangguhnyanya eksistensi doktrin Ahlu Sunnah waljama'ah ala Nahdlatul Ulama sebagai main stream ajaran Islam nasional (bahkan internasional), ataupun untuk menjaga tetap tegaknya ideologi nasional dan eksisnya NKRI. Pengkaderan katagori PPR terkait erat dengan ikhtiar membangun gerakan NU dari bawah untuk penguatan organisasi dan pemberayaan warga. Pengkaderan kategori Kader Keulamaan terkait erat dengan penyaiapan calon pimpinan Syuriyah NU di daerah (lihat, capaian program NU masa khidmat 2010-2015 dalam Hasil-hasil Muktamar ke 33 NU, h. 334-335).

B. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

1. Mengakhiri Kekerasan Atas Nama Agama

Menurut Marzuki Wahid (2014:26) bahwa Islam hari ini telah telah berubah menjadi lembaga atau badan organisasi. Akibat dari tataran praktis-empiris ini terjadi hubungan tidak baik semacam konflik intern-sekte seagama, antaragama, dan atau antara agama dan negara. Lucunya kekerasan ini didasarkan atas nama agama.

Akar kekerasan agama dapat dibagi menjadi dua hal utama yakni; bagaimana peran agama dan bagaimana keterkaitan pemeluknya terhadap agamanya masing-masing. Mengenai peran agama ada dua konsep yang dimiliki oleh setiap agama yang mempengaruhi penganutnya dalam hubungan dengan penganut agama yang lain yakni, fanatisme dan toleransi. Kedua hal ini harus dipraktikkan secara seimbang. Ketidakseimbangan akan melahirkan problem dalam umat beragama.

Toleransi yang berlebihan dari umat beragama tertentu dapat menjebak suatu agama dalam pengaburan makna ajaran agama dan eksistensi agama akan melamah. Situasi ini kadang menyebabkan tidak setia dengan ajaran agamanya. Agama hanya menjadi ritual belaka sehingga derajat dan kebenaran agama yang satu disamakan

dengan agama yang lainya. Selanjutnya, fanatisme akan melahirkan permusuhan dengan penganut agama lain dan kekerasan atas nama agama. Fanatisme yang berlebihan akan melahirkan *truth claim* yang eksklusif. Eksklusivisme dapat mengarahkan orang pada radikalisme dan fundamentalisme dalam beragama.

Kekerasan agama selama berabad-abad merupakan kejahatan terburuk yang telah mengisi peradaban manusia. Sesuatu yang paradoks, karena agama mengajarkan nilai-nilai luhur, tetapi agama juga bertanggung jawab terhadap terjadinya kerusakan di muka bumi ini. Dalam editorial bukunya, "Violence and the Sacred in the Modern World", Marl Juergensmeyer menyatakan: *Violence has always been endemic to religion. Images of destruction and death are evoked by some of religion's most popular symbols, and religious wars have left through history a trail of blood. The savage martyrdom of Hussain in Shiite Islam, the crucifixion of Jesus in Christianity, the sacrifice of Guru Tegh Bahadur in Sikhism, the bloody conquest in the Hebrew Bible, the terrible battles in the Hindu epics, and the religious wars attested to in Sinhalese Buddhist chronicles indicate that in virtually every tradition images of violence occupy as central a place as portrayals of non-violence.*

Perang atas nama Tuhan dan agama masih mengemuka. Atas nama agama, bom meledak di mana-mana. Janji-janji sorgawi (eskatologis), niat besar membangun imperium berdasarkan agama, yang dibalut dengan perasaan dendam-buta kepada bangsa (agama) lain, telah menjadi pemicu terjadinya konflik atas nama agama. Kita lebih akrab dengan sebutan terorisme atau jihad atas nama agama. Yakni aksi kekerasan dengan berbagai cara untuk memberikan peringatan atau untuk melumpuhkan mereka yang dianggap sebagai ancaman dan musuh.

Padahal Islam adalah aturan yang memiliki konsep pokok seperti tauhid, ummah, al-'adl dan ihsan. Prinsip-prinsip ini menjelaskan arti penting yang membuat orang dapat hidup bersama dalam

persaudaraan dan kebebasan. Dalam masyarakat seperti itulah orang hidup bebas tanpa eksploitasi sebagaimana diajarkan Islam kepada kita. Abdurrahman Wahid dkk (2000:110).

Juergensmeyer (2001:13) mengungkapkan sebuah pertanyaan apakah agama membenarkan kekerasan? Apakah dengan demikian hal itu digunakan untuk tujuan-tujuan politis? Pertanyaan ini bukanlah pertanyaan yang sederhana tetapi sangat pelitk karena peran agama di berbagai wilayah dunia sebagai sebuah ideologi tatanan publik-khususnya dalam gerakan-gerakan nasionalisme keagamaan. Karena itu terorisme mempunyai tujuan khusus dengan latar belakang masing-masing. Terorisme di belahan dunia manapun selalu mengatasnamakan agama. Dalam hal ini, tentu saja agama tidak salah. Sebab, agama selalu mengajarkan hal yang baik. Dalam pengamatan Juergensmeyer, kekerasan itu sendiri merupakan bagian dari respons masyarakat dalam menyikapi masalah politik. Mereka menggunakan agama sebagai jalan keluar untuk mengkritik, dengan memobilisasi kekerasan sebagai alternatif.

Sumber konflik agama justru terletak pada pemeluk agama itu sendiri. Agama memang memiliki aturan dalam memberikan pilihan bagaimana memperbaiki kerusakan moral dalam masyarakat. Tapi, tentu saja ketika dilakukan dengan tingkat ekstrem dalam bentuk tindak kekerasan, hal ini tak sesuai lagi dengan moralitas yang diajarkan agama. Singkatnya, agama telah dihinakan di balik aksi terorisme itu, dan kaum penganutnya wajib bertindak.

Pemeluk agama yang melakukan tindakan kekerasan pun dilatarbelakangi oleh banyak faktor dari luar seperti yang diungkap oleh Juergensmeyer (2011) ketika sejak peledakan WTC 11 September 2001, Amerika menjadi negara yang paling paranoid, terutama dengan gerakan-gerakan Islam di seluruh dunia. Amerika menempatkan diri sebagai panglima dunia yang memungkinkan negara itu memainkan politiknya dengan bertindak secara global.

Artinya, di mana pun aksi teroris itu terjadi, intelijen Amerika akan menelusurinya. Kebijakan Amerika untuk menuntaskan terorisme ini berlaku di seluruh dunia, baik di Jerman, Timur Tengah, Inggris, dan lain-lain. Tapi, saat menyerang Afganistan dan Irak, Amerika juga sedang melakukan tindakan teroris. Tanpa disadari Amerika sendiri memanfaatkan peluang politik ini untuk melancarkan agresinya dengan membawa bendera perang melawan terorisme. Padahal, kita tahu di balik itu terdapat motif-motif ekonomi-politik (neokolonialisme) Amerika Serikat untuk menguasai sumber-sumber ekonomi di Irak. Penanganan terorisme seperti itu tentu bukan cara terbaik untuk memotong akar terorisme di dunia. Justru, tindakan tersebut telah memantik perlawanan dan dendam berkepanjangan dari jaringan gerakan agama politik radikal. Dalam proses selanjutnya, secara samar-samar kita dapat melihat apa yang disebut Juergensmeyer sebagai fenomena "Perang Dingin Baru."

Lebih lanjut, Juergensmeyer (2011) mengungkapkan bahwa dalam *The New Cold War* ini terjadi karena *westoxifikasi* budaya, kebijakan luar negeri dan globalisasi sekulerisme yang dipromosikan Amerika telah melahirkan persepsi penghinaan dan ketertindasan berbagai kelompok agama. Setelah berbicara dengan banyak pelaku teror, Juergensmeyer menemukan tumbuhnya sikap ketidaknyamanan makro akibat globalisasi dan perubahan sosial. Ada banyak luapan kekecewaan dan kemarahan yang hadir di berbagai belahan dunia, bukan hanya dunia Islam, akan serangan *westoksifikasi*. Dominasi politik dan ekonomi AS dan Barat, dengan bauran persepsi ini, kemudian juga menjadi sumber kemarahan baru. Ada fenomena menentang globalisasi dan modernisme yang seakan hendak mengendalikan dunia. Akhirnya, reaksi kekerasan pun menjadi pilihan.

Pada muaranya, seperti membangkitkan kenangan perang dingin dulu, di mana tercipta persepsi bahwa pihak yang di seberang itu

jahat. Di dunia Islam, banyak tercipta persepsi bahwa Amerika Serikat dan Barat itu jahat dan di Barat juga terdapat persepsi bahwa Islam agama yang penuh dengan kekerasan. Fenomena ini turut diperparah oleh kesimpulan ilmuan Gedung Putih, salah satunya Samuel P. Huntington, yang menyatakan bahwa dunia saat ini sedang bergerak menuju perang peradaban antara Islam di satu pihak dan Barat di pihak lain. Padahal, sesungguhnya yang sedang terjadi adalah perang yang diciptakan oleh persepsi. Ada introduksi konsep perjuangan agama dalam menjawab masalah sosial. Yakni sebuah pertarungan kosmik antara kebaikan dan kejahatan, benar dan salah, agama dan sekulerime.

Dengan demikian solusi yang ditawarkan oleh Juergensmeyer bahwa ada lima skenario yang dapat dilakukan untuk mengakhiri teror atas nama agama. Skenario pertama, merupakan salah satu dari solusi yang dilakukan melalui kekuatan (*power*). Hal ini dilakukan dengan cara membinasakan atau mengendalikan teroris-teroris itu dengan jalan kekerasan. Cara yang dianggap solusi ini pada kenyataannya bukan solusi yang baik, karena setiap kekerasan yang dihadapi kekerasan akan menimbulkan kekerasan baru. Inilah yang dilakukan oleh Amerika ketika mendeklarasikan perang total melawan terorisme agama dan melaksanakannya selama bertahun-tahun. Penggunaan kekuatan untuk menghancurkan terorisme tidak jarang hanya merupakan manipulasi untuk membenarkan kepentingan di balik itu.

Kedua, solusi dalam bentuk ancaman pembalasan dengan kekerasan atau pemenjaraan untuk menakut-nakuti aktifis-aktifis keagamaan sehingga mereka ragu-ragu untuk melakukan aksinya. Cara ini pun dianggap tidak efektif, karena meski para aktivis itu diancam atau dipenjara, bahkan dibunuh sekalipun tidak akan berpengaruh terhadap para aktivis keagamaan lainnya.

Ketiga, dengan melakukan kompromi atau negosiasi dengan para aktifis yang terlibat dalam terorisme. Cara ini pun seperti dikatakan oleh Marx Juergensmeyer sendiri merupakan penyelesaian yang tidak selalu berhasil. Beberapa aktifis barangkali menjadi lunak, tapi yang lain menjadi marah dikarenakan apa yang mereka sebut sebagai penjualan prinsip. Kasus Arafat dan Hamas merupakan contoh dalam skenario ini. Setiap upaya kompromi yang dilakukan sekelompok aktifis Palestina akan membuat marah kelompok lainnya.

Keempat, pemisahan agama dari politik dan kembali pada landasan-landasan moral dan metafisikal. Artinya, politisasi agama dapat dipecahkan melalui sekularisasi. Solusi seperti ini telah dilakukan di beberapa negara di dunia. Namun, cara ini nampaknya belum menunjukkan keberhasilan. Alih-alih dapat melunakkan prinsip mereka, cara ini justru menimbulkan reaksi keras dari aktifis-aktifis keagamaan yang kadarnya semakin tinggi.

Kelima, solusi-solusi yang mengharuskan pihak-pihak yang saling bertikai untuk, paling tidak pada tataran minimal, menyerukan adanya saling percaya dan saling menghormati. Hal ini ditingkatkan dan kemungkinan-kemungkinan ke arah penyelesaian dengan jalan kompromi semakin menguat ketika aktifis-aktifis keagamaan memandang otoritas-otoritas pemerintahan memiliki integritas moral yang sesuai dengan nilai-nilai agama.

Di luar kelima skenario itu, Juergensmeyer menegaskan bahwa aksi kekerasan atas nama agama akan terus berlangsung, selama kita salah menyikapinya. Kalau kita menyikapinya dengan cara yang salah, maka terorisme justru akan berkembang dengan subur. Oleh karena itu, ke depan diskursus keagamaan harus mampu melakukan terobosan-terobosan baru guna mendekontekstualisasi kekerasan, seperti doktrin perang suci atau jihad, yang kerap dijadikan justifikasi untuk menghalalkan kekerasan. Saat ini sangat diperlukan

pemahaman keagamaan yang turut mendorong perlawanan terhadap segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan yang mengancam terwujudnya masyarakat pluralis. Karena bagaimanapun, agama menghendaki agar setiap umat dapat hidup berdampingan tanpa harus menebarkan kebencian dan kecurigaan pada yang lain.

Kekerasan atas nama agama dapat terlihat dalam beberapa aspek (2009:88), yaitu: pertama, kekerasan doktrinal, yakni pemahaman literal tertutup atas teks-teks keagamaan dan hanya menerima kebenaran sepihak. Dalam hal ini, literalisme tertutup telah memutuskan relasi kongkret dan aktual pesan-pesan luhur agama dari realitas sejarah, sosial, dan kultural. Akibatnya pesan-pesan luhur agama diamputasi sedemikian rupa dan hanya menyisakann organ yang sesuai dengan ideologi mereka.

Kedua, kekerasan tradisi dan budaya, dampak turunan dari yang pertama. Kebenaran sepihak yang dijunjung tinggi membuat mereka tidak mampu memahami kebenaran lain yang berbeda, dan praktik-praktik kegamaan umat Islam yang semula diakomodasi kemudian divonis sesat, dan pelakunya divonis musyrik, murtad, dan/atau kafir. Kelompok-kelompok garis keras menolak eksistensi tradisi, karena itu mereka lazim menolak bermadzhab (ala madzhabiyah), menolak tradisi tasawuf, dan berbagai praktik yang merupakan buah dari komunikasi teks-teks atau ajaran luhur agama dengan tradisi dan budaya umat Islam di berbagai daerah sepanjang sejarah. Akibatnya terjadi salah kaprah dalam memahami dan mengamalkan ajaran islam. Dengan dalih meniru Kanjeng Nabi, para anggota garis keras berpakaian a la busana Arab seperti gamis dan sorban, memanjangkan jenggot, namun mereka abai atas akhlak kanjeng Nabi, seperti santun, sabar, rendah hati, pemaaf dan seterusnya.

Ketiga, kekerasan sosiologis, dampak lanjutan dari dua kekerasan pertama, yakni aksi-aksi anarkis dan destruktif terhadap pihak lain yang dituduh musyrik, murtad, dan/atau kafir. Kekerasan sosial ini

kemudian menyebabkan ketakutan, instabilitas, dan kegelisahan sosial yang mengancam negara di manapun tempat mereka menyusup. Dan akumulasi dari ketiga kekerasan ini kemudian merusak nalar dan logika umat Islam, menyuburkan kesalahkaprahan dalam memahami Islam akibat jargon-jargon teologis yang diteriakkan dengan tidak semestinya. Kebenaran, kemudian, lebih didasarkan pada jargon ideologis, bukan pada substansi pesan luhur agama yang disimbolkan oleh jargon yang bersangkutan.

Dengan demikian, berdasarkan paparan di atas, kekerasan apapun bentuknya terlebih mengatasnamakan agama harus dihentikan. Diantara hal-hal yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Pemahaman terhadap Islam anti Kekerasan

Kelompok radikal yang sering menebarkan kekerasan atas nama agama, dalam tradisi agama apapun memiliki karakter umum dan sikap keagamaan yang tekstualis, anti pluralisme, intoleran dan selalu mengukur kebenaran agama dari aspek batas-batas eksoterisme/fiqih oriented.<http://syariah.uin-malang.ac.id/index.php/komunitas/blog-fakultas/entry/agama-dan-kekerasan-menelisik-akar-kekerasan-dalam-tradisi-islam> - ftn14

[Khttp://syariah.uin-malang.ac.id/index.php/komunitas/blog-fakultas/entry/agama-dan-kekerasan-menelisik-akar-kekerasan-dalam-tradisi-islam](http://syariah.uin-malang.ac.id/index.php/komunitas/blog-fakultas/entry/agama-dan-kekerasan-menelisik-akar-kekerasan-dalam-tradisi-islam) - ftn15. Kekerasan agama lebih disebabkan oleh sikap keagamaan yang fanatik (fanatisme), paham keagamaan yang fundamentalistis (fundamentalisme) dan integralisme. Dengan demikian, eksklusivisme sering dekat dengan konflik, pertikaian, dan kekerasan. Orang beragama yang menghadirkan kekerasan, karena level keagamaannya yang jargon sentrisme yang memperlihatkan keimanan yang logoistis, memiliki kekuatan bahasa yang provokatif, sempit dan rigid. Sehingga penghayatan yang kurang terhadap

hakikat agama (being religious) menjadi sebab merebaknya komunalisme. Ini karena agama merupakan entitas yang secara sosio-psikologis bertautan langsung dengan dimensi emosionalitas dan spiritualitas manusia. Sehingga jika hal ini tersentuh oleh isu agama -meskipun ditunggangi oleh kepetingan politik atau yang lain-- maka menjadi kekuatan dahsyat sebagai penghancur "lawan-lawannya".

Pesan Islam terhadap skenario kekerasan seperti itu: "Janganlah membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk membunuhnya, kecuali dengan alasan yang benar." Kita harus berpikir serius mengenai fakta bahwa Allah tidak mengatakan secara sederhana, "Janganlah membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk membunuhnya." Tetapi ditambah: "kecuali dengan alasan yang benar." Begitu ppula tidak disebutkan, "Barang siapa yang membunuh seorang manusia maka seolah-olah ia telah membunuh manusia secara keseluruhannya," tetapi ada pengecualian berikutnya, "bukan disebabkan pembunuhan atau membuat kerusakan di muka bumi."

Abdurrahman Wahid dkk (2000:86-87) menguraikan hubungan antara Islam dan anti kekerasan. Pertama, anti-kekerasan dalam Islam didasarkan pada masyarakat akar-rumput (grass-roots) melalui setiap individu. Hal itu diintegrasikan ke dalam aktivitas pribadi individu-individu dan perilaku kolektif masyarakat Islam. Kedua, konsep Islam tentang perdamaian sebagai basis anti-kekerasan dapat menimbulkan suatu jalur yang membawa seluruh manusia bersama-sama dalam pelaksanaan pembangunan dan perdamaian manusia. Pengaruh Islam tidak hanya akan memberikan pembaruan makna anti-kekerasan, tetapi juga bisa memudahkan proses integrasi internasional yang mencakup kita semua, langsung atau tidak langsung. Ketiga, islamisasi anti kekerasan dapat diterima oleh orang-orang non muslim karena hal itu relevan dan efektif dalam konteks kebutuhan yang paling mendesak seluruh manusia hari ini, yaitu kelangsungan hidup manusia. Keempat, anti-kekerasan yang

telah ter-islamkana yang didasarkan pada pengakuan atas kebutuhan yang mendesak ini tidak memberi peluang baagi berbagai bentuk peperangan, yang terbatas sekalipun. Praktik anti kekerasan Islam akan menyediakan kriteria untuk mendefinisikan kembali tidak hanya teori-teori perang yang bermacam-macam, tetapi juga watak atau hubungan antara perang dan damai, kekerasan dan anti kekerasan. Kelima, konsep Islam tentang anti-kekerasan akan berpihak pada filsafat yang lebih menekankan penyelamatan individual dari pada pengabaian masyarakat.

b. Mengutamakan Islam Rahmatan lil 'alamin

Menurut Sahal Mahfud yang dikutip oleh Jamal Ma'mur Asmani (2014:143) bahwa Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam harus diteguhkan. Gagasan ini tidak lepas dari fenomena formalisasi syariat Islam yang gencar dilakukan kelompok yang mengusung khilafah. Mereka berusaha memasukan doktrin Islam dalam perundang-undangan. Pikiran mereka sempit, bahwa Islam hanya bisa tegak jika menjadi undang-undang. Mereka tidak berpikir bahwa Islam hadir untuk membawa rahmah bagi seluruh alam, tidak hanya umat muslim saja, tapi bagi seluruh umat manusia lintas agama.

Negara Indonesia adalah negara yang pluralistik dengan bermacam-macam agama, etnis, suku dan golongan. Oleh sebab itu undang-undang negara harus mengakomodir berbagai kepentingan sosial lintas sektoral. Dalam konteks inilah dibutuhkan kearifan umat Islam untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan menampilkan syariat Islam yang substansial yang berbasis etika, tidak formalitas hukum yang hanya mengedepankan sisi lahirnya.

Menurut pemikiran Abdurahman Wahid dalam Tradisionalisme Radikal persinggungan NU-Negara (1997:176) bahwa Islam tidaklah statis. Ajaran Islam bukanlah sesuatu yang diturunkan sekali jadi,

dan setelah itu tidak lagi memerlukan reformulasi dan refleksi. Dengan kata lain, ia berpendapat bahwa karakteristik esensial hukum Islam adalah keharusannya untuk diinterpretasikan secara kontekstual. Karena, jika konteks sosial dan historis berubah, maka berubah juga aplikasi prinsip-prinsip eternal dari hukum tersebut.

Ajakan pada pengembangan dan penyegaran ini bukanlah ajaran untuk merombak hukum Islam. Ajakan ini hanya akan menyebabkan hukum Islam pada kebutuhan sesaat, pada kebutuhan manusia yang senantiasia berubah-ubah. Yang dimaksudkan adalah upaya untuk membuatnya peka terhadap kebutuhan-kebutuhan manusiawi pada masa kii dan di masa depan. Dengan kepekaan tersebut hukum Islam akan senantiasia mengadakan penyesuaian sekadar yang diperlukan, tanpa harus mengorbankan nilai-nilai transendentalnya yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Dengan kepekaan itu akan dapatlah hukum Islam akan turut memberikan sumbangannya pada pembangunan bangsa, yaitu dengan menciptakan nilai-nilai kehidupan yang dinamis tapi dilandasi oleh kesadaran akan keharusan bagi manusia untuk berupaya dalam batas-batas kemampuannya sebagai makhluk belaka.

c. Memperjuangkan Demokrasi

Menurut pemikiran Abdurahman Wahid dalam Tradisionalisme Radikal persinggungan NU-Negara (1997:189) Keyakinan bahwa intelektual (Islam) harus terlibat aktif dalam perubahan masyarakat adalah sebuah tema yang mencuat, secara eksplisit dan implisit, dalam banyak tulisan Abdurahman. Secara umum, tema ini memang tidak tampak dan hanya implisit dalam tulisannya.

Di negeri kita demokrasi belum lagi tegak dengan kokoh, masih berupa hiasan luar bersifat kosmetis daripada sikap yang melandasi pengaturan hidup yang sesungguhnya. Dalam suasana demikian ini, unsur-unsur masyarakat yang ingin melestarikan kepincangan

sosial yang ada dewasa ini, tentu akan berusaha sekuat tenaga membendung aspirasi demokratis yang hidup di kalangan mereka yang telah sadar akan perlunya kebebasan di Negeri ini.

Kalau tidak ada usaha sungguh-sungguh untuk menegakan demokrasi yang benar di Negeri ini, tentu aspirasi-aspirasi itu akan terbendung oleh kekuatan-kekuatan anti demokrasi itu. Negeri kita bukan tempat satu-satunya di dunia ini, dimana keadaan di atas masih berlangsung. Keadaan ini sendiri bahkan merupakan ciri umum kehidupan di hampir semua negara yang sedang berkembang.

Karenanya, dari sekarang sebenarnya telah dituntut dari kita kesediaan bersama untuk memperjuangkan kebebasan dan menyempurnakan demokrasi yang hidup di negeri kita. Perjuangan itu haruslah dimulai dengan kesediaan menumbuhkan moralitas baru dalam kehidupan bangsa, yaitu moralitas yang merasa terlibat dengan penderitaan rakyat di bawah.

Jika masyarakat Islam dengan dinamisasi otomatis akan menjadi masyarakat yang dekat dengan semua warga negara, baik muslim maupun non muslim, karena ia akan menjadi masyarakat yang terbuka terhadap perbedaan dan senang dengan komposisinya yang plural. Pada bagian terdalam dari pandangan ini adalah keyakinannya bahwa Islam menyerukan orang untuk bersikap toleran terhadap orang lain. Seorang tidak akan menjadi muslim yang baik tanpa menunjukkan keinginan tulusnya terhadap semua kalangan dalam masyarakat. Tentu saja, sikap toleransi dan pemikiran yang luas melimpah ruah dalam tulisannya. Sebangun dengan kerangka pemikiran yang pluralisti ini terbesit juga perhatian yang mendalam bahwa partai-partai politik Islam, atau "politik partai" politik Islam, seharusnya tidak memunculkan sentimen sektarian dalam masyarakat. Bagaimanapun, bentuk partai Islam adalah sesuatu yang pasti membuatnya tidak mudah (1997:192).

d. Teori kekuasaan modern

Gene Sharp yang dikutip oleh Abdurrahman Wahid dkk (2000:24) mengungkapkan bahwa: "Kekuasaan politik akan hancur jika anggotanya tidak saling menaati dan saling mendukung. Boleh jadi, peralatan militer penguasa tetap utuh, tentaranya sehat dan tegap, orang tawanan tidak cedera, pabrik-pabrik dan sistem transmisi dalam kapasitas operasional penuh, dan bangunan-bangunan pemerintah tidak rusak. Tetapi segala sesuatu menjadi berubah jika dukungan manusia yang menciptakan dan mendukung kekuasaan politik rezim itu telah meninggalkannya. Dengan demikian, kekuasaannya betul-betul hancur.

Ada lima kondisi yang didapatkan oleh orang-orang Muslim setelah protes anti-kekerasan di Pattani. Lima asas ini disebut dengan Five Pillars of Muslim Nonviolent Action yaitu: Pertama, mereka mempunyai niat untuk tidak tunduk, yang tanpa hal itu, tindakan anti kekerasan tidak bisa direalisasikan. Umat Islam berniat tidak tunduk, karena bagi mereka hanya Tuhanlah yang tertinggi. Ketundukan total terhadap Allah ini pada gilirannya berarti penolakan terhadap segala bentuk otoritas absolut, termasuk negara.

Kedua, umat Islam Pattani berani walaupun selalu ditindas oleh aparat negara. Karena hanya tunduk kepada Allah, mereka tidak takut menghadapi mati. Umat Islam percaya sebagaimana diajarkan oleh iman mereka bahwa seluruh kejadian baik buruk dalam hidup mereka merupakan pemberian Tuhan. Akibatnya, bertawakkal ketika bekerja untuk hanya sebuah kasus, tanpa takut hukuman menjadi mungkin. Singkatnya, mereka percaya Tuhan akan melindungi mereka.

Ketiga, ketertiban umat Islam untuk dapat berkumpul, membuat arak-arakan protes, dan bahkan ancaman untuk mengelola massa secara efisien. Seluruh aktivitas betul-betul tersusun rapi. Kualitas

kedisiplinan tampak berhubungan dengan kepemimpinan kelompok karena butuh waktu yang lama untuk menanamkan sifat kolektif. Tapi, umat Islam telah disiplin dalam kehidupan sehari-hari mereka, salat lima kali sehari memberi sumbangan besar pada kualitas ini.

Keempat, kosep umat (komunitas) sangat kuat di kalangan umat Islam yang menemukan ekspresinya dalam al-Quran. Kelima, perasaan di antara umat Islam Pattani itu begitu aktif. Islam berulang kali membuat mereka berani bertindak, dan walaupun jihad bisa dilakukan dalam hati, lidah, ataupun tangan, tetapi yang penting dilaksanakan.

Keharusan merubah moralitas masyarakat dengan sabar agar sesuai dengan ajaran-ajaran Islam yang kita yakini kebenarannya, dengan memberikan contoh yang baik sebagai wahana utama dalam pembentukan moralitas yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Hal ini yang tampaknya sering tidak disadari oleh beberapa tokoh Islam maupun beberapa perkumpulan kaum muslimin. Masyarakat kita sekarang ini memiliki kemajemukan sangat tinggi, kalau kita tidak menyadari hal ini, kita akan mudah marah dan bersikap 'memaksakan' kehendak kepada masyarakat. (Abdurrahman Wahid, dalam *Islamku, Islam Anda dan Islam Kita*, 2006:72).

Abdurrahman Wahid (2006:75) Islam terbagi kepada dua bagian: Islam formal dan tidak formal. Dalam pandangan formaal, ajaran Islam selalu menjadi aturan bernegara, dalam bentuk undang-undang (UU). Formalisasi ini juga mengancam kebersamaan kaum muslimin Indonesia. Karena negara akan menetapkan sebuah versi (madzhab) dalam Islam untuk dijadikan UU.

Secara teoritis, Teror atau Terorisme tidak selalu identik dengan kekerasan. Terorisme adalah puncak aksi kekerasan, *terrorism is the apex of violence*. Bisa saja kekerasan terjadi tanpa teror, tetapi tidak ada teror tanpa kekerasan. Kekerasan adalah suatu tindakan yang

ditunjukkan kepada orang lain dengan maksud melukai, menyakiti dan membuat menderita baik secara fisik, maupun psikis.

Perlu disadari bahwa faktor kekerasan agama tidak hanya dipicu oleh faktor eksternal seperti kepentingan politik, ekonomi dan sosial. Faktor internal juga dapat memberikan kontribusi yang besar. Masalah interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu masalah utama yang bisa mendorong umat beragama melakukan tindak kekerasan.

Survei menunjukkan bahwa orang yang bersedia merusak gereja yang tidak memiliki izin berjumlah 14,7%, mengusir kelompok Ahmadiyah 28,7%, merajam orang berzina 23,2%, perang melawan non-muslim yang mengancam 43,5%, menyerang atau merusak tempat penjualan minuman keras 38,4%, mengancam orang yang dianggap menghina Islam 40,7%, jihad di Afghanistan dan Irak 23,1%, dan jihad di Ambon dan Poso 25,2%. Sementara untuk bentuk tindakan kekerasan yang bersifat domestik, diperoleh tingkat kesediaan berikut: mencubit anak agar patuh pada orangtua 22%, memukul anak di atas sepuluh tahun agar salat 40,7%, suami memukul istri jika tidak melakukan kewajibannya 16,3%.

Berdasarkan hal di atas agama terkesan merupakan sumber dari kekerasan akan tetapi pemahaman yang tekstualis terhadap Kitab Suci agama lah yang bisa menjadi variabel yang paling signifikan dalam mendorong timbulnya perilaku kekerasan agama. Di samping mendorong perilaku kekerasan agama, tekstualisme dan Islamisme juga berkorelasi positif dengan perilaku kekerasan umum dan kekerasan negara.

Tidak dapat dipungkiri bahwa agama merupakan sumber identitas yang sangat kuat dalam diri seseorang. Agama profetik seperti Islam dan Kristen, cenderung melakukan kekerasan segera setelah identitas mereka terancam. Persaingan antar agama yang memicu konflik sangat mudah terjadi apabila salah satu kelompok

merasa identitasnya terancam. Misalkan bisa kita lihat pada konflik Ambon dan Poso jika dalam konteks dalam negeri.

Potensi ini menjadi semakin besar ketika para pemimpin politik berusaha mengkonstruksi identitas negara berdasarkan agama tertentu yang mayoritas. Di satu sisi itu bisa menimbulkan arogansi dari kelompok pemeluk agama yang mayoritas dan perasaan terancam dan terintimidasi yang dirasakan oleh kelompok minoritas.

Di Indonesia pada saat ini kita sedang berhadapan dengan gerakan Islam fundamentalis yang berusaha untuk mendirikan negara Islam. Sudah terbukti bahwa itu merupakan salah satu sumber terbesar kekerasan agama yang terjadi di negara kita. Bukan hanya gereja atau kelompok agama lain yang dianggap sebagai musuh melainkan juga kelompok Islam lainnya yang tidak setuju dengan ide negara Islam tersebut. Akibatnya negara kita mengalami penderitaan yang sangat dalam. Muncul kecurigaan antara pemeluk agama dan memicu terbentuknya semangat separatis.

Dalam realitas negara kita sekarang ini, terorisme adalah bentuk paling nyata dari kekerasan politik-agama di Indonesia. Dalam konteks teologis, terorisme bisa mengambil bentuknya dari agama sebagai landasan dan alat untuk mendapatkan kekuasaan, sebagai tujuan dari teror tersebut. Upaya membangun hubungan yang berpijak pada prinsip persamaan, keterbukaan, dan saling menghargai adalah wujud mutlak yang harus dilakukan untuk membenahi jalinan kusut hubungan sosial kemasyarakatan kita selama ini. Bila tidak, maka niscaya akan sulit membangun sebuah sistem sosial yang adil, terbuka dan saling menghargai.

Gagasan inilah yang mendesak untuk dikembangkan dalam rangka membangun hubungan keberagamaan di masyarakat, baik di kalangan internal maupun di kalangan eksternal. Demikian, tidak akan terjadi peristiwa kekerasan yang mengatasnamakan keyakinan agama. Betapapun ini merupakan sebuah gagasan ideal yang harus

muncul dari individu-individu yang berkesadaran. Akan sulit mengharapkan individu semua yang ada di dunia ini memiliki kesadaran sama dalam menciptakan hubungan di masyarakat. Karena sulit itulah maka diperlukan sebuah otoritas yang dapat mendesak kehendaknya kepada seluruh individu di masyarakat. Otoritas itu harus mampu bersifat netral, dan harus merupakan representasi dari semua golongan dan kelompok. Agar dapat mencegah terjadinya dominasi golongan dalam praktiknya.

Otoritas ini paling representatif mengambil bentuknya pada institusi negara. Negara dalam hal ini harus bertindak sebagai mediator atau eksekutor terhadap tegaknya sikap terbuka di antara masyarakat. Dan Negara harus mampu menindak siapapun individu yang tidak mau mewujudkan sikap terbuka itu. Negara sebagai kekuatan hukum berhak mendesak kepentingan bersama kepada individu yang enggan untuk bertindak. Kemudian para pemimpin agama harus ambil bagian dalam mencegah kekerasan atas nama agama yang sering terjadi di negeri ini dengan cara memberikan pembinaan dan pemahaman yang utuh dan menyeluruh mengenai substansi ajaran agamanya masing-masing yang memang mengajarkan kebaikan kepada umat. Kekerasan agama yang terjadi selama ini dilakukan oleh pihak-pihak yang begitu bersemangat dalam praktik ritual hidup keagamaan tetapi pengamalannya masih kurang, bahkan salah dalam menafsirkan agamanya.

Menurut Khamami Zada ada dua alasan mengapa suatu perdamaian bisa terwujud dalam masyarakat. Pertama, karena adanya elemen masyarakat yang masih memegang teguh ide dan spirit perdamaian untuk kemudian mengkampanyekannya dan, kedua karena adanya prakarsa dari para actor konflik untuk melakukan rekonsiliasi. Maka dengan begitu generasi bangsa dituntut untuk selalu bergerak dalam menanggapi persoalan-persoalan yang melanda bangsa ini, generasi bangsa harus melawan

dan mencegah bentuk intimidasi, diskriminasi, intoleransi, sampai dengan kriminalisasi yang mengatasnamakan Agama, budaya dan menjaga kepercayaan terhadap bangsa sendiri. Sementara Negara bertanggung jawab untuk memfasilitasi jalannya hukum yang betul-betul adil bagi yang tertindas hak-haknya, ajaran Islam sendiri menegaskan bahwa pemerintah dengan segala kebijakannya mesti diarahkan dan bertujuan bagi terciptanya kemaslahatan.

Menurut Abdurrahman Wahid dalam buku *Islamku, islam anda dan islam kita* (2006:346) bahwa islam mengajarkan hidup tanpa kekerasan. Satu-satunya alasan untuk menggunakan kekerasan adalah jika kaum muslimin diusir dari tempat tinggal mereka. Islam berjalan berabad-abad lamanya tanpa kekerasan, termasuk penyebaran agama tersebut di negeri ini. Dengan demikian, seharusnya umat islam memahami ini, bahwa islam anti kekerasan dan tidak dibenarkan melakukan kekerasan apapun alasannya sebab kekerasan tidak harus dilawan dengan kekerasan.

Muhammad Sayyid Tantawi Syeikh Al-Akbar al-Azhar yang dikutip oleh Abdurrahmann Wahid dalam *Ilusi Negara Islam* (2009:175) bahwa menilai aksi-aksi yang bersifat intimidatif, merugikan pihak lain secara materi maupun non-materi, mengancam keselamatan atau bahkan menghilangkan jiwa dan /a atau mencederai raga siapa pun, sekalipun dilakukan atas nama dakwah dan/atau amr ma'ruf nahy munkar, itu adalah dakwah yang salah dan umat Islamm harus menolaknya. Bahkan wajib hukumnya bagi pemerintah untuk menangkap para pelaku kejahatan (jarimah) tersebut dan menghukumnya sesuai dengan aturann yang berlaku. Dakwah apapun yang tidak sejalan dengan pesan luhur agama, adalah dakwah yang salah dan harus ditolak.

2. Kematangan Beragama dan Membuka Diri untuk Perbedaan

Dari kata kata ad din di atas digunakan dalam arti peraturan hidup yang lengkap dalam segala aspek. System hidup yang diterima dan diridhoi. System yang didalamnya memuat aqidah, syariah, akhlak, ibadah dan amal perbuatan yang disyariatkan Allah (Ahmat, 1981: 6-7).

Taib Thahir Abd Mu'in menulis agama sebagai wad'un ilahiyun saiqun lidzawil'uquli *biikhtiyarhim iyyahu ila shilahi fil hali wal falahi fil mali* dari dedfinisi ini dapat difahami bahwa agama memiliki sifat sebagai berikut ;(a) berasal dari Allah, (b) diperuntukkan bagi untuk orang berakal, (3) dianut berdasar pilihan bukan paksaan ,(4) menawarkan kebaikan dunia akherat). Sedangkan secara terminologi dengan demikian dapat difahami agama ialah suatu tata kepercayaan atas adanya yang Agung di luar manusia, dan suatu penyembahan kepada yang Agung serta suatu kaidah yang mengatur hubungan manusia dengan yan agung, hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan alam yang lain, sesuai dengan kepercayaan dan penyembahan tersebut.

Manusia mengalami dua macam perkembangan yaitu perkembangan jasmani dan rohani. Perkembangan jasmani diukur berdasarkan umur kronologis. Puncak perkembangan jasmani yang dicapai manusia disebut kedewasaan, sebaliknya perkembangan rohani diukur berdasarkan tingkat kemampuan (Abilitas). Pencapaian tingkat abilitas tertentu bagi perkembangan rohani disebut istilah kematangan (Maturity). Kemampuan seseorang untuk mengenali atau memahami nilai agama yang terletak pada nilai-nilai luhurnya serta menjadikan nilai-nilai dalam bersikap dan bertingkah laku merupakan ciri dari kematangan beragama, jadi kematangan beragama terlihat dari kemampuan seseorang untuk memahami, menghayati serta mengaplikasikan nilai-nilai luhur agama yang dianutnya dalam kehidupan sehari-hari. Ia menganut suatu agama karena menurut keyakinannya agama tersebutlah yang terbaik.

Karena itu ia berusaha menjadi penganut yang baik, keyakinan itu ditampilkannya dalam sikap dan tingkah laku keagamaan yang mencerminkan ketaatan terhadap agamanya. Ciri dan sifat agama pada orang yang sehat jiwa menurut W.Starback yang dikemukakan oleh W.Houston Clark dalam bukunya *Religion Psychology* (Sulhan, 2006: 77) adalah (a). Optimis dan Gembira. Orang yang sehat jiwa menghayati segala bentuk ajaran agama dengan perasaan optimis. Pahala menurut pandangannya adalah hasil jerih payahnya yang diberikan Tuhan. (b). Ekstrovet dan tak Mendalam. Sikap optimis dan terbuka yang dimiliki orang yang sehat jiwa ini menyebabkan mereka mudah melupakan kesan-kesan buruk dan luka hati yang tergores sebagai ekses agamis tindakannya. Dosa mereka anggap sebagai akibat perbuatan mereka yang keliru. (c). Menyenangi ajaran ketauhidan yang liberal. Sebagai pengaruh kepribadian yang ekstrovet maka mereka cenderung: (1). Menyenangi Theologi yang luwes dan tidak baku (2) Menunjukkan tingkah laku keagamaan yang lebih bebas (3) Menekankan ajaran cinta kasih daripada kemurkaan dan dosa (4). Bersifat liberal dalam menafsirkan pengertian ajaran islam (5) Selalu berpandangan positif dan (6) Berkembang secara graduasi, dll.

Ibnu Qoyyim menyebutkan kriteria bagi orang yang matang beragama dalam islam.

- a. Dia terbina keimanannya yaitu selalu menjaga fluktualitas keimanan agar selalu bertambah kualitasnya.
- b. Dia terbina ruhiyahnya yaitu menanamkan pada dirinya kebesaran dan keagungan Allah serta segala yang dijanjikan di akhirat kelak, sehingga dia menyembunyikan dirinya untuk meraihnya.
- c. Dia terbina pemikirannya sehingga akalinya diarahkan untuk memikirkan ayat-ayat Allah. baik al-kaunianya (ciptaan-nya) dan al-qur;aniyah.

- d. Dia terbina perasaannya sehingga segala ungkapan perasaan ditujukan kepada Allah, senang atau benci, marah atau rela, semuanya karena Allah.
- e. Dia terbina akhlaknya dimana kepribaiannya di bangun diatas pondasi akhlak mulia sehingga kalau berbicara dia jujur, bermuka manis, menyantuni yang tidak mampu, tidak menyakiti orang lain.
- f. Dia terbina kemsyarakatnya karena menyadari sebagai makhluk sosial, dia harus memperhatikan lingkungannya sehingga dia berperan aktif mensejahterahkan lingkungannya baik intelektualitasnya, ekonominya, dll.
- g. Dia terbina kemauannya sehingga tidak mengumbar kemaunnya ke arah yang disrtuktif tetapi diarahkan sesuai dengan kehendak Allah.
- h. Dia terbina kesehatan badannya karena memberikan hak-hak badan untuk ketaatan kepada Allah.
- i. Dia terbina nafsu seksualnya yaitu diarahkannya perkawinan yang dihalalkan Allah.

Sementara itu kriteria orang yang matang bergama menurut Allport (1962) dalam (Sulhan, 2006: 71-72) menyebutkan ciri-ciri Individu yang memiliki kematangan bergama sebagai berikut:

- a. Kemampuan melakukan differensi, artinya kemampuan differensi dengan baik dimaksudkan sebagai individu dalam bersikap dan berperilaku terhadap agama secara objektif, kritis, reflektif, berpikir terbuka atau tidak dogmatis. individu yang memiliki kehidupan bergama yang differensiasi, akan mampu menempatkan rasio sebagai salah satu bagian dari kehidupan bergamanya, sehingga pandangan terhadap agama menjadi lebih kompleks dan realistis, tidak terjebak dengan pemikiran yang dogmatis.

- b. Berkarakter dinamis, artinya apabila individu telah berkarakter dinamis, agama telah mampu mengontrol dan mengarahkan motif-motif dan aktivitasnya. aktivitas keagamaan semuanya dilaksanakan demi kepentingan agama itu sendiri.
- c. Konsistensi moral, kematangan beragama ditandai dengan konsistensi individu pada konsistensi moral yang dimiliki dengan ditandai oleh keselarasan antara tingkah laku dengan nilai moral. salah satunya adalah adanya keselarasan dan kesamaan antara tingkah laku dengan nilai agama, kepercayaan tentang agama yang intens akan mampu mengubah atau memtransformasikan tingkah laku.
- d. Komprehensif, keberagaman yang komprehensif dapat diartikan sebagai keberagaman yang luas, universal dan toleran dalam arti mampu menerima perbedaan.
- e. Integral, keberagaman yang matang akan mampu mengintegrasikan atau menyatukan agama dengan segenap aspek-aspek lain dalam kehidupan termasuk di dalamnya dengan ilmu pengetahuan.
- f. Heuristik, ciri heuristik dari kematangan beragama berarti individu akan menyadari keterbatasannya dalam beragama, serta selalu berusaha untuk meningkatkan pemahaman dan penghayatan dalam beragama.

Karenanya membangun kesefahaman itu menjadi penting, beberapa alasan NU menerima keragaman di antaranya:

- a. Perbedaan harus dianggap sebagai rahmat tuhan, dan tak diperkenankan bagi siapapun untuk melakukan intimidasi, pemaksaan atas alasan perbedaan.
- b. Mengembalikan seluruh penilaian akan iman, ideologi dan keyakinan kepada suara hati masing-masing orang dan

menghindari klaim kebenaran atas tafsir agama. Kebenaran biarlah menjadi otoritas Tuhan, dan menghargai pilihan keyakinan orang lain.

- c. Menghargai kehidupan manusia sebagai orang yang sama-sama memiliki hak untuk hidup, berkembang, berkarya dan menentukan pilihan-pilihan keyakinan sesuai nuraninya.
- d. Keragaman merupakan tanda kebesaran Tuhan bagi manusia agar dapat saling belajar, saling memahami dan melengkapi. (Sulhan, 2015)

Bahkan secara lebih progresif NU merintis kerjasama antar agama untuk menegaskan visi kebangsaan. Bagi NU Dialog Agama itu sarana menghilangkan kecurigaan bahkan lebih dari itu, membicarakan problem social yang hari ini dihadapi bangsa. Di lingkungan NU Dialog antar umat beragama dalam tahun terakhir sudah mulai meluas temanya, bukan saja dialog tentang teologi, sharing pengalaman keagamaan, tetapi berkembang pada respon persoalan riil yang dihadapi umat beragama dalam kehidupan. Persoalan mutakhir yang mulai diangkat diantaranya; (1) ketidakadilan sosial dan ekonomi akibat modernisasi dan globalisasi yang hanya dinikmati segelintir golongan, sementara yang lain dieksploitasi dan termarginalisasi. (2) bias media masa sebagai pusat penyebaran informasi, terkadang terjebak pula pada provokasi dan prasangka yang justru kurang produktif. (3) krisis lingkungan dan ekologi (4) kemiskinan (5) eksploitasi anak dan kekerasan pada perempuan dan (6) demoralisasi masyarakat dan korupsi.

Bagi NU deradikalisasi bias dimulai dengan membuka diri atas perbedaan. Bahkan berani mengakui keberadaan yang lain. Selagi ada curiga dan ketakutan akan memicu ketegangan. Bagi NU saat sekarang semua fihak dapat bijak dengan:

- a. Memastikan kebebasan beragama, yang penting untuk mempertemukan kebutuhan-kebutuhan agama dalam masyarakat plural di Indonesia.
- b. Mempromosikan sikap saling menghargai, apresiasi dan kerjasama antar ragam group keagamaan, guna mendukung stabilitas lokal, regional dan nasional sebagai prasyarat pembangunan.
- c. Memfasilitasi secara institusi sebagai pusat kajian hubungan antar umat beragama.

3. Membangun Islam Rahmatan Lil 'Alamin

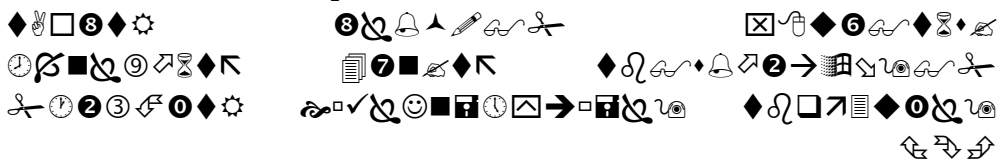
a. Islam Rahmatan lil 'Alamin ala NU

Dalam al-Qur'an, banyak sekali ayat yang menegaskan bahwa Islam diturunkan sebagai rahmat bagi sekalian alam. Dikatakan dalam surat al-Anbiya/21:107,



“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”

Dalam surat al-Furqan/25:1 dikatakan,



“Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqaan (Al Qur'an) kepada hamba-Nya, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam.”

Dalam surat Shad/38:87 dikatakan,



“Al Qur'an ini tidak lain hanyalah peringatan bagi semesta alam.”

Membangun Islam rahmatan li-l 'alamin ala NU berarti membangun Islam yang berdialog dengan budaya. Islam rahmatan li-l 'alamin ala NU adalah Islam Nusantara. Dikatakan Dr. KH. Ma'ruf Amin, “Islam Nusantara bukan agama baru, tetapi Islam yang tumbuh di Nusantara. Islam Nusantara ya Islam Aswaja an-Nahdliyyah.”

Dalam wawancaranya Ahmad Suhendra (Kontributor NU Online Yogyakarta) dengan Guru Besar Sejarah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof Dr Abdul Karim di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Jumat 29 Januari 2016, Islam Nusantara sudah diusulkan (oleh Prof Dr Abdul Karim) sejak tahun 2003, yaitu ketika rapat jurusan Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) tetapi tidak diindahkan. Pada tahun 2005, idenya diusulkan kembali, yaitu agar ada lembaga yang menangani tentang keIslaman di Indonesia. Usulnya kemudian diterima secara aklamasi dan hasilnya adalah adanya mata kuliah wajib lokal Islam Nusantara. Pada tahun 2011, yaitu dalam rapat sarasehan para sepuh NU se-Jawa di Sarang Jawa Tengah, Islam Nusantara ini diusulkan kembali dan semua menyambutnya dengan tepuk tangan, dan hasilnya dapat dilihat pada tahun berikutnya di antaranya pada STAINU Jakarta yang mulai membuka S-2 Islam Nusantara (NU Online, Juli 2016).

Ketika ditanya, apakah Islam Nusantara ini bisa menjadi jawaban atas tindakan-tindakan radikalisme? Prof Dr Abdul Karim menjawab, “Dalam konteks perdamaian dunia, bisa dikatakan Islam di Indonesia yang memimpin. Karena Islam di Indonesia tidak memiliki musuh. Indonesia bisa bekerja sama dengan semua negara. Bahkan, Indonesia bisa menjadi juru damai antara negara yang berseteru. Kekerasan dalam Islam itu tidak didukung sama sekali. Apalagi Islam di Indonesia tidak mengenal itu secara historis. Indonesia

adalah satu negara yang dinilai dunia internasional sangat damai. Islam tidak mengajarkan kekerasan, tetapi mereka yang melakukan kekerasan mungkin memahami al-Qur'an secara literlek." (NU Online, Juli 2016).

Untuk membangun Islam rahmatan lil 'alamin, landasan berfikir dan bertindak para Nahdliyin (lihat, Hasil-hasil Muktamar ke 33 NU, h. 322-324) didasarkan pada:

1) Tawassuth dan i'tidal (moderat dan teguh)

Memilih sikap tengah yang tidak ekstrim (*tatharruf*) kanan atau kiri. Sikap tengah-tengah disertai keteguhan hati dalam memegang prinsip, dengan demikian bersikap tengah bukan berarti tidak punya prinsip. Dengan sikap dasar ini, Nahdlatul Ulama akan selalu menjadi kelompok panutan yang bisa *ngemong* dan luwes kepada semua golongan.

2) Tasamuh (toleran)

NU dalam menyikapi perbedaan menjadikan *tasamuh* sebagai landasan. Sikap toleran terhadap perbedaan, baik dalam masalah keagamaan, terutama dalam hal-hal yang bersifat *furu'* atau menjadi masalah khilafiyah, dan dalam masalah khilafiyah itu sendiri, serta dalam masalah kemasyarakatan dan kebudayaan. Sikap toleran menuntut adanya upaya mencari titik-temu, bukan titik-beda. Berangkat dari titik-temu tersebut kemudian dikembangkan persaudaraan (*ukhuwwah*), baik persaudaraan seagama, sebangsa, maupun semanusia.

3) Tawazun (seimbang)

Landasan sikap seimbang diterapkan dalam semua bidang. Seimbang dalam penggunaan wahyu dan akal dalam memahami teks keagamaan. Sikap seimbang dalam berkhidmah, menyerasikan kepada Allah SWT., khidmah sesama manusia, serta kepada lingkungan hidupnya. Menyelaraskan kepentingan masa lalu, masa kini dan masa mendatang. Juga menjaga keseimbangan pemenuhan

hak dan kewajiban sebaga individu, masyarakat, warga negara dan pergaulan dunia.

4) Amar ma'ruf nahi munkar

Landasan sikap ini berarti selalu memiliki kepekaan untuk mendorong perbuatan baik, berguna dan bermanfaat bagi kehidupan bersama, serta menolak dan mencegah semua hal yang dapat menjerumuskan dan merendahkan nilai-nilai kehidupan. Prinsip nahi munkar di NU dilakukan secara makruf, dalam kerangka tetap menjaga harkat dan martabat kemanusiaan.

b. Gerakan NU untuk Membentuk “Umat Terbaik”

Gerakan yang dilakukan oleh NU untuk pembentukan “umat terbaik” dilandasi pada prinsip-prinsip dasar (lihat, Hasil-hasil Muktamar ke 33 NU, h. 324-328) sebagai berikut:

1) Al-Shidqu (jujur)

Prinsip dasar ini mengandung arti kejujuran, kebenaran, kesungguhan, dan keterbukaan. Kejujuran ini dalam arti kejujuran dalam niat, ucapan, tindakan, dan keyakinan. Kejujuran dalam niat untuk memastikan apa yang dilakukan didorong oleh niat yang baik untuk mencapai ridla Allah Swt. Jujur dalam ucapan memastikan apa yang diucapkan sesuai dengan niat dan dilakukan dengan cara yang baik. kejujuran adalah satunya kata dengan perbuatan, ucapan dengan pikiran. Apa yang diucapkan sama dengan yang di bathin. Jujur dalam hal ini berarti tidak plin-plan dan tidak dengan sengaja memutarbalikkan fakta atau memberikan informasi yang menyesatkan.

2) Al-Amanah wa al-Wafa bi al-'Ahd (amanah dan menepati janji)

Ada dua istilah dalam prinsip ini, yaitu amanah dan menepati janji. Prinsip amanah lebih umum meliputi semua tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang harus dilaksanakan, baik ada perjanjian

ataupun tidak. Berbeda dengan prinsip pertama, prinsip kedua hanya berkaitan dengan perjanjian. Kedua istilah ini digabungkan untuk memperoleh pengertian yang meliputi: dapat dipercaya, setia, dan tepat janji. Sifat dapat dipercaya, setia, komitmen, dan dedikasi terhadap tugas serta menepati janji menjamin integritas pribadi dalam menjalankan tanggung jawab dan wewenang. Sedangkan sifat amanah dan menepati janji itu sendiri, bersama-sama dengan sifat jujur, secara umum menjadi ukuran kredibilitas yang tinggi di hadapan pihak lain, sebagai satu syarat penting dalam membangun berbagai kerjasama.

3) Al-'Adalah (bersikap adil)

Bersikap adil mengandung pengertian obyektif, proporsional dan taat asas. Butir ini mengharuskan orang berpegang kepada kebenaran obyektif dan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya secara proporsional. Sikap adil ini juga diperlukan dalam menyikapi perbedaan, konflik, dan perselisihan di antara beberapa pihak. Dengan sikap ini, potensi kekacauan bisa dikendalikan. Implikasi lain dari sikap ini juga adalah sebagai kesetiaan kepada aturan main, rasionalitas, dan kejernihan berfikir.

4) Al-Ta'awun (gotong royong)

Pengertian ta'awun meliputi meliputi tolong menolong, setia kawan dan gotong royong dalam kebaikan dan taqwa. Ta'awun juga memiliki pengertian timbal balik dari masing-masing pihak untuk memberi dan menerima. Sehingga sikap ta'awun mendorong setiap orang untuk berusaha dan bersikap kreatif agar dapat memiliki sesuatu yang dapat disumbangkan kepada orang lain dan kepada kepentingan bersama.

5) Istiqamah (Konsisten)

Istiqamah mengandung arti ajeg-jegeg, berkesinambungan, dan berkelanjutan. Ajeg-jegeg artinya tetap dan tidak bergeser dari jalur (thariqah) sesuai dengan ketentuan Allah Swt dan rasul-Nya,

tuntunan yang diberikan oleh salafus shalih, dan aturan main serta rencana-rencana yang disepakati bersama. Kesenambungan artinya keterkaitan antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lain dan antara satu periode dengan periode yang lain sehingga semuanya merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan saling menopang seperti sebuah bangunan. Berkelanjutan artinya bahwa pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut merupakan proses yang berlangsung terus menerus tanpa mengalami kemandekan, dan merupakan suatu proses maju dan bukannya berjalan di tempat.

c. Islam ala NU adalah Islam yang tidak Mengabaikan Budaya

NU punya kontribusi yang cukup besar terhadap pembangunan budaya nusantara. Kontribusi NU dapat dilihat sedikitnya dari empat sudut, yaitu: (1) keberadaan NU telah menegaskan sebuah tindakan kultural masyarakat agraris, khususnya di Jawa; (2) NU dalam taraf tertentu berhasil mengharmonikan Islam, sebagai kultur nonindigenous Indonesia, dengan budaya lokal dalam bentuk perpaduan budaya; (3) kolektivitas dan komunalisme yang didukung oleh tradisi NU merupakan bentuk kontrol sosial dalam masyarakat agraris; (4) akulturasi budaya yang dilakukan NU menghasilkan kesenian khas, yang merangkum simbol dan nilai Islam dan budaya lokal (Fanani, 2008: 224).

NU sejak awal dakwahnya memang mengusung ajaran Islam tanpa melalui jalan formalistik, lebih-lebih dengan cara membenturkan diri dengan realitas secara formal, tetapi dengan cara lentur. Inilah yang ditegaskan oleh KH Sahal Mahfudz ketika beliau menjabat sebagai Raim Aam PBNU. Selanjutnya beliau (wawancaranya dengan NU Online, tanggal 28 Juli 2006; lihat juga dalam, *Ilusi Negara Islam*, Wahid [ed], 2009) mengatakan, “NU berakulturasi dan berinteraksi secara positif dengan tradisi dan budaya masyarakat setempat. Proses akulturasi tersebut telah

melahirkan Islam dengan wajah yang ramah terhadap nilai budaya setempat, serta menghargai perbedaan agama, tradisi dan kepercayaan, yang merupakan warisan budaya nusantara.”

Dalam pidato Iftitah pada Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar NU, tanggal 27-30 Juli 2006 di Asrama Haji Sukolilo Surabaya, KH. MA. Sahal Mahfudz berkata, “Salah satu corak keagamaan yang khas bagi NU adalah kemampuannya menerapkan ajaran teks keagamaan yang bersifat sakral di dalam konteks budaya yang bersifat profan. NU dapat membuktikan bahwa universalitas Islam dapat diterapkan tanpa harus menyingkirkan budaya lokal ... NU juga sejak awal mengusung ajaran Islam tanpa melalui jalan formalistik, lebih-lebih dengan cara membenturkannya dengan realitas secara formal, tetapi dengan cara lentur. NU berkeyakinan bahwa syari’at Islam dapat diimplementasikan tanpa harus menunggu atau melalui institusi formal. NU lebih mengidealkan substansi nilai-nilai syari’ah terimplementasi di dalam masyarakat ketimbang mengidealisasikan institusi. Kehadiran institusi formal bukan suatu jaminan untuk terwujudnya nilai-nilai syari’ah di dalam masyarakat. Apalagi NU sudah berkesimpulan bahwa NKRI dengan dasar Pancasila sudah merupakan bentuk final bagi bangsa Indonesia” (lihat, Rumadi, 2006, h. 2). Ditegaskan oleh KH Said Agil Siradj dalam wawancaranya dengan NU Online, tanggal 11 Januari 2009 (Lihat juga dalam, *Ilusi Negara Islam*, Wahid [ed], 2009) berkata, “Sebuah Ideologi kalau tidak diperkuat dengan budaya tidak akan langgeng. Kalau doktrin saja, maka ideologi atau ajaran itu akan hilang, bahkan menjadi kecil sekali. Maka doktrin harus diimbangi kreatifitas manusia atau kita biasa menyebutnya sebagai budaya.”

Upaya untuk mendialogkan Islam dengan budaya melalui pribumisasi Islam akan terus diupayakan. Bagi kalangan Nahdliyin, Islam tidak akan besar jika mengabaikan budaya. Dalam wawancaranya di atas, KH Said Agil Siradj (wawancaranya dengan

NU Online, tanggal 11 Januari 2009; lihat juga dalam, *Ilusi Negara Islam*, Wahid [ed], 2009) menambahkan, “Kalau tidak ada seperti itu maka akan sepi. Lama-lama Islam hanya dilakukan oleh sekelompok kecil, tidak membudaya, tidak manusiawi.”

Hubungan NU dengan budaya dipertegas ketika Mukhtamar ke 32 Nahdlatul Ulama di Makassar. Pada pengembangan kebudayaan NU, tim perumus program kerja lima tahun PBNU masa khidmat 2010-2015 merumuskan 9 rumusan penting (lihat, Hasil-hasil Mukhtamar ke 32 NU, h. 110-111), yaitu: (1) memperjuangkan kebudayaan yang tidak bertentangan dengan Islam Aswaja (baik sebagai khazanah pengetahuan, nilai, makna, norma, kepercayaan, dan ideologi suatu masyarakat; maupun—terlebih—sebagai praktik dan tindakan mereka dalam mempertahankan dan mengembangkan harkat kemanusiaannya, lengkap dengan produk material yang mereka hasilkan) sebagai faktor yang diperhitungkan oleh para pengambil kebijakan negara, sehingga kebudayaan dapat menjadi kekuatan yang menentukan dalam setiap kebijakan pemerintah; (2) membuka ruang kreativitas seluas mungkin bagi para seniman untuk mengembangkan seninya yang tidak bertentangan dengan Islam Aswaja, baik tradisional, modern, maupun kontemporer, yang mengalami kesulitan dalam melakukan kegiatan kesenian yang disebabkan oleh kebijakan politik dan birokrasi negara, dominasi pasar, maupun kekuatan formalisme agama; (3) merumuskan dan mengembangkan strategi kebudayaan yang mampu menjaga, memelihara, menginspirasi dan memberi orientasi bagi pengembangan kreativitas masyarakat pada wilayah kebudayaan dalam rangka pemenuhan kodratnya sebagai khalifah fil ardl dan sekaligus warga masyarakatnya; (4) menjadikan pesantren sebagai pusat pengembangan seni dan budaya melalui penyelenggaraan berbagai pelatihan, festival dan event kesenian di pesantren; (5) memfasilitasi dan memberi perlindungan HKI (Hak Kekayaan

Intelektual) atas berbagai karya seni para seniman NU; (6) memberikan legitimasi syariah terhadap kesenian tradisional dan berbagai praktek tradisi yang tidak bertentangan dengan Islam Aswaja; (7) mendokumentasikan karya-karya seni para intelektual, ulama dan seniman NU; (8) mengembangkan dan mempromosikan kesenian religi baik gagasan, karya dan pelaksanaannya; (9) membuat data base yang memuat nama-nama seniman NU, karya-karya, sejarah dan prestasinya.

d. Sikap NU terhadap Kekerasan dan Keberceraihan

Potensi adanya kekerasan dan keberceraihan sudah dirasa oleh NU dan ormas lainnya ketika paham-paham radikal berhasil menyusup ke berbagai komunitas Islam Indonesia. Bukan hanya NU, Muhammadiyah pun mengakui adanya infiltrasi paham Islam transnasional ke tubuh organisasi mereka. Selain itu, kelompok radikal ini berhasil juga menyusup ke Majelis Ulama Indonesia (MUI), bahkan menyusup di lembaga-lembaga pendidikan hingga infiltrasi di Instansi-instansi Pemerintah dan Swasta (Wahid [ed], 2009: 171-220).

Infiltrasi gerakan Islam radikal di Muhammadiyah telah lama diakui, dan infiltrasi ini ditandai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Pimpinan Pusat (SKPP) Muhammadiyah Nomor: 149/Kep/I.0/B/2006 tentang “Kebijakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Mengenai Konsolidasi Organisasi dan Amal Usaha Muhammadiyah”. SKPP tahun 2006 ini menuangkan 10 butir keputusan, dan dikeluarkan dengan tujuan untuk “menyelamatkan Muhammadiyah dari berbagai tindakan yang merugikan Persyarikatan”, yang secara garis besar antara lain adalah infiltrasi di tubuh Muhammadiyah dari organisasi lain yang memiliki paham, misi, dan kepentingan yang berbeda dengan Muhammadiyah. Pada butir ke-3 SKPP menyebut Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah

benar-benar partai politik. Pada butir ini, Muhammadiyah diminta untuk tetap berpijak pada Khittah Muhammadiyah dan harus membebaskan diri dari, serta tidak menghimpit diri dengan misi, kepentingan, kegiatan, dan tujuan partai politik tersebut. Apa yang paling dirasa dengan masuknya mereka adalah dibatalkannya ketika itu kebijakan tentang Dakwah Kultural (panduan bagi aktivis Muhammadiyah untuk bersikap moderat), kepemimpinan perempuan, dan pengembangan pemikiran Islam di Lembaga Tarjih (Wahid [ed], 2009: 179-189, 246).

Infiltrasi gerakan Islam radikal di NU terjadi di berbagai celah dan menggunakan berbagai cara. Apa yang dilakukan oleh mereka di antaranya dengan mengambil alih masjid-masjid yang dimakmurkan oleh para Nahdliyin. Selain itu, mereka juga masuk ke dalam Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), ke majlis-majlis taklim yang berada di bawah organisasi NU, dan ke pondok-pondok pesantren. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meredam gerakan mereka. Infiltrasi mereka ke tubuh Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) telah dirasakan pada tahun 2006. Ketua Pimpinan Pusat (PP) IPNU ketika itu, Muhammad Asyhadi menyebutkan tentang banyaknya kaum muda NU yang terlanjur masuk ke dalam gerakan Islam garis keras cukup banyak, dan mereka kalau sudah masuk biasanya kehilangan identitas ke-NU-an dan ke-IPNU-annya, untuk itu, IPNU telah bekerja sama dengan ikatan pelajar lainnya dalam menghadapi pengaruh aliran garis keras di lingkungan masing-masing melalui pelatihan motivasi belajar dengan sasaran pelajar. Kegiatan yang sama dilakukan oleh Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LDNU) pada tahun 2006 dan Rabithah al-Ma'ahid al-Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMINU) pada tahun 2007. Pada bulan Agustus 2006, Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LDNU) mengadakan pertemuan yang diikuti oleh 162 ketua Majelis Taklim se-Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi) sebagai upaya untuk memperkuat

kembali paham Aswaja yang dianut NU agar kaum Nahdliyin tidak mudah terhasut oleh kelompok garis keras. Pada bulan Mei 2007, Rabithah al-Ma'ahid al-Islamiah Nahdlatul Ulama (RMINU) mengumpulkan para Pimpinan Pondok Pesantren se-Indonesia di Asrama Pondok Haji Gede Jakarta, dengan salah satu agendanya adalah membahas munculnya ideologi transnasional yang dinilai mengancam tradisi keserjanaan dan keagamaan Pondok Pesantren (Wahid [ed], 2009: 191-198).

Infiltrasi gerakan Islam radikal di Majelis Ulama Indonesia (MUI) terjadi di antaranya, karena Ormas Islam apapun yang doktrin dan akidahnya benar menurut MUI, maka bisa bergabung dan memiliki wakil di dalamnya tanpa mempertimbangkan jumlah anggota organisasinya. Sebagai akibatnya, wakil organisasi besar dan moderat seperti NU dan Muhammadiyah tidak representatif dibandingkan dengan gerakan garis keras kecil yang anggotanya hanya puluhan ribu saja. Bukti paling nyata adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), yang betapa subversifnya secara politik tetapi tidak secara keagamaan, maka tetap diakomodasi. Dengan sistem keanggotaan seperti ini, maka tidak heran jika produk-produk dan fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejalan dengan arus gerakan garis keras, termasuk di dalamnya pada Rakernas MUI yang mengeluarkan fatwa 10 kriteria aliran sesat sebagai pedoman masyarakat Muslim untuk memantau secara mandiri aliran-aliran sesat, dan dipahami sebagai bagian dari makin tidak terkendalinya kekerasan antar agama (Wahid [ed], 2009: 198-201).

Infiltrasi gerakan Islam radikal di lembaga-lembaga pendidikan masuk dengan mudahnya, dari mulai sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Bukti paling nyata adanya infiltrasi ini adalah dengan mudahnya para siswa bahkan mahasiswa untuk mengkafirkan atau membid'ahkan orang lain. Dua strategi yang mereka lakukan untuk menyebarkan faham ini, yaitu diseminasi

ideologi dan kaderisasi. Strategi pertama adalah dengan menyelenggarakan program peribadatan, seperti training keislaman di sekolah-sekolah, yaitu training Islam pemula, bimbingan belajar, kursus-kursus bagi para pelajar dan mahasiswa, pelayanan buku-buku harakah, serta pelayanan da'i gratis. Strategi kedua adalah dengan kaderisasi, yaitu dengan melakukan latihan-latihan yang intensif untuk anak-anak, remaja, dan mahasiswa yang bakal dibina untuk menjadi kader gerakan. Sekolah yang mereka dirikan umumnya memiliki ciri khas, seperti Sekolah Islam Terpadu (SIT) yang didirikan mulai tingkat kanak-kanak hingga sekolah tingkat atas (Wahid [ed], 2009: 202-212).

Infiltrasi gerakan Islam di Instansi-instansi Pemerintah dan Swasta ditandai dengan berbagai indikator yang mengarah kepada formalisasi agama dalam bentuk negara Islam, mulai dari tuntutan kembali ke Piagam Jakarta hingga bermunculannya Perda-perda Syari'ah di berbagai daerah di tanah air. Pada tahun 2006, Menhan Juwono ketika itu mengingatkan bahwa gerakan radikal itu menunggu saat yang tepat untuk terciptanya radikalisisasi. Menurut Menhan, pendirian Negara Islam untuk menerapkan syari'ah akan membuat partai-partai Islam berseteru karena interpretasi syari'ah yang berbeda di antara mereka. Bukti lain radikalisisasi di Instansi-instansi ini adalah banyaknya khutbah jum'at yang disampaikan berisi kecaman terhadap pihak lain. Bukti lainnya adalah pergeseran materi khutbah yang dulunya berkisar tentang spiritualitas, intelektualitas, akhlak, dan etos kerja ke arah berbau politik dan jihad (Wahid [ed], 2009: 213-220).

Dalam Muktamar ke 33 NU di Jombang, NU menyoroti juga berbagai peristiwa terkait kekerasan atas nama agama. Pada Komisi Program (h. 315-316) beberapa peristiwa terkait kekerasan atas nama agama disinggung, di antaranya: (1) terseretnya WNI untuk ikut bergabung dengan ISIS, yang menurut pengamat teroris Sidney

Jones, warga WNI yang telah bergabung dengan ISIS sekitar 200-200 orang, sementara yang tewas dalam medan perang pada bulan Maret dan April 2015 ada 38 orang; (2) adanya WNI yang bergabung dengan ISIS dan telah mendapatkan pelatihan militer di Suriah, yang jika mereka balik ke Indonesia berpotensi akan memperjuangkan ideologinya yang membahayakan NKRI; (3) adanya kelompok keagamaan yang anti Pancasila yang telah berkembang di Indonesia; (4) semakin intensifnya kelompok-kelompok radikal untuk melakukan penyusutan terhadap kelompok-kelompok tarikat di daerah-daerah; (5) semakin masifnya kelompok-kelompok radikal melalui ustadz-ustadznya untuk menyebarkan ajaran Wahabi bahkan telah banyak menyerang tradisi Nahdliyyin seperti tahlilan, yasinan, peringatan Maulid Nabi, dan peringatan Isra' Mi'raj, melalui media seperti TV, radio dan media sosial; (6) mereka kelompok radikal telah memiliki sistem rekrutmen mulai dari sekolah umum melalui kegiatan rohis, menguasai masjid-masjid perkantoran hingga kaderisasi melalui organisasi kampus. Mereka memberikan doktrin ajaran garis keras, eksklusif dan anti Pancasila; (7) banyaknya buku karya ulama aswaja yang direduksi oleh kelompok salafi-wahabi dengan cara membuang teks dan menjelaskan teks sesuai dengan ideologinya. Misalnya, Maktabah Syamilah sudah diedit sesuai dengan faham wahabi, kitab Riyadus Sholihin ditahqiq dan disyarahi oleh Utsaimin yang berfaham wahabi, dan lain-lain.

Bagi kalangan Nahdliyyin, direbutnya masjid-masjid mereka berarti terhentinya beberapa kegiatan keagamaan mereka, seperti wirid, salawat, qunut, dan lainnya. Mereka yang merebutnya adalah orang-orang tidak suka dalam ber-Islam diselenggarakan kegiatan-kegiatan yang menurut mereka tidak dicontohkan oleh Rasulullah Saw. Peristiwa ini memantik reaksi di kalangan para kiai NU. Kiai Nuril ketika diwawancara NU Online (27 Februari 2007) berkata, "Masjid-masjid NU mulai diambil alih. Muncul banyak buku-buku

yang menghujat ajaran Ahlussunnah Wal Jama'ah ala NU. Salat Tarawih 20 rakaat; wirid, salawat, qunut, talqin, ziarah kubur, tahlil, maulid Nabi, istighotsah dan lain-lain dianggap ajaran sesat. Ini sudah tidak bisa ditoleransi lagi." KH Hasyim Muzadi dalam wawancaranya dengan NU Online, tanggal 05 Maret 2009 berkata, "Kita hidup di dunia di mana agama seringkali disalahgunakan sebagai alat provokasi. Akibatnya, agama seringkali disalah-pahami, tidak terkecuali Islam." (Lihat juga dalam, *Ilusi Negara Islam*, Wahid [ed], 2009).

Memahami sikap NU terhadap kekerasan dan rasa kebeceraian dapat dibagi ke dalam dua, yaitu: (1) sikap resmi organisasi; (2) sikap tidak resmi yang diperlihatkan oleh warga NU, baik ia sebagai tokoh NU ataupun mereka sebagai komunitas. Ketika Muktamar ke 33 NU di Jombang, dibahas pada Komisi Bahtsul Masail al-Diniyyah al-Qonuniyyah tentang Perlindungan Umat Beragama melalui Undang-undang (h. 206-220) dan pada Komisi Program, dibahas tentang kehidupan beragama-berbangsa (h. 313), termasuk meningkatnya propaganda anti aswaja (h. 320).

Dalam Muktamar ke 33 NU di Jombang, Komisi Bahtsul Masail al-Diniyah al-Qanuniyah tentang Perlindungan Umat Beragama melalui Undang-undang (h. 214-216) merekomendasikan: (1) segera dibuatnya Undang-undang tentang Perlindungan Umat Beragama. Hal ini didasarkan karena masih seringnya terjadinya konflik horizontal yang bernuansa agama, dan ini sebagai indikasi bahwa peraturan perundangan terkait dengan hal itu dirasakan tidak memadai lagi, sehingga bila tidak segera dicegah berpotensi menimbulkan madlarat yang lebih serius lagi. NU mengkategorikan keadaan ini kondisi ini sebagai kebutuhan mendesak (*al-hajah al-syar'iyah*); (2) UU NO 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (PKS) menyebutkan pentingnya upaya pencegahan bagi terjadinya konflik, untuk itu keberadaan UU perlindungan Umat

Beragama yang bersifat preventif dalam rangka untuk pencegahan konflik sosial menjadi sesuatu yang penting; (3) Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi keyakinan setiap warganya. Namun negara berwenang untuk mengatur hal-hal terkait dengan cara mengekspresikan keyakinan tersebut, termasuk dalam hal pemberian layanan. Karena itu RUU PUB selayaknya bersifat akomodatif-proporsional. Akomodatif terhadap semua keyakinan yang ada dan proporsional dalam pemberian layanan; (4) Selama ini telah ada sejumlah peraturan perundangan, baik berupa undang-undang ataupun peraturan di bawah undang-undang, yang mengatur kehidupan beragama di Indonesia. Sejumlah peraturan perundangan itu bagaimanapun merupakan hasil dari kesepakatan bangsa ini melalui proses yang panjang. Karena itu, hal-hal yang telah ada norma hukumnya diakomodir penuh dalam RUU PUB yang akan disahkan nanti. Namun demikian RUU PUB juga perlu mengatur hal-hal baru yang belum ada norma hukumnya; (5) Mukhtar NU ke-33 mengusulkan kembali muatan dan ruang lingkup RUU PUB sebagaimana yang telah diusulkan pada Mukhtar NU ke-32 di Makassar, yakni: (a) pengertian umum, yang meliputi pengertian agama, kehidupan beragama, pengertian kebebasan beragama, pengertian kerukunan hidup umat beragama, pengertian pemurnian agama, pengertian pembaruan agama, dan pelayanan terhadap masyarakat umat beragama; (b) tujuan kehidupan beragama; (c) hubungan agama dengan negara; (d) integrasi nilai dan hukum agama kepada hukum negara; (e) integrasi nilai kebangsaan dalam keberagamaan; (f) peningkatan pemahaman agama; (g) peningkatan penghayatan agama; (h) peningkatan pelayanan bagi pengamalan ajaran agama; (i) peningkatan pengamalan ajaran agama; (j) peranan pemerintah dalam pemeliharaan kehidupan beragama; (k) peranan umat beragama terhadap negara; (l) kewajiban setiap penganut agama terhadap penganut lainnya; (m) ketentuan penetapan hari-hari

besar keagamaan; (n) kedudukan aliran sempalan agama, yang meliputi pengembangan pemikiran, gerakan keagamaan, dan penodaan atau penistaan agama; (o) kode etik penyiaran agama atau kode etik simbol agama; (p) pendirian rumah ibadah; (q) kedudukan organisasi majelis keagamaan; (r) ketentuan tentang bantuan luar negeri keagamaan; (s) penyempahan terhadap pejabat pemerintahan; (t) tugas dan tanggungjawab lembaga kerukunan dalam pemeliharaan keserasian sosial umat beragama; (u) tugas dan tanggungjawab Pemerintahan Daerah dalam pemeliharaan kehidupan beragama; (v) sanksi administratif, sanksi perdata dan sanksi pidana terhadap pelanggaran undang-undang.

Berdasarkan rekomendasi di atas, Mukhtamar NU ke-33 (h. 220) merumuskan langkah strategis dalam bentuk rencana aksi atau langkah tindak lanjut sebagai berikut: (1) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada periode mendatang perlu membentuk tim perundang-undangan (Qonuniyah) yang bertugas dan berperan merumuskan pokok-pokok pikiran tentang Undang- Undang Perlindungan Umat Beragama, mengawal pembahasan di DPR RI, mencermati dinamika yang terjadi dalam forum pembahasan di DPR RI, dan melakukan kegiatan strategis bersama ormas keagamaan lain untuk suksesnya pembahasan UU tersebut; (2) Dalam rangka menjalankan tugasnya tim perundangundangan yang dibentuk PBNU diberi wewenang untuk melakukan kegiatan sosialisasi dan penyerapan aspirasi masyarakat yang ada di daerah-daerah.

Pada Komisi Program, dibahas tentang kehidupan beragama-berbangsa (h. 313-315). Dalam komisi ini, NU menyoroti merebaknya paham keagamaan transnasional di Indonesia yang sangat meresahkan masyarakat, yang menurut NU pada zaman Orde Baru, ideologi ekstrimis sulit masuk dan berkembang di Indonesia, karena pemerintah sangat ketat menjaga munculnya paham-paham yang dianggap dapat mengganggu stabilitas negara, sedangkan sejak era

reformasi, atas nama kebebasan paham ekstrimisme berjubah agama sangat leluasa masuk di Indonesia.

Pada Komisi Program, dibahas tentang meningkatnya propaganda anti aswaja (h. 320-321). Dalam komisi ini, NU menyoroti propaganda anti aswaja yang terus meningkat dan berkembang melalui berbagai media dan dari berbagai segi. Dalam sorotan NU, fitnah dan tuduha anti aswaja tidak hanya pada akidah, tetapi juga syari'ah, tasawuf, dan kebudayaan. Pada tingkat ajaran (akidah, syari'ah, dan tasawuf), propaganda anti aswaja memfitnah dan menuduh bahwa Aswaja al-Nahdliyah adalah faham yang menyimpang dari ajaran Islam yang benar, dan kaum Nahdliyin sebagai ahli bid'ah yang sesat dan menyesatkan. Sedangkan pada tingkat kebudayaan, bahwa kaum nahdliyin adalah tradisional yang belum mendapatkan sentuhan modern, simbol kemunduran, dan tidak dapat mendorong kemajuan. Dengan propaganda ini, komisi program merekomendasikan langkah-langkah sistematis, yaitu: (1) merekonstruksi kembali teologi Aswaja al-Nahdliyah untuk merespon dan memenuhi kebutuhan dunia baru di masa depan, baik dari segi perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi; (2) melakukan boosting mengangkat Aswaja al-Nahdliyah sebagai ikon Islam rahmatan lil alamin melalui kerjasama dengan berbagai jaringan media nasional maupun internasional; (3) menyiapkan barisan khusus yang rapi dan berdisiplin dengan kemampuan ilmu dan agama yang tinggi; (4) memperkuat konsolidasi dakwah ajaran Aswaja al-Nahdliyah sebagai ajaran Islam rahmatan lil alamin yang terbuka, inklusif, dan toleran sebagaimana diteladankan oleh Nabi Muhammad Saw; (5) membangun citra positif Aswaja dan kaum Nahdliyyin menjadi pelopor gerakan juru damai Islam sebagai rahmatan lil alamin) dengan dakwah melalui komunikasi visual yang positif diberbagai media massa, baik cetak maupun elektronik.

Komisi Rekomendasi Muktamar ke 33 NU semakin memperkuat sikap NU tentang pentingnya hidup berdampingan secara damai dengan komunitas lain. Lima dari enam rekomendasi NU untuk keumatan (h. 378) mengatakan:

- 1) NU di semua tingkatan baik Jamiyah maupun Jamaah harus menjadi pelopor dalam mewujudkan masyarakat yang toleran, moderat, ramah, mengarifi budaya, dan terbuka terhadap gagasan-gagasan baru yang selaras dengan karakter Islam Nusantara;
- 2) Pemerintah harus tegas mencegah dan menindak berbagai kelompok yang bertujuan merongrong dan mengubah konsensus nasional (Muahadah Wathaniyah) yang menjadi landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. NU mengingatkan bahwa ancaman yang merongrong dan mengubah konsensus nasional (Pancasila dan NKRI) bisa terdapat disetiap agama. NU mengajak seluruh lembaga-lembaga keagamaan untuk bekerjasama menangkal radikalisme berbasis agama;
- 3) Umat Islam perlu melakukan strategi dakwah yang produktif dan memperkuat eksistensi NKRI, bukan dakwah yang menimbulkan reaksi negatif agama lain yang justru merugikan umat Islam sendiri. Prinsip Mabadi Khairu Ummah (al-shidqu, al-amanah wal wafa bil ahd, al-'adalah, al-ta'awun, al-istiqomah) harus menjadi landasan dalam pelaksanaan Dakwah Islam;
- 4) Terkait kasus intoleransi dan kekerasan yang terjadi di berbagai daerah termasuk di Tolikara Papua, beberapa waktu lalu, NU mengecam dan tidak dapat membenarkan dengan alasan apapun. Pemerintah harus memberikan jaminan rasa aman kepada semua warga Negara Indonesia untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya.

Pemerintah harus menyelesaikan secara tuntas akar persoalan tersebut dengan melakukan penegakan hukum kepada semua pihak yang bersalah dan memfasilitasi resolusi konflik agar terjadi penyelesaian secara menyeluruh. Seiring dengan hal itu pemerintah pusat dan daerah harus segera melakukan kajian ulang terhadap regulasi diskriminatif yang menjadi sumber tindakan intoleransi, konflik dan kekerasan;

- 5) NU mengharapkan relasi mayoritas-minoritas sebagai fakta sosial hendaknya tidak digunakan sebagai alat menghegemoni, mendiskriminasi dan mengontrol kelompok lain. Harus disadari, tindakan keagamaan yang mengancam eksistensi kelompok lain di sebuah wilayah akan cepat menyebar dan menimbulkan aksi balasan di tempat lain.

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, kajian tentang deradikalisasi Islam Indonesia dapat disimpulkan dalam tiga simpulan sebagai berikut:

1. Dinamika sejarah perkembangan dan pemikiran Nahdlatul ulama tentang Islam Indonesia

NU adalah organisasi masa Islam yang menurut khittahnya merupakan gerakan keagamaan yang bertujuan untuk ikut membangun dan mengembangkan insan dan masyarakat yang bertaqwa kepada Allah Swt, cerdas, terampil, berakhlak mulia, tentram, adil dan sejahtera. Nahdlatul Ulama mewujudkan cita-cita dan tujuannya melalui serangkaian ikhtiyar yang didasari oleh dasar-dasar faham keagamaan yang membentuk kepribadian khas Nahdlatul Ulama. Berdasarkan Khittah Nahdlatul Ulama, dasar-dasar pendirian keagamaan Nahdlatul Ulama adalah untuk menumbuhkan sikap kemasyarakatan yang bercirikan pada: (a) sikap tawassuth dan i'tidal; (b) sikap tasamuh, yaitu sikap toleran terhadap perbedaan pandangan baik dalam masalah keagamaan, terutama hal-hal yang bersifat furu', atau menjadi masalah khilafiyah, serta dalam masalah kemasyarakatan dan kebudayaan; (c) sikap tawazun, yaitu sikap seimbang dalam berkhidmah; (d) amar ma'ruf nahi munkar, yaitu selalu memiliki kepekaan untuk mendorong perbuatan yang baik, berguna dan bermanfaat bagi kehidupan bersama; serta menolak dan mencegah semua hal yang dapat menjerumuskan dan merendahkan nilai-nilai kehidupan.

Nahdlatul Ulama (NU) dicatat sebagai organisasi yang menganut paham Ahlussunah waljama'ah. Paham ini merupakan sebuah pola pikir yang mengambil jalan tengah antara ekstrem aqli (rasionalis) dengan kaum ekstrem naqli (skripturalis). Sumber hukum Islam bagi

NU tidak hanya al-Qur'an, sunnah, tetapi juga menggunakan kemampuan akal ditambah dengan realitas empirik. Cara berpikir semacam itu dirujuk dari pemikir terdahulu seperti Abu al-Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur Al Maturidi dalam bidang teologi/Tauhid/ketuhanan. Kemudian dalam bidang fiqh lebih cenderung mengikuti mazhab: Imam Syafi'i dan mengakui tiga madzhab yang lain, yaitu: Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hanbali sebagaimana yang tergambar dalam lambang NU berbintang 4 di bawah. Sementara dalam bidang tasawuf, mengembangkan metode Al-Ghazali dan Syeikh Juneid al-Bagdadi, yang mengintegrasikan antara tasawuf dengan syariat.

Gagasan kembali kekhittah pada tahun 1984, merupakan momentum penting untuk menafsirkan kembali ajaran ahlussunnah wal jamaah, serta merumuskan kembali metode berpikir, baik dalam bidang fikih maupun sosial. Serta merumuskan kembali hubungan NU dengan negara. Gerakan tersebut berhasil kembali membangkitkan gairah pemikiran dan dinamika sosial dalam NU.

Bagi kalangan Nahdliyin, Islam yang dipraktikkan oleh orang Indonesia adalah Islam yang seharusnya tidak mengabaikan budaya tetapi justru berdamai dengan budaya Indonesia, dan bukan dengan budaya masyarakat Arab kemudian dipraktikkan di Indonesia. Islamnya Indonesia adalah Islam yang dikenalkan dan disebar oleh para wali, yaitu Islam yang bersentuhan langsung dengan berbagai keragaman yang ada di Nusantara. Bagi kalangan Nahdliyin, keragaman adalah hal yang harus diterima. Ada beberapa alasan kenapa NU menerima keragaman, di antaranya: (a) Perbedaan harus dianggap sebagai rahmat tuhan, dan tak diperkenankan bagi siapapun untuk melakukan intimidasi, pemaksaan atas alasan perbedaan; (b) Mengembalikan seluruh penilaian akan iman, ideologi dan keyakinan kepada suara hati masing-masing orang dan menghindari klaim kebenaran atas tafsir agama. Kebenaran biarlah

menjadi otoritas Tuhan, dan menghargai pilihan keyakinan orang lain; (c) Menghargai kehidupan manusia sebagai orang yang sama-sama memiliki hak untuk hidup, berkembang, berkarya dan menentukan pilihan-pilihan keyakinan sesuai nuraninya; (d) Keragaman merupakan tanda kebesaran Tuhan bagi manusia agar dapat saling belajar, saling memahami dan melengkapi.

Bagi kalangan Nahdliyin, Islam tidak akan besar jika mengabaikan budaya. NU sejak awal dakwahnya memang mengusung ajaran Islam tanpa melalui jalan formalistik, lebih-lebih dengan cara membenturkan diri dengan realitas secara formal, tetapi dengan cara lentur. Inilah yang ditegaskan oleh KH Sahal Mahfudz ketika beliau menjabat sebagai Raim Aam PBNU. Hubungan NU dengan budaya dipertegas ketika Mukhtamar ke 32 Nahdlatul Ulama di Makassar. Pada pengembangan kebudayaan NU, tim perumus program kerja lima tahun PBNU masa khidmat 2010-2015 merumuskan 9 rumusan, yaitu: (a) memperjuangkan kebudayaan yang tidak bertentangan dengan Islam Aswaja (baik sebagai khazanah pengetahuan, nilai, makna, norma, kepercayaan, dan ideologi suatu masyarakat; maupun—terlebih—sebagai praktik dan tindakan mereka dalam mempertahankan dan mengembangkan harkat kemanusiaannya, lengkap dengan produk material yang mereka hasilkan) sebagai faktor yang diperhitungkan oleh para pengambil kebijakan negara, sehingga kebudayaan dapat menjadi kekuatan yang menentukan dalam setiap kebijakan pemerintah; (b) membuka ruang kreativitas seluas mungkin bagi para seniman untuk mengembangkan seninya yang tidak bertentangan dengan Islam Aswaja, baik tradisional, modern, maupun kontemporer, yang mengalami kesulitan dalam melakukan kegiatan kesenian yang disebabkan oleh kebijakan politik dan birokrasi negara, dominasi pasar, maupun kekuatan formalisme agama; (c) merumuskan dan mengembangkan strategi kebudayaan yang mampu menjaga,

memelihara, menginspirasi dan memberi orientasi bagi pengembangan kreativitas masyarakat pada wilayah kebudayaan dalam rangka pemenuhan kodratnya sebagai khalifah fil ardl dan sekaligus warga masyarakatnya; (d) menjadikan pesantren sebagai pusat pengembangan seni dan budaya melalui penyelenggaraan berbagai pelatihan, festival dan event kesenian di pesantren; (e) memfasilitasi dan memberi perlindungan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) atas berbagai karya seni para seniman NU; (f) memberikan legitimasi syariah terhadap kesenian tradisional dan berbagai praktek tradisi yang tidak bertentangan dengan Islam Aswaja; (g) mendokumentasikan karya-karya seni para intelektual, ulama dan seniman NU; (h) mengembangkan dan mempromosikan kesenian religi baik gagasan, karya dan pelaksanaannya; (i) membuat data base yang memuat nama-nama seniman NU, karya-karya, sejarah dan prestasinya.

2. Pandangan Nahdlatul Ulama tentang radikalisasi agama dan kekerasan agama-terorisme

Dasar moderasi Nahdlatul Ulama bermuara pada pemahaman syariat Islam yang lebih berorientasi kepada kemaslahatan. NU selalu condong pada pemahaman agama yang mengarah kepada maslahatan dan kerahmatan. Beberapa dasar profetis moderasi NU dilihat dari cara pandang sebagai berikut: (a) Memilih Jalan Damai; (b) Keragaman adalah Fitrah Manusia; (c) Jaminan Keselamatan bagi Orang yang beriman kepada Allah Swt dan Hari Akhir; (e) Beragam Nabi tetapi Satu Umat ; (f) Tidak Ada Paksaan dalam Agama; (g) Beragama dengan kasih Sayang

Dalam pandangan NU, kekerasan apa pun bentuknya terlebih mengatasnamakan agama harus dihentikan. Di antara hal-hal yang harus dilakukan di antaranya adalah sebagai berikut: (a) Pemahaman

terhadap Islam anti Kekerasan; (b) Mengutamakan Islam Rahmatan lil 'alamin; (c) Memperjuangkan Demokrasi.

Islam nusantara yang diusung NU justru anti terhadap tindakan kekerasan dalam berdakwah. Sebejat apapun seseorang tidak boleh diperangi sejauh mereka tidak memerangi umat Islam. Dakwah amar ma'ruf harus dilakukan dengan cara-cara yang ma'ruf (baik), mencegah kemungkaran (nahi munkar) harus dilakukan dengan cara-cara yang tidak membawa kemungkaran. Prinsip berdakwah seperti inilah yang menjadi spirit Islam Nusantara yang telah dipraktikkan para sufi dan Wali di Jawa pada abad 15.

Bagi NU deradikalisasi bisa dimulai dengan membuka diri atas perbedaan, bahkan berani mengakui keberadaan yang lain. Selagi ada curiga dan ketakutan akan memicu ketegangan. Bagi NU saat sekarang semua fihak dapat bijak dengan: (a) Memastikan kebebasan beragama, yang penting untuk mempertemukan kebutuhan-kebutuhan agama dalam masyarakat plural di Indonesia; (b) Mempromosikan sikap saling menghargai, apresiasi dan kerjasama antar ragam group keagamaan, guna mendukung stabilitas lokal, regional dan nasional sebagai prasyarat pembangunan; (c) Memfasilitasi secara institusi sebagai pusat kajian hubungan antar umat beragama.

Melalui Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU) yang bertugas membahas masalah-masalah maudlu'iyah (tematik) dan waqi'iyah (aktual) yang akan menjadi Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, NU mengambil pandangan dan sikap, terutama terkait Khilafah dan Formalisasi Syari'ah dan Dlawabithul Kufr.

Terkait Khilafah dan Formalisasi Syari'ah, NU mengambil pandangan dan sikap, yaitu: (a) Tidak ada dalil nash, karena keberadaan sistem khilafah adalah bentuk ijtihadiyah; (b) Hukum merubah bentuk Negara Indonesia dengan bentuk yang lain maka

hukumnya tidak boleh selama menimbulkan mafsadah yang lebih besar. Sedangkan merubah dasar hukum negara juga tidak diperbolehkan jika menggunakan cara yang inkonstitusional dan diperbolehkan jika menggunakan cara yang konstitusional; (c) Tidak menyalahi prinsip tathbiq, bahkan strategi secara tadrij sangat tepat bila diterapkan di Negara Indonesia.

Terkait Dlawabithul Kufr, NU mengambil pandangan dan sikap: (a) Secara etimologi, al-kufr berarti as-satr wa ath-taghthiyah (tutup). Malam disebut juga dengan kufr (yang menutupi), karena dengan kegelapannya menutupi segala sesuatu. Sedangkan menurut terminologi, kufr berarti mengingkari apa yang sudah pasti dibawa Rasulullah Saw; (b) Para ulama mengklasifikasikan kufr menjadi empat macam: (1) Kufr Inkar, yaitu seseorang mengingkari dan tidak mengakui Allah sama sekali, seperti kufurnya Fir'aun; (2) Kufr Juhud, yaitu seseorang mengakui Allah dalam hatinya hanya saja lisannya tidak pernah menyatakan pengakuannya itu, seperti kufurnya Iblis; (3) Kufr 'Inad, yaitu seseorang mengakui Allah dalam hatinya dan menyatakan pengakuannya tersebut dengan lisannya hanya saja tidak mau menjadikannya sebagai suatu keyakinan, seperti kufurnya Umayah bin Abi Shalt dan Abi Thalib; (4) Kufr Nifaq, yaitu seseorang mengakui dengan lidahnya hanya saja hatiinya tidak mau mengakuinya; (5) Kufr Ni'mah; (c) Ukuran seseorang dikatakan kafir adalah ingkar terhadap rukun iman, rukun Islam dan sesuatu yang diketahui secara pasti dari Rasulullah; (d) Secara bahasa bid'ah adalah suatu yang baru. Sedangkan secara istilah adalah memunculkan sesuatu yang baru sepeninggal Nabi Muhammad SAW. dalam masalah agama setelah sempurna. Ulama mengklasifikasikan bid'ah menjadi dua; pertama, mahmudah (terpuji) atau hasanah (bagus); kedua, madzmumah (tercela) atau sayyiah (jelek). Bid'ah mahmudah atau hasanah adalah sesuatu yang baru dan sesuai al-Qur'an, as-Sunnah, atsar shahabat, atau ijma'

sebagai sumber syari'at Islam. Sedangkan bid'ah madzmumah atau sayyi'ah adalah sesuatu yang baru dan tidak sesuai dengan Syari'at Islam; (e) Ditinjau dari sisi hukum, bid'ah ada lima macam: (1) wajib, seperti merumuskan dalil-dalil 'aqli dalam bidang teologi untuk menolak pemikiran atheisme (al-mulahadah) dan sebagainya; (2) mandub/sunnah, seperti menulis karya ilmiah, membangun gedung-gedung sekolah, perguruan tinggi, pesantren, dan sebagainya; (3) mubah, seperti mengembangkan resep makanan, mushafahah setelah Shalat dan sebagainya; (4) makruh, seperti shalat memakai pakaian yang dapat mengganggu kekhusyu'an Shalat dan sebagainya; (5) haram, seperti mengembangkan dan menyebarkan pemikiran yang bertentangan dengan syari'at Islam, seperti pemikiran-pemikiran faham qaddariyyah, murji'ah, dan sebagainya; (f) Dalam kaitannya dengan kekufuran, tidak semua bid'ah identik dengan kekufuran. Hanya bid'ah yang bertentangan dengan dalil-dalil qath'i saja yang menyebabkan kekufuran.

3. Peran NU dalam upaya deradikalisasi dan upaya membangun moderasi Islam Indonesia

Memahami sikap NU terhadap kekerasan dan rasa kekecewaan dapat dibagi ke dalam dua, yaitu: (1) sikap resmi organisasi; (2) sikap tidak resmi yang diperlihatkan oleh warga NU, baik ia sebagai tokoh NU ataupun mereka sebagai komunitas. Untuk sikap resmi organisasi, upaya NU dalam deradikalisasi Islam Indonesia dilakukan melalui upaya struktural dan upaya kultural. Upaya struktural dilakukan oleh lembaga-lembaga yang jika dilihat pada tugas, pokok, dan fungsinya, berperan aktif termasuk mencegah tersebarnya gerakan Islam transnasional. Untuk gerakan kultural, para nahdliyin aktif di berbagai celah dan lapisan untuk meredam berbagai upaya tersebarnya faham dan gerakan radikal ini.

Pada Mukhtamar ke 33 NU di Jombang, dibahas pada Komisi Bahtsul Masail al-Diniyyah al-Qonuniyyah tentang Perlindungan Umat Beragama melalui Undang-undang, dan pada Komisi Program dibahas tentang kehidupan beragama-berbangsa, termasuk meningkatnya propaganda anti aswaja. Komisi Rekomendasi Mukhtamar ke 33 NU semakin memperkuat sikap NU tentang pentingnya hidup berdampingan secara damai dengan komunitas lain. Lima dari enam rekomendasi NU untuk keumatan mengatakan: (a) NU di semua tingkatan baik Jamiyah maupun Jamaah harus menjadi pelopor dalam mewujudkan masyarakat yang toleran, moderat, ramah, mengarifi budaya, dan terbuka terhadap gagasan-gagasan baru yang selaras dengan karakter Islam Nusantara; (b) Pemerintah harus tegas mencegah dan menindak berbagai kelompok yang bertujuan merongrong dan mengubah konsensus nasional (Muahadah Wathaniyah) yang menjadi landasan kehidupan berbangsa dan bernegara; (c) Umat Islam perlu melakukan strategi dakwah yang produktif dan memperkuat eksistensi NKRI, bukan dakwah yang menimbulkan reaksi negatif agama lain yang justru merugikan umat Islam sendiri; (d) Terkait kasus intoleransi dan kekerasan yang terjadi di berbagai daerah, NU mengecam dan tidak dapat membenarkan dengan alasan apapun. Pemerintah harus memberikan jaminan rasa aman kepada semua warga Negara Indonesia untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya. Pemerintah harus menyelesaikan secara tuntas akar persoalan tersebut dengan melakukan penegakan hukum kepada semua pihak yang bersalah dan memfasilitasi resolusi konflik agar terjadi penyelesaian secara menyeluruh. Seiring dengan hal itu pemerintah pusat dan daerah harus segera melakukan kajian ulang terhadap regulasi diskriminatif yang menjadi sumber tindakan intoleransi, konflik dan kekerasan; (e) NU mengharapkan relasi mayoritas-minoritas sebagai fakta sosial hendaknya tidak digunakan

sebagai alat menghegemoni, mendiskriminasi dan mengontrol kelompok lain. Harus disadari, tindakan keagamaan yang mengancam eksistensi kelompok lain di sebuah wilayah akan cepat menyebar dan menimbulkan aksi balasan di tempat lain.

Untuk memahami beberapa upaya apa yang telah dilakukan NU, berikut ini di antaranya: (a) Penyebarluasan ajaran di berbagai media, baik cetak ataupun elektronik; (b) Penguasaan aset sebagai upaya meredam tersebarnya paham radikal melalui lembaga-lembaga, terutama lembaga-lembaga NU; (c) Membangun kerjasama dengan pihak lain untuk kampanye Islam ala NU; (d) Penguatan di bidang SDM Nahdlatul Ulama.

B. REKOMENDASI

Dari simpulan di atas, dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Islam yang datang ke Indonesia mengharuskan Islam bersentuhan dengan ragam budaya Indonesia yang berbeda dengan budaya Arab. Jika Islam datang ke Arab tidak merubah budaya Arab yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, maka Islam yang datang ke Indonesia seyogyanya tidak juga merubah budaya Indonesia yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.
2. Kecenderungan berbagai kekerasan yang diatas-namakan agama seringkali terjadi karena Islam yang sering dikaitkan dengan kehidupan masyarakat Arab yang sebenarnya berbeda dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Kekerasan ini dapat diminalisir di antaranya melalui ragam dakwah yang telah dicontohkan oleh para wali pada abad-abad yang lalu. Dengan kata lain, dakwah kultural tetap harus dipertimbangkan sebagai pilihan utama sehingga ajaran Islam tetap dapat dilaksanakan dengan tidak disertai berbagai peristiwa kekerasan.

3. Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, dituntut untuk lebih berperan lagi untuk meminimalkan berbagai potensi terjadinya kekerasan yang diatas-namakan agama.
4. Penelitian ini masih harus ditindaklanjuti sebagai upaya menemukan solusi yang lebih baik untuk meminimalkan berbagai potensi terjadinya kekerasan yang diatas-namakan agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abianan. *Biografi KH. Abdul Wahab Hasbullah*, <https://abianan.wordpress.com/2013/11/13/biografi-k-h-abdul-wahab-hasbullah>.
- Al-Hamidy, Abu Dzarrin. "Toleransi antar Umat Beragama sebagai Wujud Penyikapan Pluralisme dalam Perspektif NU", dalam, *Sarung & Demokrasi: Dari NU untuk Peradaban Keindonesiaan*. Surabaya: Khalista, 2008.
- Al-Jabiri, Muhammad Abid. *Agama, Negara dan Penerapan Syariah*. Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2001.
- Al-Wahidi, Abu-l Hasan 'Ali ibn Ahmad ibn Muhammad ibn 'Ali. *Asbab Nuzuli-l Qur'an*. Riyadl: Daru-l Maiman, 2005.
- Aminuddin, Luthfi Hadi. "Nalar Fiqh NU dari Tradisional, Modern, hingga Liberal", dalam, *Sarung & Demokrasi: Dari NU untuk Peradaban Keindonesiaan*. Surabaya: Khalista, 2008.
- Amirsyah. *Meluruskan Salah Paham Terhadap Deradikalisasi Pemikiran, Konsep dan Strategi Pelaksanaan*. Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2012.
- Arif, Saepul. *Deradikalisasi Islam Pandangan dan Strategi Islam Kultural*. Koekoesan, 2010.
- As'ary, Syaikh Hasyim. *Risalah Aswaja dari Pemikiran, Doktrin hingga Model Ideal Gerakan keagamaan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2015.
- Azra, Azyumardi. *Pergolakan politik Islam, Dari Fundamentalisme, Modernisme Hingga Post Modernisme*. Jakarta: Paramadina, 1996.
- Benazir Bhutto, Benazir. *Reconciliation: Islam, Democracy, and The West*. London: Simon and Schuster, 2008.
- Bogdan dan Biklen. *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. London: Allin and Bacon, 1998.

- Budairi, Said (Penyunting). *Nahdlatul Ulama dari Berbagai sudut Pandang*. Lakpesdam, 1994.
- Budiyanto, Mangun dkk. "Pergulatan Agama dan Budaya: Pola Hubungan Islam dan Budaya Lokal di Masyarakat Tutup Ngisor, Lereng Merapi, Magelang Jawa Tengah." *Jurnal Penelitian Agama*, Vol. XVII, No. 3, September-Desember 2008.
- Cresswel, J. W. *Educational Research; planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research*. New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2008.
- Fanani, Ahwan. "NU dan Islamisasi Kultural Tradisi Lokal", dalam, *Sarung & Demokrasi: Dari NU untuk Peradaban Keindonesiaan*. Surabaya: Khalista, 2008.
- Fanani, Zaenuddin. *Radikalisme Keagamaan dan Perubahan Sosial*. Asia Foundation dan Muhammadiyah University Press, 1982.
- Gaffar, Afan. "NU sebuah Fenomena politik", Pengantar dalam A Ghaffar Karim. *Metamorfosis NU dan Politisasi Islam Indonesia*. Yogyakarta: LKIS, 1995.
- Hanna, Siti. Pencegahan Penodaan Agama (Kajian atas UU NO. 1 Tahun 1965. *Religia* Vol. 13, No. 2, Oktober 2010: 157-174.
- Hasan, Hamka. *Masa Depan Islam Radikal di Indonesia*. UIN Jakarta, 2000.
- <http://www.sarkub.com/10-tokoh-berpengaruh-nahdlatul-ulama>.
- Human Rights Watch. *Atas Nama Agama Pelanggaran terhadap Minoritas Agama di Indonesia*. Dicitak di Amerika, 2013.
- Imran, Ahmad. *Rekam Jejak Radikalisme Salafi Wahabi Sejarah, Doktrin dan Akidah*.
- Jamil, Muksin DKK. *Nalar Islam Nusantara Studi Islam Ala Muhammadiyah, Al Irsyad, Persis dan NU*. Diktis Kemenag RI, 2007.
- Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

- Karim, A Ghaffar. *Metamorfosis NU dan Politisasi Islam Indonesia*. LKIS, 1995.
- Lukens-Bull, Ronald Alan. *Jihad ala Pesantren di Mata Antropolog Amerika*. Yogyakarta: Gama Media, 2004.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i dkk. *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita*. Jakarta: Democracy, 2012.
- Machasin. *Islam Dinamis Islam Harmonis*. Yogyakarta: LkiS, 2011.
- Mahfudh, KH. MA. Sahal. *Nuansa Fiqh Sosial*. Yogyakarta: LKiS, 2012, h. 236 dan 239.
- Miles, M.B. dan Huberman, A.M. *Qualitative Data Analysis; A Source Book of New Methods*. California: SAGE Publication, 1992.
- Millan, J.H. Mc. dan Schumacher, S. *Research in Education: A Conceptual Introduction*. Fifth Edition. New York: Longman, 2001.
- Mubarak, Zaki. *Geneologi Islam Radikal di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 2008.
- Muhammad, Rifa'i. KH. *Wahab Hasbullah Biografi Singkat 1888-1971*. Yogyakarta: Garasi House of Book, 2010.
- Munawwir, Syamsu-l Arifyn. *Islam Indonesia di Mata Santri*. Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2013.
- Muzadi, Hasyim Dkk, *Gerakan Radikal Islam di Indonesia dalam Sorotan*. NU Online. *Mbah Muchith: Khittah Tidak Sekedar Persoalan Politik*. Jember, 17 Agustus 2008.
- NU Online. *Munas dan Konbes NU Kiai Sahal: Pencasila Sudah Final*. Jakarta, 28 Juli 2006.
- NU Online. *NU Layani 'Tantangan' Kelompok Islam Garis Keras*. Jakarta, 27 Februari 2007.
- Rahman, Budi Munawar. *Pluralisme Agama*. Jakarta: Paramadina, 2001.
- Rubaidi, A. *Radikalisme Islam, Nahdlatul Ulama; Masa Depan Moderatisme Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2010.
- Rumadi dalam NU dari Nusantara Untuk Dunia [uinjkt.ac.id]

- Rumadi, "Perda Syari'at Islam: Jalan Lain Menuju Negara Islam?" *Tashwirul Afkar*, Edisi No. 20 Tahun 2006: 2-7.
- Sabirin, Rahimi. *Islam & Radikalisme*. Yogyakarta: Ar-Rasyid, 2004.
- Siradj, KH Said Aqil. *Ahlu Sunnah dalam Lintas Sejarah*. LKPSM, 1997.
- Siradj, KH Said Aqil. *Deradikalisasi Nusantara*, dalam *Harian Kompas*, Edisi 20 Januari 2016.
- Situbondo, KH. Afifuddin Muhajir. "Pengantar: Meneguhkan Islam Nusantara untuk Peradaban Indonesia dan Dunia." dalam Ahmad Baso, *Islam Nusantara*. Jilid 1. Tangerang Selatan: Pustaka Afid, 2015.
- Sodiqin, Ali. *Antropologi Al-Qur'an: Model Dialektika Wahyu dan Budaya*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008.
- Stomka, Pior. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Suadi Ahmad Dkk, *Politisasi Agama dan Konflik Komunal Beberapa Isu Penting*. Jakarta: The Wahid Institute, 2007.
- Suhaidi, Mohammad RB. "NU dan Transformasi Ke-Aswajaan: Revitalisasi Gerakan Pembebasan Sosial NU dalam Memberdayakan Umat secara Kaffah", dalam, *Sarung & Demokrasi: Dari NU untuk Peradaban Keindonesiaan*. Surabaya: Khalista, 2008.
- Suparjo. "Islam dan Budaya: Strategi Kultural Walisongo dalam Membangun Muslim Indonesia." *Komunika*, Vol. 2, No. 2, Juli-Desember 2008: 178-193.
- Trianto. "Membaca Peta Politik Kiai Nadhlatul Ulama: antara Keteguhan Khittah dan Syahwat Politik", dalam, *Sarung & Demokrasi: Dari NU untuk Peradaban Keindonesiaan*. Surabaya: Khalista, 2008.
- Wahid, Abdurrahman (ed). *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*. Jakarta: The Wahid Institute, 2009.
- Wahid, Abdurrahman. *Islam Tanpa Kekerasan*. Yogyakarta: LKiS, 2000.

Wahid, Abdurrahman. *Islamku Islam Anda Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi*. Jakarta: The Wahid Institute, 2006.

Wahid, Abdurrahman. *KH Bisri Syansuri dan Kepahlawanan*, Gusdur.net, Selasa, 08 Desember 2015.

Zada, Khamami dan Fawaiz Sadzali (ed). *Nahdlatul Ulama Dinamika Ideologi dan Politik Keagamaan*. Kompas, 2010.

Zada, Khamami. *Islam Radikal Pergulatan ormas Ormas Garis Keras di Indonesia*.